

BERKONTRIBUSI UNTUK KEMAJUAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

CONTRIBUTING TO THE ADVANCEMENT OF TELECOMMUNICATION
INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDONESIA



2021 | **LAPORAN TAHUNAN**
ANNUAL REPORT

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA



Berkontribusi untuk Kemajuan Infrastruktur Telekomunikasi dan Perkembangan Perekonomian Indonesia

Contributing to the Advancement of Telecommunication
Infrastructure and Economic Development of Indonesia



Laporan Tahunan 2021
PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)
dapat diunduh di situs kami
atau scan QR code ini

2021 Annual Report
PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)
can be downloaded on our site
or scan this QR code

Disusun oleh Departemen Sekretaris Perusahaan
Prepared by the Corporate Secretary Department

Email: corsec@moratelindo.co.id

www.moratelindo.co.id

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan PT Mora Telematika Indonesia ("Perusahaan"). Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perusahaan" didefinisikan sebagai PT Mora Telematika Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha utama sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi. Adakalanya kata "Kami" dan "Moratelindo" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mora Telematika Indonesia secara umum.

Laporan ini disajikan dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan yaitu www.moratelindo.co.id.

This annual report contains statement of financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies and objectives of PT Mora Telematika Indonesia ("Company"). The prospective statements in this annual report are made on the basis of various assumptions regarding the current and future conditions of the Company and the business environment in which it operates. These statements have prospects for risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

This annual report contains the word "Company" defined as PT Mora Telematika Indonesia, which runs the main business activities as a telecommunication network provider. Sometimes the words "We" and "Moratelindo" are also used on the basis of convenience to mention PT Mora Telematika Indonesia in general.

This report is presented bilingually, in Bahasa and English, using font type and size that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report is accessible to view and download on the Company's official website, www.moratelindo.co.id.

Tema Sampul COVER THEME

Berkontribusi untuk Kemajuan Infrastruktur Telekomunikasi dan Perkembangan Perekonomian Indonesia

Kehadiran Moratelindo dalam industri infrastruktur telekomunikasi dan sejumlah proyek besar yang dipercayakan, tak hanya memberikan gambaran tentang kemampuan dan kompetensi Moratelindo. Keberhasilan ini juga menunjukkan keinginan dan komitmen kuat Moratelindo untuk dapat terus berkontribusi bagi kemajuan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan serta pemerataan perekonomian Indonesia hingga ke berbagai daerah.

Contributing to the Advancement of Telecommunication Infrastructure and Economic Development of Indonesia

Moratelindo's presence in the telecommunication infrastructure industry and a number of large projects entrusted to it, does not only provide an overview of Moratelindo's capabilities and competencies. This success also shows Moratelindo's strong desire and commitment to be able to continue to contribute to the advancement of telecommunication infrastructure in Indonesia, which will ultimately support the growth and distribution of the economy of Indonesia to various regions.

Daftar Isi TABLE OF CONTENTS

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY	3
TEMA SAMPUL COVER THEME	3
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	4



PERFORMA 2021 2021 PERFORMANCE

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS	10
IKHTISAR SAHAM STOCK HIGHLIGHTS	14
IKHTISAR OBLIGASI DAN SUKUK MORATELINDO MORATELINDO BONDS AND SUKUK HIGHLIGHTS	16
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS	17
KILAS PERISTIWA 2021 2021 EVENT HIGHLIGHTS	20



LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT	24
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT	34
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA STATEMENTS FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY OF 2021 ANNUAL REPORT OF PT MORA TELEMATIKA INDONESIA	43



PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN 31 DESEMBER 2021 GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY DECEMBER 31, 2021	46
--	----

RIWAYAT SINGKAT MORATELINDO MORATELINDO BRIEF HISTORY	47
JEJAK LANGKAH MILESTONES	54
VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES	56
BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA BUSINESS LINES AND PRODUCTS AND SERVICES	58
WILAYAH OPERASIONAL AREAS OF OPERATION	64
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE	66
KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP	68
INFORMASI TENTANG SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS	69
PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	70
PROFIL DIREKSI PROFILE OF DIRECTORS	73
INFORMASI HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM INFORMATION ON AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS	75
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY PROFILE	76
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICER PROFILE	77
DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA DEMOGRAPHY OF HUMAN RESOURCES	79
INFORMASI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS' INFORMATION	83
STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA SERTA INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU PER 31 DESEMBER 2021 STRUCTURE OF GROUPS AND WORK UNITS AND INFORMATION ON PRIMARY SHAREHOLDERS AND CONTROLLER THROUGH INDIVIDUAL OWNER AS OF DECEMBER 31, 2021	85

DAFTAR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN SEKILAS ENTITAS ANAK PERUSAHAAN LIST OF SUBSIDIARIES AND SUBSIDIARIES PROFILE	87
INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM INFORMATION ON SHARE LISTING	102
KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OF SECURITIES	102
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PER 31 DESEMBER 2021 CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS AS OF DECEMBER 31, 2021	105



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

TINJAUAN UMUM: KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI GENERAL OVERVIEW: ECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITION	110
TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA OPERATIONAL OVERVIEW OF EACH BUSINESS SEGMENT	137
ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS	145
TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL OVERVIEW	147
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT-LOSS REPORT	150

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow Report	153
KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG SOLVENCY	155
TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL	157
STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICIES ON CAPITAL STRUCTURE	157
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL BINDING FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT	159
REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF INVESTMENT IN CAPITAL GOODS	159
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE	160
DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN IMPACT OF FOREIGN CURRENCY VALUE FOR COMPANY PERFORMANCE	161
PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021 TARGET ACHIEVEMENT IN 2021	162
PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2022 BUSINESS PROSPECT AND PERFORMANCE PROJECTION IN 2022	163
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGING, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING	174
INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGING, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING	175
INFORMASI YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS	179

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN AMENDMENT TO LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S PERFORMANCE	180
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICY	180



TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

PRINSIP DASAR DAN KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PRINCIPLES AND COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	184
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE	186
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	188
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS	208
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	213
NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS	219
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS	220
KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE	221

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE	228
INFORMASI TENTANG KOMITE LAIN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG FUNGSI DAN TUGAS DIREKSI DAN/ATAU KOMITE YANG MENDUKUNG FUNGSI DAN TUGAS DEWAN KOMISARIS INFORMATION ON THE COMPANY'S OTHER COMMITTEES TO SUPPORT THE FUNCTIONS AND DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR COMMITTEES SUPPORTING THE FUNCTIONS AND DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	233
SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY	234
UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT	237
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM	243
SISTEM MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT SYSTEM	245
RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN RISK RELATED TO THE COMPANY'S BUSINESS AND INDUSTRIAL ACTIVITIES	246
RISIKO UMUM GENERAL RISK	261
PERKARA HUKUM LEGAL CASES	266
SANKSI ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE SANCTIONS	266
KODE ETIK PERUSAHAAN COMPANY'S CODE OF CONDUCT	266
INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN INFORMATION ON EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN	269
INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN DAN TRANSAKSI SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI INFORMATION ON OWNERSHIP AND TRANSACTIONS OF COMPANY'S STOCK BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS	270
WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM	270
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI ANTICORRUPTION POLICIES	275

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES	276
---	-----



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY	280
---	-----



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS



Performa 2021

2021 PERFORMANCE



Ikhtisar Data Keuangan Penting

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

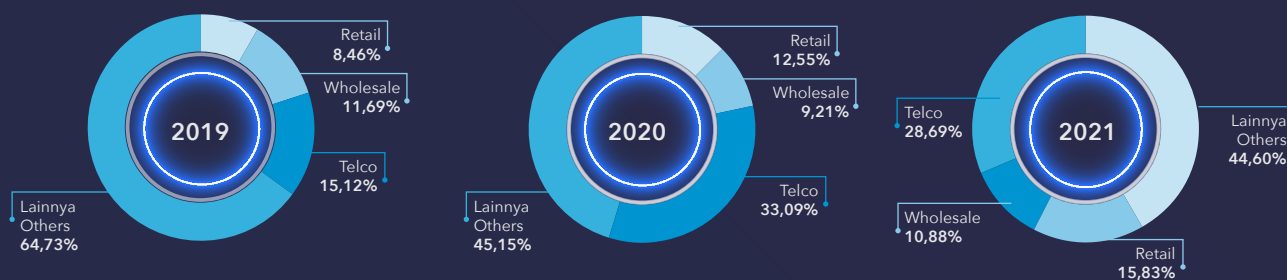
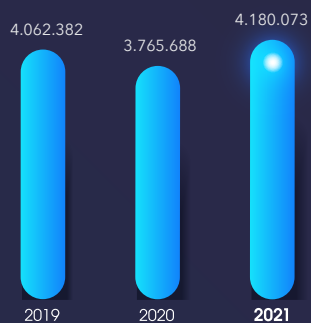
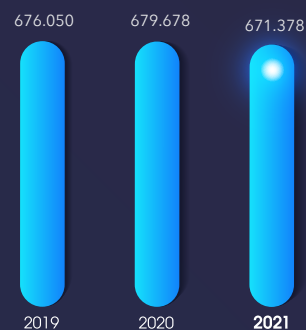
	2021	2020	2019	Y.o.Y 2020-2021 (%)
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income (in million IDR, except stated otherwise)				
Pendapatan Revenue	4.180.073	3.765.688	4.062.382	11,00%
Beban Langsung Direct Costs	(1.642.782)	(1.288.521)	(2.131.216)	27,49%
Laba Kotor Gross Profit	2.537.290	2.477.167	1.931.165	2,43%
Beban Usaha Operating Expenses	(993.298)	(905.751)	(595.940)	9,67%
Laba Usaha Profit from Operations	1.543.991	1.571.417	1.335.225	-1,75%
Beban Lain-Lain Other Expenses	(742.415)	(782.413)	(475.332)	-5,11%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	801.577	789.003	859.893	1,59%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	12.803	8.429	11.874	51,90%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	778.774	780.575	848.020	1,05%
Beban (Penghasilan) Pajak - Bersih Tax Expense (Benefit) - Net	117.395	100.897	171.970	16,35%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	671.379	679.678	676.050	-1,22%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	11.383	335.041	(13.206)	-96,60%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income	682.762	1.014.719	662.844	-32,71%
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	578.928	578.003	591.495	0,16%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	92.450	101.674	84.555	-9,07%
	671.379	679.678	676.050	-1,22%
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	590.019	913.116	578.844	-35,38%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	92.744	101.602	84.000	-8,72%
	682.762	1.014.719	662.844	-32,71%
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Earnings per Share from Profit for the Year (Full IDR)	842.436	982.606	1.005.543	-14,27%

	2021	2020	2019	Y.o.Y 2020-2021 (%)
Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Consolidated Financial Position (in million IDR, except stated otherwise)				
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	3.442.650	2.779.604	3.730.067	23,85%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	11.122.751	10.615.919	9.065.871	4,77%
Jumlah Aset Total Assets	14.565.401	13.395.523	12.795.938	8,73%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.434.467	1.932.789	3.178.349	77,69%
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	6.572.556	8.255.273	7.424.818	-20,38%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	10.007.023	10.188.062	10.603.167	-1,78%
Ekuitas Equity	4.558.378	3.207.460	2.192.771	42,12%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	14.565.401	13.395.523	12.795.938	8,73%

Rasio-Rasio Keuangan (dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain) Financial Ratios (in percent (%), except stated otherwise)			
Keterangan Description	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%) Growth Ratio (%)			
Pendapatan Revenue	11,00%	-7,30%	-12,89%
Laba Kotor Gross Profit	2,43%	28,27%	30,29%
Jumlah Aset Total Assets	8,73%	4,69%	40,65%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	-1,78%	-3,91%	40,11%
Jumlah Ekuitas Total Equity	42,12%	46,27%	43,32%
Rasio Usaha (%) Operating Ratio (%)			

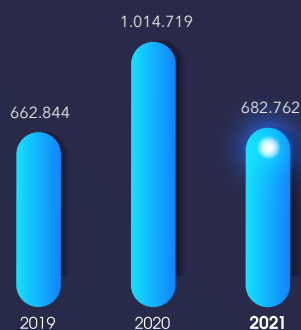
Rasio-Rasio Keuangan (dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain)
 Financial Ratios (in percent (%), except stated otherwise)

Keterangan Description	2021	2020	2019
Laba sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan/Pendapatan Profit before Final Tax and Income Tax	19,18%	20,95%	21,17%
Pendapatan/Jumlah aset Revenue/Total Assets	28,70%	28,11%	31,75%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Profit for the Year/Income	16,06%	18,05%	16,64%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA) Profit for the Year/Total Assets (ROA)	4,61%	5,07%	5,28%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE) Profit for the Year/Total Equity (ROE)	14,73%	21,19%	30,83%

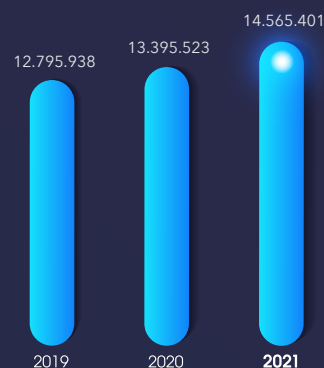
Komposisi Pendapatan per Segmen
 Revenue Composition per Segment

Pendapatan
 (Rp-Juta)
 Revenue
 (Rp-Million)

Laba Bersih Tahun Berjalan
 (Rp-Juta)
 Net Income
 for the Year
 (Rp-Million)


Rasio-Rasio Keuangan (dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain) Financial Ratios (in percent (%), except stated otherwise)			
Keterangan Description	2021	2020	2019
EBITDA/ Beban Bunga Pinjaman (Interest Coverage Ratio) EBITDA/Interest Expenses	269,33%	236,53%	219,32%
Utang Berbunga Bersih/Jumlah Ekuitas (Net Debt to Equity Ratio) Net Debt/Total Equity	149,99%	209,22%	323,84%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset Total Liabilities/Total Assets	68,70%	76,06%	82,86%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER) Total Liabilities/Total Equity (DER)	219,53%	317,64%	483,55%
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Lancar Total Current Assets/Total Current Liabilities	100,24%	143,81%	117,36%
EBITDA/Beban Bunga Pinjaman+Kewajiban Angsuran Jatuh Tempo Debt Service Coverage Ratio EBITDA/Loan Interest Expense + Installment Liability Maturity Debt Service Coverage Ratio	219,74%	144,61%	144,42%

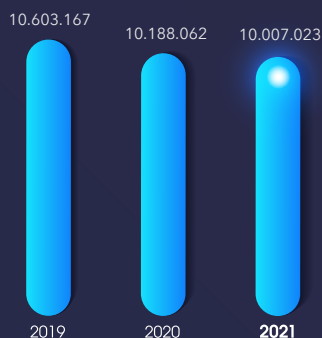
Jumlah Penghasilan Komprehensif
(Rp-Juta)
Total Comprehensive Income
(Rp-Million)



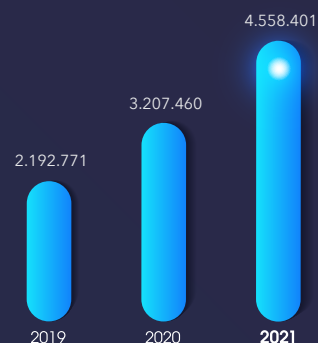
Jumlah Aset
(Rp-Juta)
Total Assets
(Rp-Million)



Jumlah Liabilitas
(Rp-Juta)
Total Liabilities
(Rp-Million)



Jumlah Ekuitas
(Rp-Juta)
Total Equity
(Rp-Million)



Ikhtisar Saham

STOCK HIGHLIGHTS

Informasi Jumlah Saham, Jenis Saham, dan Aksi Korporasi

Pada 17 Juni 2021 Moratelindo melakukan aksi korporasi sebagai berikut:

- Pada 17 Juni 2021 Moratelindo menerbitkan saham Seri C sebanyak 151.771 lembar dengan nilai per lembar sebesar Rp2.372.000 yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Smart Telecom sehingga mengakibatkan PT Smart Telecom masuk sebagai pemegang saham baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 20,51%,
- Pada 21 Desember 2021, Moratelindo melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp658.750.971.015 menjadi sebesar Rp2.112.120.439.015 dengan menerbitkan sebanyak 612.719 lembar saham baru seri C dengan nilai nominal Rp2.372.000 per saham Seri C, yang diambil bagian secara proporsional oleh seluruh pemegang saham.

Berikut disampaikan perubahan komposisi kepemilikan saham Moratelindo periode 2020-2021:

Information on Total Shares, Types of Shares, and Corporate Actions

On June 17, 2021, Moratelindo carried out the following corporate actions:

- Moratelindo issued 151,771 Series C shares at a rate of Rp2,372,000 per share, which were taken by PT Smart Telecom in their entirety, making PT Smart Telecom the Company's new shareholder with 20.51% share ownership.
- On December 21, 2021, Moratelindo took an increase in authorized capital from Rp658,750,971,015 to Rp2,112,120,439,015 by issuing 612,719 new Series C shares at a nominal value of Rp2,372,000 per share, taken proportionately by all shareholders.

Changes in the composition of Moratelindo shareholding for the period of 2020–2021 are shown on the table below:

Jenis Saham dan Pemegang Saham Share Type and Shareholder	2021		2020	
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (sheets)	Komposisi Kepemilikan (%) Ownership Composition (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (sheets)	Komposisi Kepemilikan (%) Ownership Composition (%)
PT Gema Lintas Benua				
Seri A (Nominal per lembar saham = Rp100.000) Series A (Value per sheet = Rp100,000)	250.000	33,78%	250.000	42,50%
Seri C (Nominal per lembar saham = Rp2.372.000) Series C (Value per sheet = Rp2,372,000)	206.998		-	-
PT Candrakarya Multikreasi				
Seri B (Nominal per lembar saham = Rp809.349) Series B (Value per sheet = Rp809,349)	338.235	45,71%	338.235	57,50%
Seri C (Nominal per lembar saham = Rp2.372.000) Series C (Value per sheet = Rp2,372,000)	280.056		-	-

Jenis Saham dan Pemegang Saham Share Type and Shareholder	2021		2020	
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (sheets)	Komposisi Kepemilikan (%) Ownership Composition (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (sheets)	Komposisi Kepemilikan (%) Ownership Composition (%)
PT Smart Telecom				
Seri C (Nominal per lembar saham = Rp2.372.000) Series C (Value per sheet = Rp2,372,000)	277.436	20,51%	-	-
Jumlah Total	1.352.725	100,00%	588.235	100,00%

Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun, dengan demikian tidak terdapat kepemilikan saham langsung oleh masyarakat maupun perorangan.

Until December 31, 2021, the Company did not conduct a Public Offering of Shares on the stock exchange anywhere, thus there is no ownership direct shares by the public or individuals.

Dividen Saham

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 tanggal 20 Mei 2021, pemegang saham memutuskan menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari Laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.155.293.540.000 kepada pemegang saham yang berhak, yaitu PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi. PT Smart Telecom yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham belum menjadi pemegang saham pada saat diputuskannya pembagian dividen sebagaimana dimaksud di atas.

Stock Dividend

Based on the Circular Resolution of the Shareholders as a Substitute for the Annual GMS for Fiscal Year 2020 On May 20, 2021, the shareholders decided agreed to distribute dividends from portion of retained earnings ending up to December 31, 2019 amounting to Rp1,155,293,540,000 to the rightful shareholder, namely PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi. PT Smart Telecom which is currently one of the shareholders who have not become shareholders at the time the dividend distribution is decided as referred to above.

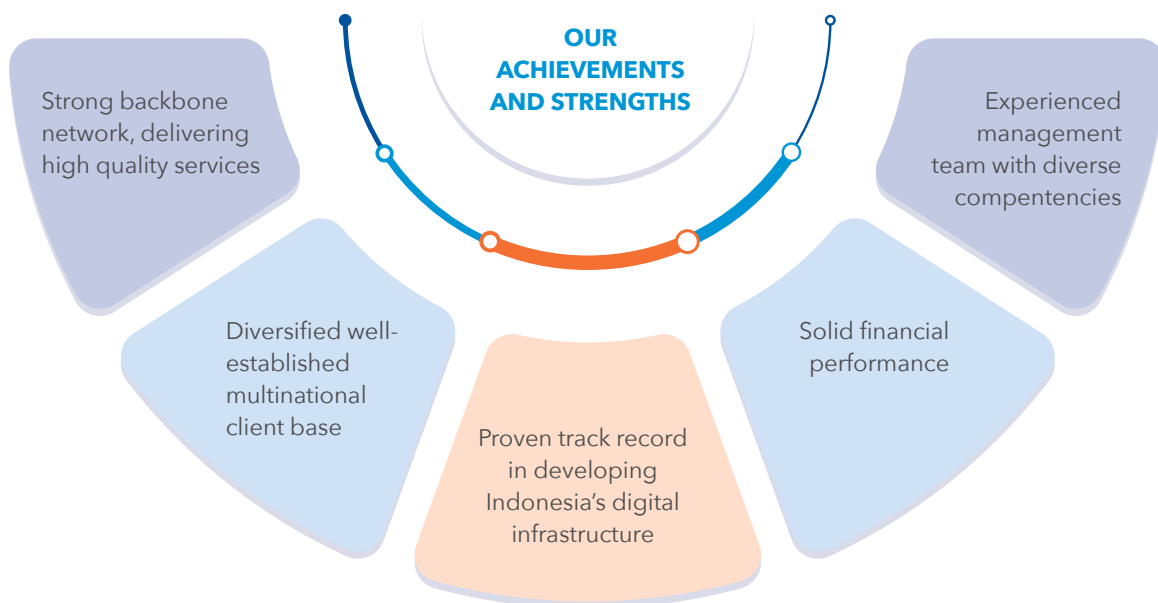
Menindaklanjuti hasil keputusan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan telah mendistribusikan dividen tahunan kepada pemegang saham dan telah diterima oleh para pemegang saham tertanggal 21 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Following up on the results of the decision, based on the Letter of Resolution of the Board of Directors No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 December 9, 2021, the Company has distributed dividends annually to shareholders and has been received by shareholders dated December 21, 2021, the details are as follows:

No.	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Lembar Saham Total Sheets of Share	Nilai Dividen Tahunan per Lembar Saham Value of Annual Dividends per Sheet of Share (Rp)	Jumlah Dividen Tahunan Total Annual Dividends (Rp)
1	PT Gema Lintas Benua	250.000	1.964.000	491.000.000.000
2	PT Candrakarya Multikreasi	338.235	1.964.000	664.293.540.000
Jumlah Total		588.235		

Bahwa Pemegang Saham yang menerima dividen yaitu PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi menyetorkan kembali dividen yang telah dibagikan sebagai modal saham Perseroan sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan modal dasar dan ditempatkan atau disetor Perusahaan dengan menerbitkan saham baru yang diambil bagian seluruhnya oleh Para Pemegang Saham Perusahaan secara proporsional.

The Company further explained that the shareholders entitled to the above dividend distribution are PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi. PT Smart Telecom which is currently one of the Company's shareholders have not become a shareholder at the time the dividend distribution was decided as referred to above.



Ikhtisar Obligasi dan Sukuk Moratelindo

MORATELINDO BONDS AND SUKUK HIGHLIGHTS

"Untuk memperkuat struktur pendanaannya, Moratelindo memanfaatkan salah satu instrumen keuangan melalui penerbitan Obligasi dan Sukuk."

"To strengthen its financing structure, Moratelindo utilizes one of the financial instruments through the issuance of Bonds and Sukuk."

Rincian daftar Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Moratelindo dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Details of the list of issued Moratelindo Bonds and Sukuk can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Penghargaan dan Sertifikasi AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Internasional/Regional 2021 International/Regional Awards



Corporate Excellent Award untuk Kategori Telecommunications & ICT Industry Corporate Excellent Award in the Category of Telecommunications & ICT Industry

Deskripsi Penghargaan:

Penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menunjukkan mobilisasi bakat yang efektif serta kemampuannya untuk memberikan hasil bisnis yang konsisten, dan seraya tetap selaras dengan tujuan perusahaan, khususnya pada industri Telecommunications & Information and Communication Technologies (ICT).

Pemberi Penghargaan:

APEA (Asia Pacific Enterprise Awards)

Acara/Kegiatan:

Asia Pacific Enterprise Awards 2021
Regional Edition (Virtual Event)

Tanggal Diberikan:

30 Juni 2021

Award Description:

An award granted to a company that has shown effective talent mobilization and its ability to present consistent results from business, all while still being in line with corporate objectives, especially within the sector of Telecommunications & Information and Communication Technologies (ICT).

Granter:

APEA (Asia Pacific Enterprise Awards)

Event:

Asia Pacific Enterprise Awards 2021
Regional Edition (Virtual Event)

Awarding Date:

June 30, 2021

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2021 Certification Valid Through 2021



ISO/IEC 20000-1:2018 (IT Service Management System)

Deskripsi Sertifikasi:

Memegang Sertifikat No. ITMS 690443 dan menjalankan Sistem Pengelolaan Jasa TI yang sesuai dengan ketentuan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk cakupan berikut:

Sistem pengelolaan jasa TI yang mendukung pengadaan jasa internet untuk rumah, pusat perbelanjaan, suite, dan perusahaan (oxygen) dari Kantor Pusat di Grha 9 dan Pusat Data sesuai dengan katalog layanan terbaru.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

British standard institution

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

18 Oktober 2019

Masa Berlaku Hingga:

17 Oktober 2022

Certification Description:

Holds Certificate No. ITMS 690443 and operates an IT Service Management System which complies with the requirements of ISO IEC 20000-1:2018 for the following scope:

The IT service management system that supported the provision of Home, Mall, suite, and corporate internet service (oxygen) from Head Office at Grha 9 and Data Center in accordance with the latest service catalogue.

Certification Issuant:

British standard institution

Date of Issuance:

October 18, 2019

Valid Through:

October 17, 2022



ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System)

Deskripsi Sertifikasi:

Memegang Sertifikat No. IS 601584 dan menjalankan Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi yang sesuai dengan ketentuan ISO/IEC 27001:2013 untuk cakupan berikut:

Pengelolaan keamanan informasi dalam pengadaan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi serta penyedia layanan internet di Pusat Data. Ini sejalan dengan Dokument SOA No. SOA-MRP-01 rev. 04 dated June 12, 2018.

Certification Description:

Holds Certificate No. IS 601584 and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the following scope:

The management of information security in the provision of Information and Communication Technologies (ICT) Infrastructure and Internet Services Provider at Data Center. This is accordance with the Statement of Applicability Document No. SOA -MRP-01 rev. 04 dated 12 June 2018.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

British standard institution

Certification Issuant:

British standard institution

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

2 November 2019

Date of Issuance:

November 2, 2019

Masa Berlaku Hingga:

1 November 2022

Valid Through:

November 1, 2022



ISO 14001:2015 (Environmental Management System)

Deskripsi Sertifikasi:

Memegang Sertifikat No. EMS 663472 dan menjalankan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan ISO 14001:2015 untuk cakupan berikut:

Manajemen Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Penyedia Layanan Internet di Pusat Data Nusantara Jakarta dan pelaksanaan proyek terkait.

Certification Description:

Holds Certificate No. EMS 663472 and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The management of Environmental Management System in the provision of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure and Internet Services Provider (ISP) at Nusantara Data Center Jakarta and related project implementation.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

British standard institution

Certification Issuant:

British standard institution

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

8 September 2020

Date of Issuance:

September 8, 2020

Masa Berlaku Hingga:

3 September 2023

Valid Through:

September 3, 2023



ISO 9001:2015 (Quality Management System)

Deskripsi Sertifikasi:

Memegang Sertifikat No. FS 601972 dan menjalankan Sistem Pengelolaan Kualitas yang sesuai dengan ketentuan ISO 9001:2015 untuk cakupan berikut:

Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Penyedia Layanan Internet.

Certification Description:

Holds Certificate No. FS 601972 and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of Information and Communication Technologies (ICT) Infrastructure and Internet Services Provider.

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:

British standard institution

Certification Issuant:

British standard institution

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:

14 September 2020

Date of Issuance:

September 14, 2020

Masa Berlaku Hingga:

13 September 2023

Valid Through:

September 13, 2023



Holds Certificate No. OHS 622211 and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of ISO 45001:2018 for the following scope:

November 26, 2023



Kilas Peristiwa 2021 2021 EVENT HIGHLIGHTS

► 4 MEI 2021 | MAY 4, 2021

Moratelindo menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp469,10 miliar, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp48,08 miliar per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan Seri B dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp30,90 miliar dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3,39 miliar per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Moratelindo issued Sukuk Shelf I Moratelindo Phase IV 2021 on BEI (Indonesia Stock Exchange), consisting of two series: Series A with a Total Remaining Ijarah Reward of Rp469.10 billion and an Ijarah Reward Installment of Rp48.08 billion per year on a term of three years after the date of issuance and Series B with a Total Remaining Ijarah Reward of Rp30.90 billion and an Ijarah Reward Installment of Rp3.39 billion per year on a term of five years after the date of issuance.

► 20 MEI 2021 | MAY 20, 2021

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan melalui Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020. Salah satu poinnya adalah keputusan pemegang saham untuk membagikan dividen atas hasil usaha tahun buku 2020 serta dividen atas sebagian laba ditahan untuk tahun buku 2019 dengan total dividen saham yang dibagikan kepada pemegang saham PT GLB dan PT CKM sebesar Rp1.155.293.540.000.

Moratelindo conducted the Annual GMS through the Circular Decision of All Shareholders in Place of the Annual GMS for the Fiscal Year of 2020. One of the points from the meeting was the shareholders decided upon the distribution of dividends from profit of the fiscal year of 2020 as well as the dividends over parts of retained earnings for the fiscal year of 2019 with a total share dividend disbursed for shareholders PT GLB and PT CKM of Rp1,155,293,540,000.



► **17 JUNI 2021** | JUNE 17, 2021

Moratelindo menerbitkan saham baru dengan seri baru, yakni saham seri C sebanyak 151.771 lembar saham yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Smart Telecom (Anak Perusahaan PT. Smartfren Telecom Tbk) sehingga mengakibatkan PT Smart Telecom masuk sebagai pemegang saham baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 20,51%.

Moratelindo issued 151,771 new Series C shares, which were taken in their entirety by PT Smart Telecom (Subsidiary of PT Smartfren Telecom Tbk), making PT Smart Telecom the Company's new shareholders with 20.51% share ownership.

► **24 SEPTEMBER 2021** | SEPTEMBER 24, 2021

Moratelindo melakukan akuisisi 145.730 lembar saham PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT") atau 65% dari total kepemilikan IPT. Akuisisi ini dalam rangka meningkatkan ekspansi bisnis dan yang akan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Moratelindo acquired 145,730 sheets of share from PT Indo Pratama Teleglobal, earning 65% of total ownership of IPT. This acquisition was part of non-organic growth strategies to improve business expansion which will have positive impacts on Moratelindo's own performance and financial condition.

► **DESEMBER 2021** | DECEMBER, 2021

Perseroan melakukan Peningkatan Modal Dasar, Disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp658.750.971.015 menjadi Rp2.112.120.439.015 dimana atas peningkatan modal tersebut Perseroan mengeluarkan saham baru seri C sebanyak 612.719 lembar saham yang keseluruhnya diambil bagian oleh Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional.

The Company increased the Company's Authorized, Paid-Up and Issued Capital from Rp658,750,971,015 to Rp2,112,120,439,015, whereby the Company issued new series C shares of 612,719 shares, all of which were taken proportionately by the Shareholders of the Company.



Laporan Manajemen

MANAGEMENT REPORT



02

Laporan Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sebagai pelaku usaha dalam industri telekomunikasi, PT Mora Telematika Indonesia berkomitmen untuk mengambil bagian dalam proses pemulihan bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak luar biasa terhadap seluruh sendi kehidupan serta perekonomian baik dalam skala nasional maupun internasional. Izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan Moratelindo Tahun Buku 2021, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

2021, Membangun Optimisme dengan Kehati-hatian

Situasi dan kondisi tahun 2021 tak lepas dari situasi global pandemi COVID-19 yang telah menyandera kehidupan sosial dan perekonomian yang bermula pada tahun 2020. Pertumbuhan negatif perekonomian di banyak negara menjadi bukti adanya stagnasi perekonomian dunia. Kebijakan *lockdown* oleh berbagai negara menyebabkan berhentinya transaksi perdagangan antar negara.

Meskipun demikian, tahun 2021 dipenuhi dengan optimisme, terutama ditopang oleh masifnya program vaksinasi massal yang diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat untuk dapat kembali normal. Namun, kemunculan varian baru Delta di pertengahan tahun 2021 kembali meningkatkan tensi ketidakpastian, yang menyebabkan koreksi perekonomian di berbagai negara. Dalam laporan *World Economic Outlook Update* edisi Oktober 2021 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), perekonomian dunia terkoreksi dari sebelumnya diproyeksikan tumbuh 6,0% pada triwulan II 2021 menjadi 5,9% pada triwulan III 2021; Tiongkok terkoreksi dari sebelumnya diproyeksikan tumbuh 8,1% pada triwulan II 2021 menjadi 8,0% pada triwulan III 2021, negara ASEAN-5 dari 4,3% pada triwulan II 2021 menjadi 2,9% pada triwulan III 2021. Sedangkan Amerika Serikat dan kawasan Eropa justru mengalami kenaikan.

Meskipun pada semester II 2021 berbagai negara mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah, pencapaian tersebut masih jauh di atas pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Mengutip laporan *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2022, pertumbuhan

Respected Shareholders and Stakeholders,

As a business subject in national construction industry, PT Mora Telematika Indonesia is fully committed to taking part in the recovery processes together with all stakeholders, especially when it comes to dealing with the COVID-19 pandemic, which has tremendously impacted all aspects of life and economy. On behalf of the Board of Commissioners, please allow me to submit the book of 2021 Moratelindo Annual Report, in particular, from the perspective of the way the Board of Commissioners conducts its supervisory functions.

2021, Building Optimism Cautiously

The situation and condition of 2021 were still tied to the global concerns over COVID-19 pandemic, which had put all social and economic side of life on halt throughout most of 2020. Negative economic growth in many countries was a proof of the presence of global economic stagnancy. The lockdown policy by various countries lead to cross-country trading transactions stopping.

Despite that, 2021 was full of optimism, particularly supported by massive vaccination programs that were expected to drive community mobility into normalcy. However, the emergence of then-new Delta variant mid-2021 again increased the tension of uncertainty, leading to economic correction in various countries. In the report of *World Economic Outlook Update*, October 2021, released by the International Monetary Fund (IMF), global economic was corrected from a growth projection of 6.0% in the second quarter of 2021 to 5.9% in the third quarter of 2021, China was corrected from 8.1% to 8.0% for the same periods, and ASEAN-5 countries from 4.3% to 2.9%. The USA and European regions saw an increase instead.

Despite seeing a downward correction at the second semester of 2021, said feat was still higher than 2020 economic growth. Based on the *World Economic Outlook Update* report from January 2022, global economic growth in 2021 generally hit the 5.9% mark, far above 2020 with a



perekonomian dunia di tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 5,9%, jauh di atas tahun 2020 sebesar defisit 3,1%. Seluruh negara dan kawasan mencatatkan pertumbuhan perekonomian yang positif, berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2020. Hal ini menunjukkan pemulihan yang berangsur-angsur terjadi.

Dari laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021 justru berhasil tumbuh 3,69%, jauh membaik dari tahun 2020 di mana Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi defisit 2,07%. Dari sisi pengeluaran atau konsumsi, Konsumsi Rumah Tangga sebagai penopang utama yang berkontribusi hingga 52,91% dari struktur PDB nasional berdasarkan pengeluaran hanya tumbuh 3,55%. Minimnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga tak lepas dari kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang masih dilakukan di tahun 2021, meskipun pertumbuhan minim ini jauh lebih baik dari kondisi di tahun 2020 di mana Konsumsi Rumah Tangga mencatat defisit 3,61%.

Kondisi ini menggambarkan pola konsumsi masyarakat yang mulai berhati-hati dalam menghadapi situasi dan kondisi yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Namun, minimnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga justru berbanding terbalik dengan transaksi digital yang dilakukan masyarakat. Mengutip data Bank Indonesia (BI), hingga triwulan III 2021 nilai nominal transaksi *e-commerce* meningkat pesat 61,7% (yoy) menjadi Rp291,5 triliun, seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*.

Peningkatan pesat transaksi digital juga tercermin dari data BPS yang mencatat pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) sebesar 6,21%. Tingginya pertumbuhan sektor Infokom tak lepas dari perubahan perilaku masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk tetap menjalankan kegiatan kesehariannya. Mulai dari berbelanja kebutuhan harian, kegiatan mengajar maupun perkantoran, hingga transaksi pembayaran berbagai hal. Hal ini kemudian ditegaskan dengan tingginya pertumbuhan sektor Transportasi & Pergudangan, terutama pada komponen Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan serta Pos Kurir yang membukukan pertumbuhan hingga 20,20%.

Dengan kondisi tersebut, Moratelindo berupaya meningkatkan kompetensinya dan mengembangkan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur telco pada

deficit of 3.1%. All countries and regions recorded positive economic growth, an inverse proportion to the condition in 2020. This indicates that a gradual recovery is taking place.

Based on the report released by the BPS (Central Statistics Agency), amidst the uncertain situation, Indonesia economy throughout 2021 managed to grow by 3.69%, far better than that of 2020 where Indonesia recorded a deficit of 2.07%. From the perspective of expenditure or consumption, Household Consumption as the main contributor of 52.91% of the national GDP structure based on expenditure only grew by 3.55%. The minimal growth of household consumption was attributed to the PPKM policy that was still in place in 2021, although the minimal growth was far better than that of 2020, where the consumption was a deficit of 3.61%.

This condition illustrated a consumption pattern within a society that is starting to be cautious in facing uncertain situation and condition. However, the minimal household consumption was inversely proportionate to digital transactions among the communities. Based on the data from Bank Indonesia, up to the third quarter of 2021, the nominal value of *e-commerce* transactions rose rapidly by 61.7% (YoY) to Rp291.5 trillion, along with increase in community's acceptance of and preference in online shopping, broadening of and ease of digital payment system, and digital banking acceleration.

Rapid increase of digital transaction is also reflected through BPS data that recorded an increase in the sector of information and communication by 6.21%. The high rate of said sector's growth was tied to a shift in community's behaviour that took advantage of digital infrastructure in conducting their daily activities, from shopping for daily needs, learning and office activities to assortments of payment transactions. This was then confirmed by the high growth of Transportation & Warehousing sectors, especially in the components of Warehousing and Transport Support Services as well as Post Courier, which posted a growth of up to 20.20%.

In such a condition, Moratelindo strives to improve its competence and develop policies in accordance with community's requirements, especially to meet the requirements of telecommunication infrastructure in the

segmen *retail* dan *enterprise*. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi perjalanan Moratelindo ke depan, khususnya dalam menunjukkan performa terbaiknya di tengah kondisi yang masih menunjukkan ketidakpastian.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas Kebijakan Strategis yang Dijalankan Direksi

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perusahaan serta inisiatif strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2021, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan tersebut mencapai 100%, yang menunjukkan keseriusan baik Dewan Komisaris maupun Direksi untuk mengelola Moratelindo meningkatkan level kompetensinya. Beberapa agenda pembahasan yang cukup penting dalam rapat gabungan tersebut terutama berfokus pada pandemi COVID-19 dan dampaknya, baik bagi perekonomian dan industri, maupun dampak langsung kepada Perusahaan seperti arah strategis pengembangan Moratelindo dalam menghadapi dinamika yang berlangsung. Selain itu, pembahasan Dewan Komisaris dan Direksi juga menitikberatkan pada pemetaan risiko baik risiko operasi, bisnis maupun keuangan.

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Direksi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Berbagai langkah yang dilakukan seperti penguatan fokus pada segmen *retail* dan *enterprise*, penyelesaian akuisisi 65% kepemilikan PT Indo Pratama Teleglobal, penguatan struktur permodalan melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo tahap IV tahun 2021 sebesar Rp500 miliar serta keberhasilan mendapatkan berbagai pendanaan bank/lembaga keuangan.

Dewan Komisaris juga menyambut baik bergabungnya PT Smart Telecom menjadi salah satu pemegang

segments of retail and enterprise. This certainly is an important note for Moratelindo's journey moving forward, especially to show its best performance amidst uncertain condition.

Implementation of Supervisory Functions by the Board of Commissioners over Strategic Policies Performed by the Board of Directors

The role of the Board of Commissioners is carried out through the Board's intensive involvement in routinely directing the preparation of Company's work plan and strategic initiatives by the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors convene in a joint meeting, discussing various agendas for work and operational plans, business opportunities, and strategic issues that require the Board of Commissioners' approval. The meeting is a form of coordination to discuss periodic reports by the Board of Directors and to offer responses, notes, and advice, outlined in a meeting summary.

Throughout 2021, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held three times. The attendance rate of those joint meetings reached 100%, indicating dedication by both the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing Moratelindo to improve its competence. Some important discussions in the joint meetings particularly focused on the pandemic and its impacts on the economy and industry and its direct impacts on the Company in terms of strategic direction for Company's development in facing the current dynamics. In addition, the discussions also focused on risk mapping, either operational, business, or financial risks.

The Board of Commissioners appreciates all strategic policies put in place by the Board of Directors, especially in facing the uncertainty caused by the prolonged COVID-19 pandemic. Various steps that have been taken include focus strengthening on retail and enterprise segments, settlement of acquisition of 65% of PT Indo Pratama Teleglobal's ownership, capital structure strengthening by the issuance of 2021 Sukuk Shelf I Moratelindo phase IV of Rp500 billion, and successfully obtaining funding from the bank.

The Board of Commissioners also welcomes the incorporation of PT Smart Telecom into the fold, becoming

saham Perusahaan di tahun 2021 dengan kepemilikan sebanyak 20,51% akan memberikan dampak yang nyata bagi perluasan portofolio bisnis Moratelindo di sektor telekomunikasi. Selain itu, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan saham baru seri C sebanyak 612.719 lembar senilai Rp1.453 triliun turut memperkuat permodalan serta *cashflow* Moratelindo, yang akan menjadi modal bagi ekspansi bisnis yang selektif di masa-masa mendatang.

Pencapaian lain Perusahaan di tahun 2021 adalah pembagian dividen kepada pemegang saham yang dibagikan berdasarkan Laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.155.293.540.000.

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan dan Dasar Penilaiannya

Penilaian kinerja Direksi dapat dilihat dari pengelolaan operasi dan bisnis yang dilakukan di sepanjang tahun 2021, serta pencapaian kinerja keuangan sebagaimana tercermin dari Laporan Keuangan Teraudit Perusahaan tahun buku 2021.

Pada aspek operasi dan bisnis, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris menilai Direksi mampu mengembangkan operasi dan bisnis Moratelindo dengan sangat baik, khususnya melalui penguatan fokus pada segmen *retail* dan *enterprise*. Demikian pula dengan pengelolaan struktur pendanaan yang menunjukkan kepercayaan pasar pada Moratelindo, yang tercermin dari terserapnya Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo tahap IV tahun 2021 serta kepercayaan dunia perbankan kepada Moratelindo, yang ditunjukkan dengan diperolehnya berbagai fasilitas pendanaan dari Bank/Lembaga Keuangan.

Secara khusus, Dewan Komisaris juga mengapresiasi kinerja Direksi melalui pengelolaan operasional di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Transformasi digital yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan daring, bahkan tanda tangan digital dan persetujuan serta pemantauan kinerja melalui daring menunjukkan kedewasaan Moratelindo dalam menghadapi dinamika situasi yang ada. Selain itu, evaluasi kinerja di setiap Departemen dan perbaikan *Standard Operational Procedure* (SOP) akan menjadi landasan bagi proses bisnis yang efektif dan berkelanjutan.

one of Company's shareholders in 2021 with an ownership percentage of 20.51%. This is expected to be able to give impacts on Moratelindo's telecommunication business portfolio expansion. In addition, the increase in authorized capital and issued and paid-up capital with the issuance of 612,719 new Series C shares with a total of Rp1,453 trillion also reinforced Moratelindo's cash flow and capital, which is an asset for business expansion in the future.

Another achievement of the Company in 2021 distribution of dividends to shareholders based on the Company's net profit for the financial year 2020 ending on December 31, 2020 and in part the Company's retained earnings ending up to December 31, 2019 with the total of Rp1,155,293,540,000.

Assessment on the Performance of the Board of Directors Concerning Company Management and Assessment Basis

The assessment of the Board of Directors' performance can be judged by operational and business management carried out throughout 2021 as well as by financial achievements reflected in the Company's Audited Financial Statement for the 2020 fiscal year.

In the operational and business aspects, as explained above, the Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors was able to develop the Company's operations and business very well, particularly through the strengthening of focus on the retail and enterprise segments. Likewise, the management of funding structure showed market confidence in the Company. This confidence was reflected in the absorption of 2021 Sukuk Shelf I Moratelindo phase IV as well as overall banking world's trust in the Company, as evidenced by the presence of various funding facilities from the Banks/Financial Institutions.

In particular, the Board of Commissioners also appreciates the performance of the Board of Directors for operational management amidst the policy of Implementation of Community Activity Restriction (PPKM). Digital transformation manifested in various online activities, even up to digital signature and approval as well as online performance monitoring displayed Company's maturity in facing the current dynamics. In addition, performance evaluation on each Department and SOP improvement would serve as a foundation for an effective and sustainable business process.

Pada aspek keuangan, peningkatan pendapatan dari segmen *Retail* dan pendapatan *Wholesale* menggambarkan keberhasilan Moratelindo dalam mengelola kesempatan yang ada. Moratelindo mampu meningkatkan EBITDA-nya, serta nilai aset yang meningkat terutama dari kas dan setara kas serta aset tetap. Penguatan kas dan setara kas diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perluasan bisnis Moratelindo di masa mendatang.

Atas seluruh keberhasilan yang telah ditorehkan di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi.

Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2022

Tahun 2022 masih akan menjadi bagian dari proses pemulihan atas dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Munculnya varian Omicron di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 kembali mengharuskan Pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk membatasi kegiatan sosial yang kemudian berdampak pada kegiatan perekonomian di berbagai aspek.

Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi Direksi untuk terus melakukan penetrasi pada segmen *retail* dan *enterprise*. Masih tingginya kebutuhan pada segmen ini menjadi potensi besar bagi pertumbuhan Moratelindo ke depan. Untuk itu, Dewan Komisaris mengapresiasi rencana Direksi untuk terus meningkatkan kapasitas yang ada serta memperluas jaringan retail yang telah ada serta melakukan penambahan di beberapa kota baru.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendukung rencana Direksi dalam melakukan pengembangan *backbone* dan access beserta perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif serta pengembangan data center, pembangunan inland cable, ducting beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.

Pandangan atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan berkepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini menjadi dasar bagi Perusahaan dan seluruh entitas usaha di Indonesia untuk dapat menghadirkan pengelolaan organisasi bisnis yang *compliance*, khususnya dengan status emiten yang disandang oleh Perusahaan.

In financial aspect, increase in earnings from retail and wholesale segments illustrated Moratelindo's success in managing opportunities. The Company managed to increase its EBITDA as well as asset values, which increase especially in cash and cash equivalents and fixed assets. Strengthening of cash and cash equivalents would impact positively on Moratelindo's business expansion in the future.

For the success amidst this uncertain condition, the Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors.

Outlook on Business Prospects for 2022

The year 2022 would still be part of processes of recovering from the impacts of the ongoing COVID-19. The emergence of Omicron variant at the end of 2021 and at the beginning of 2022 required the Indonesian Government to reimplement social restrictions, which affected economic activities in all aspects.

The Board of Commissioners accepts the Board of Directors' projection to continuously penetrate retail and enterprises segments. The high demand on these segments serves as a big potential for the development of Moratelindo in the coming years. To that end, the Board of Commissioners appreciates the plans of the Board of Directors to increase existing capacities and to broaden existing retail networks as well as to expand into several new cities.

In addition, the Board of Commissioners also supports the plan of the Directors in carrying out backbone development and access along with passive and active devices and infrastructure as well as data center development, inland cable development, ducting, and both active and passive supporting infrastructure devices.

Views on Good Corporate Governance Implementation

The company has an interest in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), which consists of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These five principles form a basis for the Company and all business entities in Indonesia and allows companies to present a compliant form of business organization management, especially with the Company's status as an issuer.

Dewan Komisaris memandang, penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sebagai emiten, Perusahaan melalui manajemennya terus berupaya untuk mengembangkan penerapan prinsip GCG, terutama terhadap kepatuhan atas peraturan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi memberikan bukti bahwa pengelolaan GCG di lingkup Perusahaan berjalan dengan sangat baik. Kerja sama dalam hubungan yang harmonis antara Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Audit Internal di bawah Direksi menunjukkan adanya keseriusan Perusahaan untuk dapat membentuk proses audit internal yang seimbang dan terukur.

Catatan penting bagi perkembangan GCG di lingkup Perusahaan adalah pengelolaan risiko sesuai dengan bisnis inti dan penyesuaian terhadap tren pengelolaan risiko dewasa ini. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris telah berupaya untuk mengembangkan sistem manajemen risiko sebagai salah satu agenda besar terkait perkembangan GCG dalam beberapa tahun terakhir.

Pandangan atas Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Perusahaan dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS Perusahaan

Perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG tak lepas dari kemampuan Perusahaan untuk menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang mandiri dan bebas dari kepentingan manapun. Keberadaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Dewan Komisaris senantiasa meninjau implementasi kebijakan *Whistleblowing System* yang dimiliki. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit melakukan evaluasi serta menindaklanjuti laporan pelanggaran/indikasi pelanggaran yang diterima melalui koordinasi dengan Unit Audit Internal dan Departemen Human Resources Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan pelanggaran melalui mekanisme Perusahaan "Pengungkapan yang dilindungi".

The Board of Commissioners is of the view that the implementation of GCG principles within the Company has continued to improve from time to time. As an issuer, the Company, through its management, continues to strive to develop its implementation of GCG principles, especially when it comes to compliance with applicable regulations on the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority (OJK). The existence of supporting organs that assist the Board of Commissioners and Directors provides evidence that GCG management within the Company is running very well. Cooperation in a harmonious relationship between the Audit Committee under the Board of Commissioners and the Internal Audit under the Board of Directors demonstrates the Company's seriousness in establishing a balanced and measured internal audit process.

Important notes for the development of GCG within the Company involve risk management in accordance with core business and adjustments to current risk management trends. The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, has made efforts to develop a risk management system as one of the big agendas related to the Company's development of GCG in recent years.

Views on the Management of Company's *Whistleblowing System* (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in Company's WBS

The development of the implementation of GCG principles cannot be separated from the Company's ability to provide a system to report violation that is independent and free from any interests. The existence of a *Whistleblowing System* (WBS) enables a reporting mechanism that ensures confidentiality of the whistleblowers.

The Board of Commissioners constantly reviews the implementation of its *Whistleblowing System* policy. The Board of Commissioners, together with the Audit Committee, evaluates and follows up on reports of violations/indications of violations received in coordination with the Internal Audit Unit and the Company's Human Resources Department.

Throughout 2021, there were no reports of violations/indications of violations that entered through the Company's "Protected Disclosure" mechanism.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris memandang, kedua komite telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik serta memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris beserta seluruh komitenya terus mengawal upaya peningkatan kualitas penerapan praktik tata kelola terbaik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif. Laporan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing komite sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan.

Penilaian kinerja komite oleh Direksi, termasuk penilaian kinerja masing-masing anggota komite yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Evaluasi kinerja komite serta evaluasi kinerja masing-masing anggota komite merupakan penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan komite yang meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim
2. Jumlah Kajian, Analisis, dan Rekomendasi
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim, termasuk kehadiran dalam rapat
4. Kerjasama dalam Tim
5. Mutu dan Kualitas Konsep

Pelaksanaan fungsi dari komite terlihat dari penyelenggaraan rapat yang dilakukan oleh masing-masing komite. Di sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali sesuai program kerja yang direncanakan untuk membahas rencana dan hasil Unit Audit Internal maupun eksternal, serta tindak lanjut arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi lingkup tugas Komite Audit. Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2021 telah

Assessment on the Performance of the Organs Supporting the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by two Committees, namely, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners is of the view that these two committees have carried out their respective roles and responsibilities well and have provided positive support for the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners along with its committees continuously oversee all efforts to improve the quality of the implementation of the best governance practices, compliance with provisions of the legislation, and effective implementation of internal control and risk management system. Reports by Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee are submitted to the Board of Commissioners as a form of accountability over each committee's duties in accordance with the stipulated work procedures.

Performance evaluation on the committees by the Board of Commissioners, including performance evaluation on members of the committees who are not members of the Board of Commissioners, is carried out at least once a year. The results from the evaluation will then be used to formulate correctional, developmental, and refining steps needed to support the implementation of the Board of Commissioners' duties.

Performance evaluation on the committees and the performance evaluation on each member of the committees are an assessment based on criteria around target achievement as stipulated in the committees' Annual Work Plan, covering the following subjects:

1. Contributions to Team's target achievement
2. Total Reviews, Analyses, and Recommendations
3. Engagement rate in Team's activities, including meeting attendance
4. Teamwork
5. The quality of the concept

The implementation of committee's functions is reflected on the meetings conducted by each committee. Throughout 2021, Audit Committee has held 9 (nine) meetings in accordance with work program, coordinated to discuss on the plans and results of Internal Audit Unit or external audit and the follow-up to the directive of the General Meeting of Shareholders, which fall under the scope of duties of the Audit Committee. On the other hand, the Nomination and Remuneration Committee has convened 3 (three) times

melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisis kedua komite telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan telah dikomunikasikan serta didiskusikan dengan manajemen dan unit-unit terkait.

Penutup

Atas pencapaian kinerja Moratelindo di tahun 2021, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Moratelindo. Kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan merumuskan berbagai langkah kebijakan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, keprihatinan di tahun 2021 menjadi catatan penting bagi seluruh pihak untuk dapat terus membangun kebersamaan dan merumuskan langkah yang tepat untuk membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

throughout 2021. All findings, notes, and recommendations on the implementation of activities, reviews, and analyses of both committees have been reported back to the Board of Commissioners for correction and follow-up by related parties and have been communicated and discussed upon with the management and concerned units.

Closing

For the performance of Moratelindo in 2021, the Board of Commissioners extends our appreciation to all Moratelindo personnel. To all shareholders, we express our gratitude for the trust given to us. The Board of Commissioners appreciates the cooperation and the commitment of the Board of Directors, especially in terms of dealing with the pandemic and in formulating various policies. We would also like to express our gratitude towards all employees for their optimal contribution. The Board of Commissioners truly hopes that all concerns in 2021 can be important things to take note of for all parties in establishing collaboration and in preparing the next right steps to bring the Company towards a better growth.

Jakarta, 12 April 2022

Atas nama Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia,
On Behalf of PT Moratelindo Telematika Indonesia Board of Commissioners,



Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Laporan Direksi

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berkepanjangan di tahun 2021 masih saja menimbulkan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Tensi ketidakpastian masih mewarnai perjalanan di tahun 2021, terutama dengan munculnya varian baru Delta di pertengahan tahun 2021 yang menciptakan kekhawatiran di seluruh dunia.

Meskipun demikian, PT Mora Telematika Indonesia tidak berpangku tangan dan meratapi kondisi eksternal yang masih diliputi ketidakpastian. Justru, di tengah situasi inilah, Moratelindo berupaya menapakkan jejak langkahnya untuk dapat menciptakan pasar yang sesuai dengan kompetensi inti yang dimiliki.

Tumbuh Berkelanjutan: Kebijakan Strategis dan Pencapaian Tahun 2021

Berlanjutnya COVID-19 menjadi menciptakan serangkaian eksese atas optimisme yang sebelumnya telah tumbuh di awal tahun 2021. Kemunculan COVID-19 varian Delta di tengah tahun 2021 memberikan eskalasi kekhawatiran di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, pada triwulan III dan IV 2021 Pemerintah kembali memperketat kegiatan masyarakat untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19 varian Delta, yang kemudian berdampak pergerakan roda perekonomian.

Meskipun demikian, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2021 mampu menunjukkan kekuatannya untuk bangkit dan mencatat pertumbuhan sebesar 3,69%, jauh di atas tahun 2020 dengan catatan pertumbuhan ekonomi defisit 2,07%. Masih menurut BPS, dari sisi Lapangan Usaha, sektor Jasa Kesehatan mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi sebesar 12,16%, diikuti oleh Transportasi & Pergudangan dan Pengadaan Listrik & Gas yang masing-masing mencatat pertumbuhan 7,93% dan 7,81% secara *Year-on-Year* (YoY); hanya sektor Jasa Keuangan yang mencatat defisit 2,59% (YoY), sedangkan sektor lapangan usaha lainnya mencatat pertumbuhan yang bervariasi.

Respected Shareholders and Stakeholders,

The ongoing COVID-19 pandemic in 2021 still caused big enough an impact on global economy. Tension of uncertainty was still prevalent in 2021, especially as a new COVID-19 variant, the Delta, emerged mid-2021, further creating worldwide concerns.

However, PT Mora Telematika Indonesia was not sitting idly and mourned the external situation full of uncertainty. It was during this situation that Moratelindo strived to leave a dent in the creation of a market that is suitable with the existing core competence.

Sustainably Growing: Strategic Policies and 2021 Accomplishment

The prolonged COVID-19 created a series of impacts on optimism that previously was growing at the beginning of 2021. The emergence of Delta variant of the coronavirus mid-2021 lead to an escalated extraordinary fear among the communities. The government was initially set to loosen the social restriction policies a little. However, during the third and fourth quarters of 2021, the government again tightened the restriction imposed on social activities to anticipate the widespread of the Delta variant, which affected the economy all over again.

Still, data from BPS (Central Statistics Agency) showed that Indonesia's economy during 2021 was capable of bouncing back and recorded a growth of 3.69%, far exceeding that of 2020 with a deficit of 2.07%. According to BPS, from the business field's perspective, medical service sector posted the highest Gross Domestic Product with 12.16%, followed by transportation and warehousing as well as gas and electricity provision, each posted a growth of 7.93% and 7.81% Year-on-Year (YoY) respectively. Financial service sector posted a deficit of 2.59% YoY while other sectors posted varying growth.



Sektor Konstruksi sendiri mampu tumbuh 3,91%, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan pemulihan berangsur-angsur atas sektor ini. Angka ini jauh di atas tahun sebelumnya, di mana sektor konstruksi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar defisit 5,67%. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) mampu tumbuh 6,21%, yang terutama didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur digital untuk tetap menjalankan kegiatan kesehariannya. Mulai dari berbelanja kebutuhan harian, kegiatan mengajar maupun perkantoran, hingga transaksi pembayaran berbagai hal. Hal ini kemudian ditegaskan dengan tingginya pertumbuhan sektor Transportasi & Pergudangan, terutama pada komponen Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan serta Pos Kurir yang membukukan pertumbuhan hingga 20,20%.

Menghadapi kondisi di mana Moratelindo merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan layanan telekomunikasi, Moratelindo berupaya untuk memperkuat fokus pasar kepada segmen *retail* dan *enterprise* yang memang memiliki potensi yang tinggi khususnya saat pandemi COVID-19 berlangsung. Selain itu, Moratelindo melakukan ekspansi bisnis sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan serta selektif dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan proyek maupun ekspansi perusahaan. Pada sisi operasi, Moratelindo berupaya melakukan evaluasi kinerja di setiap Departemen dan memperbaiki *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam rangka menciptakan efektivitas serta proses bisnis yang berkelanjutan.

Kegiatan operasi dan perkantoran juga mengalami penyesuaian sejalan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 akibat penyebaran COVID-19 varian Delta. Di tahun 2021, Moratelindo bertransformasi digital dalam setiap aktivitas, yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti rapat daring, tanda tangan digital dan persetujuan melalui daring, pelatihan dan pendidikan melalui media webinar, serta pemantauan kinerja melalui daring dengan memanfaatkan *platform* yang tersedia.

Ekspansi bisnis terus dilakukan Moratelindo, salah satunya melalui pertumbuhan non organik. Di tahun 2021, Moratelindo mengakuisisi 65% kepemilikan PT Indo Pratama Teleglobal, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya aktivitas telekomunikasi satelit. Akuisisi ini diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas Moratelindo dan memperkuat portofolio bisnis. Tak hanya itu, bergabungnya PT Smart Telecom menjadi salah satu pemegang saham Perusahaan di tahun 2021 dengan kepemilikan sebanyak 20,51% akan memberikan dampak yang nyata bagi perluasan

The sector of construction was capable of growing by 3.91%, an excellent feat that showed a gradual recovery. The figure was way higher than that of the previous year, where the sector posted a deficit of 5.67%. Information and communication sector, on the other hand, grew by 6.21%, ultimately stemming from a shift in the general behaviour of the communities that relied on digital infrastructure to be able to keep doing their usual activities, from shopping for daily needs to learning activities to office routines. This was confirmed by the high growth of Transportation and Warehousing sector, particularly Warehousing components, support for transportation modes, and post courier, which posted a growth of up to 20.20%.

As a provider of telecommunication infrastructure and services, Moratelindo strives to strengthen market's focus on retail and enterprise segments that bear strong potentials especially amidst the pandemic. In addition, Moratelindo expanded its business in accordance with Company's financial ability and by being selective in how it picks a project. From an operational perspective, Moratelindo tried to evaluate on the performance of each Department and adjust its SOP in order to create sustainable business effectiveness and processes.

Operational and office activities suffered from adjustments as the restriction policies were being imposed on the communities in 2021 on account of the spread of the Delta. In 2021, Moratelindo implemented digital transformation in its activities as evidenced by various examples such as online meetings, digital signature and online approval, trainings through webinars, and online performance monitoring through available media.

Moratelindo conducted business expansion through non-organic growth. In 2021, Moratelindo acquired 65% ownership over PT Indo Pratama Teleglobal, an entity engaging in telecommunication sector, especially activities of satellite telecommunication. The acquisition was expected to increase Moratelindo's profitability and strengthen its business portfolio. Apart from that, the incorporation of PT Smart Telecom as one of the Company's shareholders in 2021 with 20.51% ownership should provide tangible impacts on Moratelindo's business portfolio enlargement in the sector of telecommunication. In terms of business

portofolio bisnis Moratelindo di sektor telekomunikasi. Dari sisi ekspansi usaha, bergabungnya PT Smart Telecom sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan akan meningkatkan nilai tambah Perusahaan yang akan memiliki potensi bisnis 5G atau FTTH, menciptakan sinergi yang baik, serta diharapkan akan membangun ekosistem telekomunikasi secara komprehensif.

Dalam pengelolaan modal, di tahun 2021 Moratelindo memiliki 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu:

- i. Moratelindo berhasil melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Sukuk Ijarah Moratelindo Tahap IV sebesar Rp500 Miliar;
- ii. Bergabungnya PT Smart Telecom sebagai pemegang saham baru Seri C sebanyak 151.771 lembar saham sehingga meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp658 miliar;
- iii. Moratelindo kembali melakukan Peningkatan modal menjadi Rp2,1 triliun

Ketiga peristiwa ini menjadi momentum bagi Moratelindo dalam hal penguatan permodalan yang dimiliki serta *cashflow* Perusahaan, yang akan menjadi modal bagi ekspansi bisnis yang selektif di masa-masa mendatang.

Dengan berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan, khususnya penguatan fokus pasar kepada segmen *retail* dan *enterprise* memberikan dampak positif terhadap pendapatan dari segmen Retail yang mampu tumbuh hingga 39,99%, yang diikuti dengan segmen *Wholesale* yang mencatat pertumbuhan pendapatan 31,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan Moratelindo di tahun 2021 sebesar Rp4,18 triliun, meningkat 11,00% atau setara dengan Rp414,38 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,77 triliun. Selain itu, EBITDA Perusahaan di 2021 sebesar Rp2,08 triliun, mengalami pertumbuhan 7,89% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,93 triliun

Nilai aset Moratelindo juga mengalami peningkatan sebesar 8,95% menjadi Rp14,59 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,39 triliun. Pertumbuhan total aset Moratelindo terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas akibat setoran modal saham baru sebesar Rp1,81 triliun, serta kenaikan aset tetap yang disebabkan pengembangan jaringan *backbone* dan *Fiber to The Home* (FTTH), peningkatan kapasitas bandwidth dan pembangunan cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Salah satu capaian penting di tahun 2021 adalah pembagian Dividen tunai dari laba bersih periode 2020 dan laba ditahan periode 2019 senilai Rp1.155.293.540.000.

expansion, the joining of PT Smart Telecom will increase the added value of the Company which will have 5G or FTTH business potential, creating good synergies, and is expected to build an ecosystem comprehensive telecommunications.

In terms of capital management, in 2021, Moratelindo observed three important events:

- i. Moratelindo managed to conduct Shelf Registration for Sukuk Shelf I Moratelindo 4th Program Rp500 billion;
- ii. The joining of PT Smart Telecom as a new shareholder of 151,771 Series C shares, increasing Company's authorized and issued capital to Rp658 billion;
- iii. Moratelindo again to a capital increase to Rp2.1 trillion.

These three events became a momentum for Moratelindo in terms of strengthening existing capital and the Company's cash flow, which will be the assets for selective business expansion in the future.

With various strategic policies in place, the strengthening of focus on the retail and enterprise segments gave positive results in the earnings from the retail segment that grew by up to 39.99%. This was followed by the wholesale segment, with a recorded a growth in earnings by 31.15% compared to the previous year. Moratelindo's total earnings in 2021 were Rp4.18 trillion, an increase by 11.00% or by Rp414.38 billion from Rp3.77 trillion in 2020. In addition, The Company's EBITDA in 2021 is Rp2.08 trillion, experiencing a growth of 7.89% compared to 2020 of Rp1.93 trillion.

An increase was also observed in the values of Moratelindo's assets by 8.95% to Rp14.59 trillion from Rp13.39 trillion in the previous year. The growth was caused predominantly by an increase in cash and cash equivalents on account of new stock investment of Rp1.81 trillion and an increase in fixed assets due to development of backbone networks and Fiber to the Home (FTTH), increased bandwidth capacity, and construction of new branches in several big cities in Indonesia throughout 2021.

One of the most important achievements in 2021 was the distribution of cash dividends from 2020 net profits and 2019 retained earnings Rp1,155,293,540,000. The

Manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi inti Moratelindo, yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh investor.

Kendala, Tantangan, dan Solusinya

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tantangan terbesar bagi Moratelindo muncul dari kondisi tahun 2021 yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19. Meskipun terdapat pemulihan yang cukup menjanjikan, ketidakpastian masih meliputi tahun 2021 terutama karena kemunculan varian baru Delta yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat kembali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Gelombang kedua pandemi COVID-19 ini juga memberikan pengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi global serta volatilitas pada pasar keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga berimbas pada dunia perbankan dan investor yang sangat selektif dalam memilih sektor bisnis.

Namun, tantangan ini justru berhasil dijawab oleh Moratelindo melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo tahap IV tahun 2021. Terserapnya surat utang syariah ini memberikan bukti bahwa Moratelindo memiliki jejak rekam yang dapat dipercaya oleh investor, bahkan di tengah kondisi yang kurang menggembirakan. Selain itu, adanya pendanaan dari berbagai bank/lembaga keuangan di tahun 2021 juga memberikan gambaran kepercayaan perbankan/lembaga keuangan terhadap Moratelindo.

Prospek Usaha 2022

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang relatif baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*)

management is committed to continuously improving Moratelindo's core competence, which will eventually create added values for shareholders and investors.

Constraints, Challenges, and Solutions

As discussed before, the biggest challenge in 2021 for Moratelindo stemmed from the condition affected by the COVID-19 pandemic. Despite some promising progress towards recovery, uncertainty remained the common motif throughout 2021 especially with the emergence of the Delta, leading to reimplementation of social restrictions by the government. The second wave of the pandemic also resulted in a rather sluggish global economic recovery and volatile financial market across the globe, including Indonesia. This eventually lead to a banking industry and investors being overly selective in choosing a business sector.

The challenges were answered by Moratelindo by issuing 2021 Sukuk Shelf I Moratelindo phase IV. The absorption of the sharia obligation proved that Moratelindo owns a trustworthy track record among the investors, even amidst a rather discouraging condition. In addition, the presence of financing from the bank in 2021 also illustrated the trust from the banking world towards Moratelindo.

2022 Business Prospect

Prospects for the growth of the telecommunications industry in Indonesia is still very potential to be developed, especially for telecommunications facilities and infrastructure that is a prospect for the Company. Factors that support this include:

- Demographic conditions of Indonesia with the largest population fourth in the world with over 250 million inhabitants, and the fast-growing middle class, as well as the Indonesia economy which shows strong growth good and stable in recent years, is expected to continue to drive demand for telecommunications and data services.
- The total area of Indonesia is 1.9 million km² and the position is strategically located between two oceans and two continents, Indonesia can become a transit center for ICT traffic regional and global. Currently, the distribution of availability Internet services in Indonesia are still not evenly distributed. Development of the

serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) rapat-rapat daring maupun semakin meningkatnya bisnis e-commerce, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan internet. Perseroan berharap pertumbuhan layanan internet ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya bisnis e-commerce, popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan bandwidth.

- d. Terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan risiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan

backbone network (backbone) national optical fiber (Palapa Ring) that connects all major islands and all regencies/cities in Indonesia, Indonesia is one of the necessary steps accelerated to achieve this goal.

- c. Internet penetration is still relatively low compared to other countries, especially in the region Asia, while on the other hand people are increasingly open to the globalization of the digital lifestyle, which lead to a rapid increase in the use of smartphone devices at increasing prices affordable, high activity on social networks, the Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) and more increasing e-commerce business, which is expected will drive the growth of Internet mobile services . The company expects service growth This mobile Internet will continue along with increasing popularity of smartphones, tablets and other mobile devices that have Internet access, the faster the wireless network data transmission and increasing number of smart devices and Internet services affordable. This will also have an impact on increased bandwidth requirements.

- d. The occurrence of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020 in Indonesia resulted in changes to the pattern Indonesian society at large. One of change is an appeal from the government Indonesian people to work from home (*Work from Home/WFH*) for companies or study from home for schools. The appeal resulted in a request public about telecommunication and Internet services from home increased, thus making the Company have a strategy to develop the business specialized in telco and retail. In addition to supporting strategy, the Company also plans to increase the existing capacity and increase retail network in several new cities.

- e. With the advancement of telecommunications in Indonesia with the increasingly widespread optical cable network, especially in big cities, resulting in spatial planning city by the abundance of aerial optical cable network through the pillars to look unpretty and not neat, in addition to the placement of fiber optic cables with using poles causes the risk of cable damage to be higher because it does not there is an infrastructure that protects the cable. Therefore, the Company plans to build Cooperation with several big cities in Indonesia in the Provision of Public Service Infrastructure Passive Telecommunications for development projects operation, exploitation and supply U-ditch (channel of

pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE High-density polyethylene) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai emiten yang menerbitkan efek bersifat hutang di pasar modal sejak tahun 2017 hingga akhir 2021 Moratelindo diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Struktur GCG Perusahaan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Manajemen telah mengupayakan seluruh kelengkapan organ, khususnya pada organ yang mendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal yang berperan aktif dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan keterbukaan. Moratelindo sedang memperkuat kinerja internal audit untuk memastikan semua organisasi bekerja secara efisien dan transparan. Hasil temuan temuan audit ditindaklanjuti secara cepat untuk meningkatkan kinerja dan transparansi dalam menjalankan usaha.

reinforced concrete with the shape of cross section of the letter "U") and/or Macroduct (channel HDPE (High-density polyethylene) pipe and/or other media decided by the Company from time to time, which is the passive infrastructure shared by cable owners others with some commercial terms used for fiber optic cable placement by telecommunications operators so that it does not there are more aerial fiber optic cables through cellular telecommunications masts and towers will be used by telecommunications operators, and its supporting facilities and equipment.

With the huge potential in this industry, It is hoped that Indonesia will be able to transform from countries that depend on natural resources become innovation-based country, so that mastery of technology information and communication is very important.

Development on Good Corporate Governance Implementation

As an issuer of debt securities on the capital market from 2017 until the end of 2021, the Company has an obligation to implement corporate governance that complies with existing rules and regulations, especially in the capital market industry. The principles of Good Corporate Governance (GCG) consist of five main principles: accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company's GCG structure has been developed in accordance with applicable rules and regulations. The same goes for the processes or GCG mechanisms as a guide that provides clear definitions on the duties, roles and functions of each organ within the GCG structure. The Management has worked on all organs, especially the ones that support the Board of Directors, namely, the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit, the latter of which plays an active role in carrying out the functions of compliance and transparency. The Company is strengthening its performance of the internal audit unit to ensure all organizations run efficiently and transparently. The findings of audits are followed up on in a swift manner to boost efficiency and transparency in conducting business.

Selain itu, Moratelindo juga menerapkan kode etik kepada setiap karyawannya. Moratelindo juga menerapkan core value yaitu ICT-SIP (*Integrity, Change, Team Work, Service Excellence, Innovate, Passionate*) yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh karyawan untuk dapat bekerja bersama dalam tim.

Pemenuhan aspirasi pemegang saham diwujudkan oleh manajemen melalui tindak lanjut atas hasil keputusan pemegang saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di tahun 2021, Moratelindo melaksanakan RUPS dengan mekanisme sirkuler keputusan pemegang saham di luar RUPS yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang dilaksanakan melalui rapat. Terdapat 4 (empat) keputusan pemegang saham, yaitu Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2021; Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juni 2021 tentang penambahan klasifikasi saham serta peningkatan modal dasar; Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai RUPS Luar Biasa tanggal 23 September 2021 tentang persetujuan pengambilalihan 65% saham PT Indo Pratama Teleglobal; dan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 21 Desember 2021 tentang peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor. Seluruh keputusan pemegang saham telah dilaksanakan oleh manajemen.

In addition, the Company has also implemented a Code of Ethics for each of its employees. The Company has also implemented a set of core values, namely, ICT-SIP (*Integrity, Change, Teamwork, Service Excellence, Innovate, Passionate*) that is designed to inspire all employees to work together as a team.

The fulfilment of shareholders' aspirations was realized by the management by the follow-up to shareholders' resolutions as outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2021, Moratelindo implemented GMS through circular mechanism of shareholders' resolutions outside GMS that possesses the same legal power as the conventional GMS. There were four resolutions by the shareholders, namely Circular Decree of Shareholders in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders on May 20, 2021; Circular Decree of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 17, 2021 on additional stock classification and authorized capital increase; Circular Decree of Shareholders as Extraordinary GMS on September 23, 2021 on approval of the takeover of 65% of PT Indo Pratama Teleglobal's shares; and Circular Decree of Shareholders in Lieu of Extraordinary GMS on September 21, 2021 on increase in authorized capital and issued and paid-up capital. All shareholders' resolutions have been implemented by the management.

Penutup

Dengan keberhasilan Moratelindo dalam menghadapi tahun 2021 yang masih diliputi ketidakpastian, izinkan Direksi menyampaikan ucapan syukur, yang merupakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh pihak yang terlibat. Kepada Dewan Komisaris selaku representasi pemegang saham, Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu investor, pelanggan, pemasok, maupun mitra usaha lainnya, Direksi menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terbina dengan baik.

Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

Closing

With the success in facing 2021 that was still enveloped in uncertainty, allow the Board of Directors to offer our gratitude to the hard work and smart work of all parties involved. To the Board of Commissioners, as a representative of all shareholders, the Board of Directors is grateful for the provided directives, advice, and supervision. To all stakeholders; be it the investors, customers, suppliers, or other business partners, the Board of Directors is grateful for the well-established collaboration.

To all employees, please allow the Board of Directors to convey our appreciation for the dedication, especially amidst the COVID-19 pandemic. We hope this spirit of togetherness serves its function as a foundation for the Company to grow more in the future.

Jakarta, 12 April 2022

Atas nama Manajemen PT Mora Telematika Indonesia,
On Behalf of PT Mora Telematika Indonesia Management,



Galumbang Menak

Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

STATEMENTS FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY OF 2021 ANNUAL REPORT OF PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Mora Telematika Indonesia tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Laporan tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 April 2022

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT Mora Telematika Indonesia are presented in its entirety, and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Company's Annual Report.

This Annual Report also includes the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2021 and 2020.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 12, 2022

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Indra Nathan Kusnadi

Komisaris Utama
President Commissioner

Karim Panjaitan

Komisaris
Commissioner

Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Galumbang Menak

Direktur Utama
President Director

Direksi

Board of Directors

Jimmy Kadir

Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Profil Perusahaan

COMPANY PROFILE



03

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan 31 Desember 2021

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY DECEMBER 31, 2021

Nama Perusahaan Company Name	: PT Mora Telematika Indonesia
Kegiatan Usaha Utama Primary Business Activities	: • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Internet service provider • Jasa interkoneksi internet (NAP) • Telecommunications activities with cables • Internet service provider • Internet interconnection services (NAP)
Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 8 Agustus 2000 August 8, 2000
Status Hukum Legal Status	: Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability
Pemegang Saham Shareholders	: PT Candrakarya Multikreasi 45,71% PT Gema Lintas Benua 33,78% PT Smart Telecom 20,51%
Modal Dasar Authorized Capital	: Rp2.112.120.439.015,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	: Rp2.112.120.439.015,00
Kode BEI BEI Code	: MORA
Obligasi dan Sukuk Obligation and Sukuk	: 1. Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 3. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 4. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 5. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 1. Moratelindo Bonds I 2017 2. Moratelindo Shelf-Registration Sukuk Ijarah I Tranche I 2019 3. Moratelindo Shelf-Registration Sukuk Ijarah I Tranche II 2020 4. Moratelindo Shelf-Registration Sukuk Ijarah I Tranche III 2020 5. Moratelindo Shelf-Registration Sukuk Ijarah I Tranche IV 2021
Jaringan Usaha Business Network	: 5 entitas anak langsung dan 1 entitas anak tidak langsung Five direct subsidiaries and one indirect subsidiary
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	: Gedung Grha 9 Lantai 6 Jalan Panataran No. 9 Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta 10320 Indonesia
Telepon Telephone	: (+62 21) 3199 8600
Faksimili Facsimile	: (+62 21) 314 2882
Situs Website	: www.moratelindo.co.id
E-mail	: info@moratelindo.co.id
Kontak Investor Investor Contact	: corsec@moratelindo.co.id

Riwayat Singkat Moratelindo MORATELINDO BRIEF HISTORY

Dasar Hukum Pendirian

PT Mora Telematika Indonesia, disebut juga "Perusahaan" atau "Moratelindo", didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621. HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0039229. AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Legal Basis of Establishment

PT Mora Telematika Indonesia, also called "Company" or "Moratelindo", was founded based on Deed No. 30, August 8, 2000, drawn before Daniel Parganda Marpaung, S.H., a notary in Jakarta. The deed of establishment had been validated by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. C-25621. HT.01-01.TH.2000, December 21, 2000, announced in the State Gazette No. 58, July 20, 2007, Addendum No. 7264. The Company's Articles of Association have been amended in accordance with the Laws No. 40 of 2007 on Limited Liability, based on the Deed of Statement of Meeting Statement No. 5, February 11, 2008, drawn before Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The Deed had been approved by the Minister of Justice and Human Rights based on the Decree No. AHU-26803.AH.01.02 of 2008, May 21, 2008 and was registered on the Company List with No. AHU-0039229.AH.01.09 of 2008, May 21, 2008.



- Kantor Pusat PT Mora Telematika Indonesia.
Headquarter of PT Mora Telematika Indonesia.

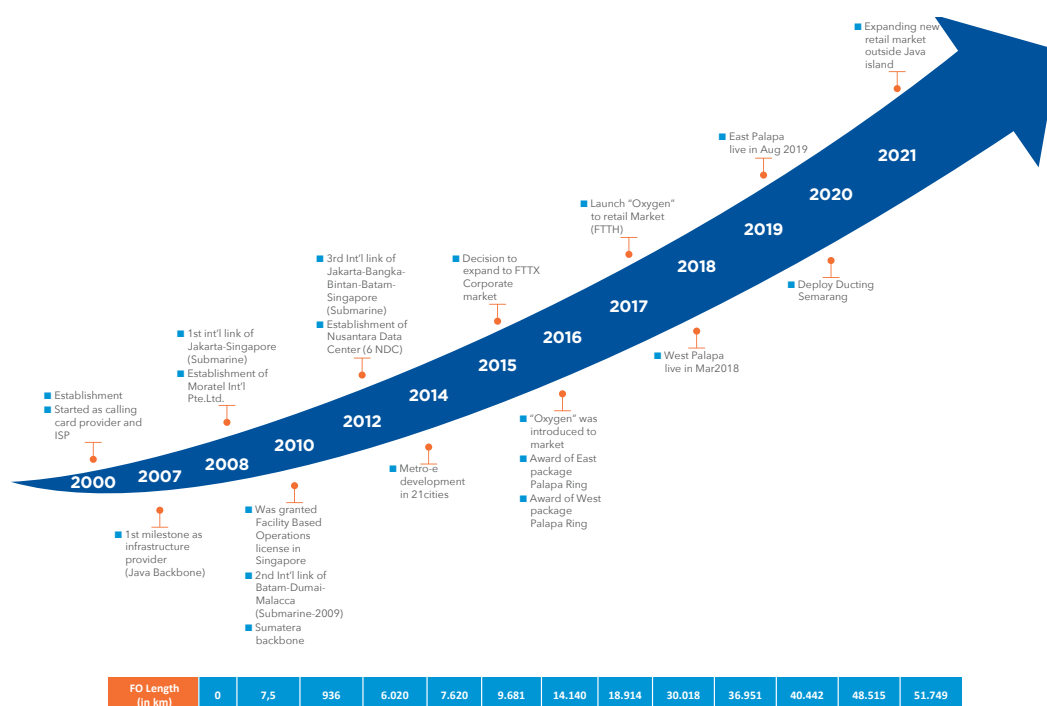
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan hingga 25 Februari 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 46, tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0040957.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 1 Maret 2022 ("Akta 46/2022").

The Company's Articles of Association had undergone some changes and the change was until February 25, 2022 as stated on the Deed of Statement of Resolutions of Shareholders on Amendment to Company's Articles of Association No. 46, February 25, 2022, drawn before Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta Administrative City, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Letter No. AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022, March 1, 2022 and has been accepted and registered in the Legal Entity Administration System in accordance with UUPT No. AHU-0040957.AH.01.11.TAHUN 2022, March 1, 2022 ("Deed 46/2022").

Kiprah di Bidang Telekomunikasi

Progress in Telecommunication Sector

Description	2021	2020	2019
Total Backbone (Km)	27.561	25.951	23.601
Submarine (Km)	12.689	12.673	11.328
Inland (Km)	14.872	13.278	12.273
Total Access/Lastmile (Km)	24.188	22.565	16.841
TOTAL (Km)	51.749	48.515	40.442
Capacity (G)	21.000	18.360	14.220
Homepass (FTTH)	413.025	244.205	111.589
Subs (FTTH)	111.968	72.619	44.858



Berdiri pada tahun 2000, Perusahaan memulai usahanya sebagai penyedia layanan internet dan kartu telepon. Kemudian, di tahun 2007, Perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa. Perusahaan memiliki keunggulan dalam infrastruktur jaringan serat optik dan industri telekomunikasi. Keunggulan ini mengantarkan Perusahaan terus berkembang hingga ke tingkat global.

Di tahun 2008 Perusahaan mendirikan perusahaan anak di Singapura serta membangun kabel laut Moratelindo International Cable-System One (MIC-1) yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura. Di tahun 2009, Perusahaan aktif mengembangkan jaringan internasional dengan membangun jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malaka). Di tahun 2010, seiring dengan kepercayaan yang tumbuh kuat kepada Perusahaan, Pemerintah Singapura memberikan lisensi *Facilities-Based Operations* (FBO) sebagai *gateway* untuk layanan *leased line* internasional. Di tahun yang sama, Perusahaan memperkuat jaringannya dengan membangun Sumatera Backbone yang merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk Submarine Cable dan Inland Cable yang melintasi sepanjang Pulau Sumatera.

Pemerintah Indonesia juga mempercayakan Perusahaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-izin dan lisensi usaha telekomunikasi seperti JARTUP (Jaringan Tetap Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), dan JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perusahaan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu Nusantara Internet Exchange (NIX).

Untuk mendukung kegiatan usaha, di tahun 2012 Moratelindo mendirikan 6 (enam) Nusantara Data Center (NDC) dengan standard design Tier 2, yang saling terintegrasi di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Seluruh NDC Moratelindo terhubung dengan ratusan PoP dan High Rise Building serta seluruh jaringan Moratelindo. Di tahun yang sama, Moratelindo juga mengembangkan jaringan internasional kabel serat optik bawah laut B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura) sebagai proyek ke-3 (kabel laut) untuk lingkup internasional, sehingga jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun hingga tahun 2012 mencapai sepanjang 7.620 km.

Di tahun 2014, Moratelindo memperkuat jaringannya melalui infrastruktur Metro-E yang dibangun di 21 kota, sehingga total jaringan yang dimiliki di tahun 2014 mencapai sepanjang 9.681 km. Pada tahun 2015 Moratelindo memutuskan untuk melakukan ekspansi pada fiber to the x (FTTX) untuk Corporate Market. Setahun kemudian, Perusahaan merambah pasar ritel FTTX melalui brand "oxygen.id".

Founded in 2000, the Company began its business as an internet service provider and calling card. Currently, the. In 2007, the Company transformed into an entity providing services of telecommunication infrastructure with the establishment of optical fiber cable network of 7.5 kilometer on the Island of Java. The Company excels in optical fiber network infrastructure and telecommunication industry. This excellence has helped the Company grow and emerge on global level.

In 2008, the Company opened an international office in Singapore and constructed the submarine cable Moratelindo International Cable-System One (MIC-1) that connects Jakarta and Singapore. In 2009, the Company actively developed international networks by constructing BDM (Batam-Dumai-Malaka) undersea optical fiber cable networks. In 2010, along with growing trust towards the Company, the Singaporean Government granted license of *Facilities-Based Operations* (FBO) as a *gateway* for the international leased line service. During the same year, the Company reinforced its networks by constructing the Sumatera Backbone, which was a construction of backbone networks of either for Submarine Cable and Inland Cable, going across Sumatera Island.

The Government of Indonesia also trusts the Company to support the development of national local infrastructure by permitting and licensing telecommunication businesses such as JARTUP (Jaringan Tetap Tertutup), NAP (Network Access Point), ISP (Internet Service Provider), and JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal) and the Company was entrusted with constructing and operating national databases, the Nusantara Internet Exchange (NIX).

To support business activities, in 2012 Moratelindo established 6 (six) Nusantara Data Center (NDC) with Tier 2 design standards, which integrated with each other in Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. All Moratelindo NDCs are connected with hundreds of PoPs and High Rise Buildings and all Moratelindo network. In the same year, Moratelindo too developing an international network of fiber optic cables underwater B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) as the 3rd project (sea cable) for international scope, so that a successful fiber optic cable network built until 2012 reaching 7,620 km.

In 2014, Moratelindo strengthened its network through the Metro-E infrastructure built in 21 city, so the total network owned in 2014 reached a length of 9,681 km. In 2015 Moratelindo decided to expand on fiber to the x (FTTX) for Corporate Market. a year later, the Company penetrated the FTTX retail market through brand "oxygen.id".

Pengalaman panjang sebagai perusahaan terpercaya telah menempatkan Perusahaan sebagai penyelenggara infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Berkat keunggulan yang dimiliki Perusahaan, Pemerintah Indonesia mempercayakan Perusahaan untuk menjalankan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat dengan menunjuk Perusahaan sebagai pemenang tender Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada 2016. Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara Pemerintah Pusat dengan anak Perusahaan PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Proyek Palapa Ring Paket Barat telah beroperasi sejak Maret 2018, sedangkan Palapa Ring Paket Timur beroperasi sejak Agustus 2019.

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perusahaan melalui KSO BPS-MORATELINDO yang merupakan joint operation dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 antara Perusahaan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa High-Density Polyethylene/HDPE) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan

The long list of experiences serving as a trusted enterprise has placed the Company as the leading telecommunication infrastructure provider in Indonesia. Due to the excellence that it possesses, the Indonesian Government has entrusted the Company with running strategic projects of priority national infrastructure by appointing it the winner of the tender on West and East Ring Palapa in 2016. The Palapa Ring projects were a joint venture between the Central Government and the subsidiaries of PT Palapa Ring Barat and PT Palapa Ring Timur Telematika, launched by the Ministry of Communication and Telecommunication of the Republic of Indonesia with a goal of constructing telecommunication infrastructure through the construction of optical fibers throughout Indonesia. The Palapa Ring projects integrated existing networks with new ones. Networks will be the basis for all telecommunication providers and users of telecommunication services in Indonesia and the networks will be integrated with existing networks all telecommunication providers already have in place. The West Package of the Palapa Ring project has been operational since March 2018 while the East Package were activated in August 2019.

After being successful in implementing the West and East Palapa Ring projects, both of which were of Central Government's prioritized national infrastructure strategic projects. This was achieved through the KSO BPS-Moratelindo, a joint operation formed on December 6, 2019 between the Company and PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)/BPS. The joint operation obtained the project following the results of partner selection process for the Collaborative Project of Public Service Provision of Passive Telecommunication Infrastructure, which held by BPS, the Company managed to earn the trust of the Government of Semarang to collaborate in the projects of constructing, operating, and procuring and provision of passive telecommunication infrastructure within the region of the City based on the Amendment to Agreement on Cooperation of Public Service Provision of Passive Telecommunication Infrastructure No. 25, September 14, 2020.

The Cooperation of Public Service Provision of Passive Telecommunication Infrastructure in Semarang is a joint project of constructing, operating, procurement, and provision of U-ditch (channels of reinforced concrete with a cross-section of the letter U) and/or Makroduct (channels of High-Density Polyethylene/HDPE pipes) that are used by all telecommunication operators to securely fit their optical fiber cables so as to eliminate the needs for aerial optical cables on poles and cellular communication towers, which will be used by all operators along with

oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064-meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola kerja sama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Di tahun 2021 Moratelindo terus melakukan ekspansi, di samping itu, Moratelindo juga mengembangkan strategi pertumbuhan non-organik melalui akuisisi saham terhadap PT Indo Pratama Teleglobal. Moratelindo berhasil mengembangkan Fiber To The Home (FTTH) ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang serta melanjutkan pengembangan FTTX ke kota Kupang dan Labuan Bajo. Moratelindo terus melakukan perluasan daerah Oxygen Home (internet rumah), di mana FTTH di akhir tahun 2021 telah mencapai 413.025 home pass dan 111.968 total pelanggan.

Per 31 Desember 2021 solusi FTTX Perusahaan menyediakan koneksi ke sekitar 216 gedung dan 6.700 koneksi ke entitas swasta dan pemerintah (yang bukan merupakan penyelenggara telekomunikasi).

Kiprah di Bidang Pasar Modal

Perusahaan berhasil mencatatkan efek pertamanya di pasar modal melalui Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1 Triliun. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp540 miliar dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan telah jatuh tempo dan telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2020, dan obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp460 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo pada 6 Desember 2022. Penawaran

other facilities and supporting instruments. With this project, KSO BPS-MORATELINDO would begin joint ducting work and construct cellular telecommunication towers with an estimated length of 506,064 meters for the U-ditch and/or Makroduct in street sections owned by the Government of Semarang based on the Attachment 1 of the Cooperation Agreement on Public Service Provision of Passive Telecommunication Infrastructure No. 30, January 31, 2020. The project began with priority street sections in Semarang, such as M.T. Haryono, Ahmad Yani, Pahlawan, Pandanaran, Bunderan Simpang Lima, Gajah Mada, Imam Bonjol, and Pemuda.

The cooperative relationship between the Government of Semarang and KSO BPS-MORATELINDO was based on the Cooperation Between Region and Third Party (KSDPK) in terms of provision of Public Service for a duration of 20 years, starting from the Commercial Operational Date. As a form of return on investment, KSO BPS-MORATELINDO will lease out Assets of Project to telecommunication operators for 20 years after the Commercial Operational Date.

In 2021 Moratelindo continues to expand, In addition, Moratelindo is also developing non-organic growth strategy through stock acquisition against PT Indo Pratama Teleglobal. Moratelindo did it developing Fiber To The Home (FTTH) to cities such as Jambi, Bandung, Semarang and continue FTTX development to the cities of Kupang and Labuan Bajo. Moratelindo continues to expand the Oxygen area Home (home internet), where is FTTH at the end of 2021 has reached 413,025 home passes and 111,968 in total customer.

As of December 31, 2021, the Company's FTTX solution provides connections to approximately 216 buildings and 6,700 connections to private and government entities (which are not telecommunications providers).

Progress in Capital Market

The Company managed to list its first stock on the capital market through Public Offering of Bonds I Moratelindo 2017 with a principal amount of bonds amounting to Rp1 trillion. These bonds consisted of 2 series: Series A, offered at Rp540 billion with a term of 3 years since the date of issuance and has matured and has been paid by the Company in 2020, and Series B, offered at Rp460 billion with a term of 5 years since the date of issuance and a due date of December 6, 2022. The Public Offering of Bonds I Moratelindo 2017 was listed on Indonesia Stock

Umum Obligasi I Moratelindo tahun 2017 ini dicatatkan di Bursa efek Indonesia. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan untuk lebih kurang 85% untuk investasi terhadap Backbone termasuk dengan perangkat terkait; lebih kurang 5% untuk investasi terhadap Proyek FTTX; dan lebih kurang 10% digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEFINDO.

Pada Juli 2019, Perusahaan mengumumkan keberhasilan dalam mencatatkan Penawaran umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo sebesar Rp3 triliun, di mana pada tahun 2019 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 dicatatkan dengan nilai Rp1 triliun. Sukuk Ijarah dengan nilai Rp1 triliun yang telah memperoleh hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah idA(sy) (Single A Syariah) dari PEFINDO mendapat tanggapan yang positif dari para investor. Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Moratelindo terdiri dari; (i) Seri A dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp347 miliar dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan (ii) Seri B dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp653 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi digunakan untuk lebih kurang 85% digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan lebih kurang 15% digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Di tahun 2020, Perusahaan kembali melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020. Untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 senilai Rp277 miliar yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A sebesar Rp191 miliar dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, dan Seri B sebesar Rp86 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Sedangkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 diterbitkan dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp389 miliar terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp333 miliar berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp56 miliar berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Exchange. After deducting the issuance costs, 85% of the funds obtained from the Offering were used for investing in the Backbone, including all related instruments; 5% for investing in the FTTX Project, and 10% for operational capital. With the Offering, the Company managed to obtain an assessment result of idA (Single A) from PT Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO.

In July 2019, the Company announced its achievement in listing Sustainable Public Offering of Sukuk Ijarah I Moratelindo with a value of Rp3 trillion, where the 2019 Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I was listed at a value of Rp1 trillion. The Rp1 trillion-worth of Sukuk Ijarah obtained a rating of idA(sy)/Single A Syariah from PEFINDO and it gained positive response from all investors. The Sukuk Ijarah Moratelindo issued consisted of (i) Series A at a Total of Remaining Ijarah Rewards of Rp347 billion, with a term of 3 years since the date of issuance and (ii) Series B at a Total of Remaining Ijarah Rewards of Rp653 billion, with a term of 5 years since the date of issuance. After deducting the issuance costs, 85% of all funds obtained from the Public Offering were used for investing in the Backbone, including instruments and passive and active infrastructures as well as for the construction of inland cable, ducting, and supporting instruments and active and passive infrastructures while 15% of the funds were used for operational capital.

In 2020, the Company again conducted Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II 2020 and Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III 2020. For the former, the value was Rp277 billion, consisting of Series A, offered at Rp191 billion with a term of 3 years since the date of issuance, and Series B, offered at Rp86 billion with a term of 5 years since the date of issuance. The latter was issued with remaining ijarah rewards of at least Rp389 billion, consisting of Series A with a total Remaining Ijarah Rewards of Rp333 billion with a term of 3 years since the date of emission and Series B with a total Remaining Ijarah Rewards of Rp56 billion with a term of 5 years since the date of issuance.

Di tahun 2021, Perusahaan terus memperkuat permodalannya dengan melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 bernilai sebesar Rp500 miliar yang terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp469,1 miliar, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp48,08 miliar per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan Seri B dengan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp30,9 miliar dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3,39 miliar per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Informasi tentang Perubahan Nama dan Status Hukum

Sejak resmi berdiri pada 8 Agustus 2000 hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dan merubah status hukumnya. Nama PT Mora Telematika Indonesia sejak awal berdiri hingga 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan.

In 2021, the Company continued to strengthen its capital by conducting Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 with a value of Rp500 billion, consisting of two series: Series A with a total Remaining Ijarah Rewards of Rp469.1 billion and an Installment for Ijarah Rewards of Rp48.08 billion per year on a term of three years since the date of issuance and Series B with a Total Remaining Ijarah Rewards of Rp30.9 billion and an Installment for Ijarah Rewards of Rp3.39 billion per year on a term of five years after the date of issuance.

Information on Name Change and Legal Status

Since first established on August 8, 2000 until December 31, 2021, the Company has never changed its name and its legal status. The name PT Mora Telematika Indonesia has never changed since the Company was first founded until December 31, 2021.

Jejak Langkah MILESTONES

2000

Perseroan resmi berdiri dan memulai usahanya sebagai penyedia layanan internet dan kartu telepon.

The Company is officially established and commenced operation as an Internet service and phone card provider.

2007

Bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa.

Transformed into a company of telecommunications infrastructure service provider by building a cable network of 7.5 km fiber optic in Java Island.

2008

Pembukaan kantor internasional di Singapura yaitu Moratel International Pte, Ltd. serta membangun kabel laut Moratelindo International Cable-System One (MIC-1) yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura.

The Company opened an international office in Singapore, namely Moratel International Pte. Ltd. as well as built the Moratelindo International Cable-System One (MIC-1) submarine cable that connects Jakarta with Singapore.

2010

Memperoleh lisens *Facilities-Based Operations* (FBO) dari Pemerintah Singapura untuk membangun jaringan kedua yang menghubungkan Batam-Dumai-Malaka (*submarine*). Membangun jaringan tulang punggung "Sumatera Backbone".

Obtained a license of Facilities-Based Operations (FBO) from the Singaporean Government to establish a second network linking Batam-Dumai-Malaka (*submarine*). Constructing the Sumatera Backbone.

2016

Dipercaya untuk menjalankan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Proyek Palapa Ring bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia.

The Company was entrusted with running the Government of Indonesia's priority national strategic infrastructure projects, namely the Palapa Ring West and Palapa Ring East projects. The Palapa Ring project aims to build telecommunication infrastructure in the form of fiber optic development throughout Indonesia.

2017

Melakukan Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 dengan kode "MORA" di Bursa efek Indonesia dengan nilai obligasi Rp1 triliun dengan peringkat idA (*Single A*) dari PEFINDO, yang terdiri dari obligasi Seri A senilai Rp540 miliar dan obligasi Seri B senilai Rp460 miliar.

The Company conducted a Public Offering of Moratelindo Debt Securities I Year 2017 with the code "MORA" on the Indonesia Stock Exchange with a bond value of Rp1 trillion with an idA (*Single A*) rating from PEFINDO, consisting of Series A bonds worth of Rp540 billion and Series B bonds worth of Rp460 billion.

2018

Proyek Palapa Ring Paket Barat beroperasi sesuai dengan Surat dari Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika No. SS 64/KOMINFO/BPPPTI ME.000/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018 tentang Penerimaan Fasilitas proyek Palapa Ring Paket Barat.

The Company operated The Palapa Ring West Package Project in accordance with the Letter from the Telecommunications and Informatics Funding Provision and Management Agency No. SS 64/KOMINFO/BPPPTI/ME.000/03/2018 dated March 2, 2018 regarding the receipt of the Palapa Ring West Package project facilities.

2019

- Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo senilai Rp3 triliun, di mana pada tahun 2019 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 dicatatkan dengan nilai Rp1 triliun dengan peringkat idA(sy) (*Single A Syariah*) dari PEFINDO.
- Proyek Palapa Ring Paket Timur beroperasi sesuai dengan Surat dari Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika No. SS 899/KOMINFO/BAKTI.31/KS.000/08/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 tentang Penerimaan Fasilitas Proyek Palapa Ring Paket Timur.
- Conducting Shelf Registration of Sukuk Shelf I Moratelindo worth of Rp3 trillion, where in 2019 Sukuk Shelf I Moratelindo Phase I Year 2019 listed with a value of Rp1 trillion with a rating of idA(sy) (*Single A Sharia*) from PEFINDO.
- East Package Palapa Ring Project operate in accordance with the Letter of Provision and Management Center Telecommunication Financing and Informatics No. SS 899/KOMINFO/BAKTI.31/KS.000/08/2019 dated August 29, 2019 on Admission Palapa Ring Package Project Facilities East.

2020

- Bersama PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dalam kerangka Kerja Sama Operasi (KSO) melaksanakan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi di wilayah Kota Semarang untuk masa periode kerja selama 20 (dua puluh) tahun. Proyek Pelayanan Publik Pembangunan Saluran Kabel Serat Optik dan Menara Telekomunikasi Selular Bersama Kota Semarang resmi dimulai setelah dilaksanakan peletakan batu pertama (*Groundbreaking Ceremony*) pada 16 September 2020.
- Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020.
- The Company, together with PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) within the framework of Joint Operations (KSO), carried out the Cooperation Project for the Provision of Public Services for Passive Telecommunications Infrastructure in Semarang City for a work period of 20 (twenty) years. The Public Service Project for the Construction of Fiber Optic Cable Channel and Joint Cellular Telecommunication Tower in Semarang officially began after the groundbreaking ceremony was held on September 16, 2020.
- The Company conducted a Shelf Registration for the Sukuk Shelf I Moratelindo 2nd Program Year 2020 and Shelf Registration for the Sukuk Shelf I Moratelindo 3rd Program Year 2020.

2021

- Mengembangkan pasar ritel baru FTTH/FTTX diluar wilayah Jawa.
- Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021.
- Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan melalui Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020. Salah satu poinnya adalah keputusan pemegang saham untuk membagikan dividen atas hasil usaha tahun buku 2020 serta dividen atas sebagian laba ditahan untuk tahun buku 2019 dengan total dividen saham yang dibagikan kepada pemegang saham PT GLB dan PT CKM sebesar Rp1.155.293.540.000.
- Perseroan menerbitkan saham Seri C sebanyak 151.771 lembar saham yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Smart Telecom (Anak Perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk) sehingga mengakibatkan PT Smart Telecom masuk sebagai pemegang saham baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 20,51%.
- Perseroan melakukan akuisisi 145.730 lembar saham PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT") atau 65% dari total kepemilikan IPT. Akuisisi ini dalam rangka meningkatkan ekspansi bisnis dan yang akan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.
- Perseroan melakukan Peningkatan Modal Dasar, Disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp658.750.971.015 menjadi Rp2.112.120.439.015 dimana atas peningkatan modal tersebut diambil bagian oleh Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional.

- Developed new FTTH/FTTX new retail market outside Java
- Conducted Shelf Registration for Sukuk Shelf I Moratelindo IV Program Year 2021.
- Held an Annual GMS through the Circular Resolution of Shareholders in Place of 2020 Annual GMS. One of the resolutions was to distribute dividends from 2020 and 2019 retained earnings with a total share dividends distributed to shareholders of PT GLB and PT CKM of Rp1,155,293,540,000.
- Issued 151,771 Series C shares, taken entirely by PT Smart Telecom (Subsidiary of PT Smartfren Telecom Tbk), making PT Smart Telecom the Company's new shareholder with an ownership percentage of 20.51%.
- Acquired 145,730 shares of PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) or 65% of total ownership of IPT. This acquisition was carried out to increase business expansion, which will have positive impacts on the Company's performance and financial condition.
- Increased Authorized, Issued, and Paid-up Capital from Rp658,750,971,015 to Rp2,112,120,439,015, parts of which were taken by Company's Shareholders proportionally.

VISI VISION

Secara aktif melakukan perubahan terhadap negara untuk menjadi masyarakat digital terkemuka

Actively contribute to transform the country into a leading digital society

MISI MISSION

Mengembangkan infrastruktur telekomunikasi terbaik di kelasnya dan memimpin ekosistem layanan telekomunikasi dan digital

To develop the best-in class national telecom infrastructure, leading telecommunication services and digital ecosystem



Bidang Usaha serta Produk dan Jasa BUSINESS LINES AND PRODUCTS AND SERVICES

Kegiatan Usaha Perusahaan Menurut Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 46/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil, Konstruksi Khusus, Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Real Estate, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang usaha Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI 42206).
2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212).
3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (Kode KBLI 46523).
4. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi, dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal

Company's Business Activities According to the Latest Articles of Association and Operational Business Lines

In line with article 3 of the Company's Articles of Association, last validated through the Deed 46/2022, the scope of primary activities of the Company is running a business in the sectors of the construction of civil buildings, special construction, major commerce, non-car and motorcycle, telecommunication, information service activities, real estate, activities of central office and management consultancy, activities of administration office, activities of office support, and other business support activities.

To accomplish the purposes and objectives mentioned above, the Company runs the following business lines:

1. The Construction of Telecommunication Center, including activities of constructing, maintenance, and repairing of the building of telecommunication center and its instruments, such as central telephony building, telegraph, broadcasting towers, microwave radar receiver, small terrain station, and satellite station. This also covers networks of local and long-distance telecommunication pipes (KLBI Code: 42206).
2. Telecommunication Installation, including telecommunication installation on buildings, residential or otherwise, such as installation of antennas; activities of installation, maintenance, and repairing of telecommunication installation on the telephone/telegraph center, microwave broadcasting station, small terrain station/satellite station and the likes. This also covers installation of telecommunication transmission and network (KLBI Code: 43212).
3. Major Commerce of Telecommunication Instruments, including major commercial business of telecommunication instruments such as telephony and communication equipment (KLBI Code: 46523).
4. Activities of Cable Telecommunication, including activities of operating, maintenance, or provision of access in facilities intended to send voice, data, text, sound, and video through infrastructure of telecommunication cables, such as the operation and maintenance of modulation and delivery facilities to accommodate point-to-point communication on land channels, microwave or data channel and satellite connectivity and the operation of cable distribution system (to distribute television signal and data) as well as telegraph equipment and other non-

televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Di mana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 68111).

vocal communications that utilize individual facilities. The transmission facilities that conduct these activities can work based on a single technology or a combination of various technologies. This includes purchase of access and capacity network from the owner and operator of the network and provision of telecommunication services that utilize this capacity for business or domestic purposes and provision of internet access through cable infrastructure operators. The procurement of networks for fixed telecommunication is intended to provide public telecommunication and rental circuit. This includes data communication connectivity whose delivery is conducted in packages through a center or through other networks such as PSTN (Public Switched Telephone Network). This also includes the procurement of terrestrial networks that serve particular mobile customers, such as radio trunking services and public radio call services (KLBI Code: 68111).

5. Penyedia Layanan Internet, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921).
6. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet telepon yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923).
7. Jasa Interkoneksi Internet (NAP), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau *routing* bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924).
8. Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924 (Kode KBLI 61929).
9. Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan
5. Internet Service Provider, including a business service that is offered by a company to the customers to access the internet, also known as the gateway into the internet (KLBI Code: 61921).
6. Telephony Internet Service for Public Utility (ITKP), including a service business to transmit calls through an Internet Protocol (IP) network. This activity provides a telephony internet service of commercial nature, which is connected to a telecommunication network (KLBI Code: 61923).
7. Internet Interconnection Service (NAP), including activities of access and/or routing procurement for internet service providers. In procuring access for the internet service providers, the internet interconnection service providers can provide a network for the internet transmission. The internet interconnection service provider must be linked to an interconnection. The interconnection service provider regulates the traffic for the provision of internet access services (KLBI Code: 61924).
8. Other Multimedia Services, including other multimedia services that do not fall under categories 61921 through 61924 (KLBI Code: 61929).
9. Data Management Activities, including the activities of processing and tabulating all forms of data. This

ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*) (Kode KBLI 63111).

10. Aktivitas Hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan YBDI, dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan *Cloud Computing* seperti DropBox, Google Drive, dan 4shared (Kode KBLI 63112).

11. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian, ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:

- a. Pemesanan dan/atau
- b. Pembayaran dan/atau
- c. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology* (FinTech), dan *on-demand online services* (Kode KBLI 63122).

12. *Real Estate* yang dimiliki Sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan, dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau

activity may cover the entire stages of processing and writing of reports from the data provided by the customers or parts of the processing stage. This includes the division of mainframe facilities to the client and provision of data entry and the management of big data (KBLI Code: 63111).

10. Hosting and YBDI Activities, including a service business relating to provision of hosting infrastructure, data processing services and YBDI activities, and the specialization of hosting, such as web-hosting, streaming services, and hosting application. This covers Cloud Computing such as DropBox, Google Drive, and 4shared (KBLI Code: 63112).

11. Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes, including the operation of websites for commercial purposes, which utilize search engine to generate and maintain large database of the address and the content of the internet in a format that is easy to look up. This includes the operation of websites that work as a portal into the internet like media websites that provide frequently updated contents, either directly or indirectly, for commercial purposes. This also includes the operation of digital platform and/or websites/web portals that conduct electronic transactions in the form of facilitation and/or mediation of transferral of goods and/or service ownership and/or other services through the internet and/or electronic devices and/or other electronic methods, which are conducted for commercial (profit) purposes that cover one of, part of, or the entirety of the following activities:

- a. Order and/or
- b. Payment and/or
- c. Delivery of activities; included in this category are websites/web portals and/or digital platforms of commercial purposes, which are the applications used in facilitating and/or mediating electronic transaction services including but not limited to marketplace, digital advertising, financial technology (FinTech), and on-demand online services (KBLI Code: 63122).

12. Privately Owned or Rented Real Estate, including a business of purchasing, selling, renting, and operating real estate, either privately owned or rented one, such as apartment buildings, residential buildings, and non-residential buildings (e.g. exhibition center, private storage facilities, malls, shopping centers, and the likes) as well as housing provision and flats or apartments, fully furnished or otherwise, for permanent dwelling,

tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan, dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111).

either on monthly or yearly basis. This covers activities of land selling, development of buildings to be privately operated (e.g. to rent out the rooms in the buildings), division of real estate into lots without land development, and the operation of residential areas for mobile homes (KLBI Code: 68111).

13. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; dan perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomi dan ekonomi agrikultur pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain (Kode KBLI 70209).

13. Other Management Consultancy Activities, including provisions of advisory supports, business guidance and operational, and other organizational and managerial issues, such as strategic and organizational mapping; finance-related decisions; marketing objectives and policies; planning, practices, and policies on human resources; and schedule-making and control over production. The provision of this service may cover advisory supports, guidance and operational of various managerial functions, consultation on the management of agronomic processes and agricultural economy in the sector of agriculture and the likes, designs of accounting methods and procedures, programs of expense accounting, procedures for budgetary monitoring, advisory supports and business aids and community services in planning, organizing, efficiency and monitoring, management information, and others (KLBI Code: 70209).

14. Aktivitas *Call Centre*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *Inbound Call Centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *Outbond Call Centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

14. Call Center Activities, including service business of call center such as Inbound Call Center for responding to calls from customers by human operator, automatic call distribution, computer and telephone integration, interactive voice response system or similar methods to accepts requests, provision of informative products relating to customer support requests or the channeling of customer complaints and Outbound Call Center for the selling or marketing of goods or services to potential customers using similar methods and conducting market research or polls and similar activities on customers (KLBI Code: 82200).

Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan

Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing produk dan/atau jasa yang ditawarkan:

1. Konektivitas (*Connectivity*)

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya baik lokal maupun internasional yang dipergunakan oleh Perusahaan Telco, ISP maupun Pelanggan Enterprise.

2. Jasa Internet (*Internet Services*)

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global dengan jalur koneksi yang bersifat Dedicated yang dipergunakan oleh pelanggan ISP, Pelanggan Enterprise maupun yang bersifat Broadband (Burstable) untuk pelanggan Enterprise dan Retail.

3. Jasa Pusat Data (*Data Center*)

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP maupun Enterprise untuk sewa Rack dan fasilitas-fasilitas di Data Center.

4. Solusi Nilai Tambah (*Value Added Solution*)

Suatu layanan Nilai Tambah yang menjadi bagian Total Solusi yang disiapkan Moratelindo kepada seluruh pelanggan-pelanggan.

5. Infrastruktur (*Infrastructure*)

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Moratelindo untuk dapat dimanfaatkan oleh Pelanggan-pelanggan baik Operator Telco dan ISP dengan skema sewa fasilitas infrastruktur, sehingga dapat menghemat biaya investasi dan waktu dalam penggunaan fasilitas infrastruktur tersebut.

Provided Goods and/or Services

The following is a general description for each product and/or services offered:

1. Connectivity

A network capacity rental service (link lease) which connects one node to another destination node both local and international used by Telco Companies, ISPs and Enterprise Customers.

2. Internet Services (*Internet Services*)

A connection service from customers to the Global Internet with a dedicated connection line used by ISP customers, Enterprise Customers as well as Broadband (Burstable) for Enterprise and Retail customers.

3. Data Center Services (*Data Center*)

A Data Center service available in 6 Data Centers Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, and Denpasar) for the needs of Telco Companies, ISPs, and Enterprises to rent Racks and facilities in the Data Center.

4. Value Added Solution

A Value Added service that is part of Total Solutions prepared by Moratelindo for all customers.

5. Infrastructure

A service with good infrastructure utilization owned or built by Moratelindo to be used by customers both Telco Operators and ISPs with facility rental schemes infrastructure, thereby saving investment costs and time in the use of the infrastructure facilities.

Konektivitas Connectivity	• International Private Leased Circuit (IPLC) • Domestic Leased Circuit (DLC) - MetroM • IP-VPN/MPLS • Cloud Connectivity - "Express Connect" (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure) • Interconnection
Jasa Internet Internet Services	• IP Transit Global • IP Transit Domestic • IP Transit MIX • Moratel Internet Exchange (Mora-IXP) • OXYGEN.ID - Broadband Internet Access (Retail, Corporate & Cluster/Apartment)
Jasa Pusat Data Data Center	• Colocation • VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant and DC Consultant and DC Construction]] • Cloud and Hosting [VPS (Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud]]
Solusi Nilai Tambah Value Added Solution	• Managed Service (WiFi, Router Managed Service, Firewall Managed Service) • Engineering on Site (EoS) • IPTV/OTT Service for Media and Hospitality • Fixed Telephony Service for Retail & Corporate (partnership with SmartFren, OFON and Telkom), Cloud Talk/Hosted Cloud PBX, Hosted/Cloud Call Center • OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Access Manager • Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail Market and QRIS • Cloud Game (Game Content) • SD-WAN (Software Define - Wide Area Network) Services
Infrastruktur Infrastructure	• Pole Rental • Ducting Rental • Tower Co-Location for BTS Hotel

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) Nusantara Data Center (NDC) dengan standard design Tier 2, yang saling terintegrasi di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan 385 PoP dan 216 Gedung serta seluruh jaringan Perseroan.

The Company's business activities are supported by 6 (six) Nusantara Data Center (NDC) with Tier design standard 2, which are mutually integrated in Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. All Company NDCs are connected with 385 PoPs and 216 Building and all Company networks.

Wilayah Operasional AREAS OF OPERATION

Total Network Length	51.749 Km	Poin of Presence	385	FTTH Utilition Rate	27%
		Homes Passed	413.025	Datacenter Utilition Rate	70%
		Data Center	6	Fiber Optic	100%



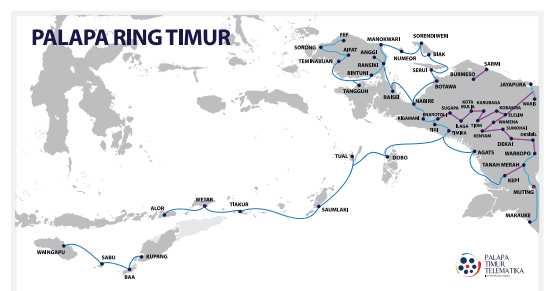
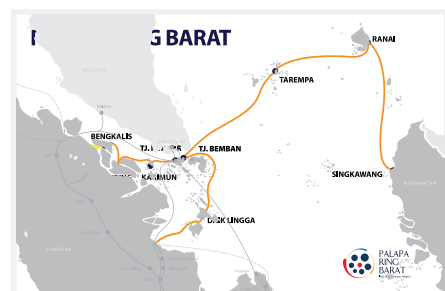
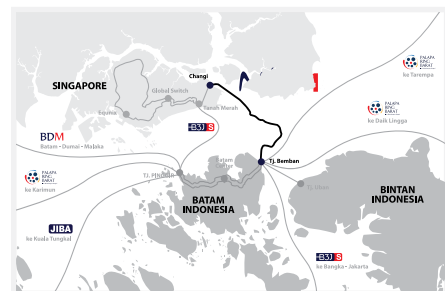
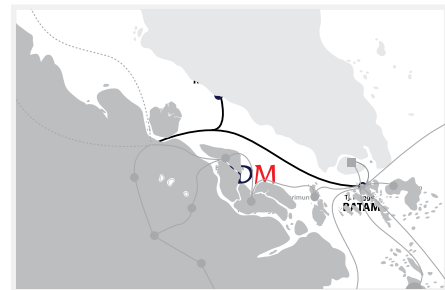
LEGEND

	Moratelindio Submarine Cable		State Capital
	Moratelindio Inland Cable		Point of Presence (PoP)
	Palapa Ring Barat Submarine Cable		Inland Amplifier (ILA)
	Palapa Ring Barat Inland Cable		Nusantara Data Center (NDC)
	Palapa Timur Telematika Submarine Cable		Jambi - Batam Cable-system
	Palapa Timur Telematika Inland Cable		Jakarta - Bangka - Batam - Bintan - Singapore
	Radio Connection		Moratelindo International Cable-system One
			Batam - Dumai - Malaka

Total
Subscriber | **111.968**

Network
Data
Capacity | **21.000 G**

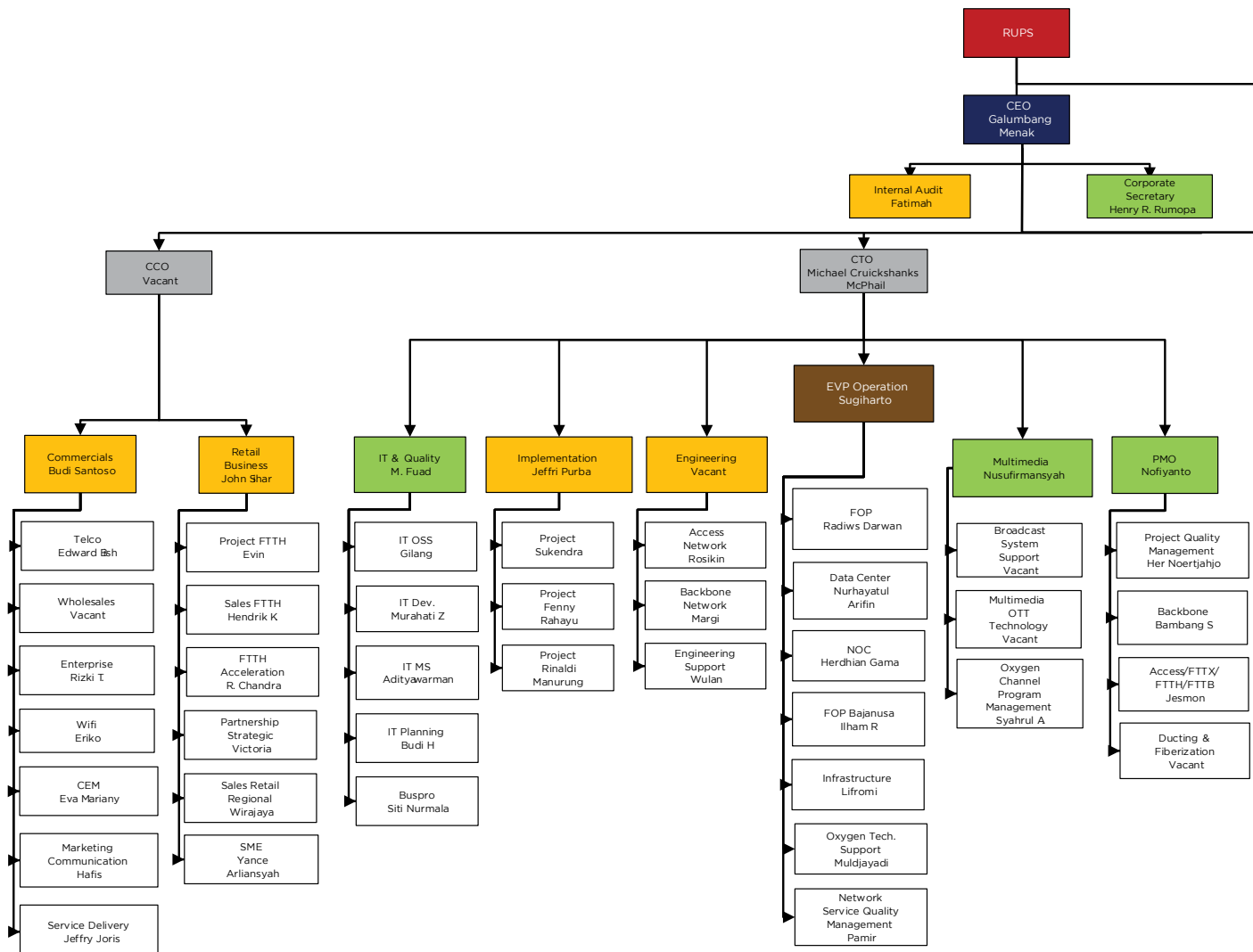
Average
Network
Age | **3 Years**

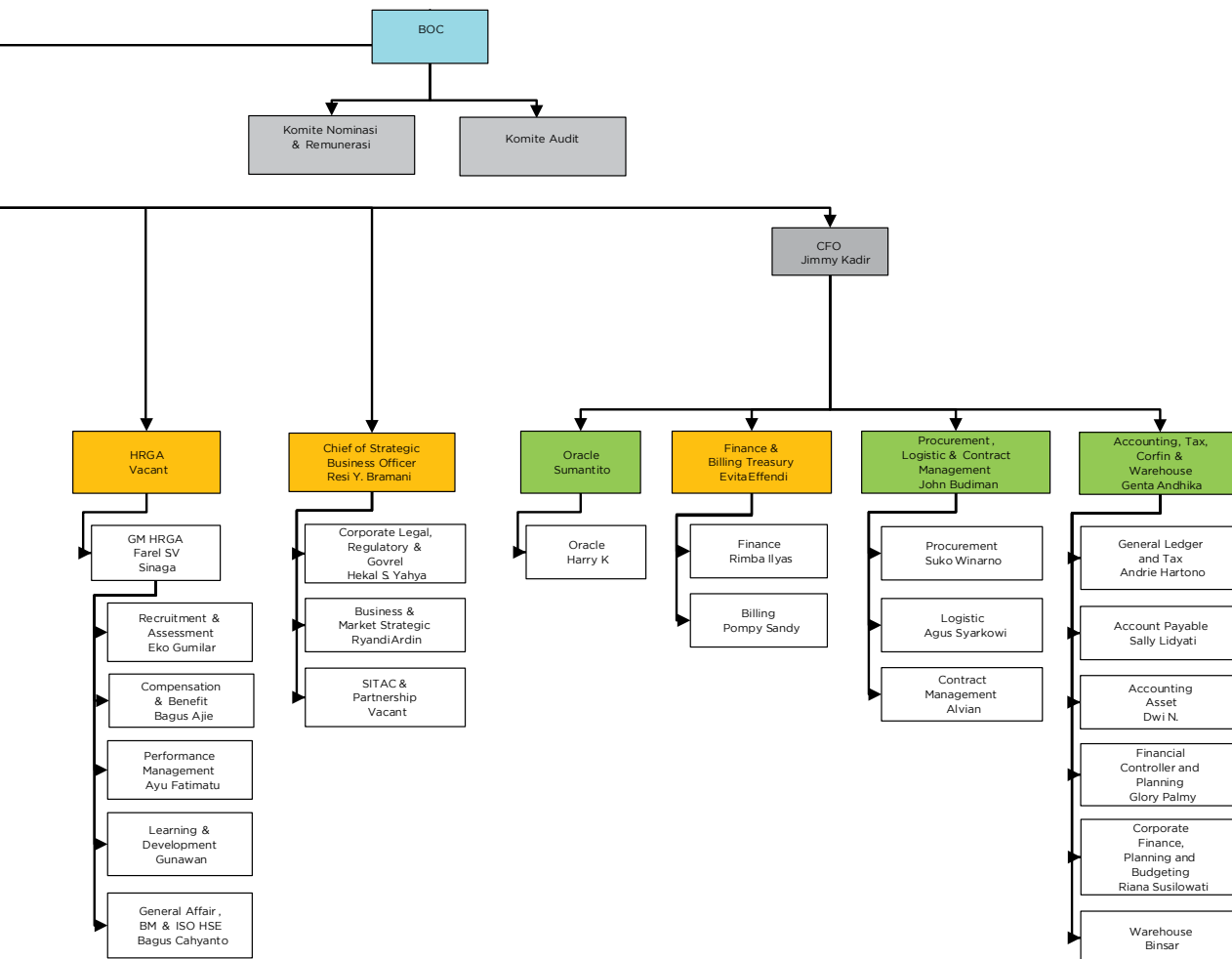


	2019	2020	2021
Total Backbone (Km)	23.601	25.951	27.561
Submarine (Km)	11.328	12.673	12.689
Inland (Km)	12.273	13.278	14.872
Total Access	16.841	22.565	24.188
TOTAL (Km)	40.442	48.515	51.749
Capacity (G)	14.220	18.360	21.000

Struktur Organisasi

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





Keanggotaan Asosiasi ASSOCIATION MEMBERSHIP

Untuk memperkuat jaringan bisnisnya, Perusahaan telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi berskala nasional, diantaranya adalah:

1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII);
2. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL);
3. Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI);
4. Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA); dan
5. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Perusahaan tidak memiliki keanggotaan asosiasi pada skala internasional.

To strengthen its business networks, the Company has several association memberships of national scale, including:

1. The Association of Indonesian Internet Service Providers (APJII);
2. The Association of Telecommunication Network Providers (APJATEL);
3. The Association of Indonesian Submarine Communication Cable System (ASKALSI);
4. Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA); and
5. Indonesia Chamber of Commerce and Industry (KADIN).

The Company has no association membership of international scale.



- Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang sehubungan dengan Proyek Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi di Kota Semarang.
The event of the signing of the Cooperation Agreement with the Semarang City Government in connection with the Project for Provision of Passive Telecommunication Infrastructure Public Services in the City of Semarang.

Informasi tentang Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris

Di tahun 2021, pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan pergantian Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sama.

Pada 17 Maret 2022, Dewan Komisaris diangkat kembali untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima (ke-5) dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Commissioners

In 2021, the shareholders decided not to change the Board of Commissioners. Therefore, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 and 31 December 2021 is the same.

On March 17, 2022, the Board of Commissioners was reappointed for a period from the date of appointment to the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the General Meeting Shareholders to terminate Board of Commissioners at any time before their term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Indra Nathan Kusnadi	17 Maret 2022-16 Maret 2027 March 17, 2022-March 16, 2027
Komisaris Board of Commissioners	Karim Panjaitan	17 Maret 2022-16 Maret 2027 March 17, 2022-March 16, 2027
Komisaris Independen Independent Commissioner	Kanaka Puradiredja	17 Maret 2022-16 Maret 2027 March 17, 2022-March 16, 2027 (Sebelumnya tidak pernah menjabat pada jajaran Dewan Komisaris/Never serves as a member of the Board of Commissioners)

Direksi

Pada 17 Maret 2022, anggota Direksi diangkat kembali untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima (ke-5) dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Directors

On March 17, 2022, members of the Board of Directors were reappointed for a period from the date of appointment to the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the General Meeting Shareholders to terminate members of the Board of Directors at any time before their term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Galumbang Menak	17 Maret 2022 - 16 Maret 2027 March 17, 2022 - March 16, 2027
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Jimmy Kadir	17 Maret 2022 - 16 Maret 2027 March 17, 2022 - March 16, 2027

Profil Dewan Komisaris

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Indra Nathan Kusnadi

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2027
Term of Office: March 17, 2022 - March 16, 2027



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 45 tahun
Kelahiran Jakarta, 3 September 1976

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan sejak 15 April 2016, berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 8 tanggal 15 April 2016. Melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 16 Maret 2022, beliau kembali diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0053960.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 ("Akta 34/2022") untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan tersebut.

Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum jurusan Litigasi Hukum dan Hukum Bisnis dari Universitas Trisakti, Jakarta (1999), dan Magister (S2) Hukum jurusan Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia, Depok (2012).

Riwayat Profesi

Memulai karirnya sebagai Paralegal pada Albert Hasibuan & Rekan (1998-1999). Beliau kemudian bergabung dengan Kusnandar & Co sebagai pengacara, dengan keahlian di bidang General Corporate dan Commercial Law, Banking dan Finance, Mergers, Acquisitions dan Intellectual Property Right (1999-2004). Pada oktober 2004 beliau bergabung dengan Adnan Buyung nasution & Partners dengan keahlian di bidang Civil dan Criminal Litigation, Arbitration, General Corporate, Commercial Law, Banking dan Finance, Mining, Intellectual Property Right dan Labor Dispute sebagai Lawyer (2004-2008), Senior Lawyers (2008-2013), Associate (Rekan) 2014-2015 dan terakhir sebagai Equity Partner (2015 s.d sekarang). Beliau menjadi Komisaris Utama Perusahaan pada 2016.

Rangkap Jabatan

Di Luar Perusahaan: Komisaris PT Candrakarya Multikreasi (pemegang saham Perusahaan) (2016-sekarang), Komisaris Utama PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), Komisaris Utama PT Oxygen Multimedia Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2017-sekarang), Komisaris PT Palapa Ring Barat (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), dan Anggota Komite Audit PT Bali Towerindo Sentra Tbk (2013-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2017-2022).

Personal Data

Indonesian citizen
45 years old
Born in Jakarta, September 3, 1976

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

He has served as the Company's President Commissioner for the first time since April 15, 2016, based on the Deed of Statement of Mutual Agreement to All Shareholders No. 8 dated April 15, 2016. Through a Circular Resolution of Shareholders dated March 16, 2022, he was reappointed President Commissioner based on Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 34, March 17, 2022, made before Aulia Taufani, S.H., a Notary in the South Jakarta Administrative City, accepted and recorded in the database of administration system of Legal Entity based on the Receipt of Notification on Company's Data Amendment AHU-AH.01.03-0182075, March 18, 2022, registered on company list in accordance with UUPT with AHU-0053960.AH.01.11.Tahun 2022, March 18, 2022 ("Deed 34/2022") for a term of office of five year since the effective date of the resolution.

Education

Bachelor of Law in Legal Practices and Business Law from Trisakti University (1999) and Master of Law in Business Law from the University of Indonesia, Depok (2012).

Professional History

Started his career as a Paralegal with Albert Hasibuan & Partners (1998-1999). He then joined Kusnandar & Co as attorney, with expertise in General Corporate and Commercial Law, Banking and Finance, Mergers, Acquisitions and Intellectual Property Right (1999-2004). In October 2004 he joined Adnan Buyung nasution & Partners with expertise in Civil and Criminal Litigation, Arbitration, General Corporate, Commercial Law, Banking and Finance, Mining, Intellectual Property Right and Labor Dispute as Lawyer (2004-2008), Senior Lawyers (2008-2013), Associate (Partner) 2014-2015 and most recently as an Equity Partner (2015 to present). He became Started his career as a Paralegal with Albert Hasibuan & Partners (1998-1999). He then joined Kusnandar & Co as attorney, with expertise in General Corporate and Commercial Law, Banking and Finance, Mergers, Acquisitions and Intellectual Property Right (1999-2004). In October 2004 he joined Adnan Buyung nasution & Partners with expertise in Civil and Criminal Litigation, Arbitration, General Corporate, Commercial Law, Banking and Finance, Mining, Intellectual Property Right and Labor Dispute as Lawyer (2004-2008), Senior Lawyers (2008-2013), Associate (Partner) 2014-2015 and most recently as an Equity Partner (2015 to present). He became President Commissioner of the Company in 2016.

Share Ownership in Moratelindo

Outside the Company: The Commissioner of PT Candrakarya Multikreasi (a shareholder of the Company) (2016-present), the President Commissioner of PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (a subsidiary of the Company) (2016-present), the President Commissioner of PT Oxygen Multimedia Indonesia (a subsidiary of the Company) (2017-present), a Commissioner of PT Palapa Ring Barat (a subsidiary of the Company) (2016-present), and a member of the Committee of Audit of PT Bali Towerindo Sentra Tbk (2013-present).

Within the Company: Member of the Nomination and Remuneration Committee (2017-2022).

Karim Panjaitan

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2027
Term of Office: March 17, 2022 - March 16, 2027



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 65 tahun
Kelahiran Taput, 7 September 1957

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 10 April 2015, berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 10 April 2015, dengan meneruskan masa jabatan Komisaris yang digantikan. Melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 16 Maret 2022, beliau kembali diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta 34/2022 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan tersebut.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia, Jakarta (1989), Magister (S2) Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (2005).

Riwayat Profesi

Memulai karirnya sebagai Section Chief of Telecommunication Rates pada Ditjen Postel-Kementerian Perhubungan (1992-2001) dan sebagai Head of Sub-Directorate of Telecommunication Rates pada Ditjen Postel-Kominfo (2002-2008), Head of Sub-Directorate of Universal Tariffs and Obligations pada Ditjen Postel-Kominfo (2008-2011), dan Head of Sub-Directorate of Universal Postal Service pada Ditjen Postel-Kominfo (2011-2013).

Rangkap Jabatan

Di Luar Perusahaan: Komisaris PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), Komisaris PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), dan Direktur PT Petro Niaga Sukses (2020-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: Tidak ada.

Personal Data

Indonesian citizen
65 years old
Born in Taput, September 7, 1957

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

Took office first as the Corporate Commissioner since April 10, 2015 based on the Deed of Statement of Agreement of Shareholders No. 3 on April 10, 2015, continuing the term of office of the previous Commissioner. Through the Circular Decision of the Shareholders on October 18, 2017, Panjaitan was once again appointed a Commissioner based on the Deed of Statement of Joint Agreement of Shareholders outside the GMS No. 37 on October 18, 2017 for a term of office of five years since the effective date of the Resolution.

Education

Bachelor of Economy from the University of Wiraswasta of Indonesia, Jakarta (1989); Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (2005).

Professional History

Panjaitan began his career as the Section Chief of Telecommunication Rates at the General Directorate of Postel-Ministry of Communication (1992-2001) and as the Head of the Sub-Directorate of Telecommunication Rates at the General Directorate of Postel-Kominfo (2002-2008), the Head of Sub-Directorate of Universal Tariffs and Obligations at the General Directorate of Postel-Kominfo (2008-2011), and the Head of Sub-Directorate of Universal Postal Service at the General Directorate Postel-Kominfo (2011-2013).

Share Ownership in Moratelindo

Outside the Company: Outside the Company: The Commissioner of PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (a subsidiary of the Company) (2016-present) and the Director of PT Petro Niaga Sukses (2020-present).

Within the Company: None.



Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2027, periode kedua
Term of Office: March 17, 2022 - March 16, 2027, Second term

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 77 tahun
Kelahiran Bandung, 8 Desember 1944

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pengangkatan pertama kali sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 18 Oktober 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 18 Oktober 2017, pada 17 Maret 2022 diangkat kembali berdasarkan akta 34/2022.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung (1971).

Riwayat Profesi

Memulai karirnya pada tahun 1971 sebagai auditor Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan hingga tahun 1974, Auditor dan mendapat pelatihan di Peat Marwick Mitchell & Co Melbourne (1975-1977), Board Member KPMG Asia Pacific (1978-1999), Senior Partner Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (2002 - 2010), Anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia (2004 - 2005), Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004 - 2010), Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (2005 - 2009), Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia (2010 - 2016), Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia - Sektor (2016 - 2019), Ketua Tim Perumus Kebijakan Korporat Governance Nasional Indonesia (2017 - 2019).

Rangkap Jabatan

Di Luar Perusahaan: Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA) (2017-sekarang), Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance, Ketua Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) (2013-sekarang), Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (2016-sekarang), dan Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi Indonesia (2021-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: Ketua Komite Audit (2018-2023) dan Ketua Nominasi dan Remunerasi (2017-2022).

*) Surat pernyataan independen dari Komisaris Independen, Kanaka Puradiredja, dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagian pembahasan Komisaris Independen.

*) The letter of independent statement from the Independent Commissioner, Kanaka Puradiredja, can be observed in the chapter of Good Corporate Governance, under the section of Independent Commissioner's discussion.

Personal Data

Indonesian citizen
77 years old
Born in Bandung, December 8, 1944

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointment as the Corporate Independent Commissioner was October 28, 2017 based on the Deed of Joint Statement of Shareholders outside the General Meeting of the Shareholders No. 37, October 18, 2017. Reappointed on March 17, 2022, pursuant to Deed 34/2022.

Education

Bachelor of Economy in Accounting from the University of Padjajaran, Bandung (1971).

Professional History

Started his career in 1971 as an auditor of the Directorate General State Finance Supervision, Ministry of Finance up to year 1974, Auditor and received training at Peat Marwick Mitchell & Co Melbourne (1975-1977), Board Member of KPMG Asia Pacific (1978-1999), Senior Partner of Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Chairman of the Honorary Council of the Indonesian Institute of Accountants (2002 - 2010), Member of the Indonesian Transparency International Board of Directors (2004 - 2005), Chairman of the Board of Directors of the Indonesian Audit Committee Association (2004 - 2010), Member of the Supervisory Board of the Rehabilitation Agency and Reconstruction of Aceh and Nias (2005 - 2009), Chairman of the Honorary Council Indonesian Audit Committee Association (2010 - 2016), Member of the National Committee Indonesian Governance Policy - Sector (2016 - 2019), Team Leader Formulator of Indonesian National Corporate Governance Policy (2017 - 2019).

Share Ownership in Moratelindo

Member of the Honorary Board of Professionals in Risk Management Association (PRIMA) (2017-present), Committee Member National Governance Policy, Chairman of the Board of Commissioners and Directors Indonesia (LKDI) (2013-present), Chairman of the Committee Association Certification Board Indonesian Audit (IKAI) (2016-present), and Member of the Expert Board National Committee on Indonesian Governance Policy (2021-present).

Within the Company: Chairman of Audit Committee (2018-2023) and Chairman of Nomination and Remuneration Committee (2017 - 2022)

Profil Direksi

PROFILE OF DIRECTORS

Galumbang Menak

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2027
Term of Office: March 17, 2022 - March 16, 2027



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Tarutung, 17 Januari 1966

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan pada 6 Desember 2001 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 6 Desember 2001. Terakhir kali ditunjuk untuk menjabat Direktur Utama Perusahaan pada 17 Maret 2022 berdasarkan Akta 34/2022 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan tersebut.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan Elektro dari Universitas Indonesia, Depok (1992)

Riwayat Profesi

Memulai karir sebagai engineering pada PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 1992 hingga 1996. Kemudian beliau bergabung dengan berbagai perusahaan Rajawali Group di antaranya PT Telekomindo Primabhakti (1996-2000) sebagai Senior Manager Business Development, PT Wahana Lintas Sentral Komunikasindo-Telkom Group (2001-2004) sebagai Direktur Operasional. Di tahun 2012, beliau mendirikan perusahaan e-commerce nusatrip.com.

Rangkap Jabatan

Di Luar Perusahaan: Direktur PT Gema Lintas Benua (pemegang saham Perusahaan) (2007-sekarang), Direktur Utama PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), Direktur Utama PT Oxygen Multimedia Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2015-sekarang), dan Komisaris Utama PT Palapa Ring Barat (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), dan saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris di Nusatrip.com.

Di Dalam Perusahaan: Tidak ada.

Personal Data

Indonesian citizen
56 years old
Born in Tarutung, January 17, 1966

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First took office as the President Director of the Company on December 6, 2001 based on the Deed of Decision Statement of the Shareholders No. 13, December 6, 2001. Recently appointed as the Company's President Director on March 17, 2022 based on Deed 34/2022 for a term of office of five years since the effective date of the resolution.

Education

Bachelor of Electronic Engineering from the University of Indonesia, Depok (1992)

Professional History

Menak began his career as an engineer at PT Telekomunikasi Indonesia from 1992 through 1996. He then joined a variety of companies of the Rajawali Group such as PT Telekomindo Primabhakti (1996–2000) as the Senior Manager of Business Development, PT Wahana Lintas Sentral Komunikasindo-Telkom Group (2001–2004) as the Operational Director. In 2012, Menak founded an e-commerce company nusatrip.com.

Share Ownership in Moratelindo

Outside the Company: The Director of PT Gema Lintas Benua (a shareholder of the Company) (2007–present), the President Director of PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (a subsidiary of the Company) (2016–present), the President Director of PT Oxygen Multimedia Indonesia (a subsidiary of the Company) (2015–present), and the President Commissioner of PT Palapa Ring Barat (a subsidiary of the Company) (2016–present), and currently serves as Commissioner at Nusatrip.com.

Within the Company: None.



Jimmy Kadir

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Periode Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2027
Term of Office: March 17, 2022 - March 16, 2027

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 42 tahun
Kelahiran Palembang, 19 April 1979

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan pada 15 April 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia Nomor 8 Tanggal 15 April 2016. Melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 34/2022, beliau kembali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan tersebut.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta (2001), Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Depok, 2022.

Riwayat Profesi

Memulai karir sebagai Accounting staf di PT Astra Komponen Indonesia (2002-2003) kemudian bergabung bersama PT Astra Otoparts Tbk sebagai Head of Accounting Division (2003-2004), Assistant of Accounting Manager (2004-2008) dan Assistant of Internal Audit Manager (2008-2009), Accounting Manager di PT Gemala Kempa Daya (2009-2010), Accounting Consolidation Manager/Dept. Head di PT Kapal Api Global (2010-2011), Accounting Manager PT ABM Investama Tbk (2011-2013), Senior Manager di Kantor Akuntan Publik (KAP) (2013-2014), Beliau menjadi Direktur Independen PT Inti Bangun Sejahtera Tbk sejak 23 Mei 2014 sampai dengan May 2015. Pada tahun 2015 Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan.

Rangkap Jabatan

Di Luar Perusahaan: Direktur PT Candrakarya Multikreasi (pemegang saham Perusahaan) (2016-sekarang), Direktur PT Palapa Timur Telematika (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), Wakil Direktur Utama PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2018-sekarang), Wakil Direktur Utama PT Palapa Ring Barat (entitas anak Perusahaan) (2016-sekarang), Wakil Direktur Utama PT Oxygen Multimedia Indonesia (entitas anak Perusahaan) (2018-sekarang), dan Direktur Utama PT Indo Pratama Teleglobal (2021-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: Tidak ada.

Personal Data

Indonesian citizen
42 years old
Born in Palembang, April 19, 1979

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First served on the Company's Board of Directors on April 5, 2016 based on the Deed of Decision of the Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Number 8 Dated April 15, 2016. Through the Circular Resolution of Shareholders dated October 17, 2022 based on the Deed of Joint Agreement of All Shareholders outside the General Meeting of Shareholders No. 34/2022, he was reappointed as Deputy President Director for a term of 5 (five) years from the effective date of the decision.

Education

Bachelor of Economy in Accounting from the University of Trisakti, Jakarta (2001), Postgraduate (S2) Master of Management from Pancasila University, Depok, 2022.

Professional History

Started his career as Accounting staff at PT Astra Component Indonesia (2002-2003) then joined PT Astra Otoparts Tbk as Head of Accounting Division (2003-2004), Assistant of Accounting Manager (2004-2008) and Assistant of Internal Audit Manager (2008-2009), Accounting Manager at PT Gemala Kempa Daya (2009-2010), Accounting Consolidation Manager/Dept. Head at PT Kapal Api Global (2010-2011), Accounting Manager of PT ABM Investama Tbk (2011-2013), Senior Manager at Public Accounting Firm (KAP) (2013-2014). He became Independent Director of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk since May 23, 2014 until May 2015. In 2015 he Previously served as President Commissioner of the Company.

Share Ownership in Moratelindo

Outside the Company: Outside the Company: The Director of PT Candrakarya Multikreasi (a shareholder of the Company) (2016–present), the Director of PT Palapa Timur Telematika (a subsidiary of the Company) (2016–present), the Vice President Director of PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (a subsidiary of the Company) (2018–present), the Vice President Director of PT Palapa Ring Barat (a subsidiary of the Company) (2016–present), the Vice President Director of PT Oxygen Multimedia Indonesia (a subsidiary of the Company) (2018–present), and the President Director of PT Indo Pratama Teleglobal (2021–present).

Within the Company: None.

Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

INFORMATION ON AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Perusahaan Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners			Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders					Entitas Anak Subsidiary			
		INK	KP	KNP	GM	JK	GLB	CKM	SMT	PTT	PRB	OMI	OII	MIPL	IPT
Indra Nathan Kusnadi Komisaris Utama President Commissioner	KU		x	x	x	x	x	K	x	x	K	KU	KU	x	KU
Karim Panjaitan Komisaris Commissioner	K	x		x	x	x	x	x	x	x	x	K	K	x	x
Kanaka Puradiredja Komisaris Independen Independent Commissioner	KI	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Galumbang Menak Direktur Utama President Director	DU	x	x	x		x	D & PS	x	x	x	KU	DU	DU	x	x
Jimmy Kadir Wakil Direktur Utama Vice President Director	WDU	x	x	x	x		x	D	x	D	WDU	WDU	WDU	x	DU

Keterangan | Information:

KU : Komisaris Utama
President Commissioners
K : Komisaris
Board of Commissioners
KI : Komisaris Independen
Independent Commissioners
DU : Direktur Utama
President Director
WDU : Wakil Direktur Utama
Vice President Director
D : Direktur
Directors
PS : Pemegang Saham
Shareholders

GLB : PT Gema Lintas Benua
CKM : PT Candrakarya Multikreasi
SMT : PT Smart Telecom
PTT : PT Palapa Timur Telematika
PRB : PT Palapa Ring Barat
OMI : PT Oxygen Multimedia Indonesia
OII : PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
MIPL : Moratel International Pte. Ltd.
IPT : PT Indo Pratama Teleglobal

INK : Indra Nathan Kusnadi
KP : Karim Panjaitan
KNP : Kanaka Puradiredja
GM : Galumbang Menak
JK : Jimmy Kadir

Profil Sekretaris Perusahaan

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Henry Rizard Rumopa

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 36 tahun.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.143/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia tanggal 19 Oktober 2017.

Indonesian citizen, residing in Jakarta, Indonesia. Currently 36 years old.

Took office as Corporate Secretary since 2017 based on the Decree of the Board of Directors No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 on Appointment of Corporate Secretary of PT Mora Telematika Indonesia on October 19, 2017.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Beliau mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum dari universitas Katholik Atmajaya Jakarta (2007) dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2010).

He received a Bachelor of Laws degree from Atmajaya Catholic University Jakarta in 2007 and a Masters in Law from the University of Indonesia in 2010.

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

Beliau memulai karirnya sebagai Legal Staff di Kantor notaris Misahardi Wilamarta pada tahun 2007, kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017), dan General Manager Corporate Legal (2017).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan lainnya.

He started his career as a Legal Staff at the Misahardi Wilamarta notary office in 2007. He then joined the Company as a Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017), and General Manager of Corporate Legal (2017).

He has no other concurrent positions.

Profil Pejabat Eksekutif

EXECUTIVE OFFICER PROFILE

Michael C. McPhail

Chief Technology Officer (CTO)

Data Pribadi

Warga negara Inggris, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun. Bergabung dengan perusahaan sejak 4 Januari 2016.

Pendidikan

Master (S2) of Engineering (M.Eng) jurusan Teknik Sipil dengan nilai memuaskan dari Heriot-Watt University, Edinburgh (1996).

Riwayat Profesi

Sebelum bergabung bersama Perusahaan, beliau menjabat sebagai SVP Demand Management & Technology Strategy di PT XL Axiata Tbk-Indonesia (2014-2015) dan sebagai Chief of Technology Officer di PT Axis Telekom Indonesia (2011-2013).

Personal Data

British citizen living in Jakarta, Indonesia; 48 years old. Joined the company since January 4, 2016.

Education

Master of Engineering in Civil Engineering with merit from Heriot-Watt University, Edinburgh (1996).

Professional History

Before joining the Company, McPhail took office as the SVP of Demand Management & Technology Strategy at PT XL Axiata Tbk-Indonesia (2014–2015) and as the CTO of PT Axis Telekom Indonesia (2011–2013).





Resi Y. Bramani

Chief Strategic Business Officer (CSBO)

Data Pribadi

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia, saat ini berusia 44 tahun. Menjabat sebagai Chief Strategic Business Officer (CSBO) Perusahaan sejak 17 Juli 2019.

Pendidikan

Master (S2) of Management (MBA) di bidang Strategic Management dari Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (2018), Sarjana (S1) di bidang Social Psychology dari Universitas Indonesia (2003), dan Bachelor (S1) of Arts dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia (2003).

Riwayat Profesi

Sebelum bergabung bersama Perusahaan, beliau memimpin berbagai profesi strategis di PT XL Axiata Tbk dengan posisi terakhir GM Frequency & Government Management. Di tahun 2018, beliau mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia atas jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan di bidang telekomunikasi, informasi, dan jaringan. Ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Periode Kedua 2021-2024 ASKALSI (Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia/Indonesian Submarine Cable Association).

Personal Data

Indonesian citizen living in Jakarta, Indonesia; 44 years old. Took office as Chief Strategic Business Officer (CSBO) since July 17, 2019.

Education

Master of Management (MBA) in Strategic Management from the University of Prasetya Mulya, Jakarta (2018); Bachelor's Degree in Social Psychology from the University of Indonesia (2003); and Bachelor's Degree of Arts from the University of Queensland, Brisbane, Australia (2003).

Professional History

Before joining the Company, Bramani lead a variety of strategic professions at PT XL Axiata Tbk, with GM Frequency & Government Management being the last position. In 2018, Bramani received the Mark of Honor Satyalancana Pembangunan from the President of the Republic of Indonesia for the services dedicated to the country and society in the development fields of telecommunication, information, and network. Appointed 2nd term as General Secretary of ASKALSI (Indonesian Submarine Cable Association) for the period of 2021-2024.

Demografi Sumber Daya Manusia DEMOGRAPHY OF HUMAN RESOURCES

Perusahaan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perusahaan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perusahaan di masa depan.

Perusahaan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perusahaan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Perusahaan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perusahaan.

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perusahaan selama 3 tahun terakhir:

The Company believes that the strength of HR is very important to encourage business growth in order to create high competitiveness in the industry telecommunications in the country. Company is always aligning the improvement of HR capabilities and capacity in line with the Company's development plan in future.

The Company also views that HR is a strategic business partner. Attendance of employees who are professional, competent, dedicated, and with integrity will serve as a solid foundation for the Company to continue to grow and develop to achieve goals. For this reason, the Company manages HR by focusing on improving competence while at the same time making efforts to meet the expectations of all employees.

The Company does not have employees with specialized expertise in certain fields, which would interfere with the continuity of activities operations/business of the Company, should the employees not present.

The following is a breakdown of the number of employees of the Company during the last 3 years:

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan (Perusahaan, Karyawan Tetap)

Total and Composition of Employees by Positions

Jenjang Jabatan Position Level	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Kepala Direktorat Directorate Head			
• Pejabat Eksekutif • Executive Officer	2	2	2
• Direktur Non Akta • Non-Deed Director	4	3	3
Kepala Divisi Division Head	7	9	9
Kepala Departemen Department Head	26	30	30
Kepala Seksi Section Head	225	217	182
Staf Staff	336	332	283
Jumlah Total	600	593	509

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Perusahaan, Karyawan Tetap)

Total and Composition of Employees by Educational Stages (Company, Permanent Employee)

Jenjang Pendidikan Educational Level	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
S3 Postgraduate	0	0	0
S2 Graduate	24	22	22
S1 Bachelor's Degree	354	355	300
Diploma	136	137	125
Lain-lain Others	86	81	64
Jumlah Total	600	593	509

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (Perusahaan, Karyawan Tetap)

Employee Composition by Age (Company, Permanent Employee)

Rentang Usia Age Range	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Di atas 55 tahun Above 55 years old	10	8	8
> 51 - 55 tahun years old	13	14	9
> 46 - 50 tahun years old	35	35	28
> 41 - 45 tahun years old	91	90	74
> 36 - 40 tahun years old	141	143	132
> 31 - 35 tahun years old	157	155	141
> 26 - 30 tahun years old	143	138	108
> 20 - 25 tahun years old	10	10	9
Jumlah Total	600	593	509

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin (Karyawan Kontrak dan Tetap)

Employee Composition by Gender (Contract and Permanent Employees)

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Laki-laki Male	692	676	635
Perempuan Female	223	214	206
Jumlah Total	915	890	841

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Employee Composition by Main Activities (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Aktivitas Utama Main Activities	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Business Development	7	15	23
Commercial	123	117	113
Engineering IT	101	89	96
Enterprise	133	124	128
Executive Officer	7	7	7
Finance	81	75	68
Government Relation & SITAC	19	17	16
Human Resources	10	10	12
General Affairs	30	25	20
Legal	10	8	8
Marketing	12	13	8
Operation	328	283	252
Performance Analysis	0	18	16
Planning	0	0	0
Project	54	89	74
Jumlah Total	915	890	841

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Employee Composition by Location (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Lokasi Location	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Bali	12	7	9
Bangka Belitung	3	3	3
Banten	-	1	2
DKI Jakarta	804	791	749
Jambi	4	4	4
Jawa Barat West Java	16	19	16
Jawa Tengah Central Java	7	8	6
Jawa Timur East Java	22	19	17
Lampung	1	1	1
Riau	12	12	12
Sulawesi Selatan South Sulawesi	1	1	1
Sumatera Selatan South Sumatra	8	8	8

Lokasi Location	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Sumatera Utara North Sumatra	15	12	11
Yogyakarta	2	1	1
Kalimantan Barat West Kalimantan	1	1	1
Kalimantan Selatan South Kalimantan	-	-	-
Kalimantan Timur East Kalimantan	1	1	-
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	6	1	1
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	-	-	-
Papua	-	-	-
Jumlah Total	915	890	841

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)

Employee Composition by Status

Jenjang Pendidikan Status	2021 (Orang/People)	2020 (Orang/People)	2019 (Orang/People)
Karyawan Tetap Permanent	600	593	509
Karyawan Kontrak Contract	315	297	332
Jumlah Total	915	890	841

Tenaga Kerja Asing

Foreign Employees

No	Nama Name	Warga Negara Nationality	Jabatan Position	No. ITAS/ITAP ITAS/ITAP No	Masa Berlaku Valid Through	No. IMTA IMTA No	Masa Berlaku Valid Through
1	Michael Cruickshanks McPhail	Inggris British	Chief Technology Officer	2014JE0177-R	16 Mei 2022 May 16, 2022	110/G.7.1/3/- 1.837/e/2020	31 Oktober 2022 October 31, 2022
2	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	Research and Development Advisor	2C21JE8898-V	5 Oktober 2022 October 5, 2022	165/G.7.1/3/- 1.837/e/2020	31 Oktober 2022 October 31, 2022

"Tentang pengelolaan SDM, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diberikan Moratelindo serta pemenuhan hak-hak karyawan dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."

"Details regarding the management of Human Resources, including training and development of competence by Moratelindo and fulfillment of employees' rights, can be seen in the Sustainability Report as an integral part of this Annual Report."

Informasi Pemegang Saham SHAREHOLDERS' INFORMATION

Perusahaan hingga 31 Desember 2021 mengeluarkan 3 (tiga) jenis saham, yaitu saham Seri A sebanyak 250.000 lembar dengan nilai per lembar sebesar Rp100.000, saham Seri B sebanyak 338.235 lembar dengan nilai per lembar sebesar Rp809.349, dan saham Seri C sebanyak 764.490 lembar dengan nilai per lembar sebesar Rp2.372.000.

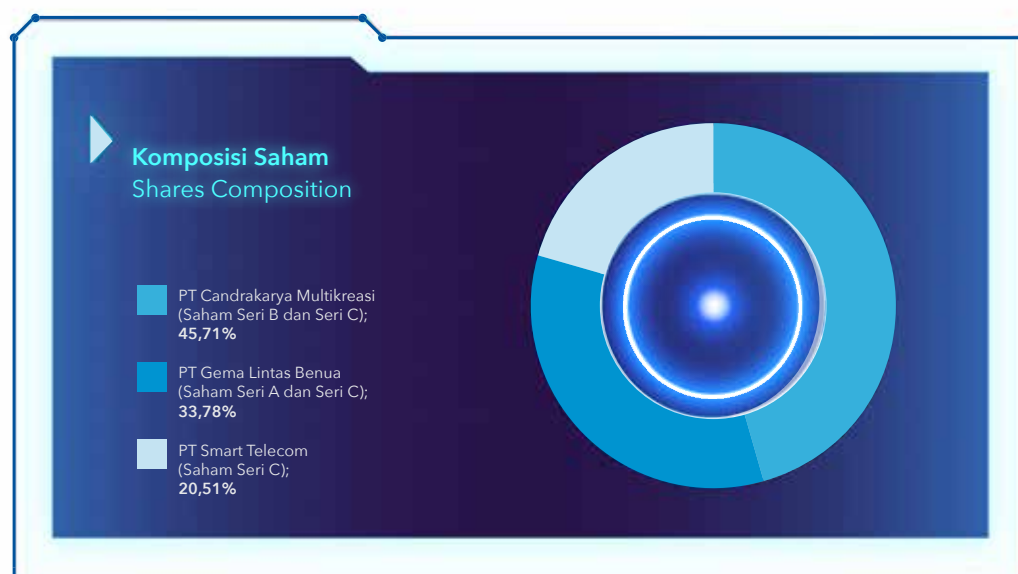
Until the end of December 31, 2021, the Company released three types of shares: Series A (250,000 sheets, Rp100,000/sheet), Series B (338,235 sheets, Rp809,349/sheet), and Series C (764,490 sheets, Rp2,372,000/sheet).

Komposisi Kepemilikan Saham Moratelindo per 31 Desember 2021

Moratelindo Shareholding Composition as of December 31, 2021

Nilai Nominal Rp100.000 per saham Seri A, Rp809.349 per saham Seri B, Rp2.372.000 per saham Seri C
Nominal Values of Rp100,000/share of Series A, Rp809,349/share of Series B, Rp2,372,000/share of Series C

	Jenis Saham Share Type	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Sheets)	Jumlah Nominal Saham Total Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham Shareholding Percentage (%)	Kepemilikan Institusi Lokal Ownership of Local Institutions (%)
Modal Dasar Authorized Capital		1.352.725	2.112.120.439.015		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-up Capital					
1. PT Gema Lintas Benua	Seri A/Series A Seri C/Series C	250.000 206.998	25.000.000.000 490.999.256.000	33,78	100,00
2. PT Candrakarya Multikreasi	Seri B/Series B Seri C/Series C	338.235 280.056	273.750.159.015 664.292.832.000	45,71	
3. PT Smart Telecom	Seri C/Series C	277.436	658.078.192.000	20,51	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Paid-up Capital		1.352.725	2.112.120.439.015	100,00	



Informasi tentang Kepemilikan Saham Publik

Hingga akhir tahun 2021, Moratelindo tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat klasifikasi pemegang saham berdasarkan kepemilikan institusi lokal, institusi asing, individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

Public Shareholding Information

Until the end of 2021, Moratelindo did not offer its shares publicly and did not list its shares on any stock exchange. Thus, there are no classifications of shareholding by local institution, foreign institutions, local individuals, and foreign individuals.

Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci Baik Langsung maupun Tidak Langsung

Information on Shareholding by Key Management, Directly or Indirectly

	Kepemilikan Saham Moratelindo Secara Langsung Moratelindo Direct Shareholding		Kepemilikan Saham Moratelindo Secara Tidak Langsung Moratelindo Indirect Shareholding	
	Per 31 Desember 2021 As of December 31, 2021 (%)	Per 31 Desember 2020 As of December 31, 2020 (%)	Per 31 Desember 2021 As of December 31, 2021 (%)	Per 31 Desember 2020 As of December 31, 2020 (%)
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors				
Indra Nathan Kusnadi (Komisaris Utama) (President Commissioner)	-	-	-	-
Karim Panjaitan (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Kanaka Puradiredja (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-	-	-	-
Galumbang Menak (Direktur Utama) (President Director)	-	-	33,78% (melalui kepemilikan di PT Gema Lintas Benua) (through ownership of PT Gema Lintas Benua)	-
Jimmy Kadir (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	-	-	-	-

Struktur Grup dan Kelompok Usaha serta Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Sampai kepada Pemilik Individu per 31 Desember 2021

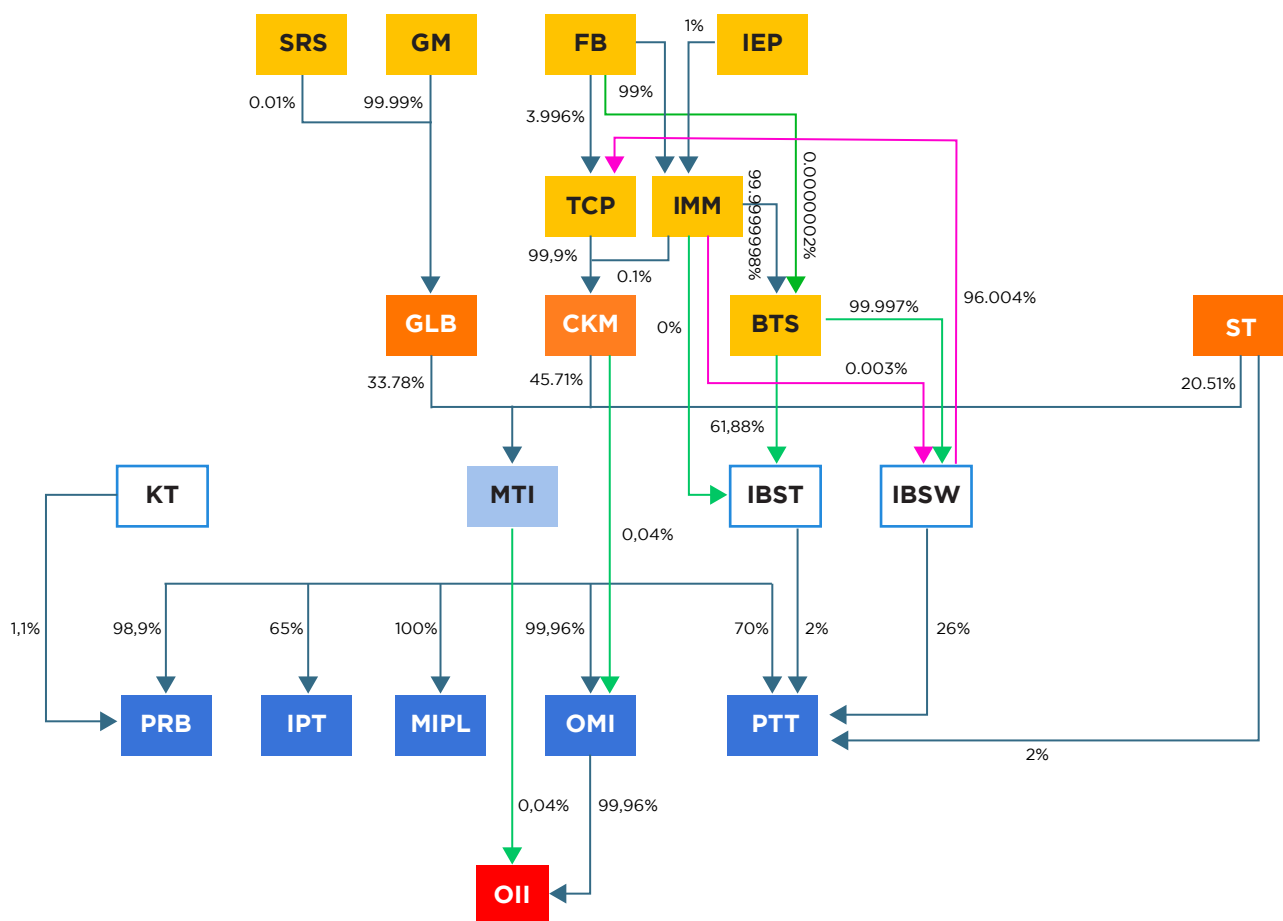
STRUCTURE OF GROUPS AND WORK UNITS AND INFORMATION ON PRIMARY SHARHOLDERS AND CONTROLLER THROUGH INDIVIDUAL OWNER AS OF DECEMBER 31, 2021

Di bawah ini disajikan struktur grup dan kelompok usaha, serta kepemilikan Perusahaan hingga entitas pemilik terakhir.

Below is a structure of groups and work units and Company ownership through the last owner.

Struktur Grup dan Kelompok Usaha serta Kepemilikan Perusahaan Hingga Entitas Pemilik Terakhir per 31 Desember 2021

Structure of Groups and Work Units and Company Ownership through the Last Owner as of December 31, 2021



MTI : PT Mora Telematika Indonesia	KT : PT Ketrosden Triasmitra	SRS : Sorta Regina Simanjuntak
PRB : PT Palapa Ring Barat	IBST : PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	GM : Galumbang Menak
IPT : PT Indo Pratama Teleglobal	IBSW : PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	FB : Farida Bau
PTT : PT Palapa Timur Telematika	ST : PT Smart Telecom	IMM : PT Inovasi Mas Mobilitas
OMI : PT Oxygen Multimedia Indonesia	GLB : PT Gema Lintas Benua	IEP : Immanuel Eka Putra
MIPL : Moratel International Pte. Ltd.	CKM : PT Candrakarya Multikreasi	BTS : PT Bakti Taruna Sejati
OII : PT Oxygen Infrastruktur Indonesia	TCP : PT Tunas Citra Persada	

Ibu Farida Bau adalah sebagai Pemegang saham Pengendali tidak langsung melalui CKM dan sebagai Ultimate Beneficial Owner (UBO) Perusahaan.

Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Farida Bau melalui kepemilikan saham pada Perusahaan sebesar 45,71% melalui PT Candrakarya Multikreasi.

Galumbang Menak yang merupakan Direktur Utama Perusahaan merupakan pemegang saham Perusahaan secara tidak langsung melalui kepemilikan 33,78% sahamnya pada PT Gema Lintas Benua.

Mrs. Farida Bau is an indirect Controlling Shareholder through CKM and as the Ultimate Beneficial Owner (UBO) of the Company.

The ultimate beneficial owner of the Company as required in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2019 concerning Procedures for Implementing the Application of Principles Regarding Beneficiary Owners of Corporations, Farida Bau has a 45.71% share ownership in the Company through PT Candrakarya Multikreasi.

Galumbang Menak, the Company's President Director, is an indirect shareholder of the Company through his 33.78% ownership in PT Gema Lintas Benua.

Sekilas tentang Pemegang Saham Moratelindo per 31 Desember 2021 Moratelindo's Shareholders at a Glance as of December 31, 2021

PT Gema Lintas Benua	
Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 7 November 2007 November 7, 2007
Status Hukum Legal Status	: Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability
Domisili Location	: DKI Jakarta, Indonesia
Bidang Usaha Business Scope	: Investasi Investment
Dewan Komisaris Board of Commissioners	: Sorta Regina Simanjuntak (Komisaris/Commissioner)
Direksi Board of Directors	: Galumbang Menak (Direktur/Director)
Alamat Address	: Grha 9, Jalan Panataran No 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
PT Candrakarya Multikreasi	
Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 22 Februari 2007 February 22, 2007
Status Hukum Legal Status	: Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability
Bidang Usaha Business Scope	: Perusahaan Holding dan Konsultasi Manajemen Holding Company and Management Consultancy
Dewan Komisaris Board of Commissioners	: Indra Nathan Kusnadi (Komisaris/Commissioner)
Direksi Board of Directors	: Makmur Jaury (Direktur Utama/President Director) Jimmy Kadir (Direktur/Director)
Alamat Address	: Jalan Riau No. 23, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

PT Smart Telecom	
Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 16 Agustus 1966 August 16, 1966
Status Hukum Legal Status	: Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability
Bidang Usaha Business Scope	: Jasa Telekomunikasi Telecommunication Services
Dewan Komisaris Board of Commissioners	: Marco Paul Iwan Sumampouw (Presiden Komisaris/President Commissioner) Lukmono Sutarto (Komisaris/Commissioner)
Direksi Board of Directors	: Merza Fachys (Presiden Direktur/President Director) Antony Susilo (Direktur/Director) Djoko Tata Ibrahim (Direktur/Director)
Alamat Address	: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, Indonesia

Daftar Entitas Anak Perusahaan dan Sekilas Entitas Anak Perusahaan LIST OF SUBSIDIARIES AND SUBSIDIARIES PROFILE

No.	Nama Perusahaan Company Name	Domisili Location	Bidang Usaha Business Scope	Tahun Berdiri Founding Year	Tahun Beroperasi Operating Year	Tahun Investasi Moratelindo Year of Moratelindo Investment	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (Rp-Juta) Total Assets (Before Elimination) (Rp-Million)		Status Operasi Operational Status
							2021	2020	2021	2020	
Entitas Anak Langsung Direct Subsidiary											
1	Moratel International Pte, Ltd. (MIPL)	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi Technology and Telecommunication Services	2008	2008	2008	100%	100,00%	279.293	154.978	Beroperasi Operational
2	PT Oxygen Multimedia Indonesia	Jakarta, Indonesia	Televisi Kabel Cable Television	2015	2015	2015	99,96%	99,96%	242.507	511.727	Beroperasi Operational
3	PT Palapa Ring Barat	Jakarta, Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi Technology and Telecommunication Services	2016	2016	2016	98,90%	98,90%	1.156.832	1.219.850	Beroperasi Operational
4	PT Palapa Timur Telematika	Jakarta, Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi Technology and Telecommunication Services	2016	2016	2016	70,00%	70,00%	5.329.999	5.524.270	Beroperasi Operational
5	PT Indo Pratama Teleglobal	Jakarta, Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi Technology and Telecommunication Services	1999	1999	2021	65,00%	-	491.068	-	Beroperasi Operational

No.	Nama Perusahaan Company Name	Domisili Location	Bidang Usaha Business Scope	Tahun Berdiri Founding Year	Tahun Beroperasi Operating Year	Tahun Investasi Moratelindo Year of Moratelindo Investment	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (Rp-Juta) Total Assets (Before Elimination) (Rp-Million)		Status Operasi Operational Status
							2021	2020	2021	2020	
Entitas Anak Tidak Langsung, Melalui PT Oxygen Multimedia Indonesia Indirect Subsidiary, Through PT Oxygen Multimedia Indonesia											
6	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia	Jakarta, Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi Construction of Facilities and Infrastructures of Telecommunication Network	2016	2016	2016	100% (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	100% (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	170.663	461.143	Beroperasi Operational

Moratel International Pte. Ltd. ("MIPL")

Entitas Anak
A Subsidiary



MORATEL INTERNATIONAL PTE. LTD.

MIPL didirikan 26 Maret 2008 sesuai dengan The Companies Act (Cap 50). dengan nomor Perusahaan 200805835W.

MIPL was established March 26, 2008 in accordance with the Companies Act (Cap 50), with Company number 200805835W.

MIPL menjalankan kegiatan usaha utama di bidang infrastruktur telekomunikasi yang menyediakan layanan telekomunikasi, internet, dan jasa teknologi informasi.

MIPL focuses on sectors of telecommunication infrastructure that provides telecommunication, internet, and IT technology services.

Alamat MIPL

Address

Moratel International Pte. Ltd. (MIPL)

51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity centre Singapore - 658077
51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity centre Singapore - 658077

Struktur Kepengurusan MIPL

Organizational Structure of MIPL

Jabatan Position	Nama Name
Direktur Director	Lim Hock Koon
Direktur Director	Alex Irwanto

PT Oxygen Multimedia Indonesia ("OMI")

Entitas Anak

A Subsidiary



OMI didirikan pada 9 September 2015, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 9 September 2015 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 25 September 2015.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 04/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta, mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya; pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933. (Kode KBLI: 60202)

OMI was founded on September 9, 2015 based on the Deed of Establishment No. 38, September 9, 2015, drawn before Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., a notary in Tangerang District. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. AHU-2457946.AH.01.01 of 2015, September 25, 2015. The Deed was registered on the Company listing in accordance with UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11 of 2015, September 25, 2015.

In accordance with Article 3 of the latest Company's Articles of Association ratified through Deed 04/2022, the scope of the Company's main activities is Broadcasting Activities and Programming.

In order to achieve the above aims and objectives, the company carries out business activities, among others:

1. Television Broadcasting and Programming Activities by Private, including activities in television broadcasting business which is managed by private sector, including station relay (return transmitter) television broadcasting, such as programming of television channels complete set of purchased program components (such as films, documentaries, etc.), program components that are self-generated (such as local news, live reports) or a combination of both; programming from channel videos on request; and data broadcasting integrated with television broadcasting. Television program complete can be broadcast alone or through distribution third parties, such as cable companies or providers satellite television. Programming can be general or (e.g. restricted formats such as news programs, sports, education or programs aimed at young people), can be made freely available to user or may be available only on a subscription basis. Live radio and television broadcasting activities or retransmission based on reply services (fees) and contracts are included in the group of 61933. (KBLI Code: 60202)

Alamat OMI

Address

PT Oxygen Multimedia Indonesia

Gedung Grha 9, Lantai 6, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Struktur Kepengurusan OMI

Organizational Structure of OMI

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Commissioner	Karim Panjaitan
Direktur Utama President Director	Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Jimmy Kadir

PT Palapa Ring Barat ("PRB")

Entitas Anak
A Subsidiary



PRB didirikan pada 10 Februari 2016, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.TAHUN 2016. Dan Akta tersebut telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 02/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah Konstruksi Bangunan Sipil, Konstruksi Khusus, Telekomunikasi, dan Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar

PRB was founded on February 10, 2016 based on the Deed of Establishment of PRB Limited Liability No. 38, February 10, 2016, drawn before I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., a notary in Tangerang District. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. AHU-0007857.AH.01.01.TAHUN 2016. And the Deed was registered on the Company listing in accordance with UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11 of 2016, February 11, 2016.

In accordance with Article 3 of the latest Company's Articles of Association ratified through Deed 02/2022, scope of the Company's activities is Civil Building Construction, Specialty Construction, Telecommunications, and Office Activities Center and Management Consulting.

In order to achieve the above aims and objectives, the Company carries out business activities, among others:

1. Telecommunication Central Construction, covering construction, maintenance and repair activities telecommunication central building construction along with equipment, such as telephone exchange buildings, telegraph, transmitting tower building, radar receiver

gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI: 42206)

2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. (Kode KBLI: 43212)
3. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. (Kode KBLI: 61100)
4. Aktivitas Konsultasi dan Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

microwave, small earth station building and satellite station. Including local communication pipeline and long distance, transmission network, and distribution network telecommunication/telephone cables above ground level, underground and in the water. (KBLI Code: 42206)

2. Telecommunication Installation, includes activities installation of telecommunications installations in buildings buildings for both residential and non-residential purposes, such as antenna installation. This group also includes installation, maintenance and repair activities telecommunications installations at telephone/telegraph exchanges, microwave radar transmitting station, earth station small/satellite stations and the like. Including activities installation of transmission and telecommunications networks and telecommunications installations in buildings and civil buildings. (KBLI Code: 43212)
3. Wired Telecommunications Activities, including operation, maintenance or supply activities access to facilities for sending voice, data, text, sound and video using infrastructure telecommunications cables, such as operating and maintenance of changing and delivery facilities for provides point-to-point communication through channels landline, microwave or line communication data and satellites, operation of distribution systems of cables (i.e. for data and signal distribution television) and the complement of telegraph and communication other non-vocals who use their own facilities. The transmission facility that performs this activity, can be based on a single technology or a combination of various technologies. Includes purchase of access and network capacity of owners and operators of network and provide telecommunications services that use this capacity for business and home stairs and provision of internet access through operators infrastructure with cables. Organizing activities network for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and circuits rent. Including data communication connection activities whose delivery is done in packages, via a central office or through another network, such as Public Switched Telephone Network (PSTN). Including Territorial network management activities that serving certain mobile customers, including services radio trunking and radio calling services for the public. (Code KBLI: 61100)
4. Other Consulting and Management Activities, including provision of advice, guidance and operational assistance business and organizational and management problems others, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; goal and marketing policy; planning, practice and policy human Resources; scheduling planning and production control. The

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI: 70209)

provision of this business service can includes advice, guidance and operational assistance various management functions, management consulting agronomist and agricultural economist in the field of agriculture and the like, design of methods and accounting procedures, cost accounting programs, procedures budget monitoring, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services. (KBLI Code: 70209)

Alamat PRB Address

PT Palapa Ring Barat

Gedung Grha 9, Lantai 5, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Struktur Kepengurusan PRB

Organizational Structure of PRB

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Galumbang Menak
Komisaris Commissioner	Indra Nathan Kusnadi
Direktur Utama President Director	Syarif Lumintarjo
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Jimmy Kadir

PT Palapa Timur Telematika ("PTT")

Entitas Anak
A Subsidiary



PTT didirikan pada 16 Agustus 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No. 83 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016. Dan Akta tersebut telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0095745.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 18 Agustus 2016.

PTT was founded on August 16, 2016 based on the Deed of Establishment of PTT Limited Liability, August 16, 2016, drawn before I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., a notary in Tangerang District. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. AHU-0036614.AH.01.01 of 2016, August 18, 2016. The Deed was registered on the Company listing in accordance with UUPT No. AHU-0095745.AH.01. of 2016, August 18, 2016.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 03/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah Konstruksi Bangunan Sipil, Konstruksi Khusus, Telekomunikasi dan Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI: 42206)
2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. (Kode KBLI: 43212)
3. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui

In accordance with Article 3 of the latest Company's Articles of Association ratified through Deed 03/2022, scope of main activities of the company is Civil Building Construction, Specialized Construction, Telecommunications and Headquarters Activities and Management Consulting.

In order to achieve the above aims and objectives, the company carries out business activities including:

1. Telecommunication Central Construction, covering construction, maintenance and repair activities telecommunication central building construction along with equipment, such as telephone exchange buildings telegraph, transmitting tower building, radar receiver microwave, small earth station building and satellite station. Including local communication pipeline and long distance, transmission network, and distribution network telecommunication/telephone cables above ground level, underground and in the water. (KBLI Code: 42206)
2. Telecommunication Installation, includes activities installation of telecommunications installations in buildings buildings for both residential and non-residential purposes, such as antenna installation. This group also includes installation, maintenance and repair activities telecommunications installations at telephone/telegraph exchanges, microwave radar transmitting station, earth station small/satellite stations and the like. Including activities installation of transmission and telecommunications networks and telecommunications installations in buildings and civil buildings. (KBLI Code: 43212)
3. Wired Telecommunications Activities, including operation, maintenance or supply activities access to facilities for sending voice, data, text, sound and video using infrastructure telecommunications cables, such as operating and maintenance of changing and delivery facilities for provides point-to-point communication through channels landline, microwave or line communication data and satellites, operation of distribution systems cable (i.e. for data and signal distribution television) and the complement of telegraph and communication other non-vocals who use their own facilities. The transmission facility that performs this activity, can be based on a single technology or a combination of various technologies. Includes purchase of access and network capacity of owners and operators of network and provide telecommunications services that use this capacity for business and home stairs and provision of internet access through operators infrastructure with cables. Organizing activities network for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and circuits rent. Including data communication connection activities whose delivery is done in packages, via a central office or through another network, such as Public

suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. (Kode KBLI: 61100)

4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI: 70209)

Switched Telephone Network (PSTN). Including Territorial network management activities that serving certain mobile customers, including services radio trunking and radio calling services for the public. (Code KBLI: 61100)

4. Other Management Consulting Activities, including provision of advice, guidance and operational assistance business and organizational and management problems others, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; goal and marketing policy; planning, practice and policy human resources; scheduling planning and production control. The provision of this business service can includes advice, guidance and operational assistance various management functions, management consulting agronomist and agricultural economist in the field of agriculture and the like, design of methods and accounting procedures, cost accounting programs, procedures budget monitoring, providing advice and assistance for business and community services in planning, organising, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services. (KBLI Code: 70209)

Alamat PTT Address

PT Palapa Timur Telematika

Gedung Grha 9, Lantai 1, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Struktur Kepengurusan PTT Organizational Structure of PTT

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Commissioner	Immanuel Eka Putra
Direktur Utama President Director	Leon Maximilian Kakisina
Direktur Director	Jimmy Kadir

PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT")

Entitas Anak

A Subsidiary



IPT didirikan pada 10 November 1999, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IPT No. 38 Tanggal 10 November 1999 yang dibuat dihadapan Dahniar, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 14/Peny./P.Not/1999/PN.jkt.Tim tertanggal 10 September 1999, pengganti dari Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. C-12467.HT.01.01.TH.2000 Tahun 2000 tanggal 27 Juni 2000 dan Akta tersebut telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT No. 090515138904 tahun 2000 tanggal 27 Juni 2000.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 15/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah Pengadaan Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil, Perdagangan Besar, Telekomunikasi, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Pembangkitan Tenaga Listrik, mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage. (Kode KBLI: 35111)
2. Transmisi Tenaga Listrik, mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 150 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt s.d 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain. (Kode KBLI: 35112)
3. Distribusi Tenaga Listrik, mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain. (Kode KBLI: 35113)

IPT was founded on November 10, 1999 based on the Deed of Establishment of IPT Limited Liability No. 38, November 10, 1999, drawn before Dahniar, S.H., based on the Letter of Stipulation of the Head of the East Jakarta District Court No. 14/Peny./P.Not/1999/PN.jkt.Tim, September 10, 1999 as an amendment to Jimmy Simanungkalit, S.H., a notary in Jakarta. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. C-12467.HT.01.01.TH.2000 of 2000, June 27, 2000 and the Deed was registered on the Company listing in accordance with UUPT No. 090515138904 of 2000, June 27, 2000.

In accordance with Article 3 of the latest Company's Articles of Association ratified through Deed 15/2022, scope of main activities of the Company is Electricity Procurement, Construction Civil Buildings, Wholesale, Telecommunication, Head Office Activities and Management Consulting, and Lease and Lease Activities without Option Rights.

In order to achieve the above aims and objectives, the company carries out business activities, among others:

1. Power Generation, including business producing electricity through power generation electricity that uses various types of energy sources. Fossil energy sources such as coal, gas, fuel oil, and diesel. Renewable energy sources such as geothermal, wind, bioenergy, sunlight, flow and waterfalls, movements and differences in sea layer temperature. Hybrid energy sources that combine sources fossil energy with renewable energy, and renewable energy comes from energy storage technology. (KBLI Code: 35111)
2. Electric Power Transmission, including operating business transmission system or electric power distribution business from the generator to the distribution network through the network high-voltage electric power (between 35 kilovolt to 150 kilovolt) and/or extra voltage high (between 150 kilovolts to 500 kilovolts) and/or ultra high voltage (above 500 kilovolts) including the substations, whether it comes from their own production as well as from the production of other parties. (KBLI Code: 35112)
3. Electricity Distribution, including operating business distribution system or electricity distribution business through a high-voltage electric power grid medium to low (under 35 kilovolts) to consumers or customers including the substation substation good distribution comes from own production as well as from the production of other parties. (KBLI Code: 35113)

4. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya. (Kode KBLI: 35129)
5. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI: 42206)
6. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. (Kode KBLI: 46523)
7. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. (Kode KBLI: 46599)
8. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator
4. Other electric power support activities, including other service businesses that are directly related to supply and use of electricity but not included in the group 35121-35122, like meter recording services, billing and pulse/electricity token trading activities as well as other electrical support. (KBLI Code: 35129)
5. Telecommunication Central Construction, includes construction, maintenance and repair activities telecommunication central building construction along with equipment, such as telephone exchange buildings, telegraph, transmitting tower building, radar receiver microwave, small earth station building and satellite station. Including local communication pipeline and long distance, transmission network, and distribution network telecommunication/telephone cables above ground level, underground, and underwater. (KBLI Code: 42206)
6. Wholesale of Telecommunication Equipment, including telecommunications equipment wholesale business, such as telephone and communication equipment. Including radio and television broadcasting equipment. (KBLI Code: 46523)
7. Wholesale of Machinery, Equipment and Equipment Others, including wholesale of machinery and equipment unclassified equipment and supplies in groups of 46591-46594, like a machine prime mover, turbine, power generator engine and machines for household use. Including wholesale trade in production robots other than for processing, other machinery ytdl for trade and navigation and other services, cable wholesalers and switches and installation of other equipment, machine tools various types and for various materials, tools computer controlled machines and equipment and measurement equipment. (KBLI Code: 46599)
8. Wired Telecommunications Activities, including operation, maintenance or supply activities access to facilities for sending voice, data, text, sound and video using infrastructure telecommunications cables, such as operating and maintenance of changing and delivery facilities for provides point-to-point communication through channels landline, microwave or line communication data and satellites, operation of distribution systems cable (i.e. for data and signal distribution television) and the complement of telegraph and communication other non-vocals who use their own facilities. Where is the transmission facility that performs this activity, can be based on a single technology or a combination of various technologies. Includes purchase of access and network capacity of owners and operators of network and provide telecommunications services that use this capacity for business and home stairs and provision of internet access through operators infrastructure with cables. Organizing activities

infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. (Kode KBLI: 61100)

9. Aktivitas Telekomunikasi Satelit, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit. (Kode KBLI: 61300)
10. Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. (Kode KBLI: 61921)
11. Jasa Sistem Komunikasi Data, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan. (Kode KBLI: 61922)
12. Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium. (Kode KBLI: 61912)
13. Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924. (Kode KBLI: 61929)
14. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen

network for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and circuits rent. Including data communication connection activities whose delivery is done in packages, via a central office or through another network, such as Public Switched Telephone Network (PSTN). Including Territorial network management activities that serving certain mobile customers, including services radio trunking and radio calling services for the public. (Code KBLI: 61100)

9. Satellite Telecommunication Activities, including activities network operation that serves telecommunications moving via satellite Earth station, Central gate and Network links. Activities in this group includes the operation, maintenance or supply access to facilities for transmitting voice, data, text and video using infrastructure satellite telecommunications, audio-visual transmission or text programs received from cable networks, stations local television or radio network to consumers via satellite system directly connected to the house (unit classified here generally do not come from programming material). Including supply activities internet access through satellite infrastructure operators. (Code KBLI: 61300)
10. Internet Service Provider, including service businesses services that a company offers to customers to access the internet, or referred to as the gateway to the internet. (KBLI Code: 61921)
11. Data Communication System Services, including service activities data communication system that can be used to delivery of voice, images, data, information and packets. This service is provided with guaranteed continuity, quality and safety. (KBLI Code: 61922)
12. Premium SMS Content Services, including service businesses for providing content via mobile mobile networks whose costing is through deduction prepaid deposit or postpaid phone bill mobile network subscribers. Content that provided are all forms of information that can be in the form of text, images, sound, animation, or a combination of everything in digital form, including software apps for download and premium SMS. (KBLI Code: 61912)
13. Other Multimedia Services, including service activities other multimedia not covered in group 61921 to 61924. (KBLI Code: 61929)
14. Other Management Consulting Activities, including provision of advice, guidance and operational assistance business and organizational and management problems

lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI: 70209)

15. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. (Kode KBLI: 77391)

others, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; goal and marketing policy; planning, practice and policy human Resources; scheduling planning and production control. The provision of this business service can includes advice, guidance and operational assistance various management functions, management consulting agronomist and agricultural economist in the field of agriculture and the like, design of methods and accounting procedures, cost accounting programs, procedures budget monitoring, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services. (KBLI Code: 70209)

15. Lease and Lease Activities Without Option Rights for Processing Industry Machinery and Equipment, including leasing and leasing activities without an option (operational leasing) of industrial machinery and equipment commonly used without an operator as capital goods by the company, such as machinery textiles, metalworking or processing machinery and wood, printing machines and electric welding machines. Including machine tools, tools for the production of measuring instruments and scientific, commercial and industrial inspectors and machines other. (KBLI Code: 77391)

Alamat IPT Address

PT Indo Pratama Teleglobal

Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40
Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160

Struktur Kepengurusan IPT Organizational Structure of IPT

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Commissioner	Siska Suryaman
Direktur Utama President Director	Jimmy Kadir
Direktur Director	Candra Bramono

PT Oxygen Infrastruktur Indonesia ("OII")
Entitas Anak Melalui PT Oxygen Multimedia Indonesia
A Subsidiary through PT Oxygen Multimedia Indonesia



OII didirikan pada 26 Mei 2016, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OII No. 18 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-0026273. AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Akta tersebut telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0066215.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta 05/2022, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil, Konstruksi Khusus, Real Estat, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

1. Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. (Kode KBLI: 41019)
2. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI: 42206)

OII was founded on May 26, 2016 based on Deed of Establishment of OII Limited Liability No. 18, May 26, 2016, drawn before Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., a notary in Tangerang District. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree No. AHU-0026273. AH.01.01. of 2016, May 30, 2016 and the Deed was registered on the Company listing in accordance with UUPT No. AHU-0066215.AH.01.11 of 2016, May 30, 2016.

In accordance with Article 3 of the latest Company's Articles of Association ratified through Deed 05/2022, scope of activities of the Company is Building Construction, Construction Civil Buildings, Specialty Construction, Real Estate, Activities Head Office and Management Consulting.

In order to achieve the above aims and objectives, the Company carries out business activities, among others:

1. Other Building Construction, including business construction, maintenance, and/or development return of buildings that are used for uses other than in groups of 41011-41018, like place worship (mosques, catholic churches, christian churches, temples, monasteries, temples), terminal/station buildings, yasa hall (railway), monumental buildings, state buildings and central/regional government, airport buildings, buildings aircraft hangar, PKPPK (Firefighter) building at the airport), historic buildings, prison buildings, meeting hall building, warehouse, generator building, pump house, depot, power house building, building electrical substation, signal substation building, tower building, storage building including material storage explosives and others. Including change activities and other building renovations. (KBLI Code: 41019)
2. Telecommunication Central Construction, covering construction, maintenance and repair activities telecommunication central building construction along with equipment, such as telephone exchange buildings, telegraph, transmitting tower building, radar receiver microwave, small earth station building and satellite station. Including local communication pipeline and long distance, transmission network, and distribution network telecommunication/telephone cables above ground level, underground and in the water. (KBLI Code: 42206)

3. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. (Kode KBLI: 43212)
4. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (Kode KBLI: 68111)
5. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI: 70209)
3. Telecommunication Installation, includes activities installation of telecommunications installations in buildings buildings for both residential and non-residential purposes, such as antenna installation. This group also includes installation, maintenance and repair activities telecommunications installations at telephone/ telegraph exchanges, microwave radar transmitting station, earth station small/satellite stations and the like. Including activities installation of transmission and telecommunications networks and telecommunications installations in buildings and civil buildings. (KBLI Code: 43212)
4. Owned Or Rented Real Estate, includes buying, selling, leasing and operating real estate both self-owned or rented, such as apartment buildings, buildings residential and non-residential buildings (such as storage/warehouse, mall, shopping center and others) as well as the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for personal use permanently, either monthly or annually. Including land sales activities, building development for self-operated (for the rental of spaces in the the building), the division of real estate into land lot without land development and operation residential area for movable houses. (KBLI Code: 68111)
5. Other Management Consulting Activities, including provision of advice, guidance and operational assistance business and organizational and management problems others, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; goal and marketing policy; planning, practice and policy human Resources; scheduling planning and production control. The provision of this business service can includes advice, guidance and operational assistance various management functions, management consulting agronomist and agricultural economist in the field of agriculture and the like, the design of methods and accounting procedures, cost accounting programs, procedures budget monitoring, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency, and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services. (KBLI Code: 70209)

Alamat OII Address

PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
Jalan Jatinegara Barat No. 44,
Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Struktur Kepengurusan OII Organizational Structure of OII

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Commissioner	Karim Panjaitan
Direktur Utama President Director	Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Jimmy Kadir

Informasi tentang Pencatatan Saham INFORMATION ON SHARE LISTING

Hingga akhir tahun 2021, Moratelindo tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun.

Until the end of 2021, Moratelindo did not trade its shares publicly and did not list its shares on any stock exchange.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND LISTING OF SECURITIES

"Untuk memperkuat struktur pendanaannya, Moratelindo memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk di antaranya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah."

"To strengthen its funding structure, Moratelindo utilizes a variety of financial instruments, including among others issuance of Bonds and Sukuk Ijarah."

Perusahaan pada 7 Desember 2017 resmi mencatatkan Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya pada Juli 2019, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo yang terbagi dalam beberapa tahap. Hingga akhir tahun 2021 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo telah diterbitkan dalam 4 (empat) tahap.

On December 7, 2017, the Company officially listed the Public Offering of Bonds I Moratelindo 2017 on BEI (Indonesia Stock Exchange). Subsequently, in July 2019, the Company conducted Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo, which was divided into several more phases. Until the end of 2021, Sustainable Public Offering (PUB) of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo has been issued in four phases.

Berikut disampaikan daftar Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan dan belum jatuh tempo:

Below is the detailed lists of securities issued by the Company that are not yet due:

Daftar Obligasi yang Masih Beredar Periode 2020-2021

Lists of Bonds Valid through 2020-2021

Nama dan Jenis Obligasi Name and Type of Bonds	Nilai (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tingkat Bunga Interest Rate	Jangka Waktu (Tahun) Term (Years)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Status
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Bonds I Moratelindo 2017							
Seri B Series B	460.000	7 Desember 2017 December 7, 2017	10,50%	5	6 Desember 2022 December 6, 2022	idA+ (Single A Plus) *	Aktif Active
Jumlah Total	460.000						

* Efektif per 8 Maret 2022 Moratelindo memperoleh peningkatan terhadap hasil pemeringkatan dari tahun sebelumnya, dari rating idA menjadi idA+ dan idA(sy) menjadi idA+(sy)
* Effective March 8, 2022, Moratelindo earned a rating of idA+ and idA+(sy), improving over the previous year's idA and idA+(sy)

Daftar Sukuk yang Masih Beredar Periode 2020-2021

List of 2020-2021 Outstanding Sukuk

Nama dan Jenis Sukuk Name and Type of Sukuk	Nilai (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Cicilan Imbalan Reward Installment	Jangka Waktu (Tahun) Term (Years)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Status
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Sukuk Shelf I Moratelindo 1st Year Program Year 2019							
Seri A Series A	347.000	9 Juli 2019 July 9, 2019	34.350	3	9 Juli 2022 July 9, 2022	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Seri B Series B	653.000	9 Juli 2019 July 9, 2019	68.570	5	9 Juli 2024 July 9, 2024	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Jumlah Total	1.000.000						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Sukuk Shelf I Moratelindo 2nd Year Program Year 2020							
Seri A Series A	191.000	12 Agustus 2020 August 12, 2020	20.055	3	12 Agustus 2023 August 12, 2023	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Seri B Series B	86.000	12 Agustus 2020 August 12, 2020	9.675	5	12 Agustus 2025 August 12, 2025	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Jumlah Total	277.000						

Daftar Sukuk yang Masih Beredar Periode 2020-2021

List of 2020-2021 Outstanding Sukuk

Nama dan Jenis Sukuk Name and Type of Sukuk	Nilai (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Cicilan Imbalan Reward Installment	Jangka Waktu (Tahun) Term (Years)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Status
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Sukuk Shelf I Moratelindo 3rd Program Year 2020							
Seri A Series A	333.365	8 Oktober 2020 October 8, 2020	35.003	3	8 Oktober 2023 October 8, 2023	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Seri B Series B	56.150	8 Oktober 2020 October 8, 2020	6.317	5	8 Oktober 2025 October 8, 2025	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Jumlah Total	389.515						

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Sukuk Shelf I Moratelindo 4th Program Year 2021							
Seri A Series A	469.100	4 Mei 2021 May 4, 2021	48.082	3	4 Mei 2024 May 4, 2024	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Seri B Series B	30.900	4 Mei 2021 May 4, 2021	3.399	5	4 Mei 2026 May 4, 2026	idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*	Aktif Active
Jumlah Total	500.000						

* Efektif per 8 Maret 2022 Moratelindo memperoleh peningkatan terhadap hasil pemeringkatan dari tahun sebelumnya, dari rating idA menjadi idA+ dan idA(sy) menjadi idA+(sy)
* Effective March 8, 2022, Moratelindo earned a rating of idA+ and idA+(sy), improving over the previous year's idA and idA+(sy)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal per 31 Desember 2021

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS AS OF DECEMBER 31, 2021

Akuntan Publik Public Accountant

Nama Name	:	KAP Mirawati Sensi Idris (an Independent Member of Moore Global Network Limited)
Alamat Address	:	Intiland Tower lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32 Jakarta 10220
Periode Penugasan Assignment Period	:	Mei 2021 – Desember 2021
Informasi Jasa Audit dan/atau Non Audit yang diberikan Information on Audit and/or Non-Audit Services provided	:	Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan melakukan attestasi pada Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). Adapun akuntan yang menandatangani Laporan Auditor Independen untuk periode 2021 adalah Ahmad Syakir. Izin Akuntan Publik No. AP.0153. Performed an audit of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and attest to the Prudential Implementation Activity Report (KPPK). The accountants who signed the Independent Auditor's Report for the period 2021 is Ahmad Syakir. Public Accountant License No. AP.0153.
Biaya jasa (fee) audit untuk tahun buku 2021 Audit fee for the financial year 2021	:	Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2021: Rp220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Atestasi Laporan KPPK: Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Consolidated Financial Statements December 31, 2021: Rp220,000,000.00 (Two Hundred Twenty Million Rupiah) and KPPK Report Attestation: Rp35,000,000 (Thirty Five Million Rupiah)

Wali Amanat Trustee

Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Public Offering of Bonds I Moratelindo

Nama Name	:	PT Bank Mega Tbk
Alamat Address	:	Menara Bank Mega, Lantai 16, Jalan Kapten Tendean Kav. 12 – 12 A, Jakarta 12790

Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I, II, III dan IV Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phased I, II, III, and IV

Nama Name	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Alamat Address	:	Gedung Bank Bukopin Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia

BIRO ADMINISTRASI EFEK Securities Administration Bureau

Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I, II, III dan IV Public Offering of Bonds I Moratelindo and Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phases I, II, III, and IV

Nama Name	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	:	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

LEMBAGA PEMERINGKAT

Rating Institution

Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I, II, III dan IV Public Offering of Bonds I Moratelindo and Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phases I, II, III, and IV

Nama
Name : PT Pemeringkat Efek Indonesia

Alamat
Address : Panin Tower, Senayan City, Lantai 17, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta

NOTARIS

Notary

Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Public Offering of Bonds I Moratelindo

Nama
Name : Fathiah Helmi, S.H.

Alamat
Address : Graha Irama, lantai 6, Suite C
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I, II, III dan IV Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phases I, II, III, and IV

Nama
Name : Aulia Taufani, S.H., M.Kn

Alamat
Address : Menara Sudirman Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 Indonesia

KONSULTAN HUKUM

Legal Consultant

Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I, II, III dan IV Public Offering of Bonds I Moratelindo and Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phases I, II, III, and IV

Nama
Name : Makes & Partners

Alamat
Address : Menara Batavia, lantai 7, jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10220

TIM AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Sharia Expert Team on Capital Market

Nama Name	:	- Irfan Syauqi Beik (Ketua Tim Ahli Syariah/Head of Sharia Expert Team) Izin Ahli Syariah Pasar Modal/Capital Market Sharia Expert License: KEP-22/D.04/ASPM-P/2016 - Mohammad Bagus Teguh Perwira, Anggota Tim Ahli Syariah/Member of Sharia Expert Team Izin Ahli Syariah Pasar Modal/License of Sharia Expert on Capital Market: KEP-03/D.04/ASPM-P/2016
Alamat Address	:	- Irfan Syauqi Beik (Head of Sharia Expert Team) resides in Bogor, West Java - Mohammad Bagus Teguh Perwira (Member of Sharia Expert Team) resides in Bekasi, West Java
Jasa yang Diberikan Provided Services	:	Mendampingi Perusahaan dalam membuat skema Sukuk Ijarah serta memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah Perusahaan Guidance for the Company on preparing the scheme for Sukuk Ijarah and provision of the Letter of Conformity with Syariah on the issuance of Company's Sukuk Ijarah

Daftar Penting Lainnya

Other Important Lists

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Efek Information on Trading and Listing of Securities	:	Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 Email: callcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id
---	---	---



Analisa dan Pembahasan Manajemen

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



04

Tinjauan Umum: Kondisi Perekonomian dan Industri GENERAL OVERVIEW: ECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITION



- Aktivitas Penggelaran kabel bawah laut pada Proyek Palapa Ring Barat.
Submarine cable laying activities on the West Palapa Ring Project.

Latar Belakang Ekonomi Makro

1. Ekonomi Makro Indonesia*

Indonesia memiliki pertumbuhan PDB yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut dalam lima tahun ke depan. PDB Nominal di Indonesia tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,5% dari 2016 hingga 2019, meskipun pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan PDB nominal turun 2,5% dari 2019 hingga 2020. Pemerintah Indonesia menerapkan fiskal darurat paket setara dengan 3,8% dari PDB pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, memberikan bantuan kepada perusahaan dan rumah tangga, dan memfasilitasi peluncuran vaksin. Dengan latar belakang pandemi yang sedang berlangsung, Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan ekonominya yang kuat mulai tahun 2022, dengan PDB nominal ditetapkan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 8,5% mulai tahun 2020 dan seterusnya hingga mencapai Rp25,2 kuadriliun (USD1,7 triliun) pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.1). Ini lebih tinggi dari CAGR yang diharapkan sebesar 7,0% untuk kawasan Asia

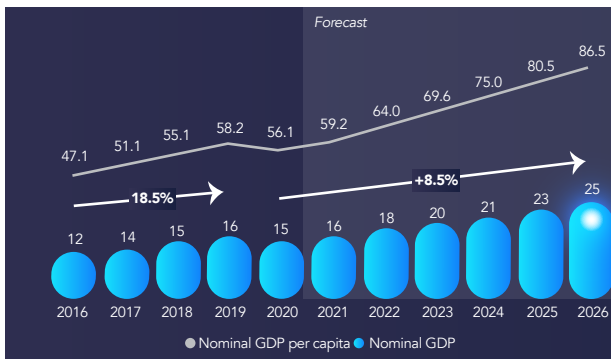
Macroeconomic Background

1. Indonesia Macroeconomics*

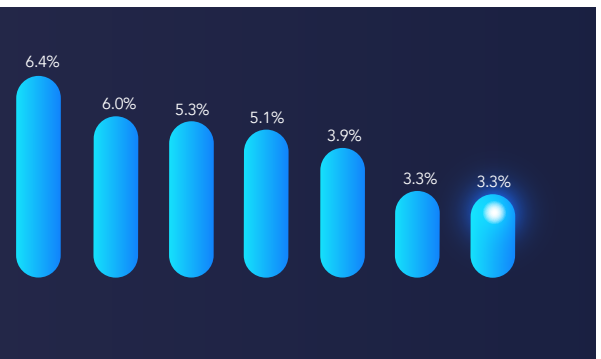
Indonesia has a strong GDP growth which is expected to continue in the next five years. Nominal GDP in Indonesia is growing at a rate of compound annual growth (CAGR) of 8.5% from 2016 to 2019, despite the COVID-19 pandemic impeding economic growth which caused the Nominal GDP fell 2.5% from 2019 to 2020. Government of Indonesia implemented an emergency fiscal package equivalent to 3.8% of GDP in 2020 to reduce the impact of the COVID-19 pandemic and provided assistance to companies and households, and facilitate vaccine launch. Against the backdrop of an ongoing pandemic, Indonesia is expected to continue its strong economic growth in 2022, with a nominal GDP set to grow at a CAGR of 8.5% from 2020 onwards to reach Rp25.2 quadrillion (USD 1.7 trillion) in 2026 (see Figure 1.1). It is higher than CAGR Expected 7.0% for Asia

Tenggara Tenggara pada periode yang sama (lihat Gambar 1.2). PDB nominal per kapita diperkirakan akan mengikuti lintasan yang sama untuk mencapai Rp86 juta (USD5.900) pada tahun 2026, tumbuh pada CAGR sebesar 7,2% dari tahun 2020 hingga 2026. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam PDB per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia. Wilayah Jakarta secara signifikan lebih tinggi daripada wilayah lain di Indonesia (lihat Gambar 1.3).

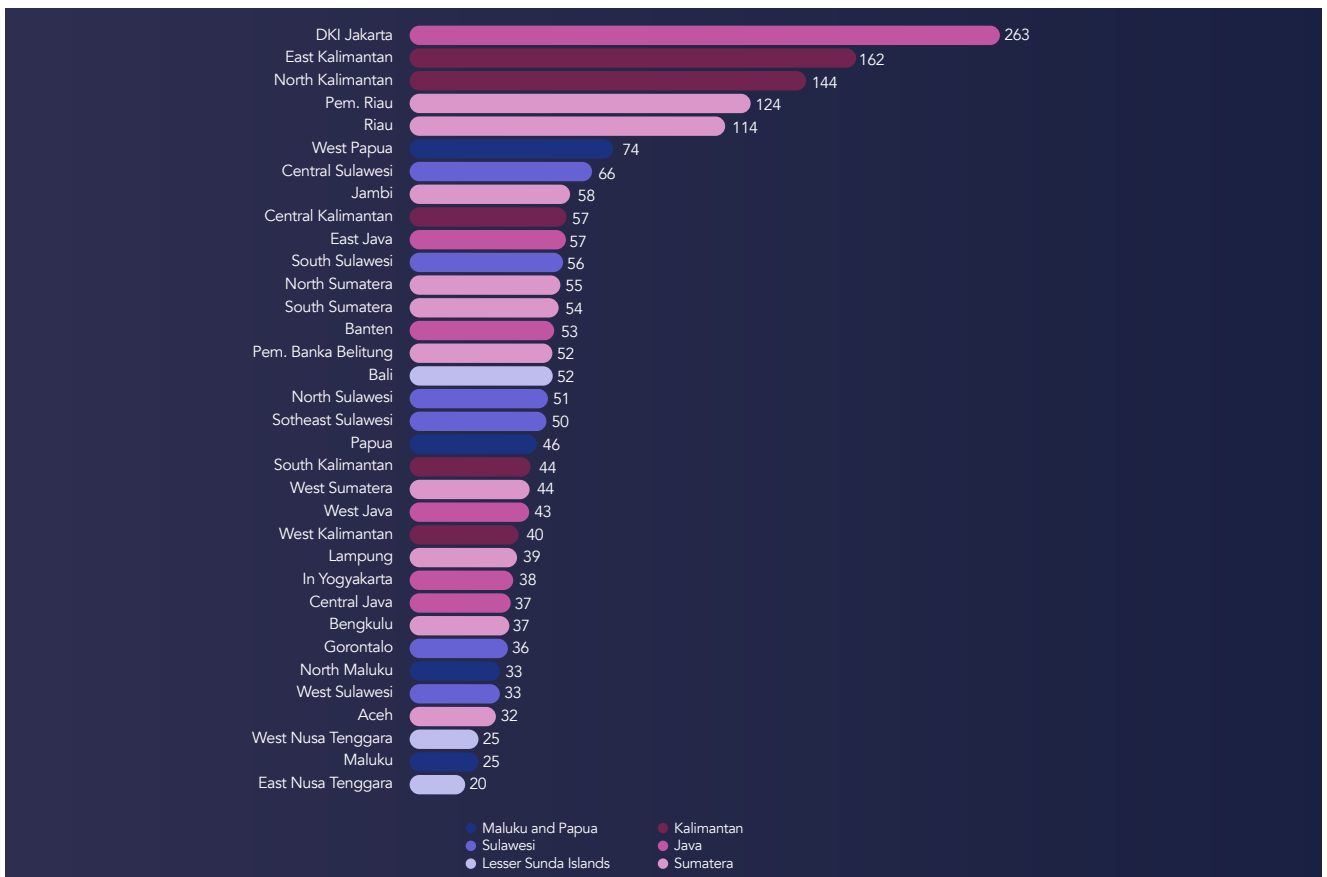
Southeastern Southeast in the same period (see Fig. 1.2). Nominal GDP per capita is expected to follow the same trajectory to reach Rp86 million (USD 5,900) in 2026, growing at a CAGR of 7.2% from 2020 to 2026. In Indonesia, there are differences which is quite large in GDP per capita with GDP per capita in Indonesia. The Jakarta area is significantly more higher than the rest of Indonesia (see Figure 1.3).



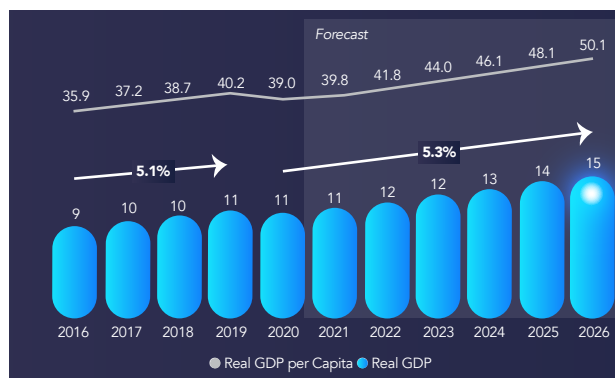
Gambar VIII.1: PDB Nominal (Rpquadrillion) dan PDB nominal per kapita (Rpjuta)
[Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]
Figure VIII.1: Nominal GDP (Rpquadrillion) and nominal GDP per capita (Rpjuta)
[Source: International Monetary Fund, United Nations, 2021]



Gambar VIII.2: Pertumbuhan PDB nominal di Asia Tenggara, CAGR 2020-26
[Sumber: International Monetary Fund, 2021]
Figure VIII.2: Nominal GDP growth in Southeast Asia, CAGR 2020-26
[Source: International Monetary Fund, 2021]



Gambar VIII.3: PDB nominal per kapita (Rpjuta) menurut provinsi, 2020 [Sumber: BPS, 2022]
Figure VIII.3: Nominal GDP per capita (Rpjuta) by province, 2020 [Source: BPS, 2022]



Gambar VIII.4: PDB riil (Rpquadriliun) dan PDB riil per kapita (Rpjuta)
[Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]
Figure VIII.4: Real GDP (Rpquadrillion) and GDP real per capita (Rpmillion)
[Source: International Monetary Fund, United Nations, 2021]

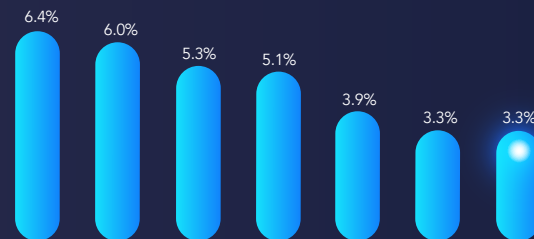
PDB riil dan PDB riil per kapita sebagian besar mengikuti lintasan yang sama dengan PDB nominal dan PDB nominal per kapita, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Secara historis, PDB riil telah tumbuh pada CAGR sebesar 5,1% dan pertumbuhan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan berada pada CAGR sebesar 5,3%. Dari sisi PDB riil, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata kawasan Asia Tenggara.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

2. Populasi dan Pertumbuhan Penduduk*

Indonesia memiliki profil demografis yang menarik untuk layanan telekomunikasi – populasi besar yang sangat urban dan dengan usia rata-rata yang rendah

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan negara terpadat di Asia Tenggara. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki populasi 274,9 juta, dan diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan masa lalunya sebesar 1% CAGR untuk mencapai 290,9 juta pada tahun 2026, menurut proyeksi oleh United Nations.



Gambar VIII.5: Pertumbuhan PDB riil di Asia Tenggara, CAGR 2020-26
[Sumber: International Monetary Fund, 2021]
Figure VIII.5: Real GDP growth in Southeast Asia, CAGR 2020-26
[Source: International Monetary Fund, 2021]

Real GDP and real GDP per capita largely follow the same trajectory as nominal GDP and nominal GDP per capita, even at a growth rate that lower. Historically, real GDP has grown at CAGR of 5.1% and growth in the five years is expected to be at a CAGR of 5.3%. In terms of real GDP, Indonesia's growth is expected to be higher than the Southeast Asian average.

source: Analysys Mason Research, 2021

2. Population and Population Growth*

Indonesia has an attractive demographic profile for telecommunications services – large, highly urbanized population with a low mean age

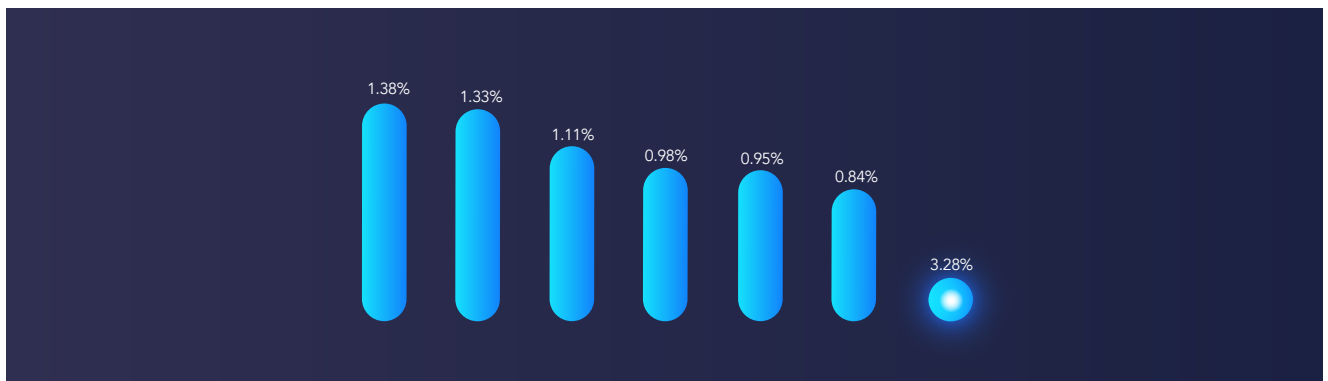
Indonesia is the fourth most populous country in the world and the most populous country in Southeast Asia. In 2020, Indonesia had a population of 274.9 million and it is estimated that it will maintain its past growth rate at 1% CAGR to reach 290.9 million in 2026, according to projections by the United Nations.



Gambar VIII.6: Populasi di Indonesia (juta) dan tingkat pertumbuhan [Sumber: United Nations, 2021]¹
Figure VIII.6: Population in Indonesia (millions) and growth rate [Source: United Nations, 2021]¹

Meskipun memiliki populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya di kawasan ini.

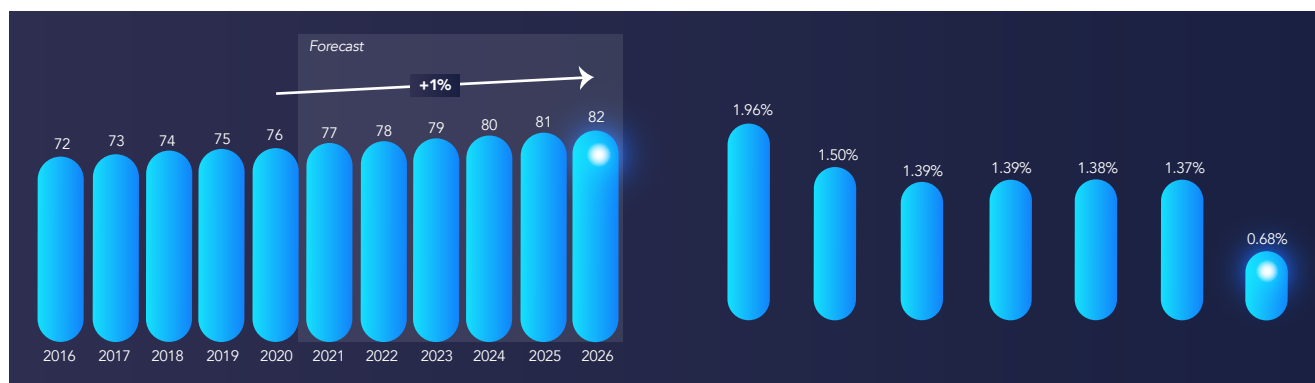
Despite having the largest population in Asia Southeast, Indonesia's population growth rate is higher than its neighbors in the region.



Gambar VIII.7: Populasi CAGR (2016-2020) di Indonesia dan negara-negara ASEAN 2 [Sumber: United Nations, 2021]
Figure VIII.7: Population CAGR (2016-2020) in Indonesia and ASEAN 2 countries [Source: United Nations, 2021]

Selama lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang stabil, yang diperkirakan akan berlanjut pada CAGR 1% hingga 2026. Pertumbuhan di pasar yang dapat dialamatkan ini positif untuk layanan telekomunikasi yang dibeli per rumah tangga, mis. broadband tetap perumahan.

Over the past five years, the number of households in Indonesia is also experiencing a steady growth, which is expected to continue at a CAGR of 1% until 2026. Growth in this addressable market is positive for telecommunications services purchased per house stairs, eg. residential fixed broadband.



Gambar VIII.8: Rumah tangga di Indonesia (juta) [Sumber: Analysys Mason Research, 2021]
Figure VIII.8: Households in Indonesia (millions) [Source: Analysys Mason Research, 2021]

Gambar VIII.9: CAGR Rumah Tangga (2016-20) di Indonesia dan negara-negara ASEAN 3 [Sumber: Analysys Mason Research, 2021]
Figure VIII.9: Household CAGR (2016-20) in Indonesia and ASEAN 3 countries [Source: Analysys Mason Research, 2021]

Indonesia juga menjadi semakin urban, dengan total populasi perkotaan diperkirakan akan tumbuh dari 156 juta pada tahun 2020 menjadi 176 juta pada tahun 2026 (CAGR sebesar 2,1%), yang akan meningkatkan pangsa penduduk perkotaan dari 57% pada tahun 2020 menjadi 60% pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.10). Pertumbuhan ini kemungkinan akan terkonsentrasi di pusat-pusat kota terbesar di Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Depok dan Medan.

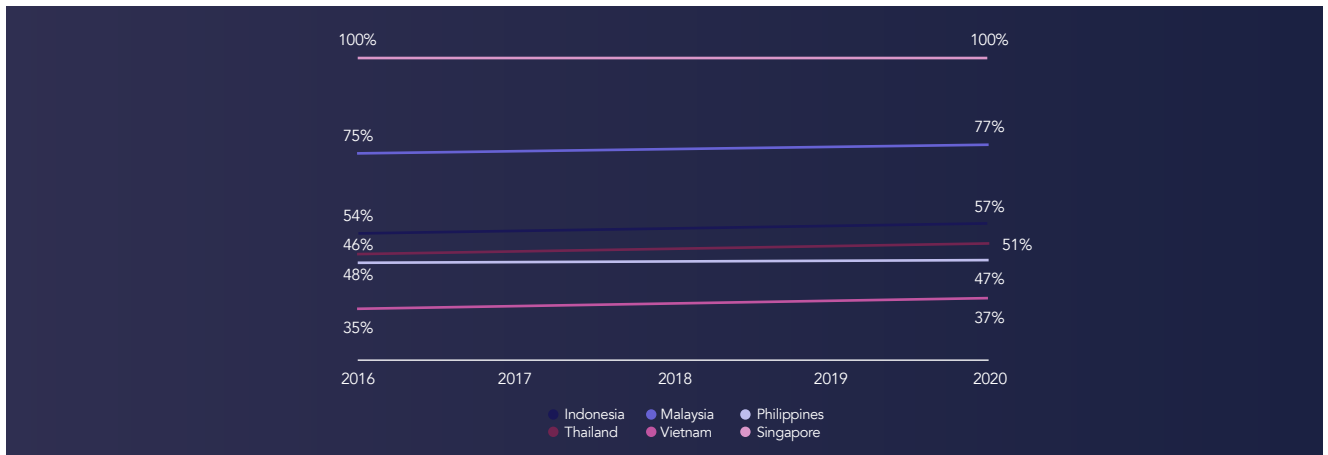
Indonesia is also becoming increasingly urbanized, with a total urban population expected to grow from 156 million in 2020 to 176 million in 2026 (CAGR of 2.1%), which will increase the share urban population from 57% in 2020 to 60% by 2026 (see Figure 1.10). Growth this is likely to be concentrated in the largest city centers in Indonesia, especially Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Depok, and Medan.



Gambar VIII.10: Penduduk Indonesia dibagi berdasarkan perkotaan/pedesaan (juta) [Sumber: United Nations 2021]
Figure VIII.10: Indonesian population divided by urban/rural (millions) [Source: United Nations 2021]

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia berada tepat di belakang Malaysia dan negara kota Singapura dalam hal proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.11).

When compared to its neighboring countries in Southeast Asia, Indonesia is right behind Malaysia and the city-state of Singapore in terms of population proportion living in urban areas (as indicated in Figure 1.11).



Gambar 1.11: Persentase penduduk perkotaan (2016–20) [Sumber: United Nations, 2021]
Figure 1.11: Percentage of urban population (2016–20) [Source: United Nations, 2021]

Tren urbanisasi yang kuat di Indonesia, ditambah dengan ruang yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi, karena urbanisasi cenderung meningkatkan pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan, membuat layanan telekomunikasi lebih terjangkau. Operator dapat mencapai penghematan biaya yang signifikan saat meluncurkan jaringan mereka di daerah perkotaan yang padat. Penerapan di daerah berpenduduk padat meningkatkan ketersediaan layanan lanjutan untuk audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memungkinkan operator untuk mengurangi harga layanan yang diberikan.

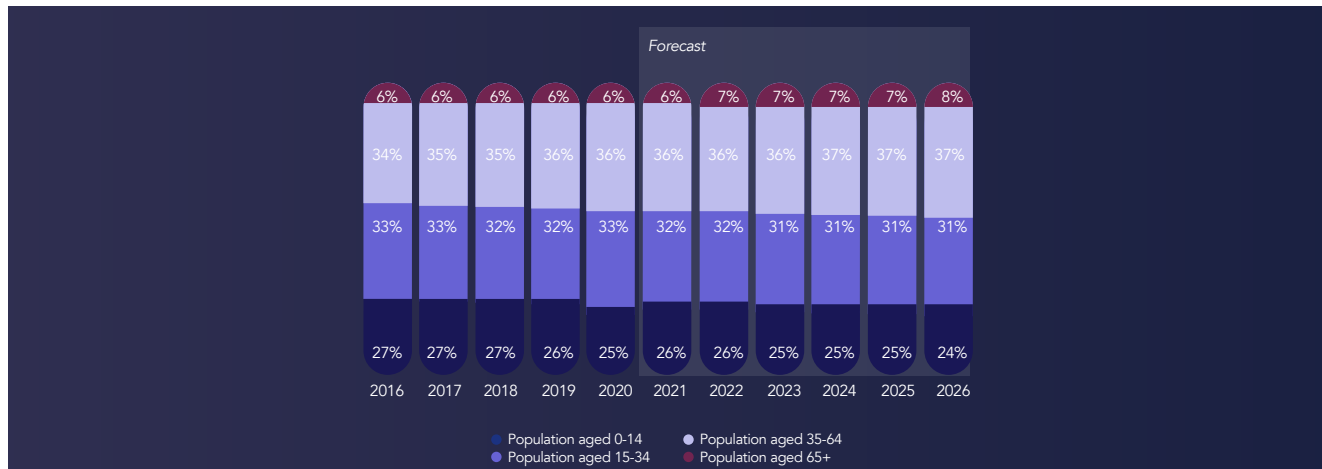
Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda, dengan 58% berusia di bawah 35 tahun pada tahun 2020. Penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15–64 tahun, mewakili 68% dari total pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.12). Diproyeksikan akan meningkat dari 190 juta pada tahun 2020 menjadi 197 juta pada tahun 2026.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda dengan usia rata-rata nasional 31 tahun lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara. Tingginya proporsi penduduk usia muda dan usia kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan untuk layanan telekomunikasi.

Indonesia's strong urbanization trend, coupled with sufficient space for future growth, creates a favorable environment for telecommunications services, because urbanization tends to increase consumer income which can be spent, making telecommunications services more affordable. Operators can achieve significant cost savings when launching their network in the dense urban area. Application in densely populated areas increases the availability of advanced services for a wider audience, which in turn can allow operators to reduce service prices.

Indonesia also has a relatively young population, with 58% are under 35 years old in 2020. Population of working age, i.e. those aged 15–64 years, represents 68% of the total in 2020 (see Figure 1.12). Projected to increase from 190 million in 2020 to 197 million in 2026.

Compared to Southeast Asian countries, Indonesia also has a relatively young population with a national average age of 31 years, lower than Southeast Asia average. High proportion of population of young age and working age are expected to encourage economic growth and create a market environment profitable for telecommunications services.



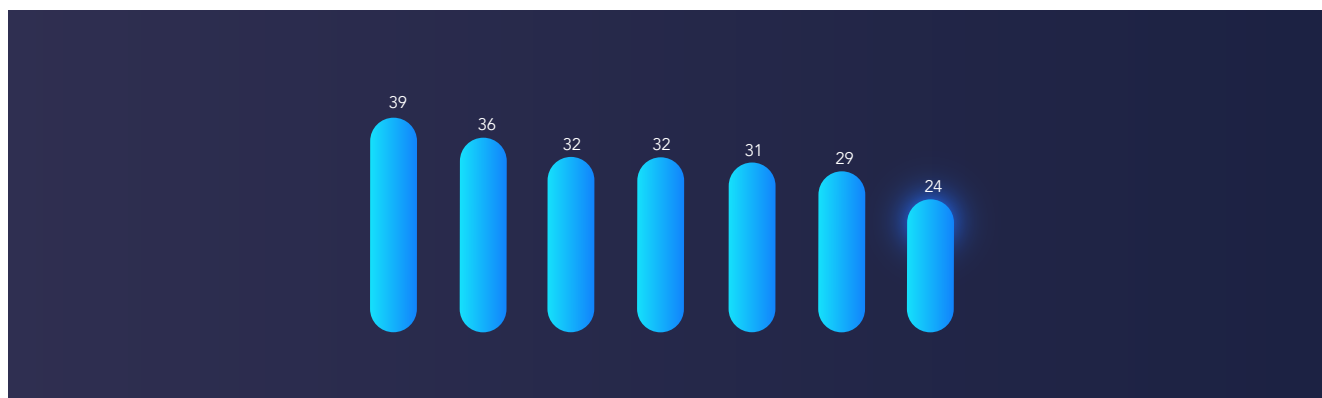
Gambar VIII.11: Distribusi penduduk di Indonesia menurut kelompok umur [Sumber: BPS, 2021]
Figure VIII.11: Population distribution in Indonesia by age group [Source: BPS, 2021]

Di antara rekan-rekan regional, Indonesia memiliki populasi yang relatif muda (usia rata-rata 31, yang lebih rendah dari rata-rata di antara negara-negara Asia Tenggara (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.13) Proporsi penduduk yang masih muda dan usia kerja yang tinggi adalah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

Among regional peers, Indonesia has a population relatively young (mean age 31, which is lower than average among Southeast Asian countries (such as shown in Figure 1.13). Proportion of population who are still young and of high working age are is expected to encourage economic growth and create a favorable market environment for telecommunication services.

source: Analysys Mason Research, 2021



Gambar VIII.12: Usia rata-rata di Indonesia dan negara-negara ASEAN 4, 2021 [Sumber: World Factbook, 2021]
Figure VIII.12: Average age in Indonesia and ASEAN 4 countries, 2021 [Source: World Factbook, 2021]

3. Pendapatan Sekali Pakai (*Disposable Income*) per Kapita/Rumah Tangga*

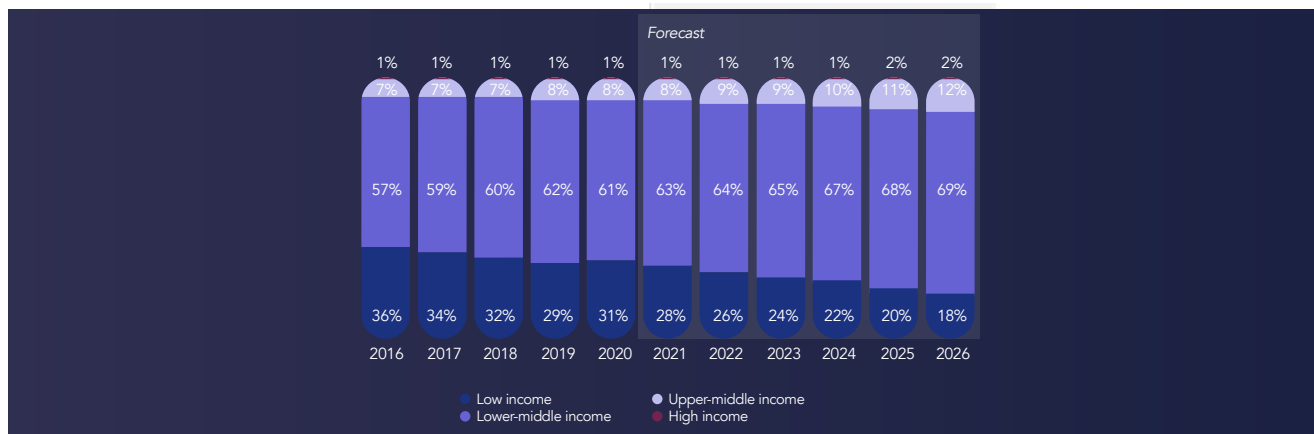
Pendapatan rumah tangga per kapita di Indonesia terus meningkat

Proporsi penduduk berpenghasilan rendah di Indonesia juga menyusut, dengan hanya 18% yang diperkirakan berpenghasilan kurang dari USD1.000 per tahun pada tahun 2026, dibandingkan dengan 31% pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.14). Kenaikan tingkat pendapatan secara umum kemungkinan akan meningkatkan daya beli, yang kemungkinan akan mendorong konsumsi layanan telekomunikasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

3. Disposable Income per Capita/Household*

Household income per capita in Indonesia continues to increase

Proportion of low-income population in Indonesia also shrunk, with only 18% expected earning less than USD1,000 per year in 2026, compared to 31% in 2020 (see Figure 1.14). Increase in income level is generally likely to increase purchasing power, which is likely to drive service consumption telecommunications and spur economic growth.



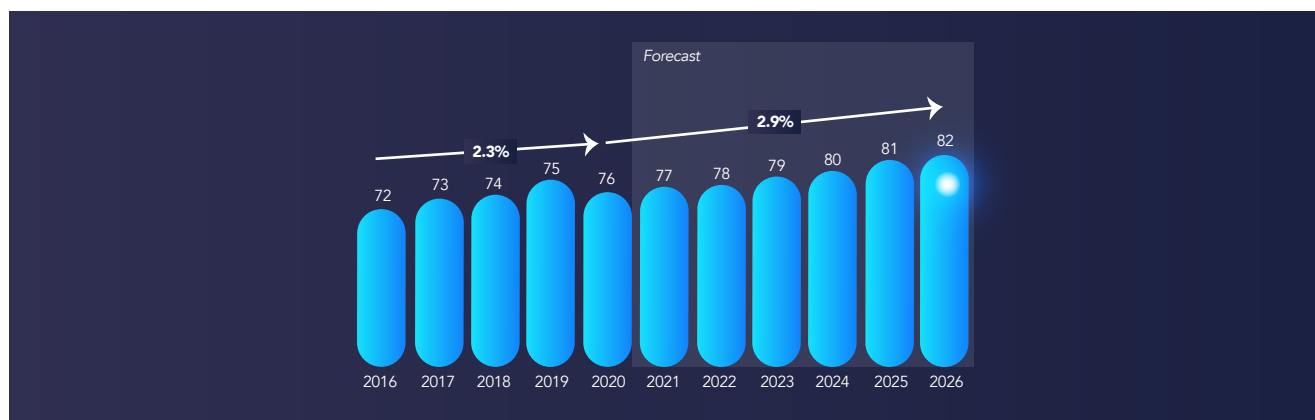
Gambar VIII.13: Distribusi penduduk menurut tingkat pendapatan [Sumber: Economist Intelligence Unit, 2021]
Figure VIII.13: Distribution of population by income level [Source: Economist Intelligence Unit, 2021]

Catatan: Jumlah individu dengan pendapatan tahunan dalam kelompok berikut: berpenghasilan rendah (USD<1.000), berpenghasilan menengah ke bawah (USD1.000–5.000), berpenghasilan menengah ke atas (USD5.00–15.000), berpenghasilan tinggi (USD>15.000)

Note: Number of individuals with annual income in the following groups: low income (USD<1,000), middle to low income (USD1,000–5,000), upper-middle income (USD5.00–15,000), high income (USD>15,000).

Penurunan populasi berpenghasilan rendah juga tercermin dalam pertumbuhan pendapatan disposabel rata-rata selama periode 2016–20. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan.

The decline in the low-income population is also reflected in average disposable income growth during the 2016–20 period. This trend is expected to continue for the next five years.



Gambar 1.15: Proyeksi pendapatan disposabel rata-rata per rumah tangga (Rpjuta), 2016-26 [Sumber: Economist Intelligence Unit, Analysys Mason, 2022]
Figure 1.15: Projected average disposable income per household (Rpmillion), 2016-26 [Source: Economist Intelligence Unit, Analysys Mason, 2022]

Pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan disposabel rata-rata akan membantu mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk broadband. Konsumen baru dapat mendaftar ke layanan sementara konsumen yang sudah ada bermigrasi ke bandwidth yang lebih tinggi dan paket yang lebih mahal.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

4. Pengeluaran Konsumsi Tahunan per Kapita*

Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita telah meningkat, meskipun ada perbedaan regional di seluruh Indonesia.

Layanan telekomunikasi, meskipun seringkali penting dalam kehidupan sehari-hari, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk penggunaan. Hal ini terutama berlaku untuk layanan bandwidth tinggi yang secara ekonomis lebih menarik bagi penyedia layanan. Rata-rata rumah tangga beranggotakan empat orang di Indonesia biasanya menghabiskan.

~7-8% dari pendapatan sekali pakainya untuk layanan telekomunikasi. Meskipun terjadi penurunan kecil akibat pandemi COVID-19, pengeluaran konsumsi per kapita di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang stabil (CAGR 5% selama periode 2016-21).

Strong growth in average disposable income will help drive budget spending households for telecommunications services, including broadband. New consumers can register for the service while existing consumers migrate to higher bandwidth and more expensive plans.

source: Analysys Mason Research, 2021

4. Annual Consumption Expenditure per Capita*

Annual consumption expenditure per capita has increased, although there are regional differences across Indonesia.

Telecommunications services, although often essential in daily life, depends on availability of disposable income. This is especially true for high bandwidth services which is economically more attractive to service providers. The average household consists of four people in Indonesia usually spends.

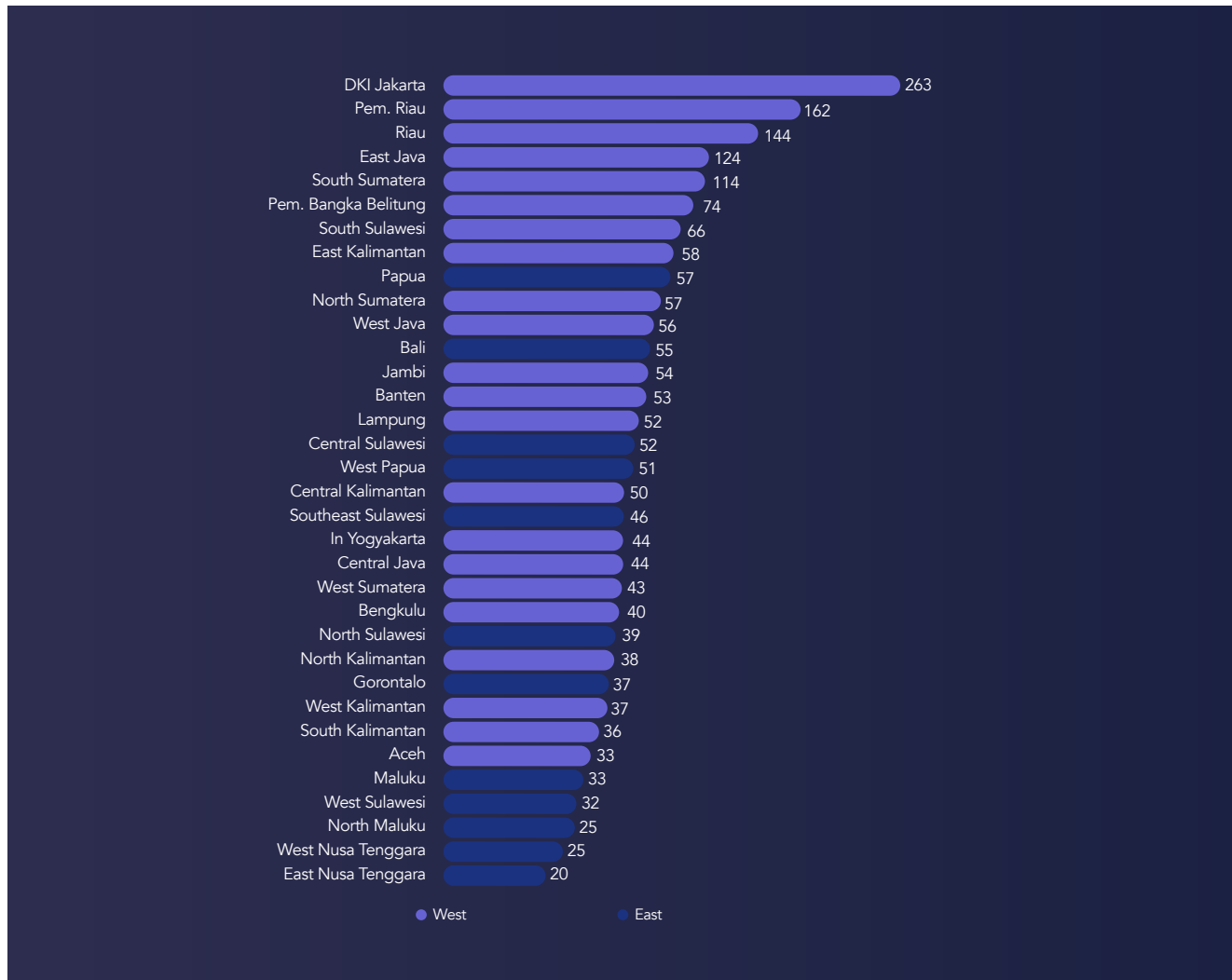
~7-8% of his disposable income for services telecommunication. Although there was a small decrease due to COVID-19 pandemic, consumption expenditure per capita in Indonesia has experienced steady growth (CAGR 5% over the period 2016-21).



Gambar VIII.14: Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita (Rpjuta), Indonesia [Sumber: BPS, 2022]
Figure VIII.14: Annual consumption expenditure per capita (Rpmillion), Indonesia [Source: BPS, 2022]

Namun, ada perbedaan regional yang signifikan dalam tren konsumsi di Indonesia dengan wilayah timur biasanya tertinggal di belakang bagian barat negara yang lebih kaya; pengeluaran konsumsi tahunan rata-rata di wilayah barat Indonesia, sekitar Rp34 juta, lebih dari 50% lebih tinggi daripada di wilayah timur Indonesia (sekitar Rp22 juta), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.17. Jakarta memiliki keunggulan signifikan dibandingkan wilayah lain di negara ini dalam hal pendapatan disposabel yang tersedia.

However, there are significant regional differences in consumption trends in Indonesia with the eastern region usually lagging behind the rich western parts of the country; average annual consumption expenditure in the western Indonesian region is around Rp34 million, more than 50% higher than in eastern Indonesia (around Rp22 million), as shown in Figure 1.17. Jakarta has a significant advantage over other regions in the country in terms of available disposable income.



Gambar 1.17: Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita menurut provinsi (Rpjuta), 2020 [Source: BPS, 2022]
Figure 1.17: Annual consumption expenditure per capita by province (Rpmillion), 2020 [Source: BPS, 2022]

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

Indonesia, currently the largest economy in Southeast Asia, has witnessed strong economic growth which is expected to continue over the next five years. The population is increasingly urban and has a lower average age low, all attributes of interest to telecommunication service providers. Prosperity also increases with increase in household income per capita leads to consumption expenditure per capita which higher. The market is expected to remain attractive to telecommunication service provider.

source: Analysys Mason Research, 2021

Kesimpulan*

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

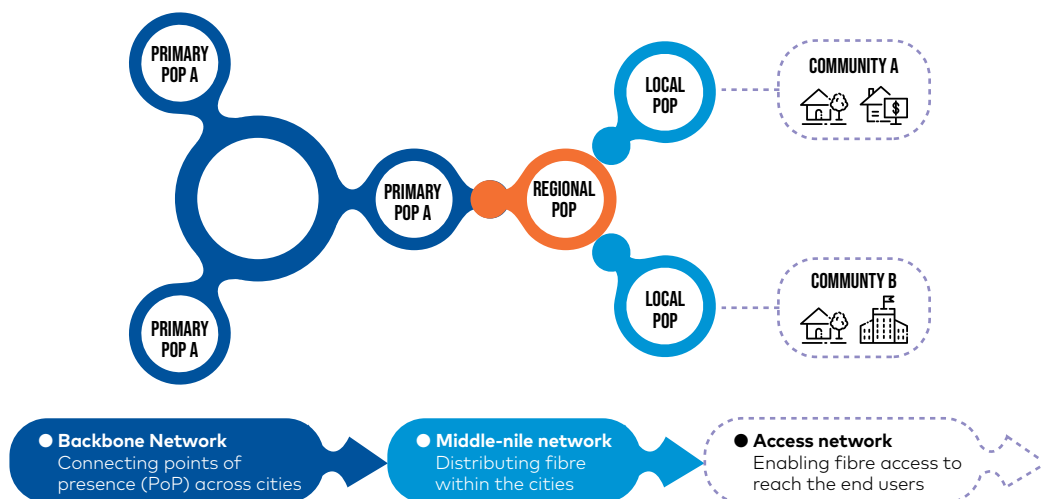
sumber: Analysys Mason Research, 2021

Tinjauan Industri Infrastruktur Kabel Fiber*

Permintaan kabel serat biasanya berasal dari berbagai segmen pelanggan seperti - (1) operator telekomunikasi yang menggunakan serat untuk menghubungkan situs jaringan, (2) penyedia layanan internet yang menyewa kabel serat untuk menyediakan layanan konektivitas, (3) pelanggan perusahaan dan perumahan yang menggunakan sambungan kabel serat untuk kebutuhan konektivitas kecepatan tinggi untuk mereka sendiri. Penyedia layanan internet adalah segmen pelanggan utama lainnya untuk serat jaringan dan kapasitas sewa untuk menyediakan layanan yang berbeda kepada pelanggan perusahaan dan perumahan.

Penyedia jaringan serat untuk layanan internet dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen terpisah:

- Jaringan tulang punggung
- Jaringan jarak menengah
- Jaringan akses
- Contoh ilustrasi jaringan serat tetap



sumber: Analysys Mason Research, 2021

Key Takeaway*

Indonesia, currently the largest economy in Southeast Asia, has witnessed strong economic growth which is expected to continue for the next five years. The population is increasingly urban and has a lower average age, all attributes of interest to telecommunication service providers. Prosperity also increases with household income per capita on consumption expenditure per capita which is higher. The market is expected to remain attractive to telecommunications service provider.

source: Analysys Mason Research, 2021

Fiber Cable Infrastructure Industry Overview*

Demand for fiber cables usually comes from various sources of customer segments such as - (1) telecommunications operators which uses fiber to connect sites network, (2) Internet service providers who rent fiber cable to provide connectivity services, (3) corporate and residential customers who use fiber cable connection for high speed connectivity needs for themselves. The Internet service provider is another major customer segment for network fiber and rental capacity to provide different services to enterprise customers and housing area.

Fiber network providers for Internet services can be grouped into three separate components:

- Backbone network
- Middle-mile network
- Access network
- An illustrative example of a fixed fiber network

source: Analysys Mason Research, 2021

Jaringan Tulang Punggung (*Backbone Network*) di Indonesia*

Di Indonesia, beberapa jaringan backbone sudah tersedia dari berbagai provider (misalnya Telkom, Moratelindo, ICON+, XL). Pemain seperti Moratelindo, XL dan Indosat memiliki jaringan backbone yang dalam kombinasi secara luas sama dengan Telkom – meskipun mungkin ada jaringan backbone yang tumpang tindih di area tertentu. Palapa Ring dapat meningkatkan konektivitas antar pulau, meskipun dampaknya terhadap konektivitas masyarakat lokal mungkin tidak signifikan karena tantangan dalam membawa fiber dari *Point of Presence* (PoPs) ke kota-kota sasaran.

Karena penyedia layanan internet memperluas layanan berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, permintaan akan infrastruktur serat diperkirakan akan kuat. Pemain yang ada secara historis berinvestasi dalam beberapa serat tulang punggung untuk digunakan sendiri, meskipun pemain baru lebih cenderung menyewa tulang punggung untuk ekspansi ke area baru.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

Faktor Utama Pendorong Pasar*

I. Meningkatnya Persyaratan *Backhaul* Seiring Kemajuan Teknologi Seluler (5G)

Backhaul mengacu pada koneksi point-to-point antara situs jaringan seluler dan jaringan inti dari operator seluler. Ini dapat disediakan dengan menggunakan berbagai teknologi, meskipun gelombang mikro dan serat adalah yang paling umum. Karena teknologi seluler memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi untuk pengguna akhir (5G, dll.), pertumbuhan berkelanjutan dalam persyaratan kapasitas backhaul akan diperlukan. Serat fiber, memberikan bandwidth yang lebih tinggi, kekebalan interferensi dan jangkauan yang lebih jauh, akan menjadi satu-satunya teknologi yang layak untuk mendukung kapasitas ini meskipun biaya penyebaran kemungkinan akan tetap lebih tinggi daripada *link microwave* (biaya sewa backhaul serat sekitar 60% lebih mahal daripada *microwave* yang sesuai tautan).

II. Pertumbuhan Langganan Broadband Tetap (*Fixed Broadband*) di Segmen Perumahan

Permintaan broadband tetap perusahaan diperkirakan akan tumbuh kuat – terutama dari UKM. Oleh karena itu, pemerintah aktif dalam mendidik usaha kecil dengan program 'UMKM Go Online' untuk mendorong kesadaran internet untuk bisnis mereka. Kementerian

The Backbone Network in Indonesia*

In Indonesia, several backbone networks are already available from various providers (e.g. Telkom, Moratelindo, ICON+, XL). Players like Moratelindo, XL, and Indosat have a backbone network that in combination are the same as Telkom – although there may be a backbone network that overlaps in certain areas. Palapa Ring can improve inter-island connectivity, though possible impact on local community connectivity may not be significant because of the challenges in carrying fiber from Point of Presence (PoPs) to target cities.

As Internet service providers are expanding their high-speed services throughout Indonesia, the demand for fiber infrastructure is expected to be robust. Existing players historically invested in some backbone fibers for own use, even though the player new are more likely to rent the backbone for expansion into new areas.

source: Analysys Mason Research, 2021

Key Market Drivers*

I. Increasing Backhaul Requirements as Advances in Mobile Technology

Backhaul refers to point-to-point connections between cellular network sites and the core network of cellular operators. This can be provided using various technologies, although microwave and fiber are the most general. Because mobile technology enables speed higher data rates for end users (5G, etc.), sustainable growth in capacity requirements backhaul will be required. Fiber fiber, providing higher bandwidth, interference immunity, and wide range furthermore, will be the only viable technology to support this capacity despite deployment costs will likely stay higher than the microwave link (fiber backhaul rental costs about 60% more than suitable microwave).

II. Fixed Broadband Subscription Growth (*Fixed Broadband*) in the Residential Segment

Estimated enterprise fixed broadband demand will grow strongly – especially from SMEs. Therefore, the government is active in educating small businesses by 'UMKM Go Online' program to encourage Internet awareness for their business. Indonesia Ministry of

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia juga telah menyediakan akses internet gratis secara uji coba kepada komunitas bisnis untuk mendorong usaha kecil menggunakan internet dan menjadi pengguna berbayar. Migrasi dari paket konsumen ke perusahaan juga cenderung mengarah pada pertumbuhan pasar.

Pendapatan dari koneksi khusus diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih bertahap namun stabil. Permintaan untuk koneksi dengan bandwidth yang lebih tinggi diproyeksikan akan tumbuh, terutama untuk mendukung layanan berbasis cloud seperti yang terlihat dengan masuknya pemain cloud terkemuka. Namun, peluncuran solusi SD-WAN dapat memberikan tekanan pada pertumbuhan pendapatan dengan meniadakan permintaan konektivitas khusus.

III. Penggunaan Data Konsumen yang Melonjak

Penggunaan data per koneksi diperkirakan akan tumbuh kuat dan mencapai ~20GB/bulan pada tahun 2025 berdasarkan perkiraan Analysys Mason Research, didorong oleh:

- Pertumbuhan penetrasi smartphone lebih lanjut, difasilitasi oleh peningkatan ketersediaan smartphone kelas bawah yang ditawarkan oleh produsen perangkat China.
- Meningkatkan konsumsi konten video melalui seluler dan dengan kualitas yang lebih tinggi (contoh. Full HD, video 4K).
- Popularitas platform media sosial, terutama yang melibatkan posting foto dan video dan dengan demikian mendorong penggunaan data (contoh. Indonesia memiliki >87 juta pengguna aktif di TikTok per Oktober 2021).
- Pertumbuhan pesat dalam ekonomi digital, dipimpin oleh unicorn lokal dan pertumbuhan yang dihasilkan dalam transaksi terkait (contoh. e-commerce, ride-hailing).

Pada tahun 2020, penggunaan data konsumen telah meningkat secara signifikan dalam beberapa aspek, yang terutama mencakup media sosial, game, dan e-commerce:

- Media sosial: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kedelapan secara global untuk waktu yang dihabiskan online setiap hari (8 jam 52 menit). Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook dan Instagram tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara – pengguna ini mendorong konsumsi data, karena kedua platform media sosial tersebut dikenal sebagai host konten gambar dan video.

Communications and Informatics (Kominfo) has also provided free Internet access on a trial basis to the business communities to encourage small businesses to use the Internet and become paid users. Migration from packages consumers to companies also tend to lead to market growth.

Revenue from special connections is expected to experience a more gradual growth yet stable. Requests for connections with higher bandwidth is projected to grow, especially to support cloud-based services as seen with the influx of leading cloud players (e.g. Amazon Web Services). However, launch of SD-WAN solutions could put pressure on growth revenue by eliminating the demand for connectivity special.

III. Soaring Consumer Data Usage

Data usage per connection is expected to grow powerful and reach ~20GB/month by 2025 based on Analysys Mason Research estimates, driven by:

- Further growth of smartphone penetration, facilitated by increased availability of low-end smartphones offered by device Chinese manufacturers.
- Increase consumption of video content via mobile and with higher quality (eg. Full HD, 4K videos).
- The popularity of social media platforms, especially those that involve posting photos and videos, thereby encouraging the use of data (e.g. Indonesia has >87 million active users on TikTok as of October 2021).
- Rapid growth in the digital economy, led by local unicorns and the resulting growth in related transactions (eg e-commerce, ride-hailing).

In 2020, consumer data usage has significantly improved in several aspects, which mainly includes social media, games and e-commerce:

- Social media: in 2020, Internet users in Indonesia rank eighth overall globally for time spent online every day (8 hours 52 minutes). Indonesia has the highest number of Facebook and Instagram users among Southeast Asian countries – this pushed data consumption, because both social media platforms are known as image and video content hosts.

- Media dan game: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kesembilan secara global untuk waktu yang dihabiskan setiap hari untuk bermain video game di konsol game (1 jam 16 menit) dan rata-rata 2 jam 50 menit setiap hari untuk menonton TV (siaran dan streaming). Banyaknya waktu yang dihabiskan menggunakan aplikasi intensif data ini kemungkinan akan mendorong konsumsi data.
- E-commerce: Indonesia adalah rumah bagi beberapa platform e-commerce terbesar di kawasan ini. Pasar konsumen e-commerce meningkat sebesar 49% pada tahun 2020 menjadi USD30,3 miliar. Saat konsumen memigrasikan lebih banyak aktivitas belanja online mereka, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk browsing dan membandingkan online, yang akan mendorong konsumsi data.

Namun, pada tahun 2020, menurut Analysys Mason Research, penggunaan data rata-rata di Indonesia saat ini lebih rendah daripada negara tetangga lainnya seperti Thailand (~11GB/bulan) dan Malaysia (~15GB/bulan) tetapi diperkirakan Indonesia akan menyusul dalam waktu dekat.

Kesimpulan

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan data-intensif, operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet harus melakukan fiberisasi di semua jaringan mereka, sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi Perseroan. Demikian pula, pertumbuhan adopsi layanan broadband akan berdampak positif terhadap permintaan serat karena FTTx menjadi jenis koneksi yang paling umum. Peluang tersebut kemungkinan juga tersebar secara geografis dengan permintaan yang terus berpindah dari Jawa ke wilayah lain karena penyedia layanan mulai bersaing dengan pemain lama di pasar tersebut.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

1. Tinjauan Industri *Ducting* (*Ducting*)*

Sementara fiber di Indonesia umumnya disebarkan melalui udara, khususnya di dalam kota, pemerintah kota tertentu telah mengambil proyek strategis untuk menyalurkan semua fiber di dalam yurisdiksi mereka. Inisiatif ini telah diterapkan pada penyebaran baru serta serat yang saat ini digunakan baik di udara atau di bawah tanah tetapi tidak di-*ducting*.

- Media and games: in 2020, Internet users in Indonesia is ranked ninth globally for the time spent each day on playing video games on a game console (1 hour 16 minutes) and an average of 2 hours 50 minutes daily to watch TV (broadcast and streaming). The amount of time spent using this data intensive app likely to drive data consumption.
- E-commerce: Indonesia is home to several largest e-commerce platform in the region. Market of e-commerce consumers increased by 49% in in 2020 to USD30.3 billion. When consumers migrate more towards online shopping activities, they will spend more time to browse and compare online, which will drive data consumption.

However, in 2020, according to Analysys Mason Research, current average data usage in Indonesia is lower than other neighboring countries such as Thailand (~11GB/month) and Malaysia (~15GB/month) but Indonesia is expected to follow suit in the near future.

Key Takeaway

Along with the increasing demand for data-intensive services, telecommunication operators and Internet service providers must do fiberization on all networks, thus providing a large enough opportunity for the Company. Likewise, broadband services adoption growth will have a positive impact on fiber demand due to FTTx being the most preferred type of connection. The opportunity is also likely to spread geographically with ever-changing demand from Java to other regions as service providers started compete with incumbent players in the market.

source: Analysys Mason Research, 2021

1. *Ducting* Industry Overview*

Meanwhile, fiber in Indonesia is generally distributed by air, especially within the city, the government of certain cities have taken strategic projects to distribute all fiber within their jurisdiction. This initiative has been applied to new deployments as well as fibers currently used either in the air or in the underground but not ducted.



- Aktivitas Penggelaran kabel dilaut dangkal oleh barge nostag 10 pada proyek Palapa Ring Timur.
Activities of cable laying in shallow sea by barge nostag 10 of the East Palapa Ring project.

Fiber *ducting* melibatkan penggalian parit sedalam 1-1,2 m untuk mengubur *ducting* dan menarik kabel fiber melalui *ducting*. Solusi ini melindungi fiber dari angin dan kondisi cuaca lainnya yang dengan demikian kecil kemungkinannya mengalami pemotongan. Namun, penyebarannya lebih sulit dan mahal, dan kelayakannya tergantung pada medannya. Setelah *ducting* disebar, sub-saluran disewakan ke penyedia fiber untuk kabel fiber mereka sendiri. Setiap sub-*duct* biasanya mampu mendukung hingga 96 fiber inti.

Ada beberapa motivasi untuk mendorong adopsi *ducting*:

- Meningkatkan kontrol dan visibilitas atas proses penyebaran fiber karena *ducting* adalah operasi berlisensi sementara penyebaran fiber di udara tidak.
- Meningkatkan estetika di seluruh kota.
- Membuat infrastruktur lebih tahan dalam jangka panjang karena lebih mudah untuk menambahkan layanan baru menggunakan fiber *ducted*. Beberapa pemerintah kota telah memandang *ducting* sebagai persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan solusi kota pintar, seperti parkir pintar, meteran jalan pintar, dan lain-lain.

Fiber *ducting* involves digging a trench as deep as 1-1.2 m for burying *ducting* and pulling cables fiber through ducts. This solution protects the fiber from the wind and other weather conditions which thus less likely to be cut. However, deployment is more difficult and expensive and its suitability depends on the terrain. After the *ducting* is deployed, sub-channels are leased to providers fiber for their own fiber cable. Each sub-*duct* is typically capable of supporting up to 96 core fibers. Ada beberapa motivasi untuk mendorong adopsi *ducting*:

There are several motivations for encouraging *ducting* adoption:

- Increase control and visibility over processes of fiber spread because *ducting* is a licensed operation while the spread of fiber in the air is not.
- Improves aesthetics throughout the city.
- Make infrastructure more resilient in the long term because it is easier to add new services using ducted fiber. Some city government have viewed *ducting* as a necessary requirement needed to implement smart city solutions, such as smart parking, smart road meter, and more.

Namun, saat ini belum ada regulasi pemerintah secara nasional yang mengatur penyebaran fiber di Indonesia meskipun pemerintah pusat secara eksplisit telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan saluran *ducting*.

However, currently there is no government regulation which regulates the distribution of fiber in Indonesia even though the central government has explicitly encourage local governments to prepare channels *ducting*.

Tinjauan Industri

Pasokan pasar pada saat ini terkonsentrasi dengan hanya dua pemain yang aktif di pasar. Saat ini baru dua kota di Jawa – Jakarta dan Semarang – yang mulai memasang fiber *duct*. *Ducting* di Jakarta dipimpin oleh JakPro, sedangkan di Semarang dilakukan oleh Moratelindo. Upaya di Jakarta sebagian besar dilakukan sedikit demi sedikit, sementara Semarang mengikuti pendekatan yang lebih terstruktur. Di Semarang hanya fiber udara yang disalurkan, sedangkan Badan Usaha Milik Negara di Jakarta telah mengamanatkan semua operator untuk memindahkan fiber yang ada (termasuk kabel dalam tanah yang ada) ke *ducting*.

Karena *ducting* membutuhkan kerjasama yang erat dengan pemerintah kota, pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah *joint-venture* antara operator telekomunikasi dan perusahaan milik negara yang ditunjuk untuk mengawasi *ducting*. Hal ini juga membantu mendapatkan RoW. Misalnya, Moratelindo telah bekerja sama dengan pemerintah kota di Semarang untuk membangun *ducting* dan tiang dan mengadopsi skema bagi hasil.

Faktor Penggerak Pasar Utama

Ambisi sektor publik untuk menghadirkan visibilitas ke penyebaran *ducting* sambil meningkatkan daya tarik estetika kota adalah pendorong utama.

- Memfasilitasi penerapan solusi kota pintar yang lebih mudah di setiap kota
Beberapa kota di Indonesia memiliki ambisi untuk menerapkan solusi kota pintar, mulai dari manajemen lalu lintas hingga membantu kepolisian dan manajemen publik. Fiber yang disalurkan jauh lebih mudah digunakan untuk skenario seperti itu dan hanya membutuhkan konektivitas ke sistem perangkat lunak yang sesuai.

Industry Overview

Market supply is currently concentrated with only two active players in the market. Currently, only two cities in Java – Jakarta and Semarang – have started installing fiber duct. *Ducting* in Jakarta led by JakPro, while in Semarang it was carried out by Moratelindo. Efforts in Jakarta are mostly carried out little by little, while Semarang followed a more structured approach. In Semarang only the distributed air fiber, while the State-Owned Enterprises in Jakarta has mandated all operators to move existing fiber (including cable in existing soil) to the *ducting*.

Because *ducting* requires close cooperation with municipal government, the usual approach is to establish a joint-venture between telecommunications operators and state-owned enterprises appointed to supervise *ducting*. This too helps get RoW. For example, Moratelindo has been in collaboration with the city government in Semarang to construct ducts and pylons and adopted schemes profit sharing.

Key Market Driving Factors

Public sector ambition to bring visibility to *ducting* spread while increasing traction of the aesthetics of the city are the main drivers.

- Facilitate deployment of easier smart city solutions in every city
Several cities in Indonesia have ambitions to implement smart city solutions, starting from traffic management to help police and public management. Fiber channeled much easier is used for such scenarios and only requires connectivity to the appropriate software system.

- Meningkatkan visibilitas ketersediaan ducting di pasar Penyebaran *ducting* memerlukan lisensi yang diperlukan sebelum pekerjaan dapat dilakukan, dan perjanjian sewa *wholesale* juga dilisensikan. Ini memberikan visibilitas yang jelas ke infrastruktur fiber yang tersedia di kota, yang saat ini tidak mungkin dilakukan dengan penyebaran udara tanpa izin.
- Meningkatkan daya tarik estetika kota Fiber di saluran bawah tanah tidak terlihat dan menghindari penyebaran berantakan yang biasa terjadi pada kabel udara.

Market Size*

Ukuran pasar yang relatif kecil pada saat ini meskipun permintaan dapat meningkat di tahun-tahun mendatang.

Moratelindo saat ini adalah penyedia utama yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah kota yang berencana untuk menyebarkan ducting fiber di seluruh Indonesia. Berangkat dari keberhasilan penggelaran Proyek Palapa Ring, dalam lima tahun mendatang Moratelindo berniat memasang ducting di sepuluh kota di Indonesia.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

Kesimpulan*

Fiber *ducting* telah diadopsi sebagai inisiatif strategis oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Saat ini, Moratelindo adalah pemasok utama yang melakukan pekerjaan ini yang menempatkannya pada posisi yang baik untuk mendapatkan kendali atas infrastruktur kota serta membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah. Meskipun peluang dalam waktu dekat mungkin tidak tampak signifikan, karena kota-kota selanjutnya mengambil inisiatif ini, pasar ini diperkirakan akan tumbuh lebih jauh.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

2. Tinjauan Industri Data Center (Data Center)*

Pusat data adalah fasilitas fisik yang digunakan organisasi untuk menampung aplikasi dan data penting mereka. Pusat data dirancang untuk mendukung aplikasi dan aktivitas bisnis. Komponen kunci dari desain pusat data termasuk router, switch, firewall, sistem penyimpanan, server dan pengontrol pengiriman aplikasi.

- Increase visibility of ducting availability in the market Ducting deployment requires required license before the work can be done, and the wholesale rental agreement is also licensed. It gives clear visibility into available fiber infrastructure in the city, which is currently impossible with unauthorized air distribution.
- Increase the aesthetic appeal of the city The fiber in the underground channel is invisible and avoid the usual messy spread on aerial cables.

Market Size*

Relatively small market size at this point though demand may increase in the coming years.

Moratelindo is currently the main provider working the same as the various city governments who are planning to spread ducting fiber throughout Indonesia. Departing from the success of holding the Palapa Ring Project, in the next five years Moratelindo intends to install ducting in ten cities in Indonesia Indonesia.

source: Analysys Mason Research, 2021

Key Takeaway*

Fiber ducting has been adopted as a strategic initiative by several city governments in Indonesia. At the moment, Moratelindo is the main supplier doing this job that put it in a good position to gain control over city infrastructure and build a strong relationship with the regional government. Although opportunities in the near future may not seem significant, as the next cities take this initiative as well, this market is expected to grow further.

source: Analysys Mason Research, 2021

2. Overview of the Data Center Industry (Data Center)*

A data center is a physical facility that an organization uses to house their critical applications and data. Data center is designed to support business applications and activities. Key components of data center design include routers, switches, firewalls, storage systems, servers, and application delivery controller.

Bersama-sama, mereka menyediakan:

- Infrastruktur jaringan: untuk menghubungkan server (fisik dan virtual), layanan pusat data, penyimpanan, dan konektivitas eksternal ke lokasi pelanggan.
- Infrastruktur penyimpanan: untuk menahan tempat pelanggan data di pusat data.
- Sumber daya komputasi: untuk menyediakan pemrosesan, memori, penyimpanan lokal, dan konektivitas jaringan yang mendorong aplikasi.

Ada berbagai jenis pusat data, masing-masing melayani kelompok pelanggan yang berbeda.

Together, they provide:

- Network infrastructure: to connect servers (physical and virtual), data center services, storage, and external connectivity to customer sites.
- Storage infrastructure: to hold the space of customer data in data center.
- Computing resources: to provide processing, memory, local storage, and network connectivity that drives applications.

There are different types of data centers, each serving different customer groups.

Tipe data centre [Source: Analysys Mason, 2022]

Data center types [Source: Analysys Mason, 2022]

Tipe Data Center Data Center Type	Deskripsi Description	Basis Customer Customer Base	Persyaratan Konektivitas Connectivity Requirement	Jumlah tenant/customer Total Tenants/Customers
Hyperscale	Umumnya, pusat data yang dibuat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh hyperscaler atau pihak ketiga Generally, custom-built data centers that are owned and operated by hyperscaler or third parties	Hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan sangat tinggi Very high speed fiber network	1-3
Wholesale co-location	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang untuk perusahaan besar/pelanggan hyperscale Owned and operated by a third party who are renting space to large companies/hyperscale customers	Customer Enterprise/hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan tinggi High speed fiber network	<100
Retail co-location	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang kepada pelanggan perusahaan kecil Owned and operated by a third party who renting space to small corporate customers	Costumer SMEs/retail	Interkoneksi ke SaaS dan PaaS Interconnect to SaaS and PaaS	100-1.000
Enterprise	Dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan yang didukungnya. Biasanya ditempatkan di lokasi dan dikelola oleh tim IT perusahaan Owned and operated by supported companies. Usually placed on the spot and managed by Company's IT team.	-	-	1
Telecoms	Dimiliki oleh penyedia layanan telekomunikasi yang menyewakan ruang kepada perusahaan yang memiliki persyaratan konektivitas yang sangat tinggi Owned by a telecommunication service provider who rent space out to companies that own very high connectivity requirements	Penyedia konten, penyedia layanan seluler Content provider, mobile service provider	Diperlukan bandwidth besar untuk pengiriman konten Requires big bandwidth for content delivery	~100

https://www.cisco.com/c/en_sg/solutions/data-center-virtualization/what-is-a-data-center.html#~types-of-data-centers

Dalam jangka panjang, penggunaan *data center* terdepan diharapkan lebih bervariasi, melibatkan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan *real-time* dan respons tepat waktu seperti aplikasi dan game berbasis *augmented reality* dan *virtual reality*, kendaraan yang terhubung dan infrastruktur jalan, serta otomasi industri (misalnya mesin *vision*).

In the long term, the use of leading data centers is expected to be more varied, involving applications that requires real-time processing and precise response time like augmented reality-based and virtual reality apps and games, connected vehicles, and road infrastructure, and industrial automation (e.g. vision machine).

Ekonomi internet Indonesia yang besar dan dinamis mendorong pertumbuhan pasar *data centre* nya. Investasi ke pasar *data centre* telah menyaksikan pertumbuhan tinggi pada 2019-21, yang diperkirakan akan berlanjut meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Menurut perkiraan Analysys Mason, kapasitas *data centre* diperkirakan akan meningkat dari 74MW pada tahun 2020 menjadi 328MW pada tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Asia Tenggara.

Pertumbuhan masa depan di pasar hyperscale diharapkan datang dari perluasan hyperscaler – dengan Alibaba Cloud dan GCP meluncurkan wilayah cloud masing-masing pada 2019 dan 2020, Tencent meluncurkan dua wilayah pada 2021 dan AWS melakukan hal yang sama pada 2022; Microsoft Azure juga berencana untuk meluncurkannya dalam waktu dekat. Selain hyperscaler, beberapa penyedia layanan pusat data juga hadir di pasar, dengan fokus pada layanan *co-location* ke beberapa perusahaan.

Pendapatan *data centre* diperkirakan akan terus tumbuh karena pertumbuhan ekonomi internet Indonesia tetap kuat dan operator terus meluncurkan kapasitas potensial. Menurut perkiraan Analysys Mason, *market size* diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 32%, dari USD150 juta pada tahun 2020 menjadi USD780 juta pada tahun 2026. Pendapatan dari segmen *hyperscale* diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 63% dari tahun ke tahun. Periode yang sama dan melebihi pendapatan dari segmen tradisional (yang meliputi lokasi bersama *wholesale/retail*, *data centre* perusahaan dan telekomunikasi) pada tahun 2022.

Faktor Penggerak Pasar Utama*

Meningkatnya permintaan dari ekosistem start-up diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di segmen hyperscaler.

- Permintaan dari ekosistem start-up yang dinamis
Indonesia memiliki ekosistem *start-up* yang dinamis dengan beberapa unicorn lokal dan bukan regional yang secara aktif mengandalkan cloud untuk kebutuhan infrastruktur mereka dan memiliki persyaratan TI yang berkembang pesat.

Ekonomi internet Indonesia yang kuat telah mendorongnya menjadi pasar terbesar untuk pembelanjaan cloud di kawasan ini. Saat ini, pembelanjaan untuk server cloud di Indonesia terutama ditujukan melalui wilayah cloud Singapura dan dengan demikian pusat data Singapura – hal ini diharapkan

Indonesia's large and dynamic internet economy drives the growth of its data center market. Investment in the data center market has witnessed high growth in 2019-21, which is expected to continue though at a slower rate. According to Analysys estimates, data center capacity is expected to increase from 74MW in 2020 to 328MW in 2026, Indonesia will become one of the largest markets and with the fastest growing among Southeast Asia countries.

Future growth in the hyperscale market is expected comes from hyperscaler expansion – with Alibaba Cloud and GCP launched their respective cloud regions on 2019 and 2020, Tencent launched two regions in 2021 and AWS do the same in 2022; Microsoft Azure is also planning to launch it soon. In addition to hyperscalers, some providers data center services are also present in the market, focusing on co-location services to several companies.

Data center revenue is expected to continue to grow because Indonesia's Internet economic growth continues strong and operators continue to roll out potential capacity. According to Analysys Mason's estimates, the market size is estimated to increase at a CAGR of 32%, from 150 million USD in 2020 to 780 million USD in 2026. Revenue from hyperscale segment is forecast to grow at a CAGR of 63% year over year. The same period and exceeds the revenue of the segment traditional (which includes wholesale/retail joint locations, enterprise data center and telecommunications) in 2022.

Key Market Moving Factors*

Increasing demand from the start-up ecosystem is expected to drive growth in the segment of hyperscaler.

- Demand from a dynamic start-up ecosystem
Indonesia has a dynamic start-up ecosystem with some local and non-regional unicorns actively relying on the cloud for their infrastructure needs and have rapidly evolving IT requirements.

Indonesia's strong Internet economy has driven it to become the largest market for cloud spending in this area. Currently, spending on cloud servers in Indonesia, mainly through the Singapore cloud area and thus the Singapore data center – it is expected to gradually move towards the Indonesian data center as the cloud

secara bertahap bergerak menuju pusat data Indonesia seiring dengan dimulainya wilayah cloud Indonesia (misalnya Microsoft mengumumkan niatnya untuk mendirikan pusat data wilayah di Indonesia pada Februari 2021).

Indonesia region begins (e.g. Microsoft announced its intention to establish a regional data center in Indonesia in February 2021).

- Perubahan persepsi tentang co-location dan layanan cloud dari industri yang sudah mapan
Banyak industri warisan diharapkan untuk mengadopsi pendekatan *hybrid-cloud* dengan beberapa permintaan untuk lokasi bersama karena masalah privasi data.
- Changes in perception about co-location and the cloud services of an established industry
Many legacy industries are expected to adopt hybrid-cloud approach with multiple requests for shared locations due to data privacy concerns.

Tabel: Change in reliance on co-location and cloud services from 2019 [Source: Analysys Mason, 2022]

Table: Change in reliance on co-location and cloud services from 2019 [Source: Analysys Mason, 2022]

Segmen Industri Industry Segment	Perubahan pada Ketergantungan Sejak 2019 Change in Reliance Since 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
Institusi Finansial Financial Institution	Tidak ada/ perubahan minimal No/Minimal Changes	Peningkatan sedang Medium Increase	• Diekspektasi untuk mempertahankan permintaan mereka untuk server lokal selama lima tahun ke depan karena kebutuhan untuk menjaga keamanan data keuangan yang sensitif • Migrasi cloud yang berkaitan dengan persyaratan data untuk data operasional dan aplikasi yang tidak sensitif diperkirakan akan meningkat selama lima tahun ke depan karena bank semakin mendigitalkan solusi mereka; pertumbuhan pemain fintech juga berkontribusi pada adopsi cloud melalui layanan co-location • Expected to maintain their requests for servers locally over the next five years because of the need to maintain sensitive financial data security • Cloud migration related to data requirements for data operational and non-sensitive applications is expected to increase over the next five years as banks increasingly digitize their solutions; the growth of fintech players is also contributing to adoption of cloud via co-location service.
Telco	Peningkatan sedang Medium Increase	Tidak ada/ perubahan minimal No/Minimal Changes	Terus sangat bergantung pada co-location; pengenalan teknologi 5G tervirtualisasi akan meningkatkan kebutuhan akan co-location. Continues to rely heavily on co-location; introduction of 5G technology virtualization will increase the need for co-location.
Hyperscalers (i.e. ekonomi internet, sosial dan media online) Hyperscalers (i.e. internet economy, social and media on line)	Tidak ada/ perubahan minimal No/Minimal Changes	Peningkatan yang ditandai Marked Increase	• Ekosistem start-up yang dinamis dipimpin oleh unicorn yang berfokus pada lokal (seperti GoTo, Traveloka, Bukalapak) yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan cenderung mengandalkan cloud untuk kebutuhan IT mereka mengingat skalabilitas tinggi yang ditawarkannya • Namun, mereka diekspektasi untuk bermigrasi secara bertahap ke wilayah cloud lokal karena penghematan biaya dan manfaat kinerja, tetapi ini akan melibatkan proses bertahap karena tantangan migrasi • A dynamic start-up ecosystem led by locally focused unicorns (such as GoTo, Traveloka, Bukalapak) that generate large amounts of data and tend to rely on the cloud for their IT needs given the high scalability it offers • However, they are expected to migrate gradually to local cloud region due to cost savings and performance benefits, but this will involve a gradual process due to migration challenges
Enterprises	Peningkatan sedang Medium Increase	Peningkatan sedang Medium Increase	Diekspektasi untuk lebih mengandalkan cloud/co-location dari waktu ke waktu untuk mengurangi investasi mereka di aset lokal dan mereka meningkatkan kecanggihan IT mereka Expected to rely more on cloud/co-location over time to reduce their investment in local assets and they increase their IT sophistication

Segmen Industri Industry Segment	Perubahan pada Ketergantungan Sejak 2019 Change in Reliance Since 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
Pemerintah Government	Peningkatan sedang Medium Increase	Tidak ada/ perubahan minimal No/Minimal Changes	Beberapa diekspektasi migrasi ke co-location, dengan migrasi yang lebih bertahap ke cloud karena kekhawatiran pemerintah yang diperkirakan atas penyimpanan data sensitif di cloud Some expected to migrate to co-location, with more gradual migration to the cloud due to government concerns that are expected over storage of sensitive data in the cloud

- Permintaan untuk cache konten saat lalu lintas melonjak. Penggunaan konten online telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir memicu permintaan untuk cache konten lokal yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Jaringan distribusi konten (*Content Distribution Network/CDN*) biasanya digunakan untuk menyimpan konten populer dan mengandalkan *data centre* lokal untuk mengurangi latensi. Saat ini, sebagian besar penyedia CDN hanya memiliki PoP di Jakarta – Akamai adalah satu-satunya penyedia CDN dengan PoP di luar ibu kota. Karena penyedia konten seperti platform media sosial dan penyedia OTT terus meningkatkan operasi mereka di Indonesia dan melayani pelanggan di luar Jakarta, akan ada peningkatan permintaan untuk lebih banyak layanan CDN dan *data centre* di seluruh negeri untuk menyimpan konten di dekat pengguna akhir.
- Regulations and policies on sensitive data retention (e.g. data sovereignty, laws/new data protection regulations) can improve local data center requests, though still available some uncertainty.

Berdasarkan Peraturan No. 71 (GR71) yang baru saja disahkan, Penyelenggara Sistem Elektronik Publik (ESO) harus menempatkan sistem dan data elektronik mereka di Indonesia kecuali jika teknologi penyimpanan tidak tersedia secara lokal. Ini mencakup lembaga negara atau lembaga lain yang ditunjuk oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem elektronik. ESO swasta tidak tunduk pada persyaratan yang sama saat ini.

Based on the newly ratified Regulation No. 71 (GR71), Public Electronic System (ESO) Operators have to put their systems and electronic data in Indonesia unless storage technology is not available locally. This includes state agencies or other institutions appointed by state institutions that maintain electronic systems. Private ESOs do not subject to the same requirements today.

Ada persyaratan tambahan di mana pemerintah akan menentukan lembaga swasta/publik mana yang memiliki 'data elektronik strategis' dan harus dilindungi dengan menghubungkan dokumen elektronik/rekaman cadangan mereka ke pusat data tertentu, dengan perincian yang akan ditentukan melalui peraturan selanjutnya. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit, 'data elektronik strategis' diharapkan mencakup institusi yang memiliki informasi penting dari berbagai sektor (misalnya layanan keuangan, telekomunikasi, IT, dll.).

There are additional requirements under which the government will determine which private/public institutions own 'strategic electronic data' and must be protected by linking electronic documents/backup records them to specific data centers, the details of which will be determined by the following regulations. Although not explicitly defined, 'strategic electronic data' expected to include institutions that have information from various sectors (e.g. financial services, telecommunications, IT, etc.).

Selain itu, terdapat persyaratan tersendiri yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, dimana penggunaan *data center* di luar negeri oleh bank umum hanya diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu. Dengan munculnya peraturan ini dan persyaratan terkaitnya, permintaan lokal untuk ruang *data centre* diperkirakan akan tetap kuat.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

Kesimpulan*

Pasar *data centre* di Indonesia masih dalam tahap awal dan diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang. Masuknya *hyperscaler* ke pasar dan permintaan untuk penyimpanan data lokal, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dalam beberapa skenario, akan mendorong pertumbuhan yang stabil dalam permintaan layanan *co-location*. Pemain internasional yang mapan telah mengidentifikasi peluang ini dan baru-baru ini telah terjadi arus masuk modal untuk membangun *data centre* di negara tersebut. Sementara keandalan pasokan listrik yang stabil dan ketersediaan tenaga kerja terampil tetap menjadi tantangan yang harus dicari solusi oleh penyedia layanan, pertumbuhan ekonomi digital dan permintaannya untuk infrastruktur pendukung akan memastikan permintaan tetap stabil selama bertahun-tahun yang akan datang.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

3. Tinjauan Industri FTTX/FTTH*

Fiber optik terutama digunakan dalam rute panjang untuk jaringan inti dan *backhaul* karena keunggulannya sebagai berikut:

- Kapasitas tinggi
- Biaya penyisipan rendah per unit kapasitas
- Ketahanan dan kekebalan terhadap gangguan elektro-magnetik dan masuknya air
- Skalabilitas untuk teknologi baru.

Antara 2016 dan 2020, permintaan data global meningkat secara signifikan – rata-rata lalu lintas internet bulanan per koneksi broadband hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus tumbuh pada CAGR 23% hingga 2026 menurut Analysys Mason Research.

Permintaan data yang melonjak ini mendorong infrastruktur fiber lebih dekat ke pengguna akhir. Teknologi fiber semakin banyak digunakan untuk jaringan akses perumahan (misalnya FTTx) karena manfaat berikut:

In addition, there are separate requirements that are applied by Bank Indonesia, where the use of the data center is abroad by commercial banks is only allowed with prior approval. With the advent of this regulation and its related requirements, local demand for data center space is expected to stay strong.

source: Analysys Mason Research, 2021

Key Takeaway*

The data center market in Indonesia is still in its early stages and is expected to show significant growth strong in the years to come. Hyperscaler entry to the market and the demand for local data storage, as mandated by the regulations in several scenario, will encourage steady growth in co-location service requests. International player who establishments have identified this opportunity and recently there has been an inflow of capital to build data center in the country. While supply reliability stable electricity and availability of skilled labor remains a challenge that must be resolved by service providers, digital economy growth and its demand for supporting infrastructure will ensure demand remains stable for years which will come.

source: Analysys Mason Research, 2021

3. FTTX/FTTH Industry Overview*

Optical fiber is mainly used in long routes for core network and backhaul because of its advantages as follows:

- High capacity
- Low insertion cost per unit of capacity
- Resistance and immunity to disturbance electro-magnetic and water ingress
- Scalability for new technologies.

Between 2016 and 2020, global data demand is increasing significantly – average monthly internet traffic per broadband connections nearly tripled and estimated will continue to grow at a CAGR of 23% until 2026 according to Analysys Mason Research.

This soaring data demand boosts infrastructure fiber closer to the end user. Fiber technology is getting widely used for residential access network (e.g. FTTx) because of the following benefits:

- **Kecepatan lebih cepat:** internet fiber optik berkali-kali lebih cepat daripada koneksi internet tembaga berkecepatan tertinggi.
- **Degradasi sinyal lebih sedikit:** sinyal jalur tembaga menurun saat pengguna menjauh dari sakelar, sementara kekuatan sinyal fiber tidak menurun karena jarak.

Ada beberapa cara di mana fiber dapat diberikan kepada pelanggan. Penerapan alternatif seperti *fiber to the local exchange* (FTTLE), *fiber to the cabinet* (FTTC), *fiber to the building* (FTTB) dan *fiber to the home/premises* (FTTH/P), masing-masing membawa koneksi fiber lebih dekat dan lebih dekat ke tempat pelanggan.

- **Koneksi Perumahan**
Di Indonesia, pasar *broadband* tetap perumahan telah berkembang pesat dengan FTTP sebagai teknologi penyebaran utama. Rumah tangga *fixed broadband* telah tumbuh pada CAGR ~27% antara 2016 dan 2020, sebagian besar didukung oleh penyebaran infrastruktur jaringan yang telah memfasilitasi peningkatan adopsi *broadband* berkecepatan tinggi. Migrasi dari ADSL lawas oleh Telkom juga menjadi alasan pertumbuhan.

Penetrasi rumah tangga telah tumbuh secara signifikan tetapi tetap rendah karena peluncuran jaringan *fixed-line* oleh operator sebagian besar terjadi di kota-kota besar karena ekonomi yang menguntungkan. Dukungan dari pemerintah Indonesia untuk menginvestasikan USD22 miliar dalam infrastruktur *broadband* tetap di bawah Rencana Pita Lebar Nasional lima tahun 2014–2019 juga telah berkontribusi pada penerimaan FTTP yang kuat.

Penyedia *broadband* tetap utama telah secara agresif memperluas jaringan mereka selama lima tahun terakhir. Misalnya, Telkom telah meningkatkan jumlah rumah yang dilewati 2–4 juta per tahun antara 2016 dan 2020, sementara beberapa pemain kecil juga telah menyebarkan secara agresif, masing-masing menambahkan antara ~20.000 dan 250.000 rumah yang dilewati setiap tahun selama beberapa tahun terakhir. Investasi dalam perluasan jaringan diperkirakan akan terus berlanjut dengan para pemain utama mengumpulkan dana untuk penyebaran lebih lanjut.

- **Faster speed:** fiber optic internet multiple times faster than copper internet connection highest speed.
- **Less signal degradation:** copper line signal decreases as the user moves away from the switch, while the fiber signal strength does not decrease because of the distance.

There are several ways in which fiber can be given to customer. Alternative applications such as fiber to the local exchange (FTTLE), fiber to the cabinet (FTTC), fiber to the building (FTTB) and fiber to the home/premises (FTTH/P), each brings the fiber connection closer and closer to the customer's place.

- **Residential Connection**
In Indonesia, the residential fixed broadband market has growing rapidly with FTTP as a technology main deployment. Fixed broadband household has grown at a CAGR of ~27% between 2016 and 2020, mostly supported by infrastructure deployment networks that have facilitated increased adoption high-speed broadband. Migration from ADSL legacy by Telkom is also the reason for growth.

Household penetration has grown significantly but still low due to fixedline network rollout by operators mostly occur in cities large because of the lucrative economy. Endorsement from the Indonesian government to invest USD22 billion in fixed broadband infrastructure in under the 2014 five-year National Broadband Plan-2019 has also contributed to the acceptance of FTTP the strong one.

Major fixed broadband providers have been aggressively expand their network for five years final. For example, Telkom has increased the number of 2–4 million homes passed per year between 2016 and 2020, while some minor players too have spread aggressively, respectively adding between ~20,000 and 250,000 houses which is passed every year for several years final. Investment in network expansion is estimated will continue with the main players raise funds for further deployment.

Kesimpulan*

Karena permintaan untuk koneksi *bandwidth* tinggi tumbuh dan jaringan tembaga lama dihentikan, fiber menjadi cara yang lebih disukai untuk menyediakan konektivitas ke perusahaan dan rumah. Meskipun penyebaran dapat menjadi tantangan, pasar sangat kurang ditembus, menyisakan ruang untuk ekspansi yang signifikan dalam jumlah koneksi. Persaingan dari teknologi seluler baru juga kemungkinan akan terbatas dalam waktu dekat, memberikan pemasok infrastruktur fiber lapangan bermain yang menarik. Koneksi *broadband*, baik untuk segmen *enterprise* dan *retail*, diharapkan menjadi mesin pertumbuhan utama.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

4. Dampak COVID-19 pada Sektor Telekomunikasi dan Usaha Perseroan*

Terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat. Pengaturan kerja dari rumah dan sekolah di rumah, yang dapat bertahan pasca COVID-19, juga dapat menambah permintaan untuk broadband tetap perumahan. Hal ini membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

5. Prospek Industri dan Usaha Perseroan*

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

1. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan

Key Takeaway*

As the demand for high bandwidth connections grows and the old copper grid was discontinued, fiber became preferred way to provide connectivity to companies and homes. Although the spread can be a challenge, the market is very less penetrated, leaving room for significant expansion in number of connections. Competition from new mobile technology also likely to be limited in the near future, provide field fiber infrastructure suppliers interesting play. Broadband connection, good for enterprise and retail segments, is expected to be the engine major growth.

source: Analysys Mason Research, 2021

4. Impact of COVID-19 on the Telecommunication Sector and the Company's Business*

Telecommunication and Company Business The occurrence of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020 in Indonesia resulted in changes to the pattern Indonesian society at large. One of change is an appeal from the government Indonesian people to work from home (Work From Home/WFH) for companies or study from home for schools. Appeal This results in public demand of telecommunication and internet services from home increase. Work from home and school arrangements at home, which can endure post-COVID-19, too could add to the demand for residential fixed broadband. This makes the Company have a strategy to develop a specialized business in telco and retail. In addition, to support the said strategy, the Company also plans to increase existing capacity as well as adding retail networks in several new cities.

source: Analysys Mason Research, 2021

5. Prospects of the Company's Industry and Business*

The growth prospects of the telecommunications industry in Indonesia is still very potential to be developed, especially for telecommunications facilities and infrastructure which is a prospect for the Company. Factors that support this include:

1. Demographic conditions of Indonesia with population fourth largest in the world with over 250 million people, and a fast-growing middle class, and the Indonesian economy which shows

pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.

2. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis e-commerce, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan mobile internet. Perseroan berharap pertumbuhan layanan mobile internet ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
4. Terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

good and steady growth in years lately, it is hoped that it will continue to encourage demand for telecommunications and data services.

2. The total area of Indonesia is 1.9 million km² and strategic position that is between the two oceans and two continents, Indonesia can become regional and global ICT traffic transit hub. At the moment, distribution of internet service availability in Indonesia still uneven. Bone tissue development national fiber optic backbone (Ring Palapa) which connects all the big islands and all districts/cities in Indonesia are one of the steps that need to be accelerated to realize that goal.
3. Internet penetration is still relatively low compared to other countries, especially in the Asian region, while on the other hand the community increasingly open to the globalization of lifestyle digital, which led to the rapid increase use of smartphone devices with increasingly affordable prices, high activity on social networks, Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) as well as increasing e-commerce business, which is expected to be drive the growth of mobile internet services. The company expects the growth of mobile services This internet will continue along with increasing popularity of smartphones, tablets and other mobile devices that have access internet, the faster the network data transmission wireless and more smart devices and affordable internet service. This too will have an impact on increasing demand bandwidth.
4. The occurrence of the COVID-19 pandemic in early 2020 in Indonesia resulted in changes to pattern of life of Indonesian society in general. One of the changes is an appeal from the government to the people of Indonesia to work from home (*Work From Home/WFH*) for companies or learn from home to schools. The appeal resulting in public demand for services telecommunications and internet from home is increasing, thus making the Company have a strategy to develop a specialized business in telco and retail. In addition, to support this strategy, The company also plans to increase existing capacity and increase the retail network in several new cities.

5. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan risiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE High-density polyethylene) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

sumber: Analysys Mason Research, 2021

5. With the advancement of telecommunications in Indonesia with an increasingly optical cable network wide especially in big cities, so that resulting in urban spatial planning by many aerial optical cable network through masts to look not beautiful and neat, besides that fiber optic cable placement using poles pose a risk of cable damage become taller because of the absence infrastructure that protects the cable. By Therefore, the Company plans to build Work Same with some big cities in Indonesia in the Provision of Public Service Infrastructure Passive Telecommunications for development projects operation, exploitation and supply U-ditch (channel of reinforced concrete with the shape of cross section of the letter "U") and/or Macroduct (channel HDPE High-density polyethylene pipe) and/or other media decided by the Company from time to time, which is the passive infrastructure shared by cable owners others with some commercial terms used for fiber optic cable placement by telecommunications operators so that it does not there are more aerial fiber optic cables through cellular telecommunications masts and towers will be used by telecommunications operators, and its supporting facilities and equipment.

With the huge potential in this industry, It is hoped that Indonesia will be able to transform from countries that depend on natural resources become innovation-based country, so that mastery of technology information and communication is very important.

source: Analysys Mason Research, 2021

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha OPERATIONAL OVERVIEW OF EACH BUSINESS SEGMENT

Perseroan membagi segmen pelanggan menjadi 5 jenis sebagai berikut:

1. Segmen Telco ("Segmen Telco");
2. Segmen *Wholesale* ("Segmen *Wholesale*");
3. Segmen *Retail* dan *Enterprise* ("Segmen *Retail and Enterprise*")
4. Segmen lainnya ("Others")

The Company divides customer segments into 5 types as follows:

1. Telco Segment;
2. Wholesale Segment;
3. Retail and Enterprise Segment
4. Other segments

Gambar di bawah menunjukkan layanan yang disediakan di bawah setiap segmen.

The figure below depicts services provided by each segment.



Gambar di bawah menunjukkan penawaran produk kami berdasarkan segmen pelanggan dan pesaing utama.
The image below sets forth our product offering by customer segment and key competitors.

Segment Segment	Project Project	International International	Domestic Domestic	Internet Internet	Data Center Data Center	VSAT VSAT	Others Others
Telco	International Backbone	√		√			
	Domestic Backbone		√				
	Inter & Innercity		√				
	Internet			√			
	Data Center				√		
	BTS Backhaul		√				
Wholesale	IPLC	√					
	IP Transit	√					
	DLC		√				
	Inter & Innercity		√				
	Internet			√			
	Data Center				√		
Enterprise	Internet			√			
	Data Center				√		
	Cloud Services				√		
	Solutions (VAS)			√			
Retail	Internet			√			
	Telephone			√			
	Cable TV			√			
	Wifi			√			
Others	Customer project (including FO Construction and Services)						√
	VSAT					√	
	Palapa Ring Project						√

Di bawah ini adalah kontribusi pendapatan historis dari setiap segmen pelanggan Perseroan.

Below is the historical revenue contribution of each customer segment of the Company.

Keterangan Description	(dalam Rupiah) (in Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Telco	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
Wholesale	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
Retail & Enterprise	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Lainnya Others	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
Jumlah Total	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751

Segmen Telco

Telco merupakan layanan *leased line* untuk konektivitas domestik dan internasional yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan operator telekomunikasi. Solusi bernilai tinggi Perseroan memungkinkan operator telekomunikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, meningkatkan kualitas layanan terutama dalam hal *Service Level Agreement* (SLA), serta memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Produk Perusahaan dari segmen Telco meliputi *IP Transit*, *data center*, *backbone*, *leased line domestic (DLC)*, dan *international (IPLC)*, produk Jaringan Privat Virtual Protokol Internet ("MPLS"), layanan *hosting* dan *private* dan *public cloud*, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Telco Segment

Telco is a leased line service for connectivity domestic and international operating in accordance with telecommunications operator needs. High value solution The Company allows telecommunications operators to keep up with the latest technological developments, improve service quality, especially in terms of Service Level Agreement (SLA), as well as providing a high level of security tall. The Company's products from the Telco segment include IP Transit, data center, backbone, domestic leased line (DLC), and international (IPLC), Internet Protocol Virtual Private Network ("MPLS") products, hosting and private and public cloud services, infrastructure services, including line leasing and tower collocation

Informasi Segmen Telco

Telco Segment Information

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Keterangan Description	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha Segmen Segment's Operating Revenue	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
Beban Segmen Segment's Expenses	(729.687.491.170)	(771.362.958.977)	(385.032.787.272)
Laba Kotor Gross Profit	469.535.864.883	474.646.501.850	229.126.629.813

Segmen Wholesale

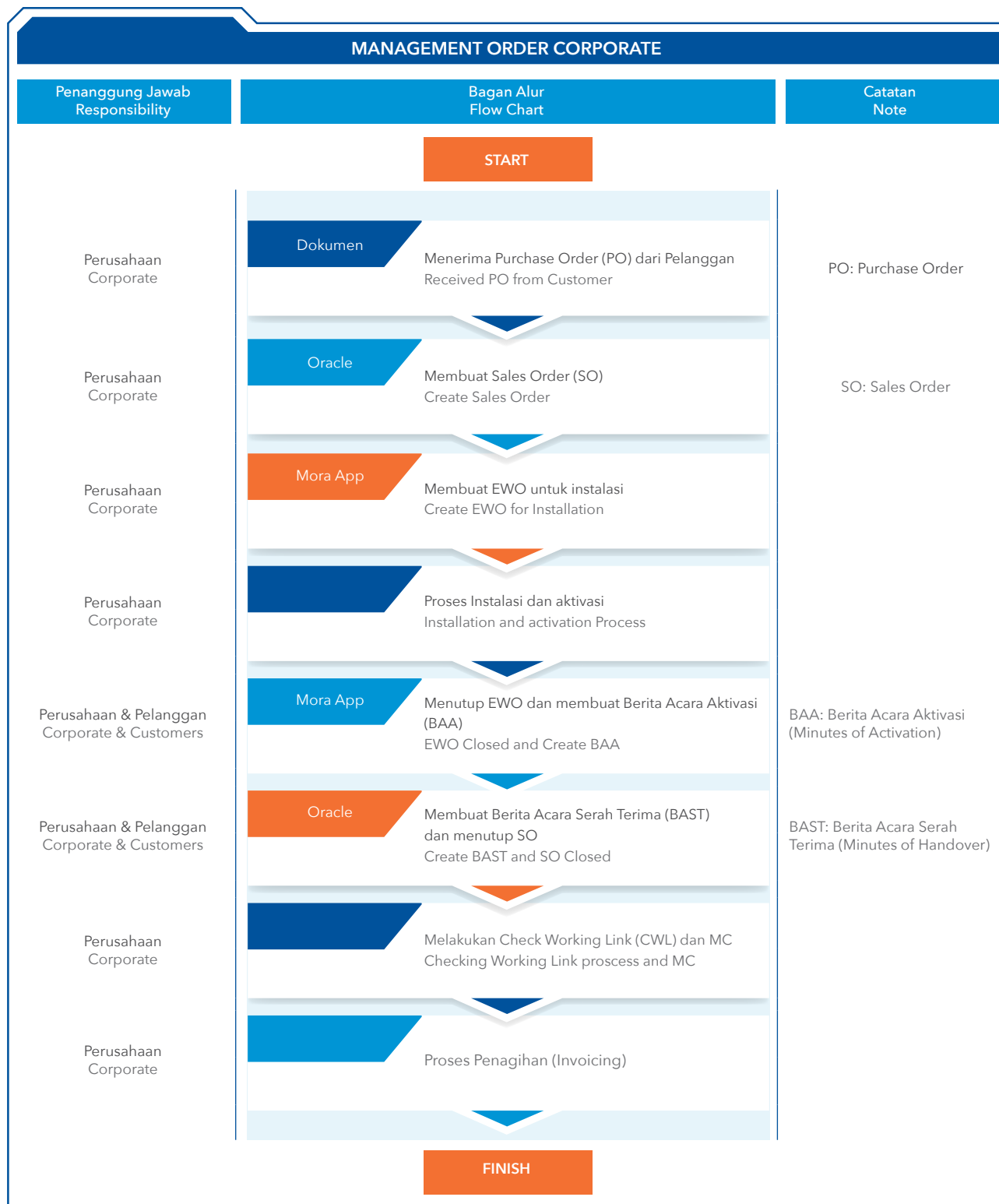
Segmen Wholesale Perseroan menyediakan layanan internet (termasuk jalur sewa dan koneksi kapasitas, baik domestik maupun internasional) kepada operator telekomunikasi, terutama melalui skema penjualan Business-to-Business ("B2B"). Produk dan jasa di segmen Wholesale meliputi IP Transit, data center, backbone, leased line domestic (DLC) dan international (IPLC), layanan interkoneksi, layanan internet, layanan pusat data, layanan hosting dan private dan public cloud, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara. Pelanggan dari segmen ini terdiri dari operator telekomunikasi.

Wholesale Segment

The Company's Wholesale segment provides internet services (including rental lines and capacity connections, both domestic and international) to telecommunications operators, primarily through the Business-to-Business ("B2B") sales scheme. Products and services in the Wholesale segment include IP Transit, data center, backbone, leased line (DLC) and international (IPLC), interconnection services, internet services, data center services, hosting and private and public cloud services, infrastructure services, including line rental and tower collocation. Customers from this segment consist of telecommunication operators.

Alur skema kerja pada segmen Telco dan Wholesale adalah sebagai berikut:

The workflow for the Telco and Wholesale segments is as follows:



Uraian:

1. Perseroan menerima *Purchase Order*/ Surat Perintah Kerja dari Pelanggan yang ingin berlangganan layanan.
2. Perseroan membuat *Sales Order* pada sistem.
3. Perseroan membuat *Execution Work Order* untuk proses instalasi.
4. Perseroan akan melakukan proses instalasi dan aktivasi pada pelanggan.
5. Perseroan menutup *Execution Work Order* dan membuat Berita Acara Aktivasi (BAA).
6. Perseroan membuat Berita Acara Serah terima (BAST) dan menutup *Sales order*.
7. Perseroan melakukan *check working Link* dan MC.
8. Perseroan membuat *invoice* untuk melakukan penagihan ke Pelanggan.
9. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* yang diterima.

Description:

1. The Company receives a Purchase Order/Warrant Work of a Customer who wants to subscribe to the service.
2. The Company creates a Sales Order on the system.
3. The Company makes an Execution Work Order for the process installation.
4. The Company will carry out the installation and activation process on the customer.
5. The Company closes the Execution Work Order and makes Minutes of Activation (BAA).
6. The Company prepares the Handover Minutes (BAST) and close the Sales order.
7. The Company checks working link and MC.
8. The company makes invoices to collect to the Customer.
9. Customers make payments according to the invoices received.

Informasi Segmen Wholesale

Wholesale Segment Information

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Keterangan Description	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha Segmen Segment's Operating Revenue	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
Beban Segmen Segment's Expenses	(185.510.656.121)	(117.194.827.177)	(175.176.282.398)
Laba Kotor Gross Profit	269.152.630.286	229.481.774.245	299.855.037.976

Segmen Enterprise

Segmen *Enterprise* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi/provider. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated, internet broadband Oxygen.id Soho, Datacenter, leased line domestic* (Metro). Pelanggan dari segmen Enterprise adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

1. Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter (Collocation dan DRC)*.
2. Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.

Enterprise Segment

The Enterprise segment is the segment for the enterprise market private, government non-telecommunication/provider. The products or services offered are *Dedicated Internet, Oxygen.id Soho broadband internet, Datacenter, leased line domestic (Metro)*. The customers of the Enterprise segment are including institutions, as follows:

1. Government and Oil Company Segments for Segments *Government* and *Oil Company* for customers categories of Central/Regional Government, State Institutions, BUMN, BUMD and *Oil Company* (private and State). The products are *dedicated Internet, Leased line/Metro, Datacenter (Collocation and DRC)*.
2. Education Segment: A dedicated customer segment for education sector, educational institutions, schools, university academy. The product is the *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.

3. Segmen *Media, Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
4. Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband* dan *VPS/Cloud Computing*.
5. Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho, Internet dedicated, Datacenter, Leased Line/Metro*.

Segmen Retail

Segmen Retail Perseroan menyediakan solusi *Fiber-to-the-Home* ("FTTH") menyeluruh secara langsung ke pelanggan ritel dalam pasar residensial dan apartemen.

Produk utama Perseroan dalam Segmen Retail meliputi layanan triple play, layanan internet, telefoni, dan TV kabel di bawah merek dagang Oxygen.id. Layanan Oxygen.id mencakup penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga bersaing.

3. Media, Medical and Hospitality Segment: Customers companies engaged in the media, hospitals and hospitality. The product is dedicated Internet, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi.
4. SME (Small Medium Enterprise) Segment: Customers companies that have business categories small size, SME. The product is Oxygen.id Soho Broadband Internet and VPS/Cloud Computing.
5. HRB (High Rise Building) Segment: Customers companies located in high-rise buildings. The products are Oxygen.id Soho, Internet dedicated, Datacenter, Leased Line/Metro.

Retail Segment

The Company's Retail segment provides comprehensive Fiber-to-the-Home ("FTTH") solutions directly to retail customers in the residential and apartment markets.

The Company's main products in the Retail Segment include triple play services, internet services, telephone, and cable TV under the Oxygen.id trademark. Oxygen.id services include providing high-speed internet services at competitive prices.

Alur skema kerja pada segmen *retail* adalah sebagai berikut:

The work scheme flow in the retail segment is as follows:



Uraian :

1. Perseroan melakukan proses penjualan ke calon pelanggan retail (perumahan).
2. Calon Pelanggan yang ingin berlangganan akan mengisi data pribadi pada Formulir Berlangganan.
3. Perseroan melakukan penginputan data pelanggan tersebut pada sistem.
4. Perseroan akan melakukan proses verifikasi data dan proses penjadwalan untuk instalasi.
5. Perseroan melakukan proses instalasi dan aktivasi di rumah pelanggan.
6. Pelanggan akan menerima tagihan setelah proses aktivasi dilakukan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterima.

Description:

1. The Company conducts the sales process to candidates retail customers (residential).
2. Prospective customers who want to subscribe will fill in personal data on the Subscription Form.
3. The Company enters customer data it on the system.
4. The Company will carry out a data verification process and scheduling process for installation.
5. The Company carries out the installation and activation process at customer's house.
6. Customers will receive a bill after the process activation is done.
7. Customers make payments according to invoices received.

Informasi Segmen Retail & Enterprise

Retail & Enterprise Segment Information

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Keterangan Description	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha Segmen Segment's Operating Revenue	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Beban Segmen Segment's Expenses	(233.623.049.529)	(146.185.955.846)	(142.305.407.259)
Laba Kotor Gross Profit	428.096.976.459	326.517.934.173	201.493.217.110

Segmen Lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan kontruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Telematika Timur Indonesia (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai "Konsesi Jasa". Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan operasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optic di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optic.

Other Segments

The other segment represents construction revenue and financial income from service concessions to its subsidiary, PT. West Palapa Ring (PRB) and PT. Indonesian Eastern Telematics (PTT) in accordance with the implementation of ISAK 16 regarding "Service Concession". Palapa ring project west and east package is a joint operation with the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia (Kominfo) which aims to build and manage networks fiber optic backbone in the western and eastern regions Indonesia. In addition, other segments are also revenue from subsidiary contractor, PT Oxygen Infrastructure Indonesia in order to meet customer needs for the construction of fiber optic networks.

Informasi Segmen Lainnya

Informasi Segmen Lainnya

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Keterangan Description	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha Segmen Segment's Operating Revenue	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
Beban Segmen Segment's Expenses	(493.961.589.655)	(253.777.039.590)	(1.428.701.917.912)
Laba Kotor Gross Profit	1.370.504.808.052	1.446.521.142.936	1.200.690.272.011

Aspek Pemasaran MARKETING ASPECTS

Strategi Pemasaran

Marketing Strategy

STRETEGI PEMASARAN MARKETING STRATEGY

FOKUS PEMASARAN MARKETING FOCUS

MENINGKATKAN KAPASITAS JARINGAN INCREASING NETWORK CAPACITY

AKSELERASI PROMOSI PROMOTION ACCELERATION

Dalam mengembangkan strategi pemasaran, Perseroan berfokus pada kedua aspek berikut ini. Pertama, meningkatkan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan pelanggan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha, terutama dalam upaya melakukan penetrasi ke pasar ritel baru di berbagai kota. Kedua, dengan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan menjalankan kegiatan promosi di media, termasuk radio, media sosial, media daring, dan media cetak dengan tujuan menghasilkan penjualan. Perseroan juga menawarkan promosi yang melibatkan paket gabungan (*bundling*) layanan internet dan televisi kabel serta layanan tambahan lainnya. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan juga secara berkala turut berpartisipasi dalam pameran teknologi swasta maupun pemerintah.

Upaya pemasaran dan penjualan Perseroan melibatkan prosedur terstandar yang diterapkan berdasarkan wilayah dan pada umumnya membutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai titik optimal. Tim pemasaran internal Perseroan terdiri dari 196 karyawan yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Medan, Riau, Bali, Palembang, dan Yogyakarta. Perseroan juga mengalihkan sebagian upaya pemasaran, penjualan, dan distribusi.

In developing a marketing strategy, the Company focuses on the following two aspects. First, increase network capacity to meet customer requests as part of the business development effort, especially in a penetration effort into new retail markets in various cities. Second, by concentrating on increasing sales. In order to increase product recognition, the Company carries out promotional activities in the media, including radio, social media, online media and print media with the aim of generating sales. The Company also offers promotions involving bundled packages (*bundling*) of internet and cable television services and services other additions. In order to increase recognition products, the Company also periodically participates in private and government technology exhibitions.

The Company's marketing and sales efforts involve standardized procedures applied by region and generally takes a year to reach the optimal point. Company's internal marketing team consists of 196 employees located in Jakarta, Bogor, Medan, Riau, Bali, Palembang, and Yogyakarta. The Company also transferred part of marketing, sales, and distribution efforts.

Sistem penjualan dan distribusi Perseroan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

- Segmen Telco dan Segmen Wholesale: Sistem penjualan Segmen Telco dan Segmen Wholesale terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B.
- Segmen Enterprise: Sistem penjualan Segmen Enterprise terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta promosi penjualan, termasuk pemberian diskon.
- Segmen Retail: Sistem penjualan Segmen Ritel berfokus pada promosi melalui iklan serta promosi penjualan, termasuk penggabungan (*bundling*) paket/produk.
- Segmen Lainnya merupakan:
 1. Pendapatan konsesi jasa atas proyek Palapa Ring dimana Perseroan hanya memberikan layanan berdasarkan kontrak dengan BAKTI selama periode kontrak kerjasama.
 2. Pendapatan kontruksi dimana program penjualan berdasarkan order pembelian dari pelanggan.
 3. Pendapatan usaha dari penjualan VSAT melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B untuk area yang tidak tercover oleh fiber optic.

Staf penjualan Perseroan untuk Segmen Enterprise dan Segmen Retail menerima insentif bulanan sebagai kompensasi. Sebagai contoh, staf penjualan Segmen Retail menerima skema insentif kompetitif apabila mengakuisisi pelanggan baru. Untuk Segmen Telco dan Segmen Wholesale, bonus dibayarkan per tahun kepada staf berdasarkan pencapaian target tertentu.

Dalam Segmen Retail, Perseroan berupaya memperoleh pelanggan dengan menciptakan paket dan harga yang kompetitif. Perseroan juga melakukan inisiatif pra-penjualan dan penganvasan untuk memperoleh pelanggan. Program loyalitas di Segmen Retail meliputi insentif seperti layanan WiFi gratis dan waktu instalasi yang cepat. Untuk Segmen Telco, Segmen Wholesale, dan Segmen Lain-Lain, Perseroan terkadang mengandalkan bantuan mitra dari pelanggan yang disasar.

The Company's sales and distribution system is based on segments are as follows:

- Telco Segment and Wholesale Segment: System Telco Segment sales and Wholesale Segment mainly done through sales program Personally tailored sustainable as well as B2B-based sales programs.
- Enterprise Segment: Segment sales system Enterprise is mainly carried out through the program continuously adjusted sales personal and sales promotions, including gifts discount.
- Retail Segment: Retail Segment sales system focuses on promotion through advertising as well as sales promotion, including package/product bundling.
- Other Segments are:
 1. Service concession revenue for the Palapa Ring project where the Company only provides services based on a contract with BAKTI during the cooperation contract period.
 2. Construction revenue where the sales program is based on purchase orders from customers.
 3. Operating income from VSAT sales through a personalized continuous sales program as well as a B2B-based sales program for areas not covered by fiber optics.

Company sales staff for Enterprise Segment and Retail Segment receive monthly incentives as compensation. For example, Retail Segment sales staff accept a competitive incentive scheme when acquiring new customer. For Telco Segment and Segment Wholesale, bonuses are paid annually to staff based on the achievement of certain targets.

In the Retail Segment, the Company seeks to obtain customers by creating packages and prices that competitive. The Company also carries out pre-sale initiatives and surveys to acquire customers. Program Loyalty in the Retail Segment includes incentives such as services Free WiFi and fast installation time. For Segments Telco, Wholesale Segment, and Miscellaneous Segment, The Company sometimes relies on partner assistance from targeted customers.

Tinjauan Keuangan FINANCIAL OVERVIEW

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position Report

	2021 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2020 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Persentase Percentage (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	3.442.650	2.779.604	663.046	23,85%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	11.122.751	10.615.919	506.832	4,77%
Jumlah Aset Total Assets	14.565.401	13.395.523	1.169.879	8,73%
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liability	3.434.467	1.932.789	1.501.678	77,69%
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liability	6.572.556	8.255.273	(1.682.717)	-20,38%
Jumlah Liabilitas Total Liability	10.007.023	10.188.062	(181.039)	-1,78%
Ekuitas Equity	4.558.378	3.207.460	1.350.918	42,12%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liability and Equity	14.565.401	13.395.523	1.169.879	8,73%

Aset

Pada 31 Desember 2021, Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.169.878.577.494 atau setara dengan 8,73% menjadi sebesar Rp14.565.401.098.078 bila dibandingkan dengan Total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp13.395.522.520.584. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp564.417.961.247 atau setara dengan 114% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp721.322.057.310 atau setara dengan 13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang disebabkan karena pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Assets

On December 31, 2021, the Company's Total Assets experienced an increase of Rp1,169,878,577,494 or equivalent with 8.73% to Rp14,565,401,098,078 when compared to Total assets on December 31 2020 amounting to Rp13,395,522,520,584. It is especially caused by the increase in the Company's cash and cash equivalents amounting to Rp564,417,961,247 or equivalent to 114% when compared to 2020 and the increase in assets fixed company amounting to Rp721,322,057,310 or equivalent with 13% when compared to 2020 which caused by the development of the backbone network and fiber to the home (FTTH), bandwidth capacity upgrade and build new branches in several big cities in Indonesia during 2021.

1. Aset Lancar

Pada 31 Desember 2021, Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp663.046.373.327 atau setara dengan 23,85% menjadi sebesar Rp3.442.650.087.617 bila dibandingkan dengan Aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.779.603.714.290. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas Perusahaan yang sebelumnya Rp494.777.973.772 menjadi Rp1.059.195.935.019. Kenaikan cash ini disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank sebesar Rp1.093.446.423.074 dan penerbitan Sukuk Ijarah tahap 4 sebesar Rp500.000.000.000 di tahun 2021 yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH).

2. Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2021, Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp506.832.204.167 atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp11.122.751.010.461 bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.615.918.806.294. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2021, Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp181.039.081.001 atau setara dengan 1,78% menjadi sebesar Rp10.007.023.391.095 bila dibandingkan dengan total Liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.188.062.472.096. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dan Sukuk Ijarah tahap 4 dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2021, Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.501.677.714.622 atau setara dengan 77,69% menjadi sebesar Rp3.434.466.972.634 bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.932.789.258.012. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994.

1. Current Assets

As of December 31, 2021, the Company's current assets increased by Rp663,046,373,327 or equivalent to 23.85% to Rp3,442,650,087,617 when compared to Current assets as of December 31, 2020 amounted to Rp2,779,603,714,290. This is mainly due to by the previous increase in the Company's cash Rp494,777,973,772 to Rp1,059,195,935,019. The increase in cash was due to the disbursement of facilities bank loan amounting to Rp1,093,446,423,074 and issuance of stage 4 Sukuk Ijarah amounting to Rp500,000,000 in 2021 partially large amount will be used for network construction backbone and fiber to the home (FTTH).

2. Non-current Assets

As of December 31, 2021, the Company's non-current assets increased by Rp506,832,204,167 or equivalent to 4.77% to Rp11,122,751,010,461 when compared to Non-current assets as of December 31, 2020 amounted to Rp10,615,918,806,294. It is especially caused by an increase in the Company's fixed assets in the form of backbone and fiber network development to the home (FTTH), bandwidth capacity upgrade and build new branches in several cities in Indonesia during 2021.

Liability

As of December 31, 2021, the Company's Total Liabilities experienced a decrease of Rp181,039,081,001 or equivalent to 1.78% to Rp10,007,023,391,095 if compared to total Liabilities at 31 December 2020 amounting to Rp10,188,062,472,096. It is especially caused by an increase in loans and Sukuk Ijarah stage 4 and the return of the advance for the paid-up capital recorded as shareholder payable in 2021 amounting to Rp844,408,372,000

1. Short-term Liability

As of December 31, 2021, Short-term liabilities The company experienced an increase of Rp1,501,677,714,622 or equivalent to 77.69% becomes Rp3,434,466,972,634 if compared to Short-term liabilities at December 31, 2020, amounting to Rp1,932,789,258,012. This was mainly due to the series B. bonds payable and stage I sukuk series A which will mature respectively in July 2022 and December 2022 with a total of Rp805,194,584,994.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2021, Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.682.716.795.623 atau setara dengan 20,38% menjadi sebesar Rp6.572.556.418.461 bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.255.273.214.084. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994 yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2021, Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.350.917.658.495 atau setara dengan 42,12% menjadi sebesar Rp4.558.377.706.983 bila dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.207.460.048.488. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru seri C Perseroan sebanyak 764.490 lembar saham sehingga modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp2.112.120.439.015 pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Long-term Liability

As of December 31, 2021, Long-term liabilities The company experienced a decrease of Rp1,682,716,795,623 or equivalent to 20.38% becomes Rp6,572,556,418,461 if compared to Long-term liabilities at December 31, 2020, amounting to Rp8,255,273,214,084. This was mainly due to bonds payable series B and stage I sukuk series A that will mature in July 2022 and December respectively 2022 with a total of Rp805,194,584,994 recorded as part of long-term liabilities which will mature within one year and return of advance for capital deposit recorded as shareholder debt in 2021 amounting to Rp844,408,372,000.

Equity

On December 31, 2021, the Company's Total Equity experienced an increase of Rp1,350,917,658,495 or equivalent with 42.12% to Rp4,558,377,706,983 when compared to total equity at 31 December 2020 amounting to Rp3,207,460,048,488. That matter mainly due to the issuance of new shares series C of the Company as many as 764,490 shares so that the authorized, issued and paid-up capital of the Company becomes Rp2,112,120,439,015 as of December 31, 2021.



- Data Center pada Nusantara Data Center Batam.
Data Center at Nusantara Data Center Batam.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

CONSOLIDATED PROFIT-LOSS REPORT

	2021 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2020 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-Juta)	Percentase Percentage (%)
Pendapatan Revenue	4.180.073	3.765.688	414.385	11,00%
Beban Langsung Direct Costs	(1.642.783)	(1.288.521)	(354.262)	27,49%
Laba Kotor Gross Profit	2.537.290	2.477.167	60.123	2,43%
Beban Usaha Operating Expense	(993.299)	(905.751)	(87.548)	9,67%
Laba Usaha Operating Profit	1.543.992	1.571.417	(27.425)	-1,75%
Beban Lain-Lain-Bersih Other Expenses-Net	(742.415)	(782.413)	39.999	-5,11%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	801.577	789.003	12.574	1,59%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	12.803	8.429	4.374	51,90%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	788.774	780.575	8.200	1,05%
Beban Pajak-Bersih Tax Expense-Net	117.395	100.897	16.498	16,35%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	671.379	679.678	(8.299)	-1,22%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) After Tax	11.384	335.041	(323.657)	-96,60%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income	682.762	1.014.719	(331.956)	-32,71%
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Earnings for the Year per Share (Full Rupiah)	119	183	(64)	-34,97%

Pendapatan

Pada 31 Desember 2021, Pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp414.384.931.361 atau setara dengan 11% menjadi sebesar Rp4.180.073.066.155 bila dibandingkan dengan Pendapatan usaha pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.765.688.134.794. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp341.696.149.280 atau setara dengan 17% khususnya di pendapatan jasa internet dan VSAT yang masing-masing naik sebesar 30.8% dan 100% di tahun 2021. Selain itu, di tahun 2021, terdapat kenaikan permintaan kapasitas internet yang cukup signifikan karena adanya pergeseran

Revenue

As of December 31, 2021, the Company's operating revenues experienced an increase of Rp414,384,931,361 or equivalent to 11% to Rp4,180,073,066,155 when compared to Operating income at 31 December 2020 amounting to Rp3,765,688,134,794. That matter mainly due to telecommunication service revenues The company which increased significantly by Rp341,696,149,280 or equivalent to 17% especially in internet and VSAT service revenues, respectively increased by 30.8% and 100% in 2021. In addition, in 2021, there will be an increase in capacity demand internet which is quite significant due to a shift in customer behavior such as online meetings, work

customer behavior seperti online meeting, work from home (WFH) dan school from home (SFH). Pergeseran customer behavior ini menyebabkan adanya kenaikan pendapatan, khususnya di segmen wholesale, enterprise dan retail.

Beban Langsung

Pada 31 Desember 2021, Beban langsung Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp354.262.004.885 atau setara dengan 27,49% menjadi sebesar Rp1.642.782.786.475 bila dibandingkan dengan beban langsung pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.288.520.781.590. Hal tersebut terutama disebabkan penambahan atas pembangunan backbone dan fiber to the home (FTTH) serta upgrade kapasitas di tahun 2021 sehingga beban depresiasi naik sebesar Rp127.933.123.499 atau setara dengan 65% menjadi Rp323.738.941.833 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp195.805.818.334. Selain itu, biaya penyelenggaraan telekomunikasi untuk jaringan domestik, internet dan jaringan internasional mengalami penurunan sebesar Rp631.534.785.914 atau setara dengan 6% dikarenakan pembangunan jaringan telekomunikasi yang sudah selesai dibangun sehingga Perseroan menggunakan jaringan milik sendiri.

Beban Lain-Lain-Bersih

Pada 31 Desember 2021, Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp39.998.730.997 atau setara dengan 5,11% menjadi sebesar Rp742.414.677.101 bila dibandingkan dengan beban lain-lain pada 31 Desember 2020 sebesar Rp782.413.408.098. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan Keuangan sebesar Rp42.858.137.582 atau setara dengan 5% yang disebabkan karena Perseroan sudah melunasi utang obligasi sebesar Rp540.000.000.000 pada tahun 2020.

Selain itu, biaya penyelenggaraan telekomunikasi untuk jaringan domestik, internet dan jaringan internasional mengalami penurunan sebesar Rp631,53 miliar atau setara dengan 6% dikarenakan pembangunan jaringan telekomunikasi yang sudah selesai dibangun sehingga Perusahaan menggunakan jaringan milik sendiri.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Pada 31 Desember 2021, Laba bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.298.972.245 atau setara dengan 1,22% menjadi sebesar Rp671.378.603.195 bila dibandingkan dengan Laba bersih pada 31 Desember 2020 sebesar Rp679.677.575.440. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan atas pembangunan backbone dan upgrade kapasitas di tahun 2021 dan pembukaan cabang-cabang baru di beberapa kota untuk memperluas penjualan jaringan FTTH di tahun 2021. Hal

from home (WFH) and school from home (SFH). Customer shift This behavior causes an increase in income, particularly in the wholesale, enterprise and retail segments.

Direct Costs

As of December 31, 2021, the Company's direct expenses increased by Rp354.262.004.885 or equivalent to 27.49% to Rp1,642,782,786,475 when compared to direct expenses on December 31, 2020 amounted to Rp1,288,520,781,590. This is mainly due to additions to the construction of the backbone and fiber to the home (FTTH) as well as capacity upgrades in 2021 so that depreciation expense will increase by Rp127,933,123,499 or equivalent to 65% to Rp323,738,941,833 compared to last year 2020 amounting to Rp195,805,818,334. In addition, the cost telecommunications operations for domestic networks, the internet and international networks have decreased amounting to Rp631,534,785,914 or equivalent to 6% due to the development of telecommunications networks that has been completed so that the Company uses own network.

Other Expenses-Net

As of December 31, 2021, the Company's other expenses decreased by Rp39,998,730,997 or equivalent to 5.11% to Rp742,414,677,101 when compared to other expenses as of December 31 2020 amounting to Rp782,413,408,098. It is especially caused by a decrease in interest expense and Finance amounting to Rp42,858,137,582 or equivalent to 5% This is because the Company has paid off the bonds payable amounting to Rp540,000,000,000 in 2020.

In addition, the telecommunications operation costs for domestic network, internet and international network decreased by Rp631.53 billion or equivalent to 6% due to network development telecommunications that have been completed so that The company uses its own network.

Net Profit for the Year

As of December 31, 2021, the Company's net profit experienced a decrease of Rp8,298,972,245 or equivalent by 1.22% to Rp671,378,603,195 if compared to Net profit on December 31 2020 amounting to Rp679,677,575,440. It is especially caused by the addition of development backbone and capacity upgrade in 2021 and opening of new branches in several cities to expand FTTH network sales in 2021. Hal This causes an increase in the value of fixed assets and expenses depreciation where depreciation expense

ini menyebabkan peningkatan nilai aset tetap dan beban penyusutan dimana beban penyusutan pada beban langsung meningkat sebesar Rp153.880.463.099 atau setara dengan 47%, sedangkan beban depresiasi pada beban operasional meningkat sebesar Rp23.756.105.847 atau setara dengan 73% dibandingkan tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Pada 31 Desember 2021, Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp331.956.391.016 atau setara dengan 32,71% menjadi sebesar Rp682.762.219.331 bila dibandingkan dengan Jumlah penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.014.718.610.347. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan atas revaluasi aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp377.262.681.230 sehingga di tahun 2021 terdapat penurunan di jumlah penghasilan komprehensif.

Rasio-Rasio Profitabilitas

Untuk dapat memberikan gambaran tentang kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, berikut disampaikan rasio-rasio profitabilitas Perusahaan.

Rasio Profitabilitas Profitability Ratios	2021 (%)	2020 (%)
Pendapatan/Jumlah Aset Income/Total Assets	28,70	28,11
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA) Profit for the Year/Total Assets (ROA)	4,61	5,07
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE) Profit for the Year/Total Equity (ROE)	14,73	21,19

Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 14,73%, 21,19% dan 30,83%.

Sedangkan Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA) menggambarkan kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 4,61% dan 5,07%.

on expense directly increased by Rp153,880,463,099 or equivalent to 47%, while the depreciation expense at operating expenses increased by Rp23,756,105,847 or equivalent to 73% compared to 2020.

Total Comprehensive Revenue

As of December 31, 2021, Total earnings The Company's comprehensive income decreased by Rp331,956,391,016 or equivalent to 32.71% to amounting to Rp682,762,219,331 when compared to Total comprehensive income as of December 31 2020 amounting to Rp1,014,718,610,347. It is especially caused by the gain on asset revaluation fixed in 2020 amounting to Rp377,262,681,230 so that in 2021 there will be a decrease in the number of comprehensive income.

Profitability Ratios

To describe Company's ability in generating profit, below are the Company's profitability ratios.

Profit for the Year/Total Equity (ROE) describes the Company's ability to earn revenue from his equity. Company's ROE for the years ended on December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively were 14.73%, 21.19% and 30.83%.

While Profit for the Year/Total Assets (ROA) describes the Company's ability to generate income from its assets. ROA for years ending on December 31, 2021 and 2020 are 4.61% and 5.07%, respectively.

Laporan Arus Kas Konsolidasian CONSOLIDATED CASH FLOW REPORT

	2021 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2020 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operational Activities	1.615,8	1.864.176	(248.332)	-13,32%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	(1.430.828)	(1.366.045)	64.783	4,74%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	378.516	(1.434.696)	1.813.213	126,38%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	563.532	(936.566)	1.500.098	160,17%
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	494.778	1.432.164	(937.386)	-65,45%
Selisih Transaksi dalam Mata Uang Asing Differences in Foreign Currency Transactions	886	(820)	1.706	208,04%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	1.059.296	494.778	564.418	114,07%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2021, total arus kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp248.331.678.675 atau setara dengan 13,32% menjadi sebesar Rp1.615.844.132.112 bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.864.175.810.787. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 6% yang disertai dengan kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar 29% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2021, total arus kas bersih diperoleh dari kegiatan investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp64.783.096.482 atau setara dengan 4,74% menjadi sebesar Rp1.430.828.437.913 bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.366.045.341.431. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap dan aset lain-lain sebesar 6% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 atas pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Cash Flow from Operational Activities

As of December 31, 2021, total net cash flow was obtained from the Company's operating activities decreased amounting to Rp248,331,678,675 or equivalent to 13.32% to Rp1,615,844,132,112 when compared with a position as of December 31, 2020 of Rp1,864,175,810,787. This is mainly due to by a 6% increase in cash receipts from customers accompanied by an increase in cash payments to suppliers and employees by 29% in 2021 if compared to 2020.

Cash Flow from Investment Activities

As of December 31, 2021, total net cash flow was obtained from the Company's investment activities has increased amounting to Rp64,783,096,482 or equivalent to 4.74% to Rp1,430,828,437,913 when compared with a position as of December 31, 2020 of RpRp1,366,045,341,431 This is mainly due to by the increase in the acquisition of property, plant and equipment and other assets by 6% in 2021 when compared to in 2020 for the development of the backbone network and fiber to the home (FTTH), bandwidth capacity upgrade and build new branches in several big cities in Indonesia during 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2021, total arus kas bersih diperoleh dari kegiatan pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.831.212.590.363 atau setara dengan 126,38% menjadi sebesar Rp378.516.239.081 bila dibandingkan dengan Arus kas bersih digunakan dari aktivitas pendanaan posisi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.434.696.351.282). Hal tersebut terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank sebesar Rp1.093.446.423.074 dan penerbitan Sukuk Ijarah tahap 4 sebesar Rp500.000.000.000 di tahun 2021 serta setoran modal saham baru sebesar Rp1.813.370.280.000 pada tahun 2021.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan memperhitungkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, serta selisih transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas Perusahaan tercatat mengalami peningkatan sebesar 114,07% atau setara dengan Rp564,42 miliar, dari Rp494,78 miliar pada awal tahun 2021 menjadi Rp1,06 triliun di akhir tahun 2021, terutama yang disebabkan oleh pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

Cash Flow from Funding Activities

As of December 31, 2021, total net cash flow was obtained from funding activities the Company experienced an increase of Rp1,831,212,590,363 or equivalent with 126.38% to Rp378,516,239,081 when compared to Net cash flow used from position funding activities as of December 31, 2020 amounting to (Rp1,434,696,351,282). It is especially caused by the disbursement of a bank loan facility of Rp1,093,446,423,074 and issuance of Sukuk Ijarah stage 4 Rp500,000,000 in 2021 and a deposit new share capital of Rp1,813,370,280,000 in year 2021.

Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Taking into account cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from activities funding, as well as foreign exchange transactions foreign currency, cash and cash equivalents The listed company experienced an increase of 114.07% or equivalent to Rp564.42 billion, from Rp494.78 billion at the beginning of 2021 to Rp1.06 trillion by the end of 2021, especially those caused by the development of the backbone network and fiber to the home (FTTH), bandwidth capacity upgrade and build new branches in several big cities in Indonesia during 2021.

Kemampuan Membayar Utang SOLVENCY

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas: Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek perusahaan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 100%, 144% dan 117%.

Sumber likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari internal dan eksternal Perseroan. Likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan digunakan untuk biaya operasional, modal kerja, belanja modal, serta pembayaran kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan pembiayaan baik untuk modal kerja dan belanja modal, maka Perseroan akan mempergunakan sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman bank jangka pendek dan/atau jangka panjang.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal serta pembayaran kembali pembiayaan dari bank beserta bunganya. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Company's solvency is measured using solvability ratios and liquidity ratios. Solvability ratios are ratios of measurement for Company's ability to settle all debts, either short- or long-term, whereas liquidity ratios are ratios of measurement for Company's ability to settle all short-term debts.

Liquidity Ratios: The Ability to Settle Short-term Debts

Liquidity is the company's ability to meet its short-term liabilities, which are reflected in the ratio of assets current liabilities to the company's current liabilities.

The Company's liquidity level for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively are 100%, 144% and 117%.

The source of liquidity owned by the Company comes from from internal and external of the Company. Internal liquidity derived from the results of the Company's business activities used for operational costs, working capital, spending capital, as well as payment of the Company's obligations. If The company needs additional financing either for working capital and capital expenditures, the Company will use external liquidity sources in the form of: short-term and/or long-term bank loans.

There are no material sources of liquidity that have not been used. So far, there is no trend known, requests, engagements and commitments, events and/or uncertainties that may result in an increase or decrease material to the Company's liquidity.

The Company believes that its liquidity sufficient to meet the needs of working capital, spending capital and repayment of financing from banks along with the flowers. So that changes in interest rates does not have a significant effect on the ability the company repays the loan.

	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
			Nominal Value
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Lancar Total Current Assets/Total Current Liabilities	100,24%	143,81	(43,57)

Rasio Solvabilitas: Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang dihitung dari rasio jumlah seluruh liabilitas perusahaan masing-masing terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas. Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 68,70%, 76,06% dan 82,86%. Sedangkan rasio seluruh liabilitas berbunga terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 219,53%, 317,64% dan 483,55%.

Solvency Ratios: The Ability to Settle Long- and Short-term Debts

Solvency is the company's ability to meet all of its liabilities, which is calculated from the ratio total liabilities of each company to total assets and to equity. Whole Ratio liabilities to the total assets of the Company for the years ending on December 31, 2021, 2020 and 2019 are 68.70% respectively, 76.06% and 82.86%. While the ratio of all liabilities interest on the Company's equity for the years ending on December 31, 2021, 2020 and 2019 were 219.53%, 317.64% and 483.55%.

	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
			Nominal Value
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER) (%) Total Liabilities/Total Equity (DER) (%)	219,53	317,64	(98,11)
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (%) Total Liabilities/Total Assets (%)	68,70	76,06	(7,36)

Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah aset Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 68,70% dan 76,06%. Sedangkan rasio seluruh liabilitas berbunga terhadap ekuitas Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 219,53% dan 317,64%.

The ratio of all liabilities to total assets of the Company for the years ended 31 December 2021 and 2020 are 68.70% and 76.06%. While the ratio of all liabilities interest on the Company's equity for the years ending on December 31, 2021 and 2020 are 219.53% and 317.64%.

Tingkat Kolektabilitas Piutang RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung rasio lama penagihan rata-rata (*average collection period*). Rasio tersebut dapat menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan Perusahaan dalam menagih piutangnya dan rasio perputaran piutang (*receivable turnover*) yang menunjukkan berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam setahun. Semakin kecil nilai rasio lama penagihan rata-rata menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

Tingkat Kolektibilitas Piutang tahun 2021 sebesar 35 hari, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kolektibilitas Piutang tahun 2020 sebesar 36 hari. Sedangkan rasio perputaran piutang pada tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 10,5 kali dan 9,78 kali.

Company's ability to collect receivables can be determined by calculating average collection period. The ratio shows the average period the Company takes to collect receivables and receivable turnover, showing how many times in a year the fund invested in receivable. The smaller the value of average collection period ratio, the faster the Company can collect its receivables.

Receivables Collectability Level of 2021 was 35 days, an increase from that of 2020 with 36 days, whereas receivable turnover ratio in 2021 and 2020 was 10.5 times and 9.78 times, respectively.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICIES ON CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Struktur modal merupakan penggabungan antara modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Struktur modal dengan minimum biaya penggunaan dana dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai saham Perusahaan, tetapi tidak meningkatkan laba bersih per saham.

Perusahaan berupaya mengintensifikan struktur modal dengan mengoptimalkan modal rata-rata tertimbang yang minimum. Meningkatnya nilai saham Perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur modal dengan minimum biaya penggunaan dana. Namun demikian, hal tersebut tetap tidak dapat meningkatkan laba bersih per saham.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan struktur modal juga ditujukan kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Management Policies on Company's Capital Structure

Capital structure is a merging between private capital (equity) and debt (liability). Capital structure with a minimum cost of fund use can lead to increase in Company's stock value, but it does not increase net profit per share.

The Company tries to intensify capital structure by optimizing minimum weighted average capital. The increase in Company's stock value can be influenced by capital structure with minimum cost of fund use. However, this will still not increase the net profit per share.

The main objective of managing Company's capital is to ensure that the Company can maintain a healthy capital ratio in support of the business itself and to maximize the value of the shareholders. The Company manages capital structure and makes adjustments to capital structure in conjunction with changes in the economic condition. Policies on capital structure is also intended for shareholders by determining the price of products and services that is in proportion with risk levels.

Sebagaimana praktik yang berlaku secara umum, Perusahaan melakukan evaluasi struktur permodalan melalui analisis rasio utang terhadap modal, yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

According to general practices, the Company evaluates capital structure through analysis on debt to capital ratio, in which net debt is divided against total capital.

Struktur Modal Perusahaan

Berikut disampaikan struktur permodalan Perusahaan yang menggambarkan rasio utang bersih terhadap modal:

Company's Capital Structure

The Company's capital structure that depicts net debt to capital ratio is described as follows:

Struktur Permodalan Perusahaan dan Komposisinya

The Company's Capital Structure and Its Composition

Struktur Modal Capital Structure	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp-Million)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp-Million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-Juta) Value (Rp-Million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Jumlah Pinjaman Total Loans	7.896.185		7.205.407		690.778	9,59%
Dikurangi: Kas dan Setara Kas Subtracted by: Cash and Cash Equivalents	1.059.196		494.778		564.418	114,07%
Utang Bersih Net Debt	6.837.045	60,00%	6.710.629	67,66%	126.415	1,88%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.558.378	40,00%	3.207.460	32,34%	1.350.918	42,12%
Jumlah Permodalan Total Capital	11.395.422	100,00%	9.918.089	100,00%	1.477.333	14,90%
Rasio Utang Bersih terhadap Ekuitas Net Debt to Equity Ratio	149,84		209,22		(59,38)	-28,38%

Di tahun 2021, struktur modal Perusahaan terdiri dari utang bersih sebesar 60,00% dan ekuitas sebesar 40,00%. Komposisi tersebut mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan utang bersih sebesar 67,66% dan ekuitas sebesar 32,34%, sejalan dengan penurunan jumlah pinjaman serta kenaikan kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan rasio utang bersih terhadap ekuitas.

In 2021, Company's capital structure consisted of net debt of 60.00% and equity of 40.00%. Such a composition shifted from 2020 with net debt of 67.66% and equity of 32.34%, along with a decrease in total loans as well as an increase in Company's cash and cash equivalents. This then contributed to a drop in net debt to equity ratio.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal MATERIAL BINDING FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material di tahun 2021.

There was no commitment to investment in material capital goods in 2021.

Realisasi Investasi Barang Modal REALIZATION OF INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table presents the Company's capital expenditure for the years ended 31 December 2021, 2020 and 2019:

Keterangan Description	2021 (Rp-juta) Rp-million	2020 (Rp-juta) Rp-million	2019 (Rp-juta) Rp-million
Tanah Land	12.150	11.721	208.265
Bangunan Building	6.387	16.775	19.604
Peralatan dan Perabot Kantor Office Supplies	8.446	11.532	14.674
Peralatan Telekomunikasi Telecommunication Equipment	283.830	804.657	546.715
Kendaraan Vehicle	4.955	484	1.882
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work in Progress	698.853	769.126	1.073.203
Jumlah Total	1.014.602	1.614.294	1.864.342

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

1. Pada tanggal 10 Maret 2022, berdasarkan Keterbukaan Informasi Publik melalui surat Perseroan No. 015/MTI/CORSEC/EXT/III/2022 perihal Penyampaian Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan Tahunan PT Mora Telematika Indonesia dan Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan Sukuk PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2022, Perseroan memperoleh peningkatan atas hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya, dari rating idA menjadi idA+ dan idA(sy) menjadi idA+(sy).
1. On March 10, 2022, by letter Company No. 015/MTI/CORSEC/EXT/III/2022 regarding Submission of Rating Monitoring Certificate PT Mora Telematika Indonesia Annual and Certificate Rating Monitoring of Debt Securities and Sukuk PT Mora Telematika Indonesia Year 2022, the Company obtained an increase in Rating results for Bonds and Sukuk Ijarah The Company's sustainability in previous years, from rating idA to idA+ and idA(sy) to idA+(sy).
2. Pada tanggal 17 Maret 2022, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang telah di aktakan oleh Akta Notaris No. 34/2022, Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022. Berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB tersebut para pemegang saham setuju dan memutuskan salah satunya sebagai berikut:

Mengangkat kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima (ke-5) dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. On March 17, 2022, by Decree Circular of Shareholders as Substitute Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Company which has been notarized by Notary Deed No. 34/2022, Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in Kota South Jakarta Administration. which deed has been received and recorded in the agency's administrative system database Law based on Notice of Acceptance Letter Change of Company Data AHU-AH.01.03-0182075 March 18, 2022. Based on the results of the Decision Circular of Shareholders as Substitute At the EGMS, the shareholders agreed and decide on the following:

Re-appointing Members of the Board of Directors and the Board Commissioners are appointed for a period starting from his appointment closing of the General Meeting of Shareholders 5th (5th) Annual Shares without subtracting rights from the General Meeting of Shareholders at any time dismiss members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners before his term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Dampak Nilai Mata Uang Asing bagi Kinerja Perusahaan IMPACT OF FOREIGN CURRENCY VALUE FOR COMPANY PERFORMANCE

Perusahaan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank. Selain piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank, Perusahaan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Perusahaan mendanai kegiatan usaha dengan berbagai pinjaman bank dan surat utang yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Karenanya, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

The Company is exposed to foreign exchange rate risk arising from various currency exposures, notably against the United States Dollar and Singapore Dollar. Risk foreign exchange rates arising from commercial transactions to be settled in the future as well as assets and recognized liability.

Exposures subject to exchange rate risk are mainly related to with trade receivables, trade payables and non-bank loans. In addition to trade receivables, trade payables and Non-Bank Loans, The company has exposure in foreign currencies which arising from operational transactions. The exposure arise because the transaction in question is carried out in currency other than the operational unit's functional currency or the opposing party.

The Company finances business activities in various ways bank loans and debt securities that bear interest. Therefore, the exposure to market risk in respect of with changes in interest rates, especially on liabilities long-term and the assets and liabilities imposed flower. Therefore, the Company establishes a policy to get the most favorable interest rate without increasing exposure to foreign currencies by managing its borrowing costs using combination of long-term debt and liabilities with fixed and floating interest rates.

Pencapaian Target Tahun 2021

TARGET ACHIEVEMENT IN 2021

Perusahaan memiliki tolak ukur untuk menghitung perbandingan target dan realisasi yang dicapai setiap tahunnya yang berfungsi untuk menilai kinerja Perusahaan serta memberikan gambaran bagi Perusahaan untuk menetapkan strategi kinerja usaha di tahun mendatang. Selain itu, Perusahaan juga memiliki komponen lainnya yang menunjang perhitungan perbandingan target dan realisasi Perusahaan.

The Company uses a parameter to measure the ratio of target and realization achieved every year in order to assess performance and to give the Company references in determining business' performance strategy for the coming years. In addition, the Company also utilizes some other components that support the measurement of the ratio of the Company's target and realization.

Pada dasarnya, realisasi tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan manajemen.

Generally, 2021 realization was in line with the targets that the management stipulated.

Deskripsi Description	Target Tahun 2021 2021 Target	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization
Pendapatan Revenue	4.062.588	4.180.073
Laba Kotor Gross Profit	2.414.417	2.537.290
Laba Bersih Net Profit	595.323	671.379
Struktur Modal Capital Structure	11.715.581	11.395.422

Prospek Usaha dan Proyeksi Kinerja Tahun 2022

BUSINESS PROSPECT AND PERFORMANCE PROJECTION IN 2022

Prospek Usaha Tahun 2022

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis e-commerce, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan mobile internet. Perseroan berharap pertumbuhan layanan mobile internet ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan bandwidth.
- Terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) bagi perusahaan-

Business Prospect in 2022

Prospects for the growth of the telecommunications industry in Indonesia is still very potential to be developed, especially for telecommunications facilities and infrastructure. factors that support this include:

- Demographic conditions of Indonesia with the largest population fourth in the world with over 250 million inhabitants, and the fast-growing middle class, as well as the economy Indonesia which shows strong growth good and stable in recent years, is expected to continue to drive demand for telecommunications and data services.
- The total area of Indonesia is 1.9 million km² and the position is strategically located between two oceans and two continents, Indonesia can become a transit center for ICT traffic regional and global. Currently, the distribution of availability Internet services in Indonesia are still not evenly distributed. Development of the backbone network (backbone) national optical fiber (Palapa Ring) that connects all major islands and all regencies/cities in Indonesia Indonesia is one of the necessary steps accelerated to achieve this goal.
- Internet penetration is still relatively low compared to other countries, especially in the region Asia, while on the other hand society is getting more open to the globalization of digital lifestyles, which culminate in on the rapidly increasing use of devices smartphones at increasingly affordable prices, high activity on social networks, the Internet of Things, Artificial Intelligence (AI) as well as increasing e-commerce business, which is expected to encourage growth of mobile internet services. The Company hope that the growth of this mobile internet service will continues with increasing popularity smartphones, tablets and other mobile devices that have internet access, the faster the data transmission wireless networks and the rise of smart devices and affordable internet service. It will also impact on increasing bandwidth requirements.
- The occurrence of the COVID-19 pandemic in early 2020 in Indonesia resulted in changes to pattern of life of Indonesian society in general. One of the changes is an appeal from government to the people of Indonesia to work from home (*Work from Home/WFH*) for companies or study from home for schools. The appeal

perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail, tetapi Perseroan juga akan mengembangkan untuk segmen bisnis lainnya yaitu Wholesale dan enterprise. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan risiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE High-density polyethylene) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

resulted in a request public about telecommunication and internet services from home increased, thus making the Company have a strategy to grow the business specifically in telco and retail, but the Company will also develop for other business segments, namely Wholesale and enterprise. In addition to supporting strategy, the Company also plans to increase the existing capacity and increase retail network in several new cities.

- e. With the advancement of telecommunications in Indonesia with optical cable network that is getting wider, especially in big cities, resulting in spatial planning city by the abundance of aerial optical cable network through the pillars to look unbeautiful and neat, in addition to the placement of fiber optic cables with using poles poses a risk cable damage is higher because not there is an infrastructure that protects the cable. Therefore, the Company plans to build Cooperation with several big cities in Indonesia in the Provision of Public Service Infrastructure Passive Telecommunications for development projects operation, exploitation and supply U-ditch (channel of reinforced concrete with the shape of cross section of the letter "U") and/or Macroduct (High-density polyethylene HDPE pipe) and/or media other matters decided by the Company from time to time, in which the passive infrastructure is used jointly by other cable owners with some of the commercial terms used for the placement of fiber optic cables by operators telecommunications so that there are no more cables aerial fiber optics through masts and towers cellular telecommunications to be used by para telecommunications operators, as well as facilities and equipment his supporters.

With the huge potential in this industry, It is hoped that Indonesia will be able to transform from countries that depend on natural resources become innovation-based country, so that mastery of technology information and communication is very important

Pembagian Dividen yang Dilakukan di Tahun 2021, dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Perseroan dapat menyatakan untuk membagikan dividen di setiap tahun jika Perseroan memiliki laba positif. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran dividen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha di masa mendatang dan kondisi keuangan Perseroan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diikutsertakan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan. Apabila, setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mengumumkan pembagian dividen untuk disetujui oleh para pemegang saham setelah Perseroan memperoleh laba positif. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, pembagian dividen akan dibayarkan dalam bentuk Rupiah. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal pencatatan memiliki hak penuh atas jumlah dividen yang disetujui, dengan tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang berlaku. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri atas saham akan dikenakan pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 20%.

Dividend Distribution Implemented in 2021 and Dividend Distribution Chronology

Based on applicable law in the Republic of Indonesia and the Company's Articles of Association, decisions regarding dividend distribution is taken through the decision of the holder shares at the Annual General Meeting of Shareholders or General Meeting of Shareholders at the recommendation of the Board of Directors. Company may declare to distribute dividends in any year if the Company has a positive profit. Announcement, the amount and future payment of cash dividends, determined by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and must be approved by the General Meeting of Shareholders Share. The amount of dividends will be influenced by various factors factors, including, but not limited to: (i) profit retained, operating performance, cash flow, future business prospects future and the Company's financial condition, and (ii) factors others deemed relevant by the Shareholders Company.

Based on the Company's Articles of Association, prior to financial year ends, interim dividends can be distributed, provided that the interim dividend will included with dividends distributed based on the decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the the provisions stipulated in the Articles of Association Company. The distribution of the interim dividend is determined by the Company's Board of Directors after previously approved in advance by the Company's Board of Commissioners. If, after the end of the relevant financial year, the Company suffer a loss, the interim dividend distributed must be returned by the shareholders to the Company, and the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will jointly and severally liable if dividends interim not returned.

With due observance of the laws in force in the Republic Indonesia and the Articles of Association of the Company, the Company intends to declare dividend distribution to be approved by the shareholders after The company earned a positive profit. Throughout the Company decided to distribute dividends, distribution dividends will be paid in Rupiah. Holder the Company's shares listed on the listing date have full rights to the agreed dividend amount, subject to the withholding of Indonesian taxes which apply. Dividends received by foreign taxpayers The country on the shares will be subject to withholding taxes which applicable in Indonesia by 20%.

Jumlah dividen dan kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada arus kas, laba ditahan, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, dan rencana investasi Perseroan di masa depan, serta batasan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, undang-undang, atau persyaratan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 tanggal 20 Mei 2021, pemegang saham memutuskan terkait penggunaan laba adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui laba bersih tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp224.474.772.872 untuk dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang saham dan menetapkan untuk tidak menempatkan dana cadangan karena telah mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- b. Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp958.663.976.130 kepada pemegang saham.

Berdasarkan perhitungan laba tersebut maka dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dengan keterangan dan syarat sebagai berikut:

- i. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan setara dengan total 588.235 lembar saham, sehingga perhitungan dividen per lembar saham senilai Rp1.964.000.
- ii. Besaran dividen untuk masing-masing PT Gema Lintas Benua adalah sebesar Rp491.000.000.000 sedangkan besaran dividen untuk PT Candrakarya Multikreasi adalah sebesar Rp664.293.540.000.
- iii. Tanggal distribusi dividen kepada Para Pemegang Saham akan dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- iv. Pembagian dividen yang dijelaskan pada huruf i sampai huruf iii akan dilakukan setelah Perusahaan memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, termasuk dari para kreditur, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada Para Pemegang Saham.
- c. Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Manajemen telah menindaklanjuti keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tersebut dengan merealisasikan pembagian Dividen tunai sebagai berikut:

The amount of dividends and the Company's ability to paying dividends in the future will depend on cash flow, retained earnings, financial condition, capital requirements work, and the Company's future investment plans, as well as limits set by applicable law, statutory, or other requirements.

Based on the Circular Decision of All Shareholders in Place of the Annual GMS for the Fiscal Year of 2020 on May 20, 2021, shareholders decided upon the following regarding the use of profit:

- a. Approved that the net profit for the fiscal year of 2020 that ended on December 31, 2020 at Rp224,474,772,872 was to be distributed in its entirety as dividends to all shareholders and stipulated that reserved fund was not to be allocated as the profit had reached 20% of issued and deposited capital.
- b. Approved that the dividend from part of retained earnings ending on December 31, 2019 at Rp958,663,976,130 was to be distributed to all shareholders based on the following terms and conditions:

Based on the profit calculation, the dividend which will be distributed to shareholders by information and conditions as follows:

- i. The dividend that was to be distributed would equal to 588,235 sheets of share, so the dividend per sheet of share would amount to Rp1,964,000.
- ii. The amount of dividends for PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi would be Rp491,000,000,000 and Rp664,293,540,000, respectively.
- iii. The date of dividend distribution to all shareholders would be July 1, 2021 through December 31, 2021.
- iv. Dividend distribution as outlined in letter (i) through (iii) would commence after the Company had obtained all required approvals, including from all creditors, and the distribution might proceed.
- c. The remaining funds would be recorded as retained earnings whose use were yet to be determined.

The management had followed up the decisions of the Annual GMS for the 2020 Fiscal Year by realizing the distribution of cash dividend as follows:

Dividen Kas yang Dibagikan Distributed Cash Dividend	Rp1.155.293.540.000
Dividen per Lembar Saham Dividend per Sheet of Share	Rp1.964.000
Jumlah Dividen Tahunan Total Annual Dividends	PT Gema Lintas Benua : Rp491.000.000.000 PT Candrakarya Multikreasi : Rp664.293.540
Tanggal Pengumuman Announcement Date	20 Mei 2021 May 20, 2021
Tanggal Pembayaran Payment Date	21 Desember 2021 December 21, 2021

Pada Juli 2020 dan Januari 2021 Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan Perseroan dengan Rincian sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A dan seri B per 30 Juni 2020 telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi OJK IDX No. 048/MTI/CORSEC/EXT/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A dan Seri B.

In July 2020 and January 2021 the Company has submit a Report on the Realization of the Use of Funds for The Company's Sukuk Shelf Ijarah with Details as follows :

1. Report on the Realization of the Use of Sukuk Ijarah Funds Sustainable I Moratelindo Phase I 2019 Series A and series B as of June 30, 2020 have been reported via OJK IDX Integrated Electronic Reporting System No. 048/MTI/CORSEC/EXT/VII/2020 July 15, 2020

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Offer General Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I 2019 Series A and Series B.

PT Mora Telematika Indonesia Per 30 Juni 2020

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results			Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Backbone 85%
1	Sukuk Ijarah	27-Jun-19	Rp1,000,000,000,000	Rp12,524,746,240	Rp987,475,253,760	Rp839,353,965,696
Jumlah Total					Rp987,475,253,760	Rp839,353,965,696

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 Seri A dan seri B per 31 Desember 2020 telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi OJK IDX No. 010/MTI/PD-DIR/I /2021 tanggal 15 Januari 2021

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A dan Seri B

PT Mora Telematika Indonesia Per 31 Desember 2020

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results			Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Investasi 90% Investment
1	Sukuk Ijarah	27-Jun-20	Rp277,000,000,000	Rp3,674,240,000	Rp273,325,760,000	Rp245,993,184,000
Jumlah Total					Rp273,325,760,000	Rp245,993,184,000

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B

PT Mora Telematika Indonesia Per 31 Desember 2020

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results			Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Refinancing 75%
1	Sukuk Ijarah	1-Oct-20	Rp389,515,000,000	Rp4,572,906,100	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425
Jumlah Total					Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425

Atas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan mengungkapkan dan mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana diatas melalui RUPST 2021 sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Pengesahan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana di Mei 2021 (sesuai RUPST di 2021)

Menerima dan menyetujui laporan-laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut :

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds						Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Modal Kerja 15% Working Capital	Jumlah Total	Backbone 85%	Modal Kerja 15%	Jumlah Total		
Rp148,121,288,064	Rp987,475,253,760	Rp839,353,965,696	Rp148,121,288,064	Rp987,475,253,760		Rp-
Rp148,121,288,064	Rp987,475,253,760	Rp839,353,965,696	Rp148,121,288,064	Rp987,475,253,760		Rp-

2. Report on the Realization of the Use of Sukuk Shelf Ijarah Funds I Moratelindo Phase II and Phase III Year 2020 Series A and series B as of December 31, 2020 have been reported through the OJK IDX Integrated Electronic Reporting System No. 010/ MTI/PD-DIR/I/2021 dated January 15, 2021

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II Year 2020 Series A and Series B

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds						Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Modal Kerja 10% Working Capital	Jumlah Total	Investasi 90% Investment	Modal Kerja 10% Working Capital	Jumlah Total		
Rp27,332,576,000	Rp273,325,760,000	Rp245,993,184,000	Rp27,332,576,000	Rp273,325,760,000		Rp-
Rp27,332,576,000	Rp273,325,760,000	Rp245,993,184,000	Rp27,332,576,000	Rp273,325,760,000		Rp-

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III 2020 Series A and Series B

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds						Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Investasi 25% Investment	Jumlah Total	Refinancing 75%	Investasi 25%	Jumlah Total		
Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425	Rp32,512,310,216	Rp321,218,880,641		Rp63,723,213,259
Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425	Rp32,512,310,216	Rp321,218,880,641		Rp63,723,213,259

For the reporting as referred to above, the Company discloses and ratifies the Usage Realization Report
The above funds will be through the 2021 AGMS as described below

Ratification of the Accountability Report on the Realization of the Use of Funds in May 2021 (according to the AGMS in 2021)

Receiving and approving the Accountability Reports for the Realization of the Use of Funds as follows:

- Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I Year 2019 series A and series B are as follows:
 - The proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I Year 2019 Series A and Series B amounted to Rp1,000,000,000,000,- (one trillion Rupiah)

- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan
 - b. Sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
 - 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)
 - Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
 - b. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut : biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, aktivitas "branding" dan promosi.
 - 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
- As of December 31, 2020, all funds raised from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I Year 2019 series A and Series B after deducting emission costs, have been used entirely (100%) by the Company in accordance with the Plan for Use of Funds submitted in the prospectus namely as follows:
 - a. Approximately 85% (eighty five percent) used for investment needs, investment against Backbone including with device and passive and active infrastructure. Including will be used for the development of Inland Cable, ducting, and supporting devices are good active and passive infrastructure; and
 - b. Approximately 15% (fifteen percent) is used for working capital requirements.
 - 2. Usage Actual Accountability Report Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II Year 2020 series A and series B as follows :
 - Funds from the public offering of Sukuk Ijarah Sustainable I Moratelindo Phase II 2020 series A and Series B amounting to Rp277,000,000,000,- (two hundred seventy seven billion Rupiah)
 - As of December 31, 2020, all funds obtained from the proceeds of the public offering of Sukuk Ijarah Sustainable I Moratelindo Phase II 2020 Series A and Series B after deducting costs emissions, have been used in full (100%) by the Company in accordance with the Usage Plan Funds conveyed in additional information namely as follows:
 - a. Approximately 90% (ninety percent) used for investment needs, investment against Backbone and Access including with passive devices and infrastructure and active. Included will also be used for construction of Inland Cable, Ducting and supporting devices both active and passive infrastructure.
 - b. About 10% (ten percent) will be used for working capital needs, with details as follows: operational costs and network and device maintenance supporters, the cost of installing the device customers, "branding" and promotional activities.
 - 3. Usage Actual Accountability Report Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 series A and series B as follows :

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan sebagian oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 75% digunakan untuk kebutuhan Refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A.
 - b. Sekitar 25% digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
 - c. Jumlah dana yang telah direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp321.218.880.641,- (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah).
 - d. Sisa dana yang belum direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp63.723.213.259,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan belum direalisasikan karena menyesuaikan progress pembangunan untuk Investasi Perusahaan.

Sisa dana yang belum direalisasikan ditempatkan oleh Perseroan di Beberapa rekening Perseroan.

Peyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana oleh Perseroan Setelah RUPST Tahun Buku 2020

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A dan seri B per 30 Juni 2021 telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi OJK IDX No. 206/MTI/PD-DIR/VII /2021 tanggal 15 Juli 2021

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B

- Funds from the public offering of Sukuk Ijarah Sustainable I Moratelindo Phase III 2020 Series A and Series B amounting to Rp389,515,000,000,-(three hundred eighty nine billion five hundred five twelve million Rupiah)
- As of December 31, 2020, the funds obtained from the proceeds of the public offering of Sukuk Ijarah Sustainable I Moratelindo Phase III 2020 series A and Series B after deducting expenses emissions, has been partially used by the Company in accordance with the Plan for the Use of Funds presented in additional information, namely: as follows :
 - a. About 75% is used for necessities Refinancing Moratelindo Bonds I Year 2017 Series A.
 - b. About 25% is used for necessities investment, investment in Backbone and Access included with device and passive and active infrastructure. Also included will be used for the construction of Inland Cable, Ducting and supporting devices are both active and passive infrastructure.
 - c. Amount of funds that have been realized in connection with the planned use of funds as mentioned in letters (a) and (b) above is Rp321.218.880.641,- (three hundred twenty one billion two hundred eight twelve million eight hundred and eighty thousand six hundred and forty one Rupiah).
 - d. Remainder funds that have not been realized in connection with the planned use of funds as mentioned in letters (a) and (b) above are amounting to Rp63,723,213,259 (sixty three billion seven hundred twenty three million two hundred thirteen thousand two hundred and fifty nine Rupiah) and has not been realized because adjust development progress for Company Investment.

The remaining unrealized funds are placed by Company in several Company accounts.

Submission of the Report on the Realization of the Use of Funds by the Company After the AGM for the Financial Year 2020

1. Report on the Realization of the Use of Sukuk Ijarah Funds Sustainable I Moratelindo Phase III 2020 Series A and series B as of June 30, 2021 have been reported via OJK IDX Integrated Electronic Reporting System No. 206/MTI/PD-DIR/VII/2021 dated 15 July 2021

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Offer General Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 Series A and Series B

PT Mora Telematika Indonesia Per 30 Juni 2021

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results		Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Refinancing 75%
1	Sukuk Ijarah	27-Jun-19	Rp389,515,000,000	Rp4,572,906,100	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425
Jumlah Total					Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A dan seri B per 30 Juni 2021 telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi OJK IDX No. 205/MTI/PD-DIR/VII /2021 tanggal 15 Juli 2021

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A dan Seri B

PT Mora Telematika Indonesia Per 30 Juni 2021

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results		Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Investasi 80% Investment
1	Sukuk Ijarah	27-Jun-19	Rp500,000,000,000	Rp5,188,000,000	Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000
Jumlah Total					Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A dan seri B per 31 Desember 2021 telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi OJK IDX No. 002MTI/PD-DIR/I /2022 tanggal 17 Januari 2022

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A dan Seri B

PT Mora Telematika Indonesia Per 31 Desember 2021

No.	Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Results		Rencana Penggunaan Data Data Usage Plan	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Result	Investasi 80% Investment
1	Sukuk Ijarah	27-Jun-19	Rp500,000,000,000	Rp5,188,000,000	Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000
Jumlah Total					Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang disampaikan Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, untuk selanjutnya akan disahkan pertanggungjawabannya pada RUPS Tahun Buku 2021

Laporan Penggunaan Dana per Juli 2021 dan Desember 2021 yang telah dilaporkan Perusahaan kepada regulator akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan di tahun 2022.

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds					
Investasi 25% Investment	Jumlah Total	Refinancing 75%	Investasi 25%	Jumlah Total	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425	Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp-
Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp288,706,570,425	Rp96,235,523,475	Rp384,942,093,900	Rp-

2. Report on the Realization of the Use of Sukuk Shelf Ijarah Funds I Moratelindo Phase IV 2021 Series A and Series B per June 30, 2021 has been reported through the OJK IDX Integrated Electronic Reporting System No. 205/MTI/PD-DIR/VII /2021 July 15, 2021

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase IV Year 2021 Series A and Series B

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds					
Modal Kerja 20% Working Capital	Jumlah Total	Investasi 80% Investment	Modal Kerja 20% Working Capital	Jumlah Total	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Rp98,962,400,000	Rp498,812,000,000	Rp22,493,806,336	Rp29,953,502,734	Rp52,447,309,070	Rp442,364,690,930
Rp98,962,400,000	Rp498,812,000,000	Rp22,493,806,336	Rp29,953,502,734	Rp52,447,309,070	Rp442,364,690,930

3. Report on the Realization of the Use of Sukuk Shelf Ijarah Funds I Moratelindo Phase IV 2021 Series A and Series B as of December 31, 2021, it has been reported through the OJK IDX Integrated Electronic Reporting System No. 002MTI/PD-DIR/I /2022 January 17, 2022

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 Series A and Series B

Realisasi Penggunaan Dana Realized Use of Funds					
Modal Kerja 20% Working Capital	Jumlah Total	Investasi 80% Investment	Modal Kerja 20% Working Capital	Jumlah Total	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Fund from Public Offering
Rp98,962,400,000	Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000	Rp98,962,400,000	Rp494,812,000,000	Rp(0)
Rp98,962,400,000	Rp494,812,000,000	Rp395,849,600,000	Rp98,962,400,000	Rp494,812,000,000	Rp(0)

Whereas based on the Report on the Realization of the Use of Funds submitted by the Company as of June 30, 2021 and December 31, 2021 all funds obtained from the results of the public offering after deducting emission costs, have been used entirely (100%) by the Company in accordance with the Plan for Use of Funds, which will then be ratified accountability at the 2021 Fiscal Year GMS.

The Report on the Use of Funds as of July 2021 and December 2021 which the Company has reported to the regulator will be accounted for at the 2021 Annual GMS which will be held in 2022.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGING, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, serta restrukturisasi utang/modal, namun terdapat informasi material mengenai akuisisi.

There is no material information regarding investment, expansion, divestment, business combination, and debt/capital restructuring, but there is information acquisition material.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Perusahaan melakukan akuisisi 145.730 lembar saham PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT") atau 65% dari total kepemilikan IPT. Akuisisi ini dalam rangka meningkatkan ekspansi bisnis dan yang akan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan.

Material Information Regarding Acquisition

The company acquired 145,730 shares PT Indo Pratama Teleglobal ("IPT") or 65% of the total IPT ownership. This acquisition is in order to improve business expansion and which will have a positive impact on the Company's performance and financial condition.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGING, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Transaksi Afiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Affiliate Transaction

In carrying out its business activities, the Company carries out business and financial transactions with related parties. Characteristic the relationship and nature of the Company's transactions with other parties related as of December 31, 2021 are as following:

No	Pihak Terafiliasi Affiliated Parties	Keterangan Description
1	PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Has some of the same shareholders as the Parent Entity.
2	PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk. Shareholders and management are the same as the Parent Entity.
3	PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk. Shareholders and management are the same as the Parent Entity.
4	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk. Owns a portion of shareholders with the Parent Entity.
5	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Has some of the same shareholders as the Parent Entity.
6	PT Smart Telecom	Pemegang saham Perusahaan. Company's shareholders
7	PT Smartfren Telecom Tbk	Pemegang saham PT Smart Telecom. Shareholders of PT Smart Telecom
8	PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Has some of the same shareholders as the Parent Entity.
9	PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Has some of the same shareholders as the Parent Entity.
10	PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Has some of the same shareholders as the Parent Entity.

Perjanjian Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001A/MTI/PD-DIR/I/2017 dengan PTT sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PTT dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PTT dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah);
2. Pada tanggal 29 Juni 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 082/PKS/MTI-PRB/VI/16 dengan PRB sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PRB dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PRB dengan nilai pinjaman sebesar Rp53.749.650.042,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat puluh dua Rupiah);
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 275D/PKS/MTI-IPT/X/2019 dengan IPT sehubungan dengan Kerjasama pemberian jasa internet dari Perseroan kepada IPT dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah);
4. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Layanan Pay TV No. 020B/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI sehubungan dengan pemasaran/penjualan paket-paket layanan Pay TV yang akan dibundling dengan produk layanan telekomunikasi Perseroan lainnya;
5. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Rack Colocation No. 020A/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI sehubungan dengan rack colocation untuk digunakan sendiri;
6. Pada tanggal 8 November 2016, perjanjian Indefeasible Right of Use No. 160/PKS/MTI- SMARTFREN/XI/2016 dengan PT Smartfren Telecom Tbk. sehubungan dengan kepemilikan sistem yang berlaku sampai dengan 8 November 2031;
7. Pada tanggal 18 Januari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Dark Core No. 009a/PKS/MTI-IBS/I/2016 dengan PT Infrastruktur Bisnis ("IBS") sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core;

Affiliate Agreement

As of the date of this Prospectus, important agreements made by the Company with affiliated parties, including the following:

1. On January 9 2017, the Company signed the Shareholder Loan Agreement No. 001A/ MTI/PD-DIR/I/2017 with PTT in connection with granting a number of loan funds provided by the Company to PTT with the aim of supporting PTT operational activities with a loan value of Rp1,750,000,000,000,- (one trillion seven hundred fifty billion Rupiah);
2. On June 29, 2016, the Company signed the Shareholder Loan Agreement No. 082/PKS/MTIPRB/ VI/16 with DRR in connection with giving a number of loan funds provided by the Company to DRR with the aim of supporting activities PRB operations with a loan value of Rp53,749,650,042,- (fifty three billion seven hundred forty nine million six hundred fifty four twenty two Rupiah);
3. On October 1, 2019, the Company sign an Internet Service Subscription Agreement No. 275D/PKS/MTI-IPT/X/2019 with IPT in connection with cooperation in providing internet services from Company to IPT with an agreement value of Rp466.200.000,- (four hundred and sixty six million two hundred thousand rupiah);
4. As of January 31, 2017, the Company signed a Marketing Cooperation Agreement PayTV Service No. 020B/ PKS/MTI-OMI/I/2017 with OMI in connection with the marketing/sales of packages Pay TV service that will be bundled with the Company's other telecommunication service products;
5. On January 31, 2017, the Company sign a Rack Lease Agreement Colocation No. 020A/PKS/MTI-OMI/I/2017 with OMI in connection with rack colocation to use alone;
6. On November 8, 2016, the Indefeasible Agreement Right of Use No. 160/PKS/MTI- SMARTFREN/XI/2016 with PT Smartfren Telecom Tbk. in connection with system ownership valid up to 8 November 2031;
7. On January 18, 2016, the Company sign the Maintenance and Repair Agreement Dark Core No. 009a/PKS/MTI-IBS/I/2016 with PT Business Infrastructure ("IBS") in connection with the activities maintenance and repair of dark core;

8. Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic No. 016A/PKS/MTI-IBS/V/2016 dengan IBS sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core jaringan fiber optic;
 9. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kawasan No. No.094B/PKS/MTI-IBS/X/2015 dengan IBS sehubungan dengan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur dan Telekomunikasi secara bersama, yang mana Perseroan membangun dan melakukan penarikan Jaringan fiber optic dan IBS membangun atau menyediakan Menara dan infrastruktur BTS Hotel;
 10. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Shaft dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 068/PKS/MORATEL-IBS/VIII/2015 dengan IBS sehubungan dengan penyewaan shaft dan penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan Gedung ST. Regis di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
 11. Pada tanggal 3 Mei 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 dengan IBS sehubungan dengan penyewaan lokasi peralatan telekomunikasi dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah);
 12. Pada tanggal 25 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Penggunaan Ruang No. 016/PKS/MTI-PAKKODIAN/I/2017 dengan PT Pakkodian sehubungan dengan penggunaan sebagian lahan atau ruang dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
 13. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. MTI 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 dengan PT Smart Telecom sehubungan dengan penyediaan menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung oleh Perseroan kepada PT Smart Telecom.
 14. Pada tanggal 15 Februari 2021, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang, dan berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir dalam waktu perjanjian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS);
 15. Pada tanggal 1 Februari 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penggunaan jaringan kabel serat optik dan Metro-E Link. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, dari 1 February 2017 hingga 31 Januari 2027;
8. On 10 May 2016, the Company signed the Marketing and Maintenance Cooperation Agreement Fiber Optic Network No. 016A/PKS/MTI-IBS/V/2016 with IBS in connection with marketing activities and maintenance and repair of dark core networks fiber optics;
 9. On October 5, 2015, the Company signed a Development Cooperation Agreement Region No. No. 094B/PKS/MTI-IBS/X/2015 with IBS in relation to development and utilization Infrastructure and Telecommunications together, which the Company builds and performs withdrawal of fiber optic network and IBS build or provide BTS Hotel Towers and infrastructure;
 10. On 7 August 2015, the Company signed a Lease Cooperation Agreement Telecommunication Equipment Shaft and Placement No. 068/PKS/MORATEL-IBS/VIII/2015 with IBS in connection with shaft rental and placement telecommunications equipment in the ST Building. Regis on Jl Jenderal Gatot Subroto, South Jakarta;
 11. On May 3, 2017, the Company signed the Rent Agreement for Network Services Telecommunications No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 with IBS in relation to equipment site rental telecommunications with an agreement value of Rp466.200.000,- (four hundred and sixty six million two hundred thousand rupiah);
 12. On January 25, 2017, the Company signed the Room Use Agreement No. 016/PKS/MTI-PAKKODIAN/I/2017 with PT Pakkodian in connection with the use of part of the land or space for the Company's operational activities;
 13. On 20 August 2019, the Company signed the Red Project Cooperation Agreement White No. MTI 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 with PT Smart Telecom in connection with the provision of telecommunication towers and supporting infrastructure by the Company to PT Smart Telecom.
 14. On February 15, 2021, the Company conducted an agreement with IBST. Some IBST shareholders are also MTI shareholders. This agreement is related to space rental, and valid for 5 years and will expire within the agreement period as stated in the Minutes of Site Use (BAPS);
 15. On February 1, 2017, the Company conducted an agreement with IBST. Some IBST shareholders are also MTI shareholders. This agreement is related to the fiber optic cable network and Metro-E Link usage. This agreement is valid for 10 years, from February 1, 2017 to January 31, 2027;

16. Pada tanggal 22 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Triasmitra Multiniaga International ("TMI"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Perseroan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang Pusat Operasi Jaringan (Network Operations Center/NOC) dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Agustus 2034;
17. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang NOC dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Maret 2034;
18. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan inti serat optik pada Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Surabaya, dan berlaku selama 15 tahun sejak Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) ditandatangani oleh Para Pihak;
19. Pada tanggal 03 Oktober 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan pasangan serat optik pada Jaringan Telekomunikasi/Sistem Kabel Surabaya - Denpasar. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak 3 Oktober 2017, atau hingga 4 September 2032;
20. Pada tanggal 15 Mei 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Jejaring Mitra Persada ("JMP") yang mana sebagian pemegang saham JMP juga merupakan pemegang saham Perseroan. Perjanjian ini terkait dengan hak pakai tanpa batas waktu atas sistem kabel bawah laut Batam – Dumai.
16. On June 22, 2020, the Company conducted an agreement with PT Triasmitra Multiniaga International ("TMI"), a company that has a relationship with the Company through the ownership of some the same shareholders as the Parent Entity. Partially TMI's shareholders are also MTI's shareholders. This agreement is related to the rental of the Network Operations Center (NOC) space and its operation. This agreement is valid until August 26, 2034;
17. On November 1, 2019, the Company conducted an agreement with TMI. Partially TMI's shareholders are also MTI's shareholders. This agreement is related to the rental of the NOC space and its operation. This agreement is valid until March 21, 2034;
18. On August 23, 2019, the Company conducted an agreement with TMI. Partially TMI's shareholders are also MTI's shareholders. This agreement is related to the maintenance and the fiber optic core repair on the Jakarta – Surabaya Telecommunication Network, and valid for 15 years since the Minutes of Site Use (BAPS) is signed by the Parties;
19. On October 3, 2017, the Company conducted an agreement with TMI. Partially TMI's shareholders are also MTI's shareholders. This agreement is related to the maintenance and the fiber optic pairs repair on the Surabaya - Denpasar Telecommunication Network/ Cable System. This agreement is valid for 15 years from October 3, 2017, or until September 4, 2032;
20. On May 15, 2018, the Company conducted an agreement with PT Jejaring Mitra Persada ("JMP"), which some of the JMP's shareholders are also shareholders of the Company. This agreement is related to the right to use indefinitely the Batam – Dumai submarine cable system.

Informasi yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan dan entitas anak. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman COVID-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan dan entitas anak.

Sampai dengan Annual Report ini diterbitkan, Perusahaan dan entitas anak belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus COVID-19. Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan kebijakan *Work from Home* (WFH) bagi karyawan-karyawan Perusahaan dan entitas anak yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai Physical Distancing, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Perusahaan dan entitas anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kemampuan keuangan Perusahaan dan entitas anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi. Perusahaan dan entitas anak akan melakukan pemantauan secara intensif atas dampak COVID-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami. Perusahaan dan entitas anak terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Perusahaan dan entitas anak tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

The global economic slowdown and its negative impacts what is happening to the world's major financial markets caused by the spread of the COVID-19 virus pandemic has caused high volatility in fair value financial instruments, trading halts, disruptions company operations, unstable stock market, volatility of foreign exchange rates, and liquidity that strict on certain economic sectors in Indonesia, including the Telecommunications industry, which can be sustainable and impact on finances and operations Company and subsidiaries. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown to the national economy is highly dependent on measures to eradicate the threat of COVID-19, in addition to fiscal policy and other policies implemented by Government. The policy, including its implementation and events that arise, are beyond the control of the Company and subsidiaries.

Until this Annual Report is published, the Company and subsidiaries have not felt the material impact in connection with the spread of the COVID-19 virus. The Company and its subsidiaries have implemented policies *Work from Home* (WFH) for employees The Company and its subsidiaries which are a form of compliance with government advice regarding Physical Distancing, but it doesn't become barriers for the Company and its subsidiaries in carry out its business activities.

The financial capability of the Company and its subsidiaries to fulfill the principal payment obligations and/or or interest due to creditors is still can be managed and fulfilled. Company and subsidiaries will carry out intensive monitoring of the impact COVID-19 on operational and financial performance and take action to address the impacts that will experienced. The Company and its subsidiaries continue to strive to keeping the fundamentals in a safe and controlled condition, The Company and its subsidiaries remain ready to face any changes that will probably occur in a few future time.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Perusahaan

AMENDMENT TO LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S PERFORMANCE

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning Instructions for Implementing Tariffs on Non-Tax State Revenue from Telecommunication Operation Rights Fees and Universal Service Obligation

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan
Explanation of Regulations and/or or legislation that are Enforced

: Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya terpapar pada risiko yang terjadi akibat adanya perubahan pada kebijakan Pemerintah. Apabila terdapat perubahan pada Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran BHP USO sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal/universal service obligation dan Ketentuan mengenai Perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, maka hal tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

The Company in carrying out its business activities is exposed to risks that occur as a result of changes to Government policies. If there are changes to the Terms regarding USO's BHP payment obligation in accordance with the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning Instructions for Implementing Tariffs on state revenues non-tax from the levy of telecommunications operation rights fees and liability contributions universal service/universal service obligation and applicable Tax Provisions in Indonesia related to Corporate Income Tax and Value Added Tax, then it is may have an impact on the financial condition and performance of the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020.

Accounting policies applied in the preparation of consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021 is consistent with the policy accounting applied in the preparation of the report consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and 2019, including the impact of Financial Accounting Standards (SAK) No. 71, 72, and 73, which has been adopted effective January 1, 2020.



► Tata Kelola Perusahaan CORPORATE GOVERNANCE



05

Prinsip Dasar dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PRINCIPLES AND COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



COUPON	NAME			
0.10 %	3 Month	0.18 %	▲	+26
0.30 %	6 Month	0.42 %	▲	+36
0.40 %	1 Year	0.58 %	▲	+48
0.60 %	2 Year	0.80 %	▲	+51
0.80 %	5 Year	1.15 %	▲	+47

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan praktik GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip GCG yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Transparansi

Perusahaan menjalankan aktivitas usaha secara transparan dengan melakukan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam membuat laporan usaha, dan menjalankan proses pengambilan keputusan yang dilandasi oleh kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas

Perusahaan mengelola bisnis secara efektif dan efisien dengan melakukan pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan. Perusahaan senantiasa membuat deskripsi pekerjaan yang terukur di setiap level jabatan untuk memastikan seluruh karyawan memiliki

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important factor that determines the sustainability of Company's business. Therefore, the Company applies GCG practices based on 5 (five) GCG principles applicable in Indonesia:

1. Transparency

The Company runs business activities transparently through open access to information to all stakeholders, upholds values of honest in preparing business reports, and conducts a process of decision-making that is based on compliance with prevailing laws and regulations.

2. Accountability

The Company manages its business effectively and efficiently through a clear task division among organs within the Company. The Company continuously makes measurable work description at every level to ensure that all employees have the rights and obligations,

hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangan yang selaras dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Responsibilitas

Perusahaan menyadari adanya aspek usaha yang membawa dampak pada lingkungan, masyarakat, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Perusahaan menjalankan usaha secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak lain dan melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan tanpa intervensi pihak manapun.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Perusahaan menjunjung tinggi kesetaraan dan perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan melaksanakan usaha secara adil, serta menaati seluruh peraturan yang ada guna melindungi pemangku kepentingan dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Dengan penerapan kelima prinsip tersebut, maka terbentuklah sebuah struktur GCG Perusahaan yang berfungsi sebagai check and balances guna mengeliminasi adanya benturan kepentingan, *fraud*, dan pelanggaran lainnya di Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat tumbuh semaksimal mungkin.

Perusahaan meyakini bahwa penerapan GCG secara maksimal akan mendorong Perusahaan untuk meraih tujuannya, di antaranya:

1. Mencapai pertumbuhan dan timbal hasil yang maksimal, serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
5. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan;
6. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah sehingga turut meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan dan segenap pemangku kepentingan lainnya.

functions and responsibilities, and authorities that are in line with the prevailing laws and regulations.

3. Responsibility

The Company realizes the aspect of business that creates an impact toward the environment, society, employees, and all stakeholders. Therefore, the Company strives to continuously comply with the prevailing laws and regulations.

4. Independency

The Company performs business professionally without any conflict of interest and pressure from any other parties and makes decision related to the Company's interest without intervention from any parties.

5. Equality and Fairness

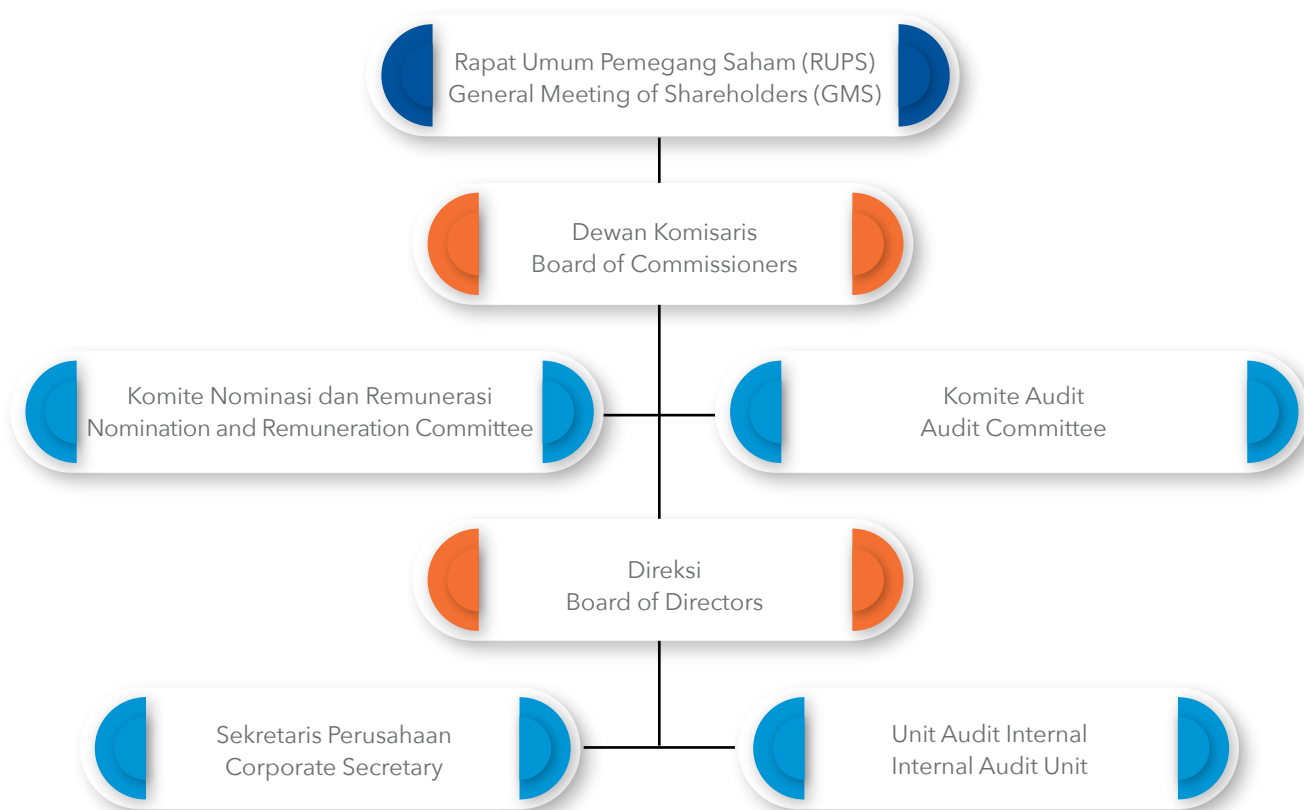
The Company upholds equality and fair treatment in fulfilling the rights and obligations of all stakeholders based on the prevailing agreements and laws and regulations. The Company carries out its business fairly, as well as complying with the regulations in order to protect the stakeholders in the continuity of the Company's business.

By applying the five principles, the Company's GCG structure as check and balances is established to eliminate any conflict of interest, fraud, other violations in the Company, so that the Company is able to grow as much as possible.

The Company believes that the maximum GCG implementation will encourage the Company to reach its objectives, among others:

1. Reaching maximum growth and yield, as well as realizing the shareholders' values in long term without ignoring the interest of other stakeholders;
2. Controlling and directing good relations among the shareholders, Board of Directors, Board of Commissioners, and all stakeholders of the Company;
3. Supporting the Company's internal control and development activities;
4. Enhancing the accountability to the stakeholders;
5. Improving the Company's working culture;
6. Adding value to the Company, so it will improve the prosperity of all persons in the Company and all other stakeholders.

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE



Guna menyempurnakan komitmen terhadap penerapan GCG, Perusahaan membentuk perangkat-perangkat yang akan menunjang pelaksanaan GCG Perusahaan. Dalam hal ini, RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris menjadi organ GCG yang utama. Dalam pelaksanaannya organ GCG dibantu dengan organ pendukung GCG yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal yang secara bersama-sama unit kerja yang turut mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi dan keberhasilan dalam menciptakan GCG di Perusahaan.

Struktur Organ GCG Moratelindo

Guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan telah melengkapi infrastruktur tata kelola yang dibutuhkan dan senantiasa melakukan peninjauan serta penyempurnaan terhadap *soft structure* yang Perusahaan miliki di masa mendatang. Kerangka kebijakan infrastruktur dan *soft structure* tersebut di antaranya:

In order to refine the commitment of GCG implementation, the Company establishes some organs that will support the Company's GCG. In this case, the GMS, Board of Directors, and Board of Commissioners become the main GCG organs. In the practice, the GCG organs are assisted by the GCG supporting organs, consisting of Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit, collectively with the working unit that controls, oversees, and is responsible for the implementation and success of the GCG in the Company.

Moratelindo GCG Organ Structure

In order to improve the qualities of GCG principles implementation, the Company has equipped the necessary governance infrastructure and has continuously reviewed and refined the soft structure of the Company in the future. The framework of the infrastructure and soft structure policies is as follows:

Infrastruktur Infrastructure		Perangkat Kebijakan Soft Structure	
1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	1	Prinsip Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Principles
2	Direksi Board of Directors	2	Piagam Direksi Charter of the Board of Directors
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	Piagam Dewan Komisaris Charter of the Board of Commissioners
4	Komite Audit Audit Committee	4	Piagam Komite Audit Charter of Audit Committee
5	Komite Nominasi & Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	5	Piagam Komite nominasi dan Remunerasi Charter of Nomination and Remuneration Committee
6	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	6	Piagam Sekretaris Perusahaan Charter of Corporate Secretary
7	Unit Audit Internal Internal Audit Unit	7	Piagam Audit Internal Charter of Internal Audit
		8	Pedoman Tingkah Laku Code of Conduct
		9	Kebijakan <i>Whistleblowing</i> Whistleblowing Policies
		10	Pedoman Keterbukaan Informasi kepada Publik Guidelines Information Disclosure to the Public
		11	Kebijakan Hak Asasi Manusia Human Rights Policy
		12	Kebijakan Lingkungan Environmental Policy
		13	Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Policy
		14	Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System Policy

Rapat Umum Pemegang Saham GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan. RUPS berperan sebagai wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan strategis di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan pengambilan keputusan-keputusan strategis sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dan didasari oleh kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang Perusahaan.

Jenis RUPS

Perusahaan menyelenggarakan RUPS yang terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Lainnya atau yang biasa disebut sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Perusahaan menyelenggarakan RUPST dengan agenda di antaranya:

1. Laporan Direksi Perusahaan yang memuat:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; dan
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
2. Penetapan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo yang positif.
3. Penetapan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, RUPS Lainnya atau RUPSLB diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara RUPST, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang diselenggarakan dengan mekanisme di atas, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest corporate governance organ of the Company. GMS is the channel for Shareholders to make strategic decisions, where based on the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, the authority of strategic decision making as mentioned above is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The decisions made in the GMS are carried out reasonably and transparently and are based on the short-, mid-, and long-term interest of the Company.

Types of GMS

The Company convenes GMS, which consists of Annual GMS and Other GMS, called the Extraordinary GMS.

The Company convenes Annual GMS with the Agenda as follows:

1. Report of the Board of Directors, which contains:
 - Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners to be approved by the GMS; and
 - Financial Statements to be approved by the meeting.
2. Stipulation of profits, if the Company's has Positive profit balance.
3. Stipulation of other agendas that have been applied by considering the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Meanwhile, the Extraordinary GMS is convened at any time based on the necessities to discuss and decide the meeting agendas, except the agendas of Annual GMS, by considering the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Apart from both GMSs, shareholders also have a mechanism of Circular Decision, which is a decision-making process by the shareholders outside the mechanism of GMS. Circular Decision has similar legal power as GMS Decision that is implemented through the above mechanism, provided that all shareholders give written agreement for the suggestions that are to be decided upon in the Circular Decision. This is in line with Article 19 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability

Mekanisme Penyelenggaraan dan Pengambilan Keputusan RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan RUPS dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar. Pemanggilan ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur Perusahaan. Jika seluruh Direktur tidak dapat hadir karena sebab apapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di antara peserta yang hadir dalam rapat. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan dan Keputusan RUPS yang Diselenggarakan di Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan RUPS dengan mekanisme sirkuler keputusan pemegang saham di luar RUPS, yaitu:

1. Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Mei 2021

Pada tanggal 20 Mei 2021, Para Pemegang Saham telah menandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Mei 2021 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Para Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

Mechanism of Convention and Decision-Making of GMS

Based on the Articles of Association, GMS is convened at the Company's domicile. The Company convenes GMS by initially notifying the shareholders through a recorded letter and/or advertisements in the newspapers. The notice is given at least 14 (fourteen) days before the date of the GMS convened, not including the notice date and the GMS date. The GMS is chaired by the President Director. If the President Director is unavailable due to any reasons, the GMS is chaired by one of the Company's Board of Directors. If all Directors cannot attend the GMS due to any reasons, the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners. Furthermore, if all members of the Board of Commissioners cannot attend the GMS due to any reasons, the GMS is chaired by an individual selected among the participants attended the meeting. The GMS may make a decision based on deliberation and consensus or based on the affirmative vote of the total votes issues in the GMS as specified in the Laws.

Implementation and Resolutions of GMS in 2021

Throughout 2021, the Company convenes GMS and shareholders' resolutions outside the GMS, namely:

1. The Circular Resolution of All Shareholders Out of the General Meeting of Shareholders on May 20, 2021

On May 20, 2021, all Shareholders had signed the Circular Decision of All Shareholders in Place of the General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year of 2020, May 20, 2021 and it was notarized in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 53, May 21, 2021, drawn before Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta.

All Shareholders decided upon the following:

1. a. Approved on and accepted the Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2020, including the Board of Commissioners' Supervisory Report;

- b. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 0003412.10901AU.110610154-1/1/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021;
- c. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun buku 2020 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2020.

2. a. Menyetujui laba bersih tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp224.474.772.872 (dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang saham dan menetapkan untuk tidak menempatkan dana cadangan karena telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor;
- b. Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp958.663.976.130,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh Rupiah) kepada pemegang saham;

Berdasarkan perhitungan laba tersebut maka dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dengan keterangan dan syarat sebagai berikut:

- i. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan setara dengan total 588.235 (lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) lembar saham, sehingga perhitungan dividen perlembar saham senilai Rp1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- ii. Besaran dividen untuk masing- masing PT Gema Lintas Benua adalah sebesar

- b. Validated consolidated financial statement for the fiscal year of 2020 consisting of balance sheet and profit and loss calculation for the fiscal year of 2020, ending on December 31, 2020, audited by the Public Accountant Firm of Mirawati Sensi Idris, with fair opinion in all material aspects as outlined in report no. 0003412.10901AU.110610154-1/1/III/2021, March 18, 2021;
- c. As the Board of Commissioners' Supervisory Report and Consolidated Financial Statement were being approved and validated, all members of Board of Directors and Board of Commissioners in office for the fiscal year of 2020 were acquitted and given waive (*volledig acquit et de charge*) from their organizational and supervisory activities throughout 2020, as long as said activities have been reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statement for the fiscal year of 2020.

2. a. Approved on the net profit for the fiscal year of 2020 ending on December 31, 2020 at Rp224,474,772,872 (two hundred and twenty four billion four hundred and seventy four million seven hundred and seventy two thousand eight hundred and seventy two rupiah) to be distributed in its entirety as dividend to shareholders and stipulated that reserved funds were not to be issued as the profit had reached 20% of issued and deposited capital;
- b. Approved on the distribution of dividend from part of retained earnings ending on December 31, 2019 at Rp958,663,976,130 (nine hundred and fifty eight billion six hundred and sixty three million nine hundred and seventy six thousand one hundred and thirty rupiah) to all shareholders;

Based on the profit calculation, dividend would be distributed to all shareholders with the following terms:

- i. The Distributed dividend would equal to a total of 588,235 sheets of share so the value of dividend per sheet of share would be Rp1,964,000 (one million nine hundred and sixty-four thousand rupiah);
- ii. The amount of dividend for PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi

- Rp491.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) sedangkan besaran dividen untuk PT Candrakarya Multikreasi adalah sebesar Rp664.293.540.000,- (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
- iii. Tanggal distribusi dividen kepada Para Pemegang Saham akan dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
 - iv. Pembagian dividen yang dijelaskan pada huruf i sampai huruf iii akan dilakukan setelah Perusahaan memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, termasuk dari para kreditur, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada Para Pemegang Saham.
- c. Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
3. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.
 4. Menyetujui Rencana Kerja selama Tahun Buku 2021;
 5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk Tahun buku 2021 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp11.524.127.156,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp2.018.794.514,- (dua miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas Rupiah); dan
 6. Menerima dan menyetujui laporan-laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut:
- would be Rp491,000,000,000 (four hundred and ninety-one billion rupiah) and Rp664,293,540,000 (six hundred and sixty-four billion two hundred and ninety-three million five hundred and forty thousand rupiah), respectively;
- iii. The date of dividend distribution to all Shareholders would be within the period from July 1, 2021 through December 31, 2021;
 - iv. Dividend distribution as outlined in letter (i) through (iii) would be conducted after the Company has obtained all necessary approvals, including from all creditors, and would be distributed to all Shareholders.
- c. The remaining funds would be recorded as retained earnings balance whose use is yet to be determined.
3. Agreed upon assigning the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Rpis as an Independent Public Accounting Firm registered on the Financial Service Authority and with a good reputation that will audit the Financial Statement for the Fiscal Year ending on December 31, 2021 in accordance with suggestions from the Board of Commissioners by taking into account recommendations by Audit Committee and henceforth grant authority to the Board of Commissioners and Directors to determine the amount of fees for the Public Accounting Firm along with other conditions related to the assignment. The Public Accounting Firm Mirawati Sensi Rpis is an independent public accounting firm registered on the Financial Service Authority and has a good reputation.
 4. Approved of the Work Plan for the Fiscal Year of 2021;
 5. Approved of and stipulated salary/fees and/or allowances/other remunerations for the members of the Board of Directors and Commissioners for the fiscal year of 2021, namely for the Board of Directors with Rp11,524,127,156 (eleven billion five hundred and twenty four million one hundred and twenty seven thousand one hundred fifty six rupiah) and for the Board of Commissioners with Rp2,018,794,514 (two billion eighteen million seven hundred and ninety four thousand five hundred and fourteen Rupiah); and
 6. Accepted and approved of all reports of Accountability of Realization of Use of Funds described as follows:

i. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B sebagai berikut :

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perusahaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut:
 - a. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan
 - b. Sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
- Perusahaan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam website Perusahaan.

ii. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut:

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah);
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya

i. The Accountability Report of Realization of Use of Funds from Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I 2019 Series A and Series B is as follows:

- Proceeds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I 2019 Series A and Series B were Rp1,000,000,000,000 (one trillion rupiah).
- As of December 31, 2020, all proceeds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I 2019 series A and series B, after subtracted by emission costs, had been used (100%) by the Company in accordance with Fund Usage Plan, outlined through the following prospectus:
 - a. Around 85% of the proceeds were used for investment, investment in the Backbone including instruments and passive and active infrastructures. The funds would also be used for the construction of Inland Cable, Ducting, and supporting equipment, both active and passive infrastructure; and
 - b. Around 15% were used for work capital requirements.
- The Company periodically reported on the realization of use of funds from public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase I 2019 series A and series B to FSA and Indonesia Stock Exchange in accordance with FSA Regulation No.30/POJK.04/2015, December 22, 2015 on Reports of Realization of Use of Funds from the Pubic Offering and all information on fund usage realization is available on the Company's website.

ii. The Accountability Report of Realization of Use of Funds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II 2020 series A and series B is as follows:

- Funds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II 2020 series A and series B were Rp277,000,000,000 (two hundred and seventy-seven billion rupiah);
- As of December 31, 2020, all proceeds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II 2020 series A and series B, subtracted by emission costs, had been used (100%) by the Company

emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perusahaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :

- a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
- b. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut: biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, aktivitas "*branding*" dan promosi.
- Perusahaan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam website Perusahaan.

iii. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :

- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan sebagian oleh Perusahaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut:
 - a. Sekitar 75% digunakan untuk kebutuhan Refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A.

in accordance with Fund Usage Plan, outlined through the following additional information:

- a. Around 90% of the proceeds were used for investment requirements, investment in the Backbone and Access, including instruments and passive and active infrastructures. The funds would also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting equipment, both active and passive infrastructures.
- b. Around 10% would be used for work capital requirements, with the following details: costs of network operation and maintenance as well as its supporting instruments, costs of equipment installation for the customers, branding activities, and promotion.
- The Company periodically reported on the realization of use of funds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase II 2020 series A and series B to FSA and Indonesia Stock Exchange in accordance with FSA Regulation No.30/POJK.04/2015, December 22, 2015 on Reports of Realization of Use of Funds from Public Offering and all information of the fund usage realization is available on the Company's website.

iii. The Accountability Report of Realization of Use of Funds from the Public Offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III 2020 series A and series B is as follows:

- Funds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III 2020 series A and series B were Rp389,515,000,000 (three hundred and eighty-nine billion five hundred and fifteen million rupiah).
- As of December 31, 2020, proceeds from the public offering of Sukuk Shelf Ijarah I Moratelindo Phase III 2020 series A and series B, subtracted by emission costs, had all been used by the Company in accordance with Fund Usage Plan, outlined through the following additional information:
 - a. Around 75% of the proceeds were used for the requirements of Refinancing the Bonds I Moratelindo 2017 series A.

- b. Sekitar 25% digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
- c. Jumlah dana yang telah direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) di atas adalah sebesar Rp321.218.880.641,- (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah).
- d. Sisa dana yang belum direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dan (b) di atas adalah sebesar Rp63.723.213.259,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan belum direalisasikan karena menyesuaikan progress pembangunan untuk Investasi Perusahaan. perusahaan. Sisa dana yang belum direalisasikan ditempatkan oleh Perusahaan di beberapa rekening Perusahaan.

Perusahaan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam website Perusahaan.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

2. Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2021 dan telah diaktakan dalam Akta

- b. Around 25% were used for investment, investing in the *Backbone* and *Access*, including instruments and passive and active infrastructures. The funds would also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting equipment, both active and passive infrastructures.
- c. Total realized funds in relation to fund usage plan as stated in letters (a) and (b) were Rp321,218,880,641 (three hundred and twenty-one billion two hundred and eighteen million eight hundred and eighty thousand six hundred and forty one rupiah).
- d. The remaining funds that had to be realized in relation to fund usage plan as stated in letters (a) and (b) were Rp63,723,213,259 (sixty-three billion seven hundred and twenty-three million two hundred and thirteen thousand two hundred and fifty-nine rupiah). The funds have yet to be realized due to the needs of adjusting to the development progress for the investment of the Company. The unrealized remaining funds were deposited to several accounts belonging to the Company.

The Company has periodically reported on the realization of use of funds from the public offering of Sukuk Shelf I Moratelindo Phase III 2020 series A and series B to FSA and Indonesia Stock Exchange in accordance with FSA Regulation No.30/POJK.04/2015, December 22, 2015 on Reports of Realization of Use of Funds from Public Offering and all information of the fund usage realization is available on the Company's website.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

2. Circular Decree of All Shareholders in Place of Extraordinary General Meeting of Shareholders of June 17, 2021, notarized in the Deed of Statement of the

Pernyataan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49 tanggal 17 Juni 2021 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- i. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham Perusahaan, sehingga mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- ii. Menyetujui peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) untuk selanjutnya menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan akan menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas :
 - a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp809.349,00 00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan); dan
 - c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Decree of Shareholders No. 49, June 17 2021, drawn before Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta, bore the following decisions:

- i. Agreed upon adding more classifications for the Company's shares, which in turn changed some provisions in the Company's Articles of Association.
- ii. Approved the increase in authorized capital from the original amounting to Rp298,750,159,015.00 (two hundred ninety-eight billion seven hundred fifty million one hundred fifty-nine thousand and fifteen Rupiah) which is divided into 250,000 (two hundred and fifty thousand) series A shares with a nominal value of Rp100,000 (one hundred thousand Rupiah) and 338,235 (three hundred and thirty eight thousand two hundred and thirty five) series B shares with a nominal value of Rp809,349.00 (eight hundred nine thousand three hundred forty nine) henceforth it becomes Rp658,750,971,015.00 (six hundred fifty eight billion seven hundred fifty million nine hundred seventy one thousand and fifteen Rupiah) which is divided into 250,000 (two hundred and fifty thousand) series A shares with a nominal value of Rp100,000.00 (one hundred thousand Rupiah), 338,235 (three hundred and thirty-eight thousand two hundred and thirty-five) series B shares with a nominal value of Rp809,349.00 (eight hundred nine thousand three hundred forty-nine Rupiah), and 151,771 (one hundred and fifty-one thousand seven hundred and seventy-one) series C shares each with a nominal value of Rp2,372.000,00 (two million three hundred and seventy-two thousand Rupiah).

Due to this, Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association would be amended as follows:

1. Authorized Capital is Rp658,750,971,015 (six hundred fifty eight billion seven hundred fifty million nine hundred seventy one fifteen rupiah), divided into:
 - a. 250,000 (two hundred fifty thousand) series A shares with a value of Rp100,000 (one hundred thousand) each;
 - b. 338,235 (three hundred thirty eight thousand) series B shares with a value of Rp809,349 (eight hundred nine thousand three hundred forty nine) each; and
 - c. 151,771 (one hundred fifty one thousand seven hundred seventy one) series C shares with a value of Rp2,372,000 (two million three hundred seventy two thousand) each.

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:
- 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
 - 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan
 - 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah);

atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

- Menyetujui bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel tersebut selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengabaikan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
 - PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00; dan
 - PT Smart Telecom sebanyak 151.771 saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00

2. Of the authorized capital, 100% of it had been issued and deposited, equivalent to:
- 250,000 (two hundred fifty thousand) series A shares with a total value of Rp25,000,000,000 (twenty five billion rupiah);
 - 338,235 (three hundred thirty eight thousand two hundred thirty five) series B shares with a total value of Rp273,750,159,015 (two hundred seventy three billion seven hundred fifty million one hundred fifty nine fifteen rupiah); and
 - 151,771 (one hundred fifty one thousand seventy hundred seventy one) series C shares with a total value of Rp360,000,812,000 (three hundred sixty billion eight hundred twelve thousand rupiah);

or amounting to a total of Rp658,750,971,015 (six hundred fifty eight seven hundred fifty nine hundred seventy one fifteen rupiah), all shareholders had obtained their parts of share and the details and shares' value had been mentioned at the end of the deed.

- Agreed that all shares emitted from the portfolio were to be obtained by PT Smart Telecom and All Shareholders agreed to first waive their rights off in taking parts of the emitted shares in proportion to the amount of shares that respective shareholders own, either towards the share intended for them or towards the remaining shares that other shareholders did not take.
- Agreed on restructuring the composition of shareholders into:
 - PT Gema Lintas Buana owning 250,000 series A shares with a total value of Rp25,000,000,000;
 - PT Candrakarya Multikreasi owning 338,235 series B shares with a total value of Rp273,750,159,015; and
 - PT Smart Telecom owning 151,771 series C shares with a total value of Rp360,000,812,000.

- v. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan perihal Pemindahan Hak atas Saham menjadi sebagai berikut :

Pemindahan hak atas saham baik untuk saham seri A, saham seri B, maupun saham Seri C harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

- vi. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perusahaan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perusahaan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-sekurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

- v. Agreed on amending the provision of Article 7 paragraph 1 of the Company's Articles of Association on Transfer of Rights over Shares into:

Transfer of Rights over Shares for series A, series B, or series C must be based on the deed of transfer of rights, signed by the transferer and transferee or a party with a valid authority.

- vi. Agreed on amending the provision of Article 10 paragraphs 1 and 2 of the Articles of Association on Quorum, Voting Rights, and the Decree of the General Meeting of Shareholders into:

1. The GMS can be held if the attendance quorum is represented by at least 90% of the entire series A, series B, and series C shares with valid voting rights, issued by the Company and all decisions of the GMS taken by voting must be approved by at least 75% of the total votes issued legally in the GMS.
2. If in the meeting referred to in paragraph (1) the stipulated quorum is not met, then in 7 (seven) days at the soonest and 14 (fourteen) days at the latest after the first meeting, a second meeting could be held with similar agenda as the first meeting, except in regards to summoning period, which should be conducted within at least 2 (two) days before the second meeting, excluding summoning date and meeting date, and attendance quorum must be represented by at least 75% of the total amount of series A, series B, and series C shares with valid voting rights as issued by the Company and all decisions of the GMS taken through voting must be approved by at least 60% of the total votes issued legally in the GMS.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

3. Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 September 2021, dengan ringkasan hasil keputusan menyetujui pelaksanaan rencana transaksi untuk:

1. Menyetujui pelaksanaan membeli atau mengambilalih sebagian besar saham yang telah dikeluarkan oleh PT Indo Pratama Teleglobal ("PT IPT") yaitu 145.730 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) lembar saham yang dimiliki PT Telekomunikasi Nusantara Sejahtera ("PT TNS") di dalam PT IPT yang merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT IPT, dengan total harga pembelian Rp18.216.250.000 (delapan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh rebut Rupiah) dan mengambilalih dan menerima pengalihan hak atas uang muka modal saham yang telah disetorkan oleh PT TNS ke dalam PT IPT sebesar Rp39.300.000.000 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) Rencana Transaksi dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada Perusahaan dan untuk kepentingan terbaik Perusahaan;
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk membuat dan/atau menandatangani pengumuman, perjanjian, dokumen, dan/atau akta berikut dengan perubahan, penambahan, dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Rencana Transaksi dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, dan/atau untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar Rencana Transaksi dapat terlaksana dan berlaku efektif; dan
3. Memberi kuasa kepada dengan hak substitusi kepada Direksi, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali sebagian atau seluruh Keputusan Sirkuler ini ke dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada dan/atau memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

3. Circular Decree of All Shareholders in Place of Extraordinary General Meeting of Shareholders, September 23, 2021, with a summary of decisions that approved of the implementation of transaction plan for:

1. Approved of purchasing or taking over parts of the shares issued by PT Indo Pratama Teleglobal (PT IPT) at a total of 145,730 (one hundred forty five thousand seven hundred thirty) sheets of share, owned by PT Telekomunikasi Nusantara Sejahtera (PT TNS) within PT IPT, which was 65% (sixty five percent) of the shares fully issued and deposited in PT IPT, with a total price of Rp18,216,250,000 (eighteen billion two hundred sixteen million two hundred fifty thousand rupiah) and taking over and accepting the transfer of rights over share capital advance deposited by PT TNS into PT IPT at Rp39,300,000,000 (thirty nine billion three hundred million rupiah). The transaction plan was intended to benefit the Company itself and for the best interest of the Company;
2. Gave consent to the Board of Directors to prepare and/or sign announcements, agreements, documents, and/or deeds along with their amendments, addendums, and/or substitutions whenever required to complete the Transaction Plan by the terms and conditions deemed necessary by the Board of Directors, and/or to take other required actions in accordance with prevailing laws and regulations to ensure that the Transaction Plan can be implemented and applied effectively; and
3. Gave power with substitution rights to the Board of Directors, individually or collectively, to appear before the authorized official and/or notary to outline and/or restate part of or the entirety of this Circular Decree into notarized deed, to announce to and/or gain approval from authorized officials, and to take other required actions in relation to this Circular Decree in accordance with prevailing laws and regulations.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

4. Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Desember 2021 dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan keputusan sebagai berikut:
- Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp2.112.120.439.015 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 612.719 (enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham baru Seri C dalam Perusahaan dengan nilai nominal Rp2.372.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham Seri C.
 - Menyetujui seluruh saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan diambil bagian seluruhnya oleh Para Pemegang Saham secara proporsional, dengan pembagian masing-masing (a) PT Gema Lintas Benua sebanyak 206.998 (dua ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham, (b) PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 280.056 (dua ratus delapan puluh ribu lima puluh enam) lembar saham, dan (c) PT Smart Telecom sebanyak 125.665 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham, untuk kemudian ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perusahaan, sehingga mengubah struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
4. Circular Decree of All Shareholders in Place of Extraordinary General Meeting of Shareholders, December 21, 2021, notarized in Deed of Statement of the Decree of Shareholders No. 39, December 21, 2021, drawn before Aulia Taufani, S.H., a notary in South Jakarta, with the following decisions:
- Approved of the increase of authorized capital, issued and deposited capital to Rp2,112,120,439,015 (two trillion one hundred twelve billion one hundred twenty million four hundred thirty-nine thousand fifteen rupiah) by issuing 612,719 (six hundred twelve thousand seven hundred ninety) new series C shares in the Company with a value of Rp2,372,000 (two million three hundred seventy two thousand) each.
 - Agreed that the entire new shares issued by the Company were to be taken by all Shareholders proportionately, by dividing them into: (a) PT Gema Lintas Benua with 206,998 (two hundred six thousand nine hundred ninety eight) sheets of share, (b) PT Candrakarya Multikreasi with 280,056 (two hundred eighty thousand fifty six) sheets of share, and (c) PT Smart Telecom with 125,665 (one hundred twenty five thousand six hundred sixty five) sheets of share, to be fully issued and deposited into the Company, which in turn changed the capital structure and shareholding composition into:

Nilai Nominal Rp100.000 per saham Seri A, Rp809.349 per saham Seri B, Rp2.372.000 per saham Seri C Value of Rp100,000 per series A share, Rp809,349 per series B share, Rp2,372,000 per series C share				
	Jenis Saham Share Types	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Sheets)	Jumlah Nominal Saham (Rp) Total Share Values (Rp)	Presentase Kepemi- likan Saham (%) Shareholding Percentage (%)
Modal Dasar Authorized Capital		1.352.725	2.112.120.439.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Fully Issued and Deposited Capital				
PT Gema Lintas Benua	Seri A Seri C	250.000 206.998	25.000.000.000 490.999.256.000	33,78
PT Candrakarya Multikreasi	Seri B Seri C	338.235 280.056	273.750.159.015 664.292.832.000	45,71
PT Smart Telecom	Seri C	277.436	658.078.192.000	20,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Fully Issued and Deposited Capital	-	1.352.725	2.112.120.439.015	100,00
Saham Dalam Portepel Share in Portfolio	-	-	-	-

- iii. Menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1

Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan Miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas:

- a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah); dan
- c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Pasal 4 ayat 2

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah:

- a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan
- c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah);

atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan Miliar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dibawah ini.

Menjadi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1

Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) terbagi atas:

- iii. Approved of amendment to article 4 of the Company's Articles of Association, which previously read:

Article 4 paragraph 1

Company's authorized capital is Rp658,750,971,015 (six hundred fifty eight billion seven hundred fifty million nine hundred seventy one thousand fifteen rupiah), divided into:

- a. 250,000 (two hundred fifty thousand) series A shares with a value of Rp100,000 (one hundred thousand rupiah);
- b. 338,235 (three hundred thirty eight thousand two hundred thirty five) series B shares with a value of Rp809,349 (eight hundred nine thousand three hundred forty nine);
- c. 151,771 (one hundred fifty one thousand seven hundred seventy one) series C shares with a value Rp2,372,000 (two million three hundred seventy two thousand).

Article 4 paragraph 2

Of the authorized capital, 100% have all been issued and deposited or equals to:

- a. 250,000 (two hundred fifty thousand) series A shares with a total value of Rp25,000,000,000 (twenty billion rupiah);
- b. 338,235 (three hundred thirty eight thousand two hundred thirty five) series B shares with a total value of Rp273,750,159,015 (two hundred seventy three billion seven hundred fifty million one hundred fifty nine fifteen rupiah);
- c. 151,771 (one hundred fifty one thousand seven hundred seventy one) series C shares with a total value of Rp360,000,812,000 (three hundred sixty billion eight hundred twelve rupiah);

or equals to a total of Rp658,750,971,015 (six hundred fifty eight thousand billion seven hundred fifty thousand million nine hundred seventy one fifteen rupiah), by the shareholders who have taken their parts and the details and share value are described below.

Into the following:

Article 4 paragraph 1

Company's total authorized capital amounts to Rp2,112,120,439,015 (two trillion one hundred twelve billion one hundred twenty million four hundred thirty-nine thousand fifteen rupiah), divided into:

- a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- c. 764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Pasal 4 ayat 2

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:

- a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan
- c. 764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.813.370.280.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah); atau seluruhnya sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

Informasi Keputusan RUPS yang Diselenggarakan di Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya oleh Perusahaan

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham di luar RUPS, yaitu:

1. Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar RUPS tanggal 2 Januari 2020 dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar RUPS No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat

- a. 250,000 (two hundred fifty thousand) series A shares with a value of Rp100,000 (one hundred thousand rupiah) each;
- b. 338,235 (three hundred thirty eight thousand two hundred thirty five) series B shares with a value of Rp809,349 (eight hundred nine thousand three hundred forty nine rupiah) each;
- c. 764,490 (seven hundred sixty four thousand four hundred ninety) series C shares with a value of Rp2,372,000 (two million three hundred seventy two rupiah) each.

Article 4 paragraph 2

From the authorized capital, it has been issued and paid up 100% (one hundred percent) or an amount of:

- a. 250,000 (two hundred and fifty thousand) serial shares A with a total face value of Rp25,000,000,000.00 (twenty five billion Rupiah);
- b. 338,235 (three hundred and thirty eight thousand two hundred and thirty five) series B shares with a total nominal value of Rp273,750,159,015.00 (two hundred and seventy three billion seven hundred fifty million one hundred five twenty nine thousand and fifteen Rupiah); and
- c. 764,490 (seven hundred and sixty four thousand four hundred ninety) C series shares with a total nominal value of Rp1,813,370,280,000.00 (one trillion eight hundred thirteen billion three hundred and seventy million two hundred and eighty thousand Rupiah); or a total of Rp2,112,120,439,015.00 (two trillion one hundred twelve billion one hundred twenty million four hundred thirty-nine thousand and fifteen Rupiah) by shareholders who have taken a share.

This decision of the shareholders has been realized, reported through the integrated Electronic Reporting System Indonesian Financial Services Authority and Stock Exchange, announced in the daily newspaper circulating nationally and can be accessed through the Company's website.

Information on the Decisions by the GMS Held in 2020 and Their Follow-up by the Company

Throughout 2020, the Company held GMS and the decisions by the shareholders outside the GMS included:

1. Circular Decree of All Shareholders outside the GMS of January 2, 2020, notarized in the Deed of Statement of Circular Decree of All Shareholders outside the GMS No. 3, January 6, 2020, drawn before Darmawan Tjoa, S.H.,

di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta, yang dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perusahaan, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen Pasal 18

1. Laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.
3. Seluruh laba bersih Perusahaan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali

S.E., a notary in Jakarta, unanimously decided upon and approved of the following:

1. Adding provision into Article 18 paragraphs 3 and 4 or the Company's Articles of Association that regulates dividend distribution and interim dividend, so that the entire Article 18 of the Company's Articles of Association reads:

Profit Use and Dividend Distribution Article 18

1. Company's net profit for one fiscal year as outlined in the balance sheet and loss-profit calculation, validated by the Annual General Meeting of Shareholders, is divided based on the way it is used, as regulated by the meeting.
2. If the loss-profit calculation for one fiscal year shows losses that cannot be covered by reserved funds, the losses will still be recorded and included in the loss-profit calculation and in the next fiscal year, the Company will be regarded as not receiving profit as long as the losses that are recorded and included in the loss-profit calculation are not covered.
3. All net profits of the Company, subtracted by allocation for reserve as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, can be distributed to all shareholders as dividend, unless otherwise stated in the General Meeting of Shareholders.
4. The Company can distribute interim dividend before the end of the Company's fiscal year based on the decisions by the Board of Directors following the approval by the Board of Commissioners provided that the temporary dividend is to be calculated along with the distributed dividend, based on the Decree of the next Annual General Meeting of Shareholders in conjunction with the provisions of the Articles of Association.
2. Gave authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in relation to the decisions outlined in this Decree and to effectively implement all decisions outlined in this Decree in their entirety without any exclusion, including but not limited to preparing or asking for required documents, agreements, and/or deeds to be prepared, and to restate this Decree, either in parts or in its entirety, in the form of notary deeds; to appear before authoritative parties,

Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perusahaan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.
4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan jo. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

2. Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar RUPS tanggal 18 Maret 2020, yang dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 1. Menyetujui rencana pemberian jaminan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan kepada Bank atau Lembaga Keuangan manapun lainnya yang akan memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun kepada Perusahaan, yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
 2. Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua akta, perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada akta, perjanjian penjaminan dan/atau dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk penjaminan

officials, institutions, and/or agencies, including notary; to report, register, and/or appeal for approval to and/or from authoritative parties or other related parties.

3. This Decree may be signed separately by each Company's Shareholder, where each is the original document and the entire Decree that is signed separately by each Company's Shareholder is one inseparable document, which is the same document as well at the same time.
4. Stipulated that in accordance with the provision of the Company's Articles of Association in conjunction with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability, the Decree has a binding power, similar to the decree drawn in a Company's General Meeting of Shareholders and the decree is already in effect since the last date of the Decree.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

2. Circular Decree of All Shareholders outside the GMS on March 18, 2020, in which unanimously decided and approved of the following:
 1. Approved the plan to provide a guarantee for the Company's assets which is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company to any Bank or other Financial Institution that will provide financing facilities in any form to the Company, which occurs within 1 (one) financial year as of January 1, 2020 to December 31, 2020 in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not.
 2. Gave full authority with substitution rights to the Company's Board of Directors in relation to the decisions above to sign each and every deed, agreement, and document, including but not limited to deeds, warranty agreements, and/or other related documents such as power of attorney, statement letter, and documents needed in guaranteeing assets based on terms and conditions as deemed

kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perusahaan tanpa pengecualian. Oleh karenanya segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perusahaan tersebut adalah sah dan mengikat tanpa ada yang dikecualikan.

necessary and appropriate by the Board of Directors indiscriminately. Therefore, all actions taken by the Company's Board of Directors are valid and indiscriminately binding.

3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir dihadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan ini menjadi keputusan Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris (apabila diperlukan) untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir dihadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain atau untuk melakukan tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.
4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini dan Perusahaan telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak ketiga lainnya.

3. Gave power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights, either individually or collectively, to appear before authoritative officials including before a notary and to prepare or to be the cause of the preparation and/or to state the entire or parts of this Decree to become the decisions of shareholders in the form of notary deed (if needed) to be followed up in accordance with prevailing laws and regulations, including but not limited to gaining approval from or informing or registering on the Ministry of Law and Human Rights, alter or add words in the Company's Articles of Association if required and/or suggested by the Ministry of Law and Human Rights, signing the deeds, conveying information, preparing and signing required documents, appearing before related institution and government bodies to appeal and register as stipulated based on the prevailing legislation in the Republic of Indonesia, and taking any other required actions in relation to the indiscriminate implementation of the Decree.
4. Stated that in accordance with the provision of the Company's Articles of Association in conjunction with the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability, this decree has a binding power similar to that of decisions made in a General Meeting of Shareholders and the decisions are in effect since the last date of the signing of the Decree and the Company has obtained necessary approval as required by the law and regulations and agreements between the Company and other third parties.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

3. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 sebagaimana dituangkan melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 PT Mora Telematika Indonesia dan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 No. 40 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, notaris di Jakarta, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik isi laporan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019. Menyetujui pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (*acquitt et d'charge*).

Menerima dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2019 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00464/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020.

2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan laba bersih yang diperoleh Perusahaan selama tahun buku 2019 akan dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Disisihkan sebesar Rp34.750.031.803 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga Rupiah) untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba tahun buku 2019 sebesar Rp270.542.384.133 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan yang penggunaannya untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

3. The Annual General Meeting of Shareholders of the Fiscal Year 2019 was outlined through the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 PT Mora Telematika Indonesia and was included in the 2019 Deed of Statement of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 40, June 17, 2020, made by Darmawan Tjoa, a notary in Jakarta, with the following decisions of 2019 Fiscal Year GMS:

1. Approved and accepted the content of reports of the Board of Directors and supervisory report of the Board of Commissioners on the condition and the management of the Company for a period from January 1, 2019 through December 31, 2019 as outlined in the 2019 Fiscal Year Annual Report. Approved of the waiving of the managerial responsibilities of all members of the Board of Directors and the supervisory responsibilities of all members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year of 2019 (*acquitt et d'charge*).

Accepted and validated the consolidated financial statement for the 2019 fiscal year consisting of balance sheet and profit-loss calculation of 2019 fiscal year, ending on December 31, 2019, which was audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Rpis, with fair opinion in all material respects as outlined in the report No. 00464/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2020, dated March 23, 2020.

2. Agreed not to distribute dividend for the fiscal year ending on December 31, 2019, and the net profit obtained by the Company throughout the fiscal year of 2019 would be used in the following ways:
 - a. Allocated a total of Rp34,750,031,803 (thirty four billion seven hundred fifty million thirty one thousand eight hundred three rupiah) as Reserved Funds as referred to in the Article 70 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability;
 - b. The remaining profit for the fiscal year of 2019 amounting to Rp270,542,384,133 (two hundred seventy billion five hundred forty two million three hundred eighty four thousand one hundred thirty three rupiah) will be recorded as retained earnings, used to support the operation and development of business.

3. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.
 4. Menyetujui Rencana Kerja Perusahaan selama Tahun Buku 2020;
 5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk Tahun buku 2020 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp11.524.174.527 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp2.008.950.443 (dua miliar delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah).
 6. Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan Seri B adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
 - Per tanggal 31 Desember 2019, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perusahaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 90% digunakan untuk kebutuhan investasi dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Sekitar 85% digunakan untuk investasi terhadap Backbone termasuk dengan perangkat terkait; dan
 2. Sekitar 5% digunakan untuk investasi terhadap Proyek FTTX, yang merupakan peningkatan kapasitas jaringan dan cakupan layanan akses di segmen *Small*
3. Agreed on the reappointment of the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Rpis to audit the Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2020 in accordance with the suggestions by the Board of Commissioners while taking into account Recommendations by the Audit Committee and to subsequently authorized the Board of Commissioners and the Board of Directors to determine the amount of honorarium intended for the Public Accountant Firm in relation with the reappointment. The Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Rpis is an independent public accounting firm registered on the Financial Service Authority and has good reputation.
 4. Approved the Company's Work Plan for the 2020 Fiscal Year;
 5. Approved and determined the salary/honorarium and/or allowances/other remunerations for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year; as much as Rp11,524,174,527 (eleven billion five hundred twenty four million one hundred seventy four thousand five hundred twenty seven rupiah) for the members of the Board of Directors and Rp2,008,950,443 (two billion eight million nine hundred fifty four hundred forty three rupiah) for the Board of Commissioners.
 6. Accepted and approved the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of the 2017 Moratelindo Bonds I Series A and Series B as follows:
 - Funds from the public offering of Bonds I Moratelindo 2017 series A and series B were Rp1,000,000,000,000 (one trillion rupiah).
 - As of December 31, 2019, the entire funds from the public offering of the Bonds I Moratelindo 2017 Series A and Series B, subtracted by emission costs, had all been used (100%) by the Company in accordance with the Fund Use Plan, conveyed through the following prospectus:
 - a. Around 90% were used for investment needs, detailed as follows:
 1. Around 85% for investment in the Backbone, including in related instruments; and
 2. Around 5% for investment in the FTTX Project, which was a network capacity and access service coverage upgrade in the segment of Small Office Home Office

Office Home Office (SOHO) dan Retail, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 70% digunakan untuk pembangunan jaringan akses, dan
 - Sekitar 30% digunakan untuk pembelian *equipment*.
- b. Sekitar 10% digunakan untuk kebutuhan modal kerja seperti biaya operasional dan perawatan jaringan, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, dan aktivitas "*branding*" dan promosi.

Perusahaan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Memberikan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Keputusan Para Pemegang Saham ini telah direalisasikan, dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan dapat diakses melalui website Perusahaan.

(SOHO) and Retail, with the following details:

- Around 70% were for the construction of access network, and
 - Around 30% for purchase of equipment.
- b. Around 10% were used for work capital requirements such as operational and network maintenance costs, costs of equipment installation for the customers, and branding and promotional activities.

The Company has periodically reported on the realization of use of funds from Public Offering of Bonds I Moratelindo 2017 series A and series B to the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchange in accordance with FSA Regulation No. 30/POJK.04/2015 of December 22, 2015 on Report of Realization of Use of Funds from Public Offering. The Company granted the Board of Directors with authority with substitution rights to take any necessary actions in relation with all subjects decided upon in the Meeting Decree and in the effective implementation of included decisions, entirely without exclusion, including but not limited to preparing or asking to be prepared of all required documents, agreements, and/or deeds and restating this document in parts or in its entirety in the form of notary deed; to appear before parties, officials, institutions, and/or agencies, including notary; reporting, registering, and/or appealing for approvals to and/or from authorized parties and/or other related parties.

The decisions of all Shareholders had been realized, reported through the FSA and Indonesia Stock Exchange's integrated Electronic Reporting System, announced through national daily newspaper, and can be accessed on the Company's website.

Direksi THE BOARD OF DIRECTORS

Secara umum Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan Perusahaan melalui kewenangan dan tanggung jawabnya yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Direksi dilaksanakan melalui penyusunan strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi serta maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi juga bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Audit Internal dan pengambilan tindakan atas temuan-temuan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi Perusahaan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Penetapan jumlah anggota Direksi saat ini telah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan serta efektifitas pengambilan keputusan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

1. Setiap transaksi atau tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan dan/atau anak perusahaan Perusahaan;
2. Setiap pembebanan hak tanggungan, gadai, atau pembebanan lainnya atau hak jaminan atas harga kekayaan Perusahaan, tidak terbatas kepada harta kekayaan dan/atau saham milik Perusahaan;
3. Setiap tindakan untuk memberikan pernyataan dan/atau jaminan perusahaan oleh Perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran utang pihak lain atau kewajiban-kewajiban lainnya;
4. Setiap penerimaan pinjaman atau pemberian pinjaman uang untuk dan atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di bank untuk kegiatan sehari-hari Perusahaan);
5. Setiap tindakan untuk mendirikan anak perusahaan baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri; dan
6. Setiap tindakan untuk melakukan perubahan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang utama dari Perusahaan.

In general, the Board of Directors is responsible for the entire Company's management through its authority and responsibilities that are regulated in the Company's Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations. The functions of the Board of Directors are performed through the formulation of business strategies, budget, and work plans in accordance with the Company's vision and mission, as well as the purposes and objectives. The Board of Directors is also responsible for the monitoring of the Internal Audit performance and actions taken on the findings based on the direction of the Board of Commissioners.

Members of the Company's Board of Directors are appointed by the GMS for a period of 5 (five) year without prejudice to the GMS right to terminate at any time. The number of members of the Board of Directors is stipulated by considering the condition and needs, as well as the effectiveness of the Company's decision-making.

Duties and Responsibilities of Board of Directors

The Board of Directors is entitled to represent the Company in and out of the Court regarding any matters and in any events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, as well as taking all actions, both for management and ownership, but with the limitation for:

1. Any transaction or other action that cause the change of composition of the Company's shareholders and/or the Company's subsidiaries;
2. Any registered mortgage, security, or other charges or guarantee rights on the Company's assets, not limited to the assets and/or shares of the Company;
3. Any action to provide corporate statement and/or guarantee of the Company to guarantee the obligations to settle payables to other parties or other obligations;
4. Any loan received or fund loan granted to and on behalf of the Company (not including taking the Company's fund in the bank for the Company's daily activities);
5. Any action to establish a subsidiary in Indonesia and abroad; and
6. Any action to make change to the Company's main business activities.

Harus dengan persetujuan dari, atau dengan surat-surat/ dokumen/anggaran yang telah disetujui oleh, Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau bilamana diperlukan dengan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

It must be with the approval from, or letters/documents/ budgets approved by the Board of Commissioners in the meeting of the Board of Commissioners from time to time or as needed by signing the Board of Commissioners.

Pembagian Lingkup Tugas antar Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan pembagian lingkup tugas dari pembagian tugas di atas adalah sebagai berikut:

Division of Scope of Duties among Directors

In carrying out its duties, the Board of Directors divides the scope of duties from the division of tasks above as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibility
Galumbang Menak	Direktur Utama President Director	Menjalankan tugas dan fungsi di bidang operasional dan komersial. Carry out duties and functions in the operational and commercial fields.
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Menjalankan tugas dan fungsi di bidang keuangan. Carry out duties and functions in the financial sector.

Piagam Direksi

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik GCG, Perusahaan telah membentuk Piagam Direksi pada 29 Maret 2018. Piagam Direksi merupakan acuan pedoman kerja dan tata tertib kerja Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ringkasan isi Piagam Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Charter of the Board of Directors

In performing the role and function of the Company's management to increase the quality of GCG implementation, the Company has established the Charter of the Board of Directors on March 29, 2018. The Charter of the Board of Directors is a reference for work guidelines and code of conduct for the Board of Directors in performing its duties and responsibilities. The content summary of the Charter of the Company's Board of Directors is as follows:

- Bab 1: Landasan Hukum
- Bab 2: Ketentuan Umum
- Bab 3: Struktur dan Keanggotaan
- Bab 4: Kriteria
- Bab 5: Masa Jabatan
- Bab 6: Tugas dan Tanggung Jawab
- Bab 7: Kewenangan
- Bab 8: Nilai Kerja
- Bab 9: Waktu Kerja
- Bab 10: Rapat Direksi
- Bab 11: Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Bab 12: Aspek Transparansi
- Bab 13: Larangan
- Bab 14: Ketentuan Penutup

- Chapter 1: Legal Basis
- Chapter 2: General Provisions
- Chapter 3: Structure and Membership
- Chapter 4: Criteria
- Chapter 5: Term of Office
- Chapter 6: Duties and Responsibilities
- Chapter 7: Authority
- Chapter 8: Work Values
- Chapter 9: Working Time
- Chapter 10: Meeting of the Board of Directors
- Chapter 11: Reporting and Accountability
- Chapter 12: Transparency Aspect
- Chapter 13: Prohibition
- Chapter 14: Closing Provisions

Pedoman Kerja Direksi tersebut senantiasa disempurnakan dengan tujuan agar GCG Perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

The working guidance of the Board of Directors is continuously improved, so that the Company's GCG can be implemented better in the future.

Rapat Direksi

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, di sepanjang tahun 2021, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Galumbang Menak	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama Vice President Director	12	12	100%

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris memiliki rapat gabungan atau rapat bersama. Uraian terkait kebijakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian pembahasan Dewan Komisaris.

Di sepanjang tahun 2021, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Galumbang Menak	Direktur Utama President Director	3	3	100%
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama Vice President Director	3	3	100%

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS

Di sepanjang tahun 2021 Pemegang Saham memutuskan RUPS dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler. Sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan secara fisik. Dengan demikian, kehadiran Direksi dalam RUPS di tahun 2021 tidak diperhitungkan.

Meeting of the Board of Directors

In accordance with the laws and regulations in the capital market and the Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Company, during 2021, the Board of Directors have held meetings for 12 (twelve) times with the attendance rate as follows:

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Directors and the Board of Commissioners convene in a joint meeting or a collective meeting. Details regarding policies on the Board of Directors and the Board of Commissioners' joint meeting can be checked in the section of the Discussion of the Board of Commissioners.

Throughout 2021, the joint meeting had been held three times with Directors' attendance rate as follows:

The Attendance Rate of Members of the Board of Directors in the GMS

Throughout 2021, Shareholders decided that the GMS is to be conducted through the mechanism of Circular Decree. In accordance with Article 91 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability, the Circular Decree of the Shareholders has a legal power similar to that of decisions of the GMS, which is physically held. Therefore, the attendance of the Board of Directors in the 2021 GMS was not taken into account.

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2021.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Material	Tempat dan Waktu Location and Time	Penyelenggara Organizer
Galumbang Menak (Direktur Utama) Galumbang Menak (President Director)	Workshop Workshop	Embrace 5G, Connect Future	Daring, 4 Februari 2021 Online, 4 Februari 2021	ZTE
Galumbang Menak (Direktur Utama) Galumbang Menak (President Director)	Workshop Workshop	Huawei 5G, Workshop	Daring, 8 Februari 2021 Online, 8 Februari 2021	Huawei
Jimmy Kadir (Wakil Direktur Utama) Jimmy Kadir (Vice President Director)	Pendidikan Formal Formal Education	Program Pascasarjana S2 Manajemen Postgraduate Program in Management	2021 (daring)	Universitas Pancasila

Educational Training and/or Competence Improvement of the Board of Directors

The following are educational training and/or competence improvement that the Board of Directors took part in 2021.

Penilaian atas Kinerja Komite dan Organ Pendukung Direksi

Hingga akhir tahun 2021 Direksi tidak membentuk komite khusus. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direksi didukung oleh organ-organ yang telah dibentuk dalam Perusahaan guna memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal, dalam hal ini Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Manajemen memiliki prosedur penilaian kinerja organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Prosedur penilaian kinerja menggunakan Key Performance Indicator (KPI) serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian KPI yang dilakukan 2 (dua) kali setahun yaitu tengah (1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan) dan akhir tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan).

KPI untuk Unit Audit Internal dilihat berdasarkan perspektif Keuangan, Perspektif Proses Bisnis Internal (internal process), Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Organizational Capacity) dan Sekretaris Perusahaan berdasarkan perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal (internal process) dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Organizational Capacity).

Kriteria penilaian KPI untuk Unit Audit Internal mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, demikian pula penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Assessment of the Committee Performance and the Organs Supporting the Board of Directors

Until the end of 2021 the Board of Directors did not form a committee special. That in carrying out their duties, the Board of Directors supported by the organs that have been formed in the Company in order to comply with the provisions of regulations in the field of capital market, in this case Internal Audit and Secretary Company.

Management has organ performance appraisal procedures supporters, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. Performance appraisal procedure using Key Performance Indicators (KPI) as well as monitoring and evaluation of progress of KPI achievement carried out 2 (two) times a year i.e. middle (1 January to 30 June current year) and the end of the year (1 January to 31 December of the current year).

KPI for Internal Audit Unit seen from perspective Finance, Perspective of Internal Business Process (internal process), Learning and Growth Perspective (Organizational Capacity) and Corporate Secretary based on perspective Perspective of Internal Business Process (internal process) and Learning and Growth Perspective (Organizational Capacity).

KPI assessment criteria for the Internal Audit Unit follow the conditions stipulated in OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning Formation and Guidelines Preparation of the Internal Audit Unit Charter, as well as Performance appraisal of the Corporate Secretary follows the requirements stipulated in OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Company.

Orientasi Anggota Direksi Baru

Perusahaan memastikan bahwa seluruh Direksi telah menerima dan memahami tentang visi, misi, nilai, kode etik, struktur organisasi, lini bisnis, Piagam Direksi, Peraturan Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta risiko utama yang dihadapi oleh bisnis Perusahaan. Pelaksanaan program dan masa orientasi merupakan tanggung jawab manajemen, unit bisnis dan unit pendukung lain melalui pertemuan tatap muka.

Di tahun 2021 tidak terdapat pergantian susunan Direksi. Dengan demikian Perusahaan tidak menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi anggota Direksi yang baru.

Orientation of New Members of the Board of Directors

The Company ensures that all Directors have accepted and understood the vision, mission, values, code of ethics, organizational structure, business lines, the Board of Directors Charter, Company Regulations, regulations and laws that apply in the capital market as well as the main risks faced by the Company's business. The implementation of the program and orientation period are the responsibility of management, business units and other support units through face-to-face meetings.

In 2021 there was no change in the composition of the Board of Directors. Therefore, the Company did not hold orientation activities for new members of the Board of Directors.



- Aktivitas instalasi Optical Distribution Cabinet pada proyek ducting bersama kota Semarang.
Optical Distribution Cabinet installation activity on a joint ducting project in the city of Semarang.

Dewan Komisaris BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/04/POJK/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, Komisaris Independen Perusahaan memiliki kriteria sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Board of Commissioners is a corporate governance organ responsible for overseeing all policies of the Board of Directors and providing advice to the Board in carrying out the Company's business activities, such as conducting oversight of the implementation of Work Plan and Company Budget, as well as policies set out in the GMS and the Company's Articles of Association. In addition, the Board of Commissioners is collectively responsible for ensuring that the Company implements GCG at all organizational levels. Members of the Company's

Board of Commissioners are appointed by GMS for a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to terminate them at any time.

Appointment Criteria of Independent Commissioner

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and controlling shareholders, and does not have business or other relationships that can affect their ability to act independently or dedicatedly for the interest of the Company as explained in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In accordance with Article 21 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/04. POJK/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners, the Company's Independent Commissioner shall have the following criteria:

- Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;
- Have no shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
- Have no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company; and
- Have no business relationship either directly or indirectly related to business activities of the Issuer or Public Company.

Pernyataan Komisaris Independen mengenai Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Komisaris Independen Perusahaan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa Komisaris Independen senantiasa bersikap independen dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pernyataan ini diberikan dan diperbaharui oleh Komisaris Independen dari tahun ke tahun, yang mana terakhir kali pernyataan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 3 Januari 2022.

Statement of Independent Commissioner on the Statement of Independency and Conflict of Interest Potential

The Company's Independent Commissioner has signed Statement of Independency stating that the Independent Commissioner is always independent and professional in carrying out its functions and duties. This statement is given and renewed by the Independent Commissioner every year, which most recently is stated in the Statement of Independency on January 3, 2022.

Pernyataan Independensi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Kanaka Paradiredja
Jabatan	: Komisaris Independen
Alamat	: Pangdajene Timur Raya, RT. 001, RW. 002, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
No. KTP	: 3174080212430001

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Yang Membuat Pernyataan"**, bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen PT Mora Telematika Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, ber Kantor pusat di Gedung 5, Jalan Paksiaran Nomor 5, Proklamasi, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Perusahaan"**), menyatakan bahwa :

- Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikn, atau mengawasi Kegiatan Perseoran kecuali dalam fungsi saya sebagai Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliat dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut; dan
- Akan tetap bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan selama menjabat sebagai Komisaris Independen termasuk dalam proses pengambilan keputusan

Jakarta, 3 Januari 2022


Kanaka Paradiredja
 Komisaris Independen

PT Mora Telematika Indonesia
 Group B, Jalan Paksiaran No 5 PT Moriindo
 Jakarta Pusat 10102 - Indonesia

021-5794 0001 | 021-5794 0002 | 021-5794 0003
 www.moraindonesia.co.id | @moraindonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Dewan Komisaris berhak mendapatkan penjelasan dari setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association, duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners has the right to inspect all books, letters and other evidence, examine and cross check the actual cash and others, as well as be informed of all actions taken by the Board of Directors;
2. The Board of Commissioners reserves the right to obtain explanation from each member of the Board of Directors regarding all matters asked by the Board of Commissioners;

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris; dan
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, seluruh tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris, juga berlaku bagi Komisaris tersebut.

Piagam Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan Perusahaan, telah disusun Piagam Dewan Komisaris pada 29 Maret 2018. Piagam Dewan Komisaris merupakan acuan pedoman kerja dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Ringkasan isi Piagam Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

- Bab 1: Landasan Hukum
- Bab 2: Ketentuan Umum
- Bab 3: Struktur dan Keanggotaan
- Bab 4: Kriteria
- Bab 5: Komisaris Independen
- Bab 6: Masa Jabatan
- Bab 7: Tugas dan Tanggung Jawab
- Bab 8: Kewenangan
- Bab 9: Nilai Kerja
- Bab 10: Waktu Kerja
- Bab 11: Rapat Dewan Komisaris
- Bab 12: Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Bab 13: Aspek Transparansi
- Bab 14: Larangan
- Bab 15: Ketentuan Penutup

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala setidaknya dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun. Apabila ada peristiwa penting yang membutuhkan pembahasan segera, dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tambahan. Rapat dilaksanakan secara tatap muka dan terbuka dengan tingkat kehadiran dan partisipasi dari anggota Dewan Komisaris.

3. If all members of the Board of Directors are suspended and there is no acting member of the Board of Directors left, the Board of Commissioners must temporarily manage the Company. In this case, the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more members of the Board of Commissioners upon the responsibility of the Board of Commissioners; and
4. In the event that there is only one Commissioner, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners, also apply to the Commissioner.

Board of Commissioners Charter

In carrying out its supervisory and advisory roles in respect of the Company's management, the Company has prepared Board of Commissioners Charter since March 29, 2018. The Board of Commissioners Charter serves as a reference to work guidelines and rules of the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory duties to the Board of Directors. The content summary of the Board of Commissioners Charter include the following:

- Chapter 1: Legal Basis
- Chapter 2: General Provisions
- Chapter 3: Structure and Membership
- Chapter 4: Criteria
- Chapter 5: Independent Commissioner
- Chapter 6: Term of Office
- Chapter 7: Duties and Responsibilities
- Chapter 8: Authority
- Chapter 9: Work Value
- Chapter 10: Office Hour
- Chapter 11: Board of Commissioners Meeting
- Chapter 12: Reporting and Accountability
- Chapter 13: Transparency Aspects
- Chapter 14: Prohibition
- Chapter 15: Closing Provisions

Board of Commissioners Meeting

In accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Board of Commissioners Meetings are held regularly at least 6 (six) times a year. If an important event that requires immediate discussion occurred, the Board of Commissioners may hold additional meetings. Meetings are held face-to-face and openly with attendance and participation from the Board of Commissioners members.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Frekuensi rapat ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Berikut tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings. The frequency of these meetings is in accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The following table contains the attendance rate of the Board of Commissioners at these meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Indra Nathan Kusnadi	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%
Karim Panjaitan	Komisaris Commissioner	6	6	100%
Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi melakukan rapat gabungan atau rapat bersama untuk membahas hal-hal strategis Perusahaan, termasuk pembahasan persiapan RUPS maupun pertanggungjawaban kinerja. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala setidaknya dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun.

Sepanjang tahun 2021, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali. Frekuensi rapat ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Commissioners along with the Board of Directors conduct joint meetings to discuss the Company's strategic matters, including discussion of preparations for the GMS and performance accountability. In accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the joint meetings are held regularly at least 3 (three) times a year.

Throughout 2021, the Company held 3 (three) joint meetings. The frequency of these meetings is in accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The following table contains the attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors at these meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Indra Nathan Kusnadi	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%
Karim Panjaitan	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100%

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Di sepanjang tahun 2021 Pemegang Saham memutuskan RUPS dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler. Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan secara fisik. Dengan demikian, kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS di tahun 2021 tidak diperhitungkan.

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021.

Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru

Perusahaan memastikan bahwa seluruh Dewan Komisaris telah menerima dan memahami tentang visi, misi, nilai, kode etik, struktur organisasi, lini bisnis, Piagam Direksi, Peraturan Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal serta risiko utama yang dihadapi oleh bisnis Perusahaan. Pelaksanaan program dan masa orientasi merupakan tanggung jawab manajemen, unit bisnis dan unit pendukung lain melalui pertemuan tatap muka.

Di tahun 2021 tidak terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian Perusahaan tidak menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.

Penilaian atas Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

- **Penilaian atas Kinerja Direksi**
Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian kinerja Direksi tahun 2021 dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi & Remunerasi, yang kemudian diusulkan kepada Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Manajemen), dan Laporan Tahunan serta realisasi Key Performance Indicators (KPI) Direksi yang terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu financial perspective, customer perspective, internal process dan organizational capacity. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegal dari seluruh Direksi.

Attendance Rate of the Board of Commissioners in the GMS

Throughout 2021, Shareholders decided that the GMS is to be held through Circular Decree mechanism. In accordance with Article 91 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability, Shareholders' Circular Decree has a legal power similar to decisions of the GMS, held physically. Therefore, the attendance of the Board of Commissioners in the 2021 GMS was not taken into account.

Training and/or Competence Improvement of the Board of Commissioners

There were no educational trainings and/or competence improvement that the Board of Commissioners joined throughout 2021.

Orientation of New Members of the Board of Directors

The Company ensures that all Directors have accepted and understood the vision, mission, values, code of ethics, organizational structure, business lines, the Board of Directors Charter, Company Regulations, regulations and laws that apply in the capital market as well as the main risks faced by the Company's business. The implementation of the program and orientation period are the responsibility of management, business units and other support units through face-to-face meetings.

In 2021, there was no change in the composition of the Board of Directors. Therefore, the Company did not hold orientation activities for new members of the Board of Directors.

Work Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

- **Performance Assessment of the Board of Directors**
The performance of the Board of Directors is assessed annually as an evaluation of the duties performed by the Board of Directors. The performance assessment of the Board of Directors in 2021 has been conducted by the Board of Commissioners and the GMS based on the Financial Statements, Report of RKAP Realization (Management), and Annual Report, as well as Realization of Key Performance Indicators of the Board of Directors, consisting of 4 (four) aspects, namely financial perspective, customer perspective, internal process, and organizational capacity. The measurement of the Board of Directors' performance is a collegial work result of all members of the Board of Directors.

- **Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris**
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris pada 2021 telah dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang telah diusulkan sebelumnya oleh Komite Nominasi & Remunerasi, termasuk di dalamnya penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadirannya sebagaimana telah disampaikan di atas. Pengukuran keberhasilan kinerja Dewan Komisaris merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh Dewan Komisaris.

Penilaian atas Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk mendukung fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris menilai kinerja komite dan kinerja masing-masing anggota komite yang bukan anggota Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Evaluasi kinerja komite serta evaluasi kinerja masing-masing anggota komite merupakan penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan komite yang meliputi:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim;
2. Jumlah Kajian, Analisis, dan Rekomendasi;
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim, termasuk kehadiran dalam rapat;
4. Kerjasama dalam Tim; dan
5. Mutu dan kualitas konsep.

- **Performance Evaluation of the Board of Commissioners**
Performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted regularly every year as an evaluation of the implementation of the Board of Commissioners' duties. The Board of Commissioners' performance evaluation in 2020 was done by the GMS based on the Report of Supervisory Task and Realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners, as previously suggested by the Nomination & Remuneration Committee, including on the implementation of meeting and its attendance rate as outlined above. The success of the Board of Commissioners' performance is measured through collective work of the Board of Commissioners.

Performance Evaluation of Committee Supporting the Implementation of Board of Commissioners' Duties

In order to support the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established committees to support its functions in accordance with the applicable laws and regulations. These committees are the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Commissioners evaluates the performance of the committees and the performance of each non-Commissioner member of the committees at least once a year. The results of said evaluation will be used to develop steps of repair, development, and perfection that are required in supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties.

The evaluation of the committees' performance as well as the evaluation of each committee member's performance is an assessment based on criteria of target achievement, as stated in the Annual Work Plan of the committee, which includes:

1. Contribution to the Team's target achievement;
2. The number of Discussions, Analyses, and Recommendations;
3. Activity rate within the Team, including meeting attendance;
4. Team work; and
5. The quality of the concept.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas melaksanakan fungsi nominasi, baik dalam hal memberikan rekomendasi tentang komposisi jabatan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, hingga melakukan evaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk mengajukan laporan pengawasan dan penilaian kinerja kepada RUPS.

Dalam hal proses nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya, mulai dari pengusulan komposisi jabatan dan kriteria yang dibutuhkan, hingga membantu melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Dari bahan evaluasi ini yang kemudian diajukan oleh Dewan Pengawas dalam Laporan Pengawasannya, Pemegang Saham melalui RUPS dapat memutuskan pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Di tahun 2021 tidak terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan demikian proses nominasi di tahun 2021 berfokus pada proses penilaian atas pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan tahun buku 2020 yang telah diputuskan melalui keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2020 melalui keputusan sirkuler Pemegang Saham.

Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company has a Nomination and Remuneration Committee that is in charge of implementing the function of nomination in terms of giving recommendations of the composition of position and criteria required in the nomination process, analyzing and proposing a candidate who has met all requirements as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to be suggested in the GMS, and evaluating individual and collective performance of the Board of Directors as the material used by the Board of Commissioners to submit supervisory report and performance assessment to the GMS.

In terms of nomination process, the Nomination and Remuneration Committee has implemented its duties from proposing the composition of ranks and required criteria to aiding with assessing the performance of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners based on the benchmark prepared as consideration for evaluation. Based on the evaluation materials submitted by the Supervisory Board in its Supervisory Report, Shareholders can decide on the performance achievement of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS.

In 2021, there was no change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, therefore the 2021 nomination process focused on assessment on the accountability of Company management for 2020 fiscal year, decided in the Decree of the Annual GMS for the fiscal year of 2020, through the Shareholders' Circular Decree.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan POJK 34/2014. Penetapan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan ditetapkan serta disahkan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

- Gaji;
- Tunjangan lainnya (Bonus dan Tunjangan Hari Raya).

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada 20 Mei 2021, pemegang saham memutuskan menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang diberikan pada tahun 2021 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp7.417.390.613 dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp1.368.154.910,-.

Procedures for and Basis of Stipulation of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is stipulated by referring to the provisions of POJK 34/2014. The stipulation is conducted by taking into account recommendations by the Nomination and Remuneration Committee and is stipulated and validated by shareholders in the Annual GMS.

Structure of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Components of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors include:

- Salaries;
- Other Benefits (Bonuses and religious holiday allowances).

Transparency of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The procedures for stipulating the amount of remuneration for the Board of Directors are proposed by the Nomination and Remuneration Committee for the GMS to approve of.

The procedures for stipulating the amount of remuneration for the Board of Commissioners are regulated by the Nomination and Remuneration Committee upon the approval of the GMS.

Based on the Decree of the 2020 Fiscal Year Annual GMS on May 20, 2021, shareholders approved and stipulated the salary/honorarium and/or allowances/other remunerations for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, granted in 2021, with an amount of Rp7,417,390,613 for the Board of Directors and Rp1,368,154,910 for the Board of Commissioners.

Komite Audit AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Perusahaan yang baik dan anggota Komite Audit memiliki masa tugas yang tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Ketentuan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Ketentuan Masa Jabatan Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komposisi, Susunan, dan Profil Komite Audit

Di tahun 2021 tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit. Dengan demikian, susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sama.

Audit Committee is established by the Board of Commissioners to assist the Board in supervising the implementation of the Board of Directors' company management function. Term of office of the Audit Committee shall not exceed that of the Board of Commissioners. The provisions of the Audit Committee refer to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee.

The provision of the Term of Office of the Member of the Audit Committee shall not exceed that of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association, namely 5 (five) years and reelection is possible only for the next period of 1 (one) year.

Composition, Structure, and Profile of Audit Committee

In 2021, there was no structural change in the Audit Committee. Therefore, the structure of the Audit Committee as of December 31, 2020 and December 31, 2021 remains the same.

Nama Name	Jabatan Position	Periode dan Masa Jabatan Term of Office	Dasar Penunjukan/ Pengangkatan Basis of Appointment
Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen/Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ Head of Audit Committee	2018-2023	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No.139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit
Nenden Purwitasari	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2018-2023	Decree of the Board of Commissioners No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 on Amendment to Decree of the Board of Commissioners No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 on Appointment of Members of Audit Committee
Drs. Mulyadi, M.Sc	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	2018-2023	

Profil Komisaris Independen/Ketua Komite Audit Kanaka Puradiredja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Profil anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

The profile of the Independent Commissioner/Head of Audit Committee Kanaka Puradiredja can be seen in the section of Board of Commissioners' Profile of the Company Profile chapter of this Annual Report.

The profiles of the members of the Audit Committee for non-Commissioners can be seen below.



NENDEN PURWITASARI

Anggota Komite Audit
Member

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

An Indonesian citizen, domiciles in Jakarta, Indonesia. Currently, she is 56 years old.

Riwayat Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1989).

Educational Background

She obtained her Bachelor's degree in Economics from Parahyan-gan Catholic University, Bandung in 1989.

Riwayat Jabatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No.139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan periode masa jabatan terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Nusa Danata Mahaloka sejak April 2016 dan Direktur PT Insan Bisnis dan Industri Manufaktur Indonesia (2019-Sekarang). Sebelumnya, beliau telah berpengalaman memimpin berbagai posisi penting di beberapa perusahaan di antaranya sebagai Advisor di PT Anugerah Mitra Sentosa (2015-2016).

Di dalam Perusahaan beliau tidak memiliki jabatan lain selain anggota Komite Audit.

Professional Background

He was appointed a member of the Company's Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 on Amendment to the Decree of the Board of Commissioners No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 on the Appointment of Members of Audit Committee with a term of office effective since 2018 through 2023.

Currently, she also serves as a Director of PT Nusa Danata Mahalo-ka since April 2016 and a Director of PT Insan Bisnis dan Industri Manufaktur Indonesia (2019–present). Previously, she is well-ex-perienced in leading various key positions in several companies, among others as the Advisor of PT Anugerah Mitra Sentosa (2015-2016).

Within the Company, she has no concurrent positions other than as a member of Audit Committee.



DRS. MULYADI, M.SC

Anggota Komite Audit
Member

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 75 tahun.

An Indonesian citizen, domiciles in Jakarta, Indonesia. Currently, he is 75 years old.

Riwayat Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Sarjana (S1) Muda Ekonomi jurusan Akuntansi (1969), dan Sarjana (Drs) Ekonomi jurusan Akuntansi (1971), keduanya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta Master (S3) of Science in Management and Administrative Science dari University of Texas di Dallas, Amerika Serikat (1983).

Educational Background

He obtained his Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting (1969) and Bachelor of Economics (Drs), majoring in Accounting (1971); both from Gadjah Mada University Yogyakarta; and Master of Science in Management and Administrative Science, University of Texas at Dallas, United States of America in 1983.

Riwayat Jabatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No.139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan periode masa jabatan terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Saat ini, beliau juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 2009; Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1972; Partner Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan, Jakarta sejak tahun 2000; anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk. sejak tahun 2012; anggota Komite Audit PT Bumi Resource Mineral, Jakarta sejak tahun 2017; dan anggota Komite Audit PT China Construction Bank Indonesia, Jakarta sejak tahun 2014 dan anggota Komite Audit PT Darma Henwa Tbk. sejak tahun 2017.

Di dalam Perusahaan beliau tidak memiliki jabatan lain selain anggota Komite Audit.

Professional Background

He was appointed a member of the Company's Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 on Amendment to the Decree of the Board of Commissioners No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 on the Appointment of Members of Audit Committee with a term of office effective since 2018 through 2023.

Currently, he is also a Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University, Yogyakarta since 2009; Postgraduate Lecturer of Gadjah Mada University, Yogyakarta since 1972; Partner of the Public Accounting Firm of S. Mannan, Ardiansyah, and Partner, Jakarta since 2000; Member of the Audit Committee of PT Bumi Resources Tbk. since 2012; a member of the Audit Committee of PT Bumi Resource Mineral, Jakarta since 2017; and a member of the Audit Committee of PT China Construction Bank Indonesia Tbk (formerly Bank Windu Kentjana International Tbk), Jakarta since 2014.

Within the Company, he has no concurrent positions other than as a member of Audit Committee.

Independensi Komite Audit

Komite Audit Perusahaan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa Komite Audit senantiasa bersikap independen dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pernyataan ini diberikan dan diperbaharui oleh Komite Audit dari tahun ke tahun, yang mana terakhir kali pernyataan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 3 Januari 2021.

Independency of the Audit Committee

The Company's Audit Committee has signed the Letter Independence Statement stating that the Committee Audit is always independent and professional in carrying out its functions and duties. This statement given and updated by the Audit Committee from year to the year, which was the last time the statement stated in the Declaration of Independence dated January 3, 2021.



Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen dan dua anggota profesional lainnya yang berasal dari luar Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara profesional dan independen. Independensi Komite Audit Perusahaan diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan;
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perusahaan dan diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan;
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang digunakan Perusahaan, Kantor Konsultan Hukum yang digunakan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan tersebut.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah dilengkapi pedoman kerja yang terakhir disempurnakan dan diperbaharui dalam Piagam Komite Audit No. 001/MTI/PKA/I/2019 pada 22 Januari 2019. Piagam Komite Audit Perusahaan disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Secara umum, hal-hal yang diatur dalam Piagam Komite Audit adalah: Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; Kebijakan Rapat; Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan; Masa Jabatan; Tata Cara dan Prosedur Kerja; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Pelanggaran.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

The Company's Audit Committee is chaired by the Independent Commissioner and two other professional members from outside the Company. In the execution of tasks and its responsibilities, the Audit Committee acts effectively professional and independent. Independence of the Audit Committee is manifested in the following forms:

- The Audit Committee consists of at least 3 (three) people members from Independent Commissioners and parties from outside the Company;
- The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner and appointed by Decision of the Company's Board of Commissioners;
- Have expertise and experience in the field of accounting and/or finance;
- Not an insider of a Public Accounting Firm used by Companies, Legal Consulting Firms used by the Company within 6 (six) last month;
- Not a person who works or owns authority and responsibility for planning, leading, controlling, or supervising activities the issuer or Public Company within the last 6 (six) months except for the Independent Commissioner;
- Do not have direct or indirect shares directly to the Company;
- Have no affiliation with members Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Holders Major Shares of the Company; and
- Do not have a direct good business relationship or indirectly related to the company's business.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has been equipped with the latest work guidelines, refined and updated in the Audit Committee Charter No. 001/MTI/PKA/I/2019 on January 22, 2019. The Company's Audit Committee Charter is prepared based on applicable laws and regulations and is always reviewed periodically.

In general, matters that are regulated in the Audit Committee Charter are Duties, Responsibilities, and Authorities; Meeting Policies; Composition, Structure, and Requirements of Membership; Term of Office; System and Procedures of Work; Reporting and Accountability; Complaint Management or Report on Violation.

Duties, Authorities, and Responsibilities of Audit Committees

Pursuant to the Company's Audit Committee Charter, the Audit Committee has duties, responsibilities, and authorities as follows: Duties and responsibilities of the Audit Committee:

1. Laporan Keuangan dan Kegiatan Assurance
 - i. Melakukan penelaahan atas keandalan informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
 - ii. Melalui hasil kerja auditor eksternal, melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan Perusahaan;
 - iii. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - iv. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - v. Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material;
 - vi. Melakukan kajian obyektivitas dan independensi auditor eksternal; dan
 - vii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 2. Manajemen Risiko
 - a. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dalam hal Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; dan
 - b. Melakukan penelaahan atas risiko-risiko yang diidentifikasi oleh manajemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan memadai.
 3. Auditor Internal
 - a. Melakukan penelaahan atas rencana, pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; dan
 - b. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor internal.
 4. Tata Kelola dan Kepatuhan
 - a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG;
 - b. Melakukan monitor atas terlaksananya penerapan praktik GCG di Perusahaan, termasuk program penerapan CSR;
 - c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
1. Financial Statements and Assurance Activities
 - i. Reviewing the reliability of financial information to be published by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;
 - ii. Through the results of external auditors, reviewing the effectiveness of internal controls implemented by the management in the process of preparing financial statements to prevent misstatements in the Company's financial statements;
 - iii. Reviewing complaints relating to the Company's accounting and financial reporting processes;
 - iv. Providing independent opinions in the event of any disagreement between the management and external auditors for the provision of services;
 - v. Reviewing the plans and results of activities performed by external auditors in ensuring that the financial statements are free from material misstatements;
 - vi. Performing objectivity and independency review of external auditors; and
 - vii. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors based on independency, the scope of the assignment, and remuneration.
 2. Risk Management
 - a. Reviewing the risk management activities conducted by the Board of Directors, in the event the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners; and
 - b. Reviewing the risks identified by the Management and ensuring that the risks have been adequately addressed.
 3. Internal Auditor
 - a. Reviewing the audit plans, implementation, and results by internal auditors and overseeing the Board of Directors' follow-up on the findings of the internal auditor; and
 - b. Reviewing the objectivity and independence of internal auditors.
 4. Governance and Compliance
 - a. Reviewing the compliance with laws and regulations associated with the activities of the Company, taking into account GCG principles;
 - b. Monitoring the implementation of GCG practices in the Company, including the implementation of CSR programs;
 - c. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company and
 - d. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Sedangkan wewenang Komite Audit meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Komite Audit mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2021.

Audit Committee Authorities include:

1. Access the Company's documents, data, and information regarding the Company's employees, funds, assets, and resources required;
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties performing the internal audit function, risk management, and external auditor, related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve independent parties outside the members of the Audit Committee who are required to assist in the execution of its duties (if necessary); and
4. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

Audit Committee Training

The Audit Committee participated in several educational and training programs to improve competency in carrying out its duties to assist the supervisory function of the Board of Commissioners. Below are the training and/or competency development programs attended by Audit Committee in 2021.

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Material	Tempat dan Waktu Location and Time	Penyelenggara Organizer
Nenden Purwitasari (Anggota Komite Audit) Nenden Purwitasari (Member of Audit Committee)	Webinar Webinar	Focus Group Action: Electrical Vehicle in Indonesia Focus Group Action: Electrical Vehicle in Indonesia	Daring, 23 Juni 2021 Online, June 23, 2021	Ibima Indonesia Ibima Indonesia
Nenden Purwitasari (Anggota Komite Audit) Nenden Purwitasari (Member of Audit Committee)	Webinar Webinar	Business Leadership & Executive Development Program Business Leadership & Executive Development Program	Daring, 11 - 12 Agustus 2021 Online, August 11-12, 2021	Ibima Indonesia Ibima Indonesia
Nenden Purwitasari (Anggota Komite Audit) Nenden Purwitasari (Member of Audit Committee)	Webinar Webinar	Focus Group Discussion Series: Membangun Kedaulatan Teknologi Indonesia Sebagai Basis Ekosistem Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045 Focus Group Discussion Series: Building Indonesia Technological Sovereignty as the Basis for High Economic Growth Ecosystem to Welcome 2045 Golden Indonesia	Daring, 16 September 2021 Online, September 16, 2021	Ibima Indonesia Ibima Indonesia
Nenden Purwitasari (Anggota Komite Audit) Nenden Purwitasari (Member of Audit Committee)	Webinar Webinar	The Concepts of Risk Management The Concepts of Risk Management	Daring, 23 September 2021 Online, September 23, 2021	IBST
Kanaka Puradiredja (Ketua Komite Audit) Kanaka Puradiredja (Chairman of Audit Committee)	Webinar Webinar	The Concepts of Risk Management The Concepts of Risk Management	Daring, 23 September 2021 Online, September 23, 2021	IBST

Rapat Komite Audit

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Piagam Komite Audit, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Komite Audit mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat, yang dituangkan dalam risalah rapat, serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Kanaka Puradiredja	Ketua Head	9	9	100%
Nenden Purwitasari	Anggota Member	9	9	100%
Drs. Mulyadi, M.Sc	Anggota Member	9	7	77,78%

Pelaksanaan Tugas Anggota Komite Audit di Tahun 2021 Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Piagam (Charter) Komite Audit

Di sepanjang tahun 2021 Komite Audit telah melakukan tugas sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan Auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia;
2. Melakukan peninjauan berkala informasi keuangan, yang terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan akhir tahun untuk dipublikasikan. Pelaksanaan penelaahan laporan keuangan mencakup identifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dan rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan usaha; dan
3. Melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya. Komite Audit telah meninjau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Audit Internal.

Audit Committee Meeting

Based on the provisions of the Company's Articles of Association, Audit Committee Charter, and Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Implementation of Audit Committee Work, Audit Committee Meetings are held periodically at least once in 3 (three) months which can only be held if attended by more than (one-half) of the total members. The Audit Committee makes decisions by deliberation to reach consensus, which is set forth in the minutes of meetings and submitted to the Board of Commissioners.

During 2021, the Audit Committee held 9 meetings with attendance as follows:

Implementation of Duties of Audit Committee Members in 2021 as Outlined in the Audit Committee Charter

Throughout 2021, the Audit Committee has performed the following duties:

1. Supervising external auditor who is responsible for auditing the financial statements in accordance with the applicable Professional Standards of Public Accountants in Indonesia and providing opinion whether the financial statements have been presented fairly, in all material respects, financial position, and activity results as well as cash flow of the Company in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia;
2. Conducting periodic reviews of financial information, consisting of quarterly financial reports and year-end financial statements for publication. The implementation of the review of financial statements includes the identification of matters that require attention from the management and recommendations for business development; and
3. Evaluating human resources, organizational structure, reporting of the implementation of internal audit, and follow up on their findings. The Audit Committee has reviewed work results of the Internal Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 141/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi.

The Company's nomination and remuneration committee was established in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. Through Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 141/MTI/PD-DIR/X/2017 dated October 19, 2017 concerning the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee, the Nomination and Remuneration Committee was formed by the Board of Commissioners to carry out functions related to nomination and remuneration.

Komposisi, Susunan, dan Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2021 tidak terdapat perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sama.

Composition, Structure, and Profile of Nomination and Remuneration Committee

In 2021, there was no structural change in the Nomination and Remuneration Committee. Therefore, the structure of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020 and December 31, 2021 remains the same.

Nama Name	Jabatan Position	Periode dan Masa Jabatan Term of Office	Dasar Penunjukan/ Pengangkatan Basis of Appointment
Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen/Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Independent Commissioner/Head of Nomination and Remuneration Committee	2017-2022	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 141/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi
Indra Nathan Kusnadi	Komisaris Utama/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi President Commissioner/Member of Nomination and Remuneration Committee	2017-2022	Decree of the Board of Commissioners No. 141/MTI/PD-DIR/X/2017 of October 19, 2017 on the Appointment of Members of Nomination and Remuneration Committee, Nomination and Remuneration Committee
Farel Sumandar Valentino Sinaga	Kepala Divisi HRGA/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Head of HRGA Division/Member of Nomination and Remuneration Committee	2021-2022	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi Decree of the Board of Commissioners No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 of January 10, 2021 on the Change to the Structure of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Komisaris Independen/Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Kanaka Puradiredja dan Komisaris Utama/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Indra Nathan Kusnadi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of the Independent Commissioner/Head of Nomination and Remuneration Kanaka Puradiredja and the President Commissioner/Member of Nomination and Remuneration Committee Indra Nathan Kusnadi can be seen on the section of Board of Commissioners' Profile in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

The profile of non-Commissioner member of Nomination and Remuneration Committee can be seen below.



FAREL SUMANDAR VALENTINO SINAGA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /GM HRGA
Member of Nomination and Remuneration/GM HRGA

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun.

An Indonesian citizen, residing in South Tangerang, Indonesia. Currently, he is 38 years old.

Riwayat Pendidikan

Beliau mendapatkan gelar Sarjana (S1) jurusan Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung (2007) dan Magister (S2) jurusan Counseling Psychology dari De La Salle University, Filipina (2010).

Educational Background

He received a Bachelor degree (S1) majoring in Psychology from Maranatha Christian University, Bandung (graduated in 2007) and a Masters (S2) majoring in Counseling Psychology from De La Salle University, Philippines (graduated in 2010).

Riwayat Pekerjaan

Beliau memulai karirnya sebagai Dosen di Universitas Pelita Harapan (2010-2012) dan Dosen di Universitas Prasetya Mulya (2012-2018). Pada tahun 2018 beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai HR Learning and Development Manager. Saat ini beliau sebagai General Manger Human Resource and General Affair.

Professional Background

He started his career as a Lecturer at Pelita Harapan University (2010-2012) and a Lecturer at Prasetya Mulya University (2012-2018). In 2018, he joined the Company as HR Learning and Development Manager. Currently, he is the General Manger of Human Resource and General Affair.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan senantiasa bersikap independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa bersikap independen dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pernyataan ini diberikan dan diperbaharui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dari tahun ke tahun, yang mana terakhir kali pernyataan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 3 Januari 2022.

Independency of Nomination and Remuneration Committee

The Company's Nomination and Remuneration Committee is always independent and able to carry out its duties independently, free from the influence of various parties who have conflict of interest with the Company. The Company's Nomination and Remuneration Committee has signed the Statement Letter of Independence stating that the Nomination and Remuneration Committee is always independent and professional in carrying out their functions and duties. This statement is provided and updated by the Nomination and Remuneration Committee every year, the latest being outlined in the Statement Letter of Independence on January 3, 2022.



Guna menjaga independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan telah sesuai dengan kriteria berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham utama Perusahaan;
2. Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan;
3. Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama; dan
4. Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi.

Perusahaan tidak memiliki anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan.

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas membantu fungsi nominasi dan remunerasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2021.

To maintain the independence of the Nomination and Remuneration Committee members, the Nomination and Remuneration Committee members from external parties comply with the following criteria:

1. Have no affiliation with the Company's members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major Shareholders of the Company;
2. Not the majority shareholder of the Company or an employee directly related to the Company's majority shareholder;
3. Not the main supplier or customer of the Company or affiliated Company or employee from/or who is directly or indirectly related to the main supplier or customer; and
4. Has no agreement with the Company or other affiliated companies as Board of Directors.

The Company does not have members of the Nomination and Remuneration Committee from outside the Company.

Trainings and/or Competence Improvement for the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee took part in several training activities to improve competence in carrying out duties of supporting nomination and remuneration functions conducted by the Board of Commissioners. The trainings and/or competence improvement joined by the Nomination and Remuneration Committee throughout 2021 are detailed below.

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training Material	Tempat dan Waktu Location and Time	Penyelenggara Organizer
Farel Sumandar Valentino Sinaga	Training	The Art and Science of Coaching	Daring, 18-28 Maret 2021 Online, March 18–28, 2021	Vanaya Indonesia
Farel Sumandar Valentino Sinaga	Training	Advanced Human Capital Accomplished (AHCA)	Daring, 3 Oktober-20 November 2021 Online, October 3–November 20, 2021	Universitas Katolik Atma Jaya

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

A. Fungsi Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perusahaan dalam menjalankan Fungsi nominasi, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, jumlah, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan evaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi.

B. Fungsi Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perusahaan dalam menjalankan Fungsi Remunerasi, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan.

Duties and Responsibilities of Nomination & Remuneration Committee

A. Nomination Function

Duties and Responsibilities of the Company's Board of Commissioners in performing the Nomination Function are as follows:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - b. Policy and criteria required in the Nomination process; and
 - c. Policy of performance evaluation for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the established benchmarks as evaluation materials.
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. Providing proposals of eligible candidates as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
5. Preparing and provide recommendation on structure, number, system and procedure of appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners.
6. Performing performance evaluation individually and collectively as Board of Directors.

B. Remuneration Function

Duties and Responsibilities of the Company's Board of Commissioners in carrying out the Remuneration Function are as follows:

1. Evaluating the Company's remuneration policy.

- Memberikan rekomendasi mengenai Kebijakan remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 29 Maret 2018. Piagam tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Secara umum, hal-hal yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah: Dasar Hukum; Tugas dan Tanggung Jawab; Komposisi dan Struktur Keanggotaan; Tata Cara dan Prosedur Kerja; Penyelenggaraan dan Keputusan Rapat; Sistem Pelaporan Kegiatan; Tata Cara Penggantian Anggota dan Masa Jabatan; serta Kerahasiaan Data dan Informasi.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejak diundangkan pada 8 Desember 2014, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, Perusahaan telah menyesuaikan ketentuan tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Kanaka Puradiredja	Ketua Head	3	3	100%
Indra Nathan Kusnadi	Anggota Member	3	3	100%
Farel Sumandar Valentino Sinaga	Anggota Member	3	3	100%

- Providing recommendations on remuneration policies (including facilities and allowances) for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company, taking into account financial performance, individual work performance, fairness against peer groups, added value for shareholders, consideration of the Company's long-term goals and strategies.
- Carrying out other tasks related to remuneration policies in accordance with the applicable regulations.

Nomination and Remuneration Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee has been Equipped with the work guidelines specified in the Nomination and Remuneration Committee Charter on March 29, 2018. The Charter is prepared based on applicable laws and regulations and is regularly reviewed.

In general, matters regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter are: Legal Basis, Duties and Responsibilities, Membership Composition and Structure, Work System and Procedures, Holding and Decisions of Meetings, Activity Reporting System, Procedures for Member Replacement and Term of Office, and Data and Information Confidentiality.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Since law enforcement on December 8, 2014, based on POJK No. 34/POJK.04/2014, the Company has complied with these provisions by establishing Nomination and Remuneration Committee Meeting. In 2021, there were three meetings with attendance frequency as follows:

**Pelaksanaan Tugas Anggota Komite Audit di Tahun
2021 Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Piagam
(Charter) Komite Audit**

Di tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Implementation of the Duties of Members of Audit
Committee in 2021 as Outlined in the Charter of Audit
Committee**

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee has carried out several activities in accordance with the duties and responsibilities and authorities of the Committee as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. The Nomination and Remuneration Committee always provides advice and recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

**Informasi tentang Komite Lain yang Dimiliki
Perusahaan dalam Rangka Mendukung Fungsi dan
Tugas Direksi dan/atau Komite yang Mendukung
Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris**
**INFORMATION ON THE COMPANY'S OTHER COMMITTEES TO SUPPORT
THE FUNCTIONS AND DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/
OR COMMITTEES SUPPORTING THE FUNCTIONS AND DUTIES OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS**

Tidak terdapat komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

There are no other committees that the Company has to support the functions and duties of the Board of Directors and/or committees supporting the functions and duties of the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan, Perusahaan mengangkat Henry Rizard Rumopa S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.



HENRY RIZARD RUMOPA

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Corporate Secretary has an important role in facilitating communication among the Company's organs. One of the responsibilities carried is to keep up to date with the development of regulations that apply in the capital market.

Corporate Secretary Official

Referring to the FSA Regulation No. 35/POJK.04/2015 of December 8, 2014 on Corporate Secretary, the Company appointed Henry Rizard Rumopa, S.H., M.H. as Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 of October 19, 2017.

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 36 tahun.

Indonesian citizen, residing in Jakarta, Indonesia. Currently 36 years old.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.143/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia tanggal 19 Oktober 2017.

Took office as Corporate Secretary since 2017 based on the Decree of the Board of Directors No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 on Appointment of Corporate Secretary of PT Mora Telematika Indonesia on October 19, 2017.

Riwayat Pendidikan

Beliau mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum dari universitas Katholik Atmajaya Jakarta (2007) dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2010).

Educational Background

He received a Bachelor of Laws degree from Atmajaya Catholic University Jakarta in 2007 and a Masters in Law from the University of Indonesia in 2010.

Riwayat Pekerjaan

Beliau memulai karirnya sebagai Legal Staff di Kantor notaris Misahardi Wilamarta pada tahun 2007, kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014- 2016), Senior Legal Manager (2016-2017), dan General Manager Corporate Legal (2017).

Professional Background

He started his career as a Legal Staff at the Misahardi Wilamarta notary office in 2007. He then joined the Company as a Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017), and General Manager of Corporate Legal (2017).

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan lainnya.

He has no other concurrent positions.

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah mengikuti workshop/ pelatihan/seminar sepanjang 2021 guna meningkatkan kompetensinya, antara lain:

Corporate Secretary Training and/or Competency Development

The Corporate Secretary has participated in workshops/ training/seminars throughout 2021 to improve competence, covering:

Pelatihan/Training/Seminar Training/Seminar	Tempat dan Waktu Venue and Time	Penyelenggara Organizer
Pendalaman Peraturan OJK No. 42/ POJK. 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan In-depth Discussion of FSA Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliation Transaction and Transaction of Conflict of Interest	Daring, 25 Maret 2021 Online, March 25, 2021	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
Be More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking Be More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking	Daring, 30 Maret 2021 Online, March 30, 2021	ICSA
Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan Duties and Functions of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Nomination and Remuneratin Committee, Audit Committee, and Corporate Secretary	Daring, 30 April 2021 Online, April 30, 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik In-depth Discussion of the FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of the GMS of Limited Liability & FSA Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Holding of the GMS of Limited Liability through Electronic Ways	Daring, 27 Mei 2021 Online, May 27, 2021	ICSA
From A to Z Media Relation, The Mutually Beneficial Relationship From A to Z Media Relation, The Mutually Beneficial Relationship	Daring, 17 Juni 2021 Online, June 17, 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal In-depth Discussion of FSA Regulation No. 3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Field of Capital Market	Daring, 23 Juni 2021 Online, June 23, 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha In-depth Discussion of POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities	Daring, 22 Juli 2021 Online, July 22, 2021	ICSA
Powerful Writing for Media Communication Powerful Writing for Media Communication	Daring, 28 Juli 2021 Online, July 28, 2021	ICSA
Stock Split, Dividen Saham Saham Bonus dan Buyback Saham Stock Split, Stock Dividend, Bonus Stock, and Stock Buyback	Daring, 19 Agustus 2021 Online, August 19, 2021	ICSA
Tata Kelola Komunikasi Corporate Secretary di tengah Direksi dan Dewan Komisaris Management of Corporate Secretary Communication among the Board of Directors and the Board of Commissioners	Daring, 9 September 2021 Online, September 9, 2021	ICSA
How to Create a Solid Business Contingency Plan How to Create a Solid Business Contingency Plan	Daring, 11 November 2021 Online, November 11, 2021	ICSA
Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Keberlanjutan Introduction to ESG Aspects as One of Supports of Sustainable Business	Daring, 19 November 2021 Online, November 19, 2021	ICSA

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengikuti dan menginformasikan dengan baik mengenai perkembangan pasar modal, ojk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal serta bertindak sebagai penghubung antara Perusahaan, regulator dan publik;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- Properly follow and inform the development of the capital market, OJK, and the applicable law and regulations especially in the field of capital market, and act as a liaison between the Company, regulators, and the public;
- Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector;
- Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, ketersediaan informasi pada Situs Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas terkait waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Piagam Sekretaris Perusahaan

Guna menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka diperlukan Piagam Sekretaris Perusahaan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Sekretaris Perusahaan telah berlaku efektif sejak 29 Maret 2018. Cakupan Piagam Sekretaris Perusahaan terdiri dari:

1. Landasan Hukum
2. Ketentuan Umum
3. Persyaratan Sekretaris Perusahaan
4. Pengangkatan dan Pemberhentian
5. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
6. Program Pengembangan
7. Nilai Kerja
8. Pelaporan

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan di Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah melakukan korespondensi terkait pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal yang berlaku kepada otoritas dan lembaga pasar modal, diantaranya mengenai:

- Laporan bulanan data utang;
- Laporan keuangan tahunan dan triwulan;
- Laporan tahunan;
- Laporan rencana dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham berikut iklan pengumumannya; dan
- Laporan keterbukaan informasi berkenaan dengan informasi yang perlu disampaikan kepada publik.

- Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company Website;
 - Timely submission of reports to relevant authorities;
 - Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
 - Implementation and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and
 - Implementation of orientation programs for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- d. As a liaison between the Company and shareholders and other stakeholders. Piagam Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Charter

In order to carry out roles and responsibilities properly, Corporate Secretary Charter is required as a guideline to carry out its duties and authorities in accordance with applicable laws and regulations.

The Corporate Secretary Charter is effective since March 29, 2018. The scope of the Corporate Secretary Charter consists of:

1. Legal Basis
2. General Provisions
3. Requirements of Corporate Secretary
4. Appointment and Termination
5. Duties and Responsibilities of Corporate Secretary
6. Development Program
7. Work Value
8. Reporting

Implementation of Duties of Corporate Secretary in 2021

Throughout 2021, Corporate Secretary has conducted correspondence regarding compliance with capital market regulations with the capital market authorities and institutions, includes:

- Monthly debt data report;
- Annual and quarterly financial report;
- Annual report;
- Report on the plan and agenda of the General Meeting of Shareholders and the advertisement announcement; Material reports and public expose results; and
- Information disclosure reports relating to information that requires public disclosure.

Unit Audit Internal INTERNAL AUDIT UNIT

Pembentukan Unit Audit Internal Perusahaan merujuk pada Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (sebelumnya Peraturan No. IX.I.7, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008).

Perusahaan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.56/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perusahaan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Profil Kepala Audit Internal



FATIMAH
Ketua Audit Internal
Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal.

Riwayat Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (1997).

The establishment of the Company's Internal Audit Unit refers to the Regulation of the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter (formerly Regulation No. IX.I.7, Appendix to the decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-496/BL/2008 dated November 28, 2008).

The Company has an Internal Audit Unit Charter as required in POJK No.56/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter. It is based on the Internal Audit Unit Charter No. 142/MTI/PDDIR/ 2017 dated October 19, 2017 signed by the Director and approved by the Company's Board of Commissioners. Based on the Decree of the Directors of the Company No. 203/MTI/PDDIR/X/2020 dated October 7, 2020 concerning the Appointment of the Internal Audit Unit which has been approved by the Board of Commissioners.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit

In accordance with the Internal Audit Charter, the Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Profile of the Head of Internal Audit

An Indonesian Citizen, residing in Bekasi, Indonesia. Currently, she is 51 years old.

Took office as the Company's Head of Internal Audit based on the Decree of the Board of Directors of the Company No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 on October 7, 2020 on the Assignment of Internal Audit Unit.

Educational Background

She obtained her Bachelor of Economics in Accounting from the School of Economics in 1997.

Riwayat Pekerjaan

Beliau memulai karirnya sebagai Co Assistant di RS Ridwan Maureksa dan Klinik Yadika (1992-1994), Accounting di PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai Accounting Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing & Collection Senior Manager (2010-2013), dan Finance & Accounting General Manager PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), dan kembali bergabung dengan Perusahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal (2020-saat ini).

Beliau memiliki kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal melalui beberapa sertifikasi profesi yang dimiliki, yaitu Risk Based Audit (2021), Remote Auditing (2021), Financial Auditing for Internal Auditors (2021) dan Magister Manajemen Risiko (2021)

Professional Background

She started her career as a Co Assistant at Ridwan Maureksa Hospital and Yadika Clinic (1992-1994), Accounting at PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Later, she joined the Company as Accounting Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing & Collection Senior Manager (2010-2013), and Finance & Accounting General Manager of PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager of PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), and rejoined the Company as Head of the Internal Audit Unit (2020-present).

She obtained qualification and certification of internal audit profession through several profession certifications, namely Risk Based Audit (2021), Remote Auditing (2021), Financial Auditing for Internal Auditors (2021), and Master in Risk Management (2021).

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi Audit Internal

Untuk memastikan pelaksanaan audit internal yang efektif, Perusahaan telah menetapkan standar kualifikasi staf Audit Internal, antara lain:

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dalam bidang dan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib memenuhi kode etik audit internal;
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal terkecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip-prinsip GCG; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Perusahaan mendorong Audit Internal untuk memiliki sertifikasi profesi yang diharapkan mampu memberikan fondasi bagi pengembangan audit internal yang sesuai dengan yang diharapkan. Per 31 Desember 2021, kualifikasi Auditor Internal Perusahaan berupa sertifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Qualification of Internal Audit Profession

To ensure an effective internal audit implementation, the Company has established qualification standards for the Internal Audit staff, among others:

1. Have the integrity and professional behavior, be independent, honest, and objective in performing its duties;
2. Possess knowledge and experience on technical audit and other relevant disciplines in its field and duties;
3. Possess knowledge on the laws and regulations in the field of capital market and other related laws and regulations;
4. Have the ability to interact and communicate, both orally and in writing effectively;
5. Shall comply with code of conduct of the internal audit;
6. Shall maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of the internal audit unit unless required by law or court decision;
7. Understand GCG principles; and
8. Willing to improve knowledge, expertise, and professionalism ability in a continuous manner.

The Company encourages Internal Audit to have a professional certification which is expected to provide a foundation for the development of internal audit as expected. As of December 31, 2021 the qualification of the Company's Internal Auditor can be seen in the table below:

Nama dan Jenis Sertifikasi Name and Type of Certification	Jumlah Auditor Internal yang Memiliki Number of Certified Internal Audits
Remote Auditing	6 orang/people
Risk-based Auditing	6 orang/people

Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Audit Internal

Audit Internal telah mengikuti workshop/pelatihan/seminar sepanjang 2021 guna meningkatkan kompetensinya, antara lain:

Pelatihan/Training/Seminar Training/Seminar	Tempat dan Waktu Venue and Time	Penyelenggara Organizer
Fraud Detection Investigation for Internal Audit Fraud Detection Investigation for Internal Audit	Daring, 19-20 April 2021 Online, April 19–20, 2021	Institute of Internal Auditors (IIA)
Financial Auditing for Internal Auditors Financial Auditing for Internal Auditors	Daring, 24-25 Mei 2021 Online, May 24–25, 2021	IIA
Internal Audit for New Internal Auditor Internal Audit for New Internal Auditor	Daring, 12-13 Agustus 2021 Online, August 12–13, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Analyzing and Improving Business Process Analyzing and Improving Business Process	Daring, 23-24 Agustus 2021 Online, 23–24 August, 2021	IIA
Data Analitik untuk Auditor Internal Analytical Data for Internal Audit	Daring, 29-30 November 2021 Online, November 29–30, 2021	YPIA

Trainings and/or Competence Improvement of Internal Audit

Audit Internal had participated in workshops/trainings/seminars throughout 2021 in order to improve its competence, including:

Kedudukan Unit Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Unit Audit Internal merupakan tim pemeriksa independen yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan ditunjuk serta diberhentikan atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Kepala Audit Internal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Unit Audit Internal.

Position of Internal Audit in the Company's Structure

The Internal Audit Unit is an independent audit team led by a Head of Internal Audit who reports directly to the President Director and is appointed and dismissed with the approval of the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Head of Internal Audit is assisted by the Internal Audit Unit.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Unit Audit Internal

Ruang lingkup pekerjaan Unit Audit Internal adalah melakukan audit pada seluruh aspek kegiatan Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya operasional dan kepentingan Perusahaan, para pemegang saham, serta stakeholder. Dalam pelaksanaan audit, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kesesuaian dengan standar, juga mencakup efektivitas struktur pengendalian internal Perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

The scope of work of the Internal Audit Unit is to conduct audit on all aspects of the Company's activities which are expected to directly or indirectly affect the implementation of the operations and interests of the Company, shareholders, and stakeholders. In conducting audits, aside from examining and evaluating compliance with the standards, it also covers the effectiveness of the Company's internal control structure so as to support optimal analysis in assisting the decision making process by management.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan secara umum meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

As stated in the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Company's Internal Audit Unit generally include:

1. Develop and implement the annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and internal control system and risk management system according to the company's policies;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Adapun wewenang Unit Audit Internal adalah:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

3. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Provide suggestions for improvement and information objective about the activities that are checked on all management level;
5. Make a report on audit results and submit the report to the President Director and the Board Commissioner;
6. Monitor, analyze, and report on implementation follow-up improvements that have been implemented;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Develop a program to evaluate the quality of activities the internal audits it performs; and
9. Carry out special inspections if necessary.

The powers of the Internal Audit Unit are:

1. Access all relevant information related with its duties and functions;
2. Communicating directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee;
3. Hold regular and incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee; and
4. Coordinate its activities with other activities external auditors.



- Pembangunan tower di Papua pada Proyek Palapa Ring Timur.
Tower construction in Papua of the East Palapa Ring Project.

Kode Etik Unit Audit Internal

Standar atau Kode etik Unit Audit Internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Menunjukkan loyalitas terhadap organisasi namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
3. Dapat menahan diri dan tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan organisasi atau kegiatan yang dapat meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya secara objektif;
4. Dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasi yang dapat atau patut dapat memengaruhi pertimbangan profesinya;
5. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
6. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya;
7. Dilarang untuk menggunakan informasi rahasia:
 - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi,
 - Melanggar hukum, atau
 - Yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasi.
8. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat:
 - Mendistorsi laporan atau kegiatan yang ditelaah, atau
 - Menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan; dan
10. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

Piagam Audit Internal

Dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan, Unit Audit Internal diharapkan dapat meningkatkan nilai dan perbaikan operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.

Internal Audit Unit Code of Ethics

Company Internal Audit Unit Standards or Code of Ethics is as follows:

1. Demonstrate honesty, objectivity and sincerity in carrying out their duties and responsibilities;
2. Shows loyalty to the organization but does not may be consciously involved in activities which deviates or violates the law;
3. Can hold back and not get involved with activities which creates a conflict of interest suspicious organization or activity ability to be able to carry out tasks and his professional responsibilities objectively;
4. It is forbidden to receive anything in any form from employees, customers, suppliers, or business partners organizations that can or should be able to influence professional considerations;
5. Only perform services that can be completed by using professional competence owned;
6. Be careful and wise in using information obtained in the performance of their duties;
7. It is forbidden to use confidential information:
 - For personal gain
 - Breaking the law, or
 - Which can cause harm to organization
8. In reporting the results of their work, the internal auditor must disclose all important facts that he knows, namely facts which, if not disclosed could:
 - Distort reports or activities under review, or
 - Covering up any unlawful practices law
9. Always improve competence and effectiveness and the quality of the implementation of their duties, Internal auditor must attend continuing professional education; and
10. Uphold the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competence.

Internal Audit Charter

In order to improve the effectiveness of risk management and corporate governance, the Internal Audit Unit is expected can increase value and improve operational The company, through a systematic approach with how to evaluate and improve effectiveness risk management, control and governance processes Company.

Agar Unit Audit Internal dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka diperlukan Piagam Audit Internal sebagai pedoman bagi Unit Audit Internal Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Unit Audit Internal Perusahaan telah berlaku efektif dan terakhir diperbarui pada 1 Juli 2021. Cakupan Piagam Audit internal terdiri dari:

1. Visi, Misi, dan Tujuan
2. Wewenang
3. Tanggung Jawab
4. Ruang Lingkup
5. Kedudukan dalam Organisasi Perusahaan
6. Standar Pelaksanaan Pekerjaan

Sepanjang tahun 2021, Piagam Audit Internal menjadi acuan dalam meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal pada Tahun 2021

Audit Internal setiap tahun membuat Perencanaan Audit Tahunan yang dibagi secara kuartal. Sepanjang tahun 2021, Unit Audit Internal telah melaksanakan 15 tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengecekan dan *monitoring* terhadap prosedur dan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penugasan tersebut mencakup kegiatan audit, *review*, evaluasi, dan audit investigatif. Selain itu, Unit Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Ringkasan kegiatan Internal Audit sebagai berikut:

Sub Audit Sub Audit	Audit Audit	Peninjauan Review	Evaluasi Evaluation	Audit Investigatif Investigative Audit	Jumlah Total	
Keuangan Financial		3	5	3	-	11
Operasional Operational		2	-	-	-	2
Investigasi Investigative		-	-	-	2	2
Jumlah Total		5	5	3	2	15

So that the Internal Audit Unit can carry out its role and responsibility as it should be, it is necessary Internal Audit Charter as a guideline for the Audit Unit Internal Company to carry out the duties and authority in accordance with the laws and regulations applicable.

The Company's Internal Audit Unit Charter has been effective and last updated on July 1, 2021. Scope of the Charter Internal audit consists of:

1. Vision, Mission and Goals
2. Authority
3. Responsibility
4. Scope
5. Position in Company Organization
6. Work Implementation Standards

Throughout 2021, the Internal Audit Charter will become reference in improving the effectiveness of risk management and corporate governance.

The Implementation of Internal Audit Duties in 2021

The Annual Internal Audit prepares Annual Audit Plan, divided quarterly. Throughout 2021, the Internal Audit Unit had carried out 15 tasks and responsibilities in checking and monitoring the procedures and internal control system in accordance with the prevailing regulations. The assignment covered activities of auditing, reviewing, evaluating, and investigative auditing. In addition, the Internal Audit Unit held 8 meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Audit Committee. Internal Audit's activities are summarized below:

Sistem Pengendalian Internal INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Sistem pengendalian internal di Perusahaan dilaksanakan melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengelola dan mengendalikan laporan keuangan, distribusi dan pelaksanaan operasional. Perusahaan juga melaksanakan peninjauan berkala operasi masing-masing unit usaha untuk memastikan bahwa tingkat pengendalian internal yang didefinisikan oleh sistem yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan diterapkan secara efektif.

Tujuan dari sistem pengendalian Internal adalah memberikan keyakinan (*assurance*) kepada pemangku kepentingan bahwa segala sistem, prosedur, kaidah dan norma dijalankan dengan tepat dan benar. Pengendalian yang efektif akan meningkatkan keterandalan dari informasi keuangan, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan operasional, serta kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dapat mengarahkan Perusahaan guna mencapai *Good Corporate Governance* (GCG), yang diwujudkan dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Kewajaran.

Penerapan sistem pengendalian internal meliputi;

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Secara umum pengendalian internal dijalankan oleh Unit Audit Internal sesuai dengan perintah dari Direktur Utama dengan scope audit berbasis keuangan, operasional, kepatuhan, dan risiko. Dalam melakukan audit, informasi ditelaah kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit yang berlaku secara umum sehingga mampu meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dilanggar oleh organ maupun unit-unit kerja di dalam Perusahaan.

Sistem Pengendalian Operasional dan Keuangan

Dalam organ tata kelola Perusahaan, pengendalian operasional dan keuangan Perusahaan telah diselenggarakan secara berkesinambungan, merujuk kepada kerangka kerja dari *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commissions* (COSO).

Financial and Operational Control, as well as Compliance with Other Laws and Regulations

The Company's internal control system is implemented through the application of *Standard Operating Procedures* (SOP) to manage and control financial reports, distribution and operational implementation. The Company also carries out periodic reviews of each other's operations business units to ensure that the level of control internally defined by the system according to generally accepted and effectively implemented standards.

The objectives of the Internal control system are provide assurance to stakeholders it is in the interest that all systems, procedures, rules and norms are implemented properly and correctly. Control effective will increase the reliability of the information finance, efficiency, and effectiveness of operational activities, and the Company's compliance with laws and regulations applicable. Internal control can direct Companies to achieve *Good Corporate Governance* (GCG), which is realized by the principle of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

The implementation of the internal control system includes;

1. Control Environment (*Control Environment*);
2. Risk Assessment (*Risk Assessment*);
3. Control Activities;
4. Information and Communication (*Information and Communication*) Communications); and
5. Monitoring (*Monitoring*).

In general, internal control is carried out by the Internal Audit Unit in accordance with orders from the President Director with the scope of audits based on financial, operational, compliance, and risk. In conducting an audit, information reviewed and then tested according to standards set in the conduct of audits generally applicable so as to be able to ensure that the internal control system is not violated by the organ as well as work units within the Company.

Operational and Financial Control System

In the corporate governance organs, controlling The Company's operations and finances have been held on an ongoing basis, referring to to the framework of the *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commissions* (COSO).

Berdasarkan kerangka kerja COSO, ada 5 elemen Sistem Pengendalian Internal yang telah diadopsi oleh Perusahaan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pengawasan

Di tahun 2021, Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan. Melalui lingkungan pengendalian yang mendukung, pengelolaan risiko yang berkesinambungan, perangkat SOP yang memadai dan didukung sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi dan teknologi yang andal serta fungsi pengawasan yang baik, Perusahaan yakin dapat melakukan perbaikan operasional secara terus-menerus.

Tinjauan dan Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan dilakukan oleh Unit Audit Internal. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan diaplikasikan secara efektif dan efisien dalam Perusahaan, maka Manajemen Perusahaan sudah memutuskan untuk dilaksanakan pemeriksaan atau audit atas beberapa fungsi dan divisi yang ada di Perusahaan.

Pelaksanaan audit diantaranya adalah *compliance* audit/*review* atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses audit internal dilakukan oleh seorang Auditor Internal yang berada di bawah Unit Audit Internal.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Melalui *review* dan evaluasi/tinjauan yang telah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Based on the COSO framework, there are 5 System elements Internal Controls that have been adopted by the Company, that is:

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Information and Communication
4. Control Activities
5. Supervision

In 2021, the Internal Control System that implemented in the Company has been in accordance with the needs. Through a supportive control environment, sustainable risk management, tools Adequate SOPs and supported by human resources competent, reliable information systems and technology as well as a good supervisory function, the Company believes it can carry out continuous operational improvement.

Review and Evaluation of System Effectiveness Internal control

Evaluation of the effectiveness of the implementation of the control system The Company's internal audit is carried out by the Internal Audit Unit. To ensure that the internal control system The company is applied effectively and efficiently within the Company, then the Company's Management has decide to carry out an examination or audit on several functions and divisions in the Company.

The audit implementation includes compliance of audit/*review* with the implementation of policies and procedures that have been determined by the Company. In practice, the process Internal audit is carried out by an Internal Auditor who is under the Internal Audit Unit.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Adequacy of Internal Control System

Through reviews and evaluations / reviews that have been carried out as described above, the Board of Directors and the Board of The Commissioner stated that the Internal Control System implemented in the Company is in accordance with company needs.

Sistem Manajemen Risiko RISK MANAGEMENT SYSTEM

Gambaran Umum mengenai Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Perusahaan senantiasa melakukan proses manajemen risiko guna mengantisipasi risiko-risiko usaha yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan melakukan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Sejak awal berdiri, Perusahaan telah membangun Sistem Manajemen Risiko dan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha. Sistem ini dijalankan sesuai dengan arahan Direksi dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, memadai, dan sesuai dengan karakteristik kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan terus menerus melakukan penguatan Sistem Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh unit Audit Internal, yang merupakan unit pendukung pencapaian target yang telah ditentukan untuk menghasilkan kualitas aset yang sehat. Terdapat beberapa aspek penerapan manajemen risiko untuk memastikan pengawasan risiko yang berkelanjutan, yaitu:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan dan pengembangan secara terus menerus atas kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang jelas dan menyeluruh; dan
3. Pengawasan agar proses identifikasi pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko dijalankan sesuai dengan perkembangan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, terintegrasi, dan efektif dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Membantu manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan yang tepat dan berbasis risiko;
3. Membantu dalam menetapkan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur;
4. Menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar; dan
5. Mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang yang ada.

General Outlook on the Issuer or Public Company's Risk Management System

The Company continuously conduct processes of risk management to anticipate business risks that may cause the emergence of negative impacts on the Company's business activities. In managing the risks, the Company conducts its activities in accordance with the policies, standards, and operational procedures, stipulated by the Company.

Since its establishment, the Company has built a Risk Management System and it has been continuously developed in line with the growth of business. This system is operated in accordance with the direction from the Board of Directors and under the supervision of the Board of Commissioners to ensure an application that is effective, sufficient, and in proportion to the complex characters and risk profiles of the Company.

Similar to previous years, the Company continuously reinforces the Risk Management System, conducted by the Internal Audit unit, which is a supporting unit to achieve the targets that have been stipulated to generate healthy and quality assets. There are several aspects of risk management application to ensure sustainable risk management, namely:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Continuous stipulation and development of policies and procedures for clear and comprehensive risk management; and
3. Supervision to ensure processes of measurement and monitoring identification and risk control are implemented in accordance with the growth of business and prevailing legislation and regulation.

The Company continuously strives to apply comprehensive, integrated, and effective risk management with the purposes of:

1. Supporting business implementation so it is in line with the Company's intentions and objectives;
2. Aiding the management by providing information that can be used to make the right and riskbased decisions;
3. Aiding in determining sufficient backup to anticipate measurable risks;
4. Avoiding potential losses that are relatively larger; and
5. Identifying and maximizing existing opportunities.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Industri Perseroan

RISK RELATED TO THE COMPANY'S BUSINESS AND INDUSTRIAL ACTIVITIES

1. RISIKO UTAMA

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Apabila terjadi kegagalan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perusahaan, kemampuan Perusahaan untuk memulihkan layanan mungkin tertunda atau terbatas dengan cara lain.

Sistem kabel serat optik bawah laut Perusahaan menyangga sebagian besar lalu lintas Perusahaan. Jaringan bawah laut Perusahaan terpapar risiko yang bersifat inheren bagi sistem telekomunikasi serat optik bawah laut yang kompleks dan berskala besar (yang ditetapkan Perusahaan sebagai sistem yang menyediakan solusi konektivitas tanpa hambatan dalam berbagai rute lalu lintas data, antar negara dan benua), termasuk cacat desain, kerusakan peralatan, pelanggaran keamanan, virus komputer, dan kerusakan fisik pada kabel bawah laut dan peralatan. Pengoperasian jaringan bawah laut Perusahaan tergantung pada kemampuan Perusahaan menghindari dan memitigasi gangguan layanan atau penurunan kapasitas bagi pelanggan. Kecuali diselesaikan sebagaimana mestinya, gangguan layanan atau masalah kinerja yang disebabkan oleh kerusakan fisik pada sistem kabel bawah laut akibat bencana alam, aktivitas gunung berapi, ketidakstabilan geologis, kehilangan daya, jaring ikan, jangkar, atau berbagai faktor dan alasan lainnya, dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan Perusahaan serta menyebabkan Perusahaan kehilangan pelanggan atau meningkatkan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Meskipun struktur jaringan yang digunakan dalam sistem jaringan bawah laut Perusahaan dirancang untuk meminimalkan gangguan layanan dengan mengalihkan lalu lintas, pengalihan lalu lintas tersebut mungkin tidak selalu dapat dilakukan atau berhasil dilakukan. Dalam hal terjadi kegagalan atau kerusakan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perusahaan, Perusahaan mungkin membutuhkan waktu yang signifikan untuk melakukan perbaikan atau memulihkan layanan, yang dapat menyebabkan gangguan layanan berkepanjangan atau penurunan kapasitas.

Mengingat sebagian besar layanan Perusahaan bersifat kritis bagi bisnis sebagian besar pelanggan Perusahaan, seandainya suatu sistem kabel mengalami serangkaian pemadaman atau pemadaman yang berkepanjangan, dapat terjadi hilangnya kepercayaan terhadap sistem kabel tersebut. Apabila terjadi kegagalan dan Perusahaan gagal memperoleh fasilitas alternatif, sebagian layanan komunikasi yang ditawarkan Perusahaan kepada pelanggan dapat terganggu, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, kinerja operasi, atau likuiditas Perusahaan.

1. KEY RISK

Fiber Optic Cable Network Interference Risk

In the event of a failure in the fiber optic cable system the Company's underwater, the Company's ability to restoring service may be delayed or limited in another way.

The Company's underwater fiber optic cable system supports most of the Company's traffic. Underwater network Companies are exposed to risks inherent to the system complex underwater fiber optic telecommunications and large scale (which the Company defines as a system which provides seamless connectivity solutions in various data traffic routes, between countries and continents), including design defects, equipment failures, violations security, computer viruses and physical damage to cables underwater and equipment. Bottom network operation Company sea depends on the Company's ability avoid and mitigate service interruptions or reduced capacity for customers. Unless resolved as appropriate, service interruptions or problems performance caused by physical damage to the system submarine cables due to natural disasters, mountain activities fiery, geological instability, loss of power, net fish, anchors, or various other factors and reasons, can reduce trust in Company services and cause the Company to lose customers or increase the difficulty of attracting customers new. Although the network structure used in The Company's underwater network system is designed for minimize service interruptions by diverting traffic traffic, the diversion of such traffic may not always can be done or can be done. In case it happens failure or damage in the fiber optic cable system Underwater Company, Company may need significant time to make repairs or restore service, which may cause interruptions prolonged service or reduced capacity.

Given that most of the Company's services are critical to the business of most of the Company's customers, If a cable system undergoes a series of prolonged blackout or blackout, there may be a loss of trust in the system the cable. In the event of a failure and the Company failed to obtain alternative facilities, some services communications offered by the Company to customers may be disrupted, which may have an impact material harm to business activities, position financial, operating performance or liquidity of the Company.

2. RISIKO USAHA

Risiko Perizinan

- A. Kegiatan usaha Perusahaan mungkin mengalami dampak merugikan apabila Perusahaan tidak mampu memperpanjang izin yang dimilikinya atau menerapkan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi dasar kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan mengandalkan izin dan perjanjian lainnya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk menetapkan dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektual Perjanjian terkait teknologi serta produk dan layanan yang digunakan dalam operasi Perusahaan. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh atau tetap memperoleh lisensi dari pihak-pihak ketiga tersebut dengan ketentuan yang wajar, atau sama sekali.

Selain itu, akibat pesatnya perubahan teknologi, Perusahaan mengembangkan produk dan layanan Perusahaan sendiri dan juga mengandalkan teknologi yang dikembangkan atau dilisensikan oleh pihak ketiga. Akan tetapi, hak atas kekayaan intelektual Perusahaan, atau hak-hak para pemasok Perusahaan, dapat disanggah atau dibatalkan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan memperoleh lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, termasuk penyedia konten dan perangkat lunak. Selain itu, dari waktu ke waktu, Perusahaan dan mitra usaha Perusahaan, kepada siapa Perusahaan mengalihdayakan sebagian layanan Perusahaan, mungkin secara tidak sengaja melanggar hak pihak ketiga tersebut atau gagal membayar royalti kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat menyebabkan pengajuan gugatan terhadap Perusahaan. Gugatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sering kali diajukan dalam industri komunikasi dan hiburan, dan Perusahaan mungkin merupakan pihak dalam tuntutan hukum yang memepersangkakan bahwa layanan atau teknologi Perusahaan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain.

Selain itu, klaim atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat mengharuskan Perusahaan untuk mengadakan perjanjian royalti atau lisensi dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, menimbulkan liabilitas moneter yang substansial, atau Perusahaan mungkin dilarang, baik untuk sementara waktu atau seterusnya, menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan Perusahaan harus mengubah praktik usaha atau

2. BUSINESS RISK

Licensing Risk

- A. The Company's business activities may experience detrimental impact if the Company is unable extend its license or apply intellectual property rights on which to base the Company's business activities.

The company relies on permits and other agreements with employees, customers, suppliers, and parties others to establish and defend the rights on intellectual property Technology related agreements and the products and services used in Company operations. The company may not be able to obtain or continue to obtain licenses from parties the third with reasonable conditions, or at all.

In addition, due to the rapid changes in technology, Companies develop products and services Own company and also rely on technology developed or licensed by a third party. However, the Company's intellectual property rights, or the rights of the Company's suppliers, may denied or cancelled. In addition, in carrying out its business activities, the Company obtains a license to use intellectual property rights third parties, including content and device providers soft. In addition, from time to time, the Company and the Company's business partner, to whom is the Company outsource some of the Company's services, may inadvertently violate the rights of parties third party or fail to pay royalties to the third party, which may cause filing a lawsuit against the Company. lawsuit frequent infringement of intellectual property rights filed in the communications and entertainment industry, and The company may be a party to a lawsuit laws that suspect that services or Company technology violates property rights intellectuals of others.

In addition, claims for infringement of property rights intellectual property may require the Company to enter into a royalty or license agreement with unfavorable terms, giving rise to substantial monetary liability, or the Company may be barred, either temporarily or so on, use intellectual property rights concerned. This can cause Companies must change business practices or Company offerings and limit capabilities Companies to compete effectively. Even Even an unsuccessful lawsuit

penawaran Perusahaan dan membatasi kemampuan Perusahaan untuk bersaing secara efektif. Bahkan gugatan yang tidak berhasil pun dapat memakan waktu dan biaya terkait upaya pembelaan, dan dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen Perusahaan dari kegiatan usaha Perusahaan. Kerugian signifikan yang ditimbulkan dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan prospek Perusahaan.

- B. Perusahaan tunduk pada lingkungan peraturan yang kompleks dan tidak pasti, yang mungkin meningkatkan biaya Perusahaan atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, dan Perusahaan menghadapi biaya kepatuhan dan pembatasan yang lebih luas dibandingkan sebagian besar pesaing Perusahaan.

Layanan komunikasi data dan pita lebar yang ditawarkan Perusahaan tunduk pada peraturan yang lebih ekstensif dibandingkan sebagian besar industri lain. Perusahaan tunduk pada pengawasan dan peraturan ekstensif di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kominfo") dan badan pemerintah terkait lainnya. Peraturan tersebut termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Peraturan tersebut juga tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perusahaan, pesaing Perusahaan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perusahaan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Perubahan pesat dalam teknologi dan kondisi pasar menyebabkan perubahan dalam cara Pemerintah mengelola layanan telekomunikasi dan Internet. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perusahaan. Peraturan baru dapat mengenakan biaya tambahan atau persyaratan modal, mempersyaratkan kewajiban pelaporan baru, menghambat peluang pendapatan, dan mungkin menghambat kemampuan Perusahaan untuk menyediakan layanan dalam cara yang menarik bagi pelanggan Perusahaan, serta mungkin menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau memperoleh lini bisnis baru.

can eat up time and costs associated with defense efforts, and can divert attention and management resources Company from the Company's business activities. Loss significant effect that can cause adverse impact on business activities, performance operations, and prospects of the Company.

- B. The Company is subject to the regulatory environment complex and uncertain, which is possible increase the Company's costs or in other ways have a detrimental impact on activities the Company's business, and the Company faces wider compliance costs and restrictions compared to most of the Company's competitors.

Data and broadband communication services offered Companies are subject to more extensive regulations compared to most other industries. Company subject to extensive supervision and regulation under various Indonesian authorities, including the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia ("Kominfo") and government agencies other related. These regulations include Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications as amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Job Creation Law"). These regulations are also subject to on changes from time to time. Regulations and government supervision, as well as changes in laws, regulations, or government policies in the future (or changes in the interpretation of regulations applicable laws and regulations) which can affect the Company, the Company's competitors or industry in general, has a significant impact strong on the way the Company operates today and in the future. Rapid changes in technology and market conditions cause changes in the way The government manages telecommunications services and Internet. Adoption of laws or regulations new, or changes in the legal framework existing at the central, regional, or local level, can require significant and costly adjustments high, which can have a detrimental impact to the Company's business plan. New rules may charge additional fees or requirements capital, requires new reporting obligations, impede revenue opportunities, and may hinder the Company's ability to provide services in a way that appeals to the Company's customers, as well as possibly creating barriers to entering new markets or obtaining new line of business.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang merugikan dapat menempatkan kegiatan usaha Perusahaan dalam sejumlah risiko. Peraturan mungkin membatasi operasi Perusahaan dan memberikan tekanan persaingan lebih jauh terhadap Perusahaan, termasuk:

- aturan mengenai perizinan, persetujuan, pernyataan, dan izin, sertifikat, dan pemberitahuan lainnya;
- aturan mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, dan e-niaga;
- aturan sehubungan dengan penyedia layanan internet, jaringan tetap lokal dan jaringan tetap tertutup; dan
- persyaratan lainnya yang mencakup berbagai bidang operasional, seperti perlindungan lingkungan hidup, retensi data, dan standar teknis.

Kegagalan memenuhi peraturan yang berlaku saat ini atau di masa depan dapat menyebabkan pengenaan berbagai sanksi atas Perusahaan, termasuk denda. Mematuhi peraturan yang berlaku merupakan proses yang memberatkan, dan perubahan di masa depan dapat meningkatkan beban operasi dan administrasi Perusahaan serta membatasi pendapatan Perusahaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perusahaan. Perusahaan tidak dapat meramalkan perkembangan atau perubahan lingkungan peraturan yang mungkin terjadi di masa depan atau dampak perkembangan atau perubahan tersebut bagi Perusahaan.

Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya menurut peraturan-peraturan tersebut melalui izin yang diberikan. Izin dan surat izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada jaminan bahwa otoritas yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perusahaan, dan Perusahaan juga tidak dapat menjamin bahwa izin dan surat izin operasional yang ada akan dapat diperpanjang atau perpanjangan dengan ketentuan baru akan dapat diterima secara komersial oleh Perusahaan atau akan tetap layak secara komersial, atau bahwa izin-izin tersebut akan tetap memberikan tingkat pengembalian yang sama bagi Perusahaan. Biaya memperoleh izin baru tersebut atau perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi Perusahaan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin atau surat izin

Development of laws and regulations which are detrimental can place business activities The company is in a number of risks. Possible rules limit the Company's operations and provide further competitive pressure on the Company, including:

- rules regarding permits, approvals, declarations, and permits, certificates and other notices;
- rules regarding data protection, protection consumers, and e-commerce;
- rules regarding service providers internet, local fixed network and fixed network closed; and
- other requirements covering various fields operations, such as environmental protection, data retention, and technical standards.

Failure to comply with current regulations or in the future may lead to imposition various sanctions against the Company, including fines. Complying with applicable regulations is a process burdensome, and future changes can increase operating and administrative burden the Company as well as limiting the Company's revenue, which in turn can have an impact material harm to business activities, financial condition, operating performance and prospects Company. Companies can't predict developments or changes in the regulatory environment that may occur in the future or impact the development or change for Company.

The Company carries out its business activities according to these regulations through permits given. Operational permits and permits subject to examination, interpretation, modification, or termination by the competent authority. There is no assurance that the competent authority will not take action that can have an impact material harm to the Company, and The company also cannot guarantee that permits and Existing operational licenses will be able to be extended or an extension with new conditions will be commercially accepted by the Company or will remain commercially viable, or that the permits will still provide a rate of return the same for the Company. Cost of obtaining a new permit or extension of the expired permit validity may be much higher than Company estimates. Meet all conditions required to obtain a permit or permit does not guarantee that the permit or permit will given. Administrative problems or other problems may result in failure to obtain permission or

tidak menjamin bahwa izin atau surat izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin atau surat izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin atau surat izin akan diberikan. Kegagalan memperoleh atau memperpanjang izin atau surat izin tersebut atau untuk mematuhi syarat dan ketentuan (termasuk sehubungan dengan batasan kepemilikan asing) yang diatur dalam izin atau surat izin yang berwenang mungkin menyebabkan Perusahaan dapat dikenakan sanksi, termasuk dalam bentuk surat peringatan, pembekuan atau pencabutan izin Perusahaan, penutupan sementara jaringan atau layanan yang terkait, denda, atau sanksi administratif lainnya.

Apabila terjadi perubahan dalam peraturan, Perusahaan mungkin harus mengubah atau memodifikasi surat izin yang ada atau mengajukan permohonan surat izin baru. Ketentuan dan kewajiban baru mungkin ditetapkan atas izin baru dan pada saat perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya, dan ketentuan serta kewajiban tersebut mungkin lebih berat dibandingkan izin yang ada atau izin yang telah habis masa berlakunya. [Izin operasi Perusahaan tertentu mungkin mengandung kewajiban sehubungan dengan penggelaran jaringan dan cakupan populasi. Kegagalan memenuhi kewajiban yang diatur dalam izin operasi yang terkait dapat menyebabkan pembekuan izin atau pada akhirnya pencabutan izin tersebut dan/atau pengenaan sanksi keuangan. Tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan mampu mengidentifikasi dan memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran tersebut terjadi akibat skala operasinya.][Note: Dalam hal Perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan undang-undang, peraturan atau surat izin yang berlaku, izin Perusahaan mungkin diakhiri dan/atau dicabut. Hal ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan operasinya dan nilai yang dapat direalisasikan atas infrastruktur jaringan yang relevan dan aset yang terkait dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Di samping peraturan perundang-undangan Indonesia, mengingat sifat usaha dan layanan yang diberikan Perusahaan, Perusahaan mungkin tunduk pada peraturan perundang-undangan yurisdiksi lain tempat Perusahaan beroperasi atau memiliki pelanggan. Secara khusus, regulator di berbagai yurisdiksi semakin meningkatkan pemantauan atas cara perusahaan mengumpulkan, mengolah, menggunakan

permit, considering that the competent authority has full authority to decide whether a permit or a permit will be issued. Failure to obtain or extend the permit or permit or to comply with the terms and conditions (including with respect to foreign ownership restrictions) which regulated in the permit or permit authorized perhaps cause the Company to be subject to sanctions, including in the form of a warning letter, freezing or revocation of Company license, temporary closure network or related services, fines, or sanctions other administrative.

In the event of a change in regulations, the Company may have to change or modify the license existing ones or apply for a new permit. New terms and obligations may be established on new permits and at the time of renewal of existing permits expired, and the terms and obligations it may be heavier than the permit existing or the permit has expired. [Permission Certain Company operations may contain obligations in connection with network deployment and population coverage. Failure to fulfill obligations which is regulated in the relevant operating license can cause permission freeze or in the end revocation of the permit and/or imposition of sanctions finance. There is no guarantee that the Company will able to identify and correct any the violation committed if the violation This happens due to the scale of the operation.][Note: In if the company is unable to meet the provisions applicable laws and regulations, or carry out its business activities in accordance with applicable laws, regulations or permits, Company licenses may be terminated and/or revoked. This can have a serious impact on the Company's ability to continue its operations and realizable value of infrastructure relevant networks and associated assets can be experience a material adverse effect.

In addition to the laws and regulations Indonesia, given the nature of the Company's business and services, the Company may be subject to on the laws and regulations of the jurisdiction other places where the Company operates or owns customer. In particular, regulators in various jurisdictions are increasingly increasing monitoring of how companies collect, process, use and analyze, store, share and send personal data.

dan menganalisis, menyimpan, membagikan, dan mengirimkan data pribadi. Pemantauan yang semakin ketat tersebut dapat menimbulkan interpretasi baru atas hukum yang ada, dan dengan demikian meningkatkan dampak terhadap kegiatan usaha Perusahaan. Peraturan terkini, seperti Peraturan Perlindungan Data Umum atau General Data Protection Regulation ("GDPR"), yang mulai berlaku di Uni Eropa ("UE") pada tanggal 25 Mei 2018, berlaku atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, keamanan, pengolahan, dan pengalihan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi dari penduduk negara tertentu, seperti negara-negara anggota UE dalam hal GDPR. GDPR menciptakan serangkaian kewajiban kepatuhan baru dan mengenakan denda dan sanksi yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi. Di Indonesia, rancangan undang-undang perlindungan data, yang mengadopsi ketentuan GDPR, telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada bulan Februari 2020, dan pada saat ini pembahasan dengan Pemerintah masih berlangsung. Oleh karenanya, terdapat ketidakpastian mengenai ruang lingkup undang-undang perlindungan data, termasuk ruang lingkup dan sifat pengecualian dari hak-hak pemilik data pribadi dalam hal data dikumpulkan untuk berbagai tujuan, seperti riset statistik dan ilmiah, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pengembangan aplikasi mahadata dan bisnis di Indonesia sampai hal-hal tersebut ditetapkan. Kegagalan, atau persepsi kegagalan, di pihak Perusahaan untuk mematuhi perintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, atas privasi, perlindungan data, keamanan informasi, atau perlindungan konsumen sehubungan peraturan perundang-undangan privasi, dapat menyebabkan perkara hukum atau gugatan terhadap Perusahaan oleh badan pemerintah atau individual, menyebabkan Perusahaan tunduk pada denda, penalti, dan/atau putusan, atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, mengingat reputasi Perusahaan dapat mengalami dampak negatif.

- C. Interpretasi dan penerapan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia diliputi ketidakpastian dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perusahaan.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, meliputi beragam etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai

More monitoring Such strictness can lead to new interpretations of existing laws, and thereby improve impact on the Company's business activities. Recent regulations, such as the Protection Regulations General Data or General Data Protection Regulation ("GDPR"), which entered into force in the European Union ("EU") on May 25 2018, applies to the collection, use, storage, security, processing, and transfer of identifiable information personally from residents of certain countries, such as EU member states in terms of GDPR. GDPR creates a new set of compliance obligations and impose significant fines and sanctions for the violation. In Indonesia, the design data protection law, which adopts GDPR provisions, have been submitted to the Council Representatives ("DPR") in February 2020, and Currently, discussions with the Government are still take place. Therefore, there is uncertainty regarding the scope of the protection law data, including the scope and nature of exceptions of the rights of the owner of personal data in terms of data collected for various purposes, such as statistical research and scientific, which can have a negative impact on the development of big data applications and business in Indonesia until such matters are determined. Failure, or perception of failure, on the part of Company to comply with orders or conditions applicable laws and regulations, including but not limited to, over privacy, protection data, information security, or consumer protection regarding privacy laws and regulations, can lead to lawsuits or lawsuits against the Company by a government agency or individual, causing the Company to be subject to fines, penalties, and/or decisions, or in other ways have a detrimental impact on activities the Company's efforts, considering the Company's reputation can have a negative impact.

- C. Interpretation and application of laws about local government in Indonesia covered uncertainty and can have an impact detrimental to the Company.

Indonesia is a large and diverse nation diversity, covering various ethnic, religious, linguistic, traditions and customs. Prior to 1999, The government controls almost all aspects national and local government. Period after The reign of former President Suharto was marked with broad demands for more regional autonomy big.

dengan tuntutan luas akan otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR Indonesia menerbitkan (i) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004, dan digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja), dan (ii) UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 2 tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang). Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan aset negara dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan hukum bagi perusahaan di Indonesia melalui desentralisasi kewenangan perundang-undangan, pajak dan kewenangan tertentu lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Meskipun berdasarkan hukum pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada tingkatan yang lebih tinggi, penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kekurangan personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di beberapa tingkat pemerintah daerah. Terlebih lagi, terdapat keterbatasan preseden atau panduan lainnya yang tersedia mengenai interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah

Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah tertentu telah menetapkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari

In response to these demands, in 1999, the Indonesian Parliament issued (i) UU No. 22 of 1999 concerning Regional Government, which later changed in 2004, and replaced by Law no. 23 of 2014 about the same thing (as last amended by Law No. 9 years 2015 concerning the Second Amendment to Law no. 23 years 2014 and the Job Creation Law), and (ii) Law no. 25 year 1999 on Financial Balance between Governments Central and Local Governments, which then replaced by Law no. 33 of 2004 concerning matters the same (as last amended by Law no. 2 of 2020 concerning the Implementation of Government Regulations Substitute Law No. 1 year 2020 about State Finance Policy and System Stability Finance for Handling the Covid-19 Pandemic and/or In Facing the Threats Endangering the National Economy and/or Financial System Stability into Law). Based on the law, regional autonomy expected to give power and responsibility greater responsibility to local government on the use of state assets and to create a balanced and fair financial relationship between central and local government. law and regional autonomy regulations have changed the environment law for companies in Indonesia through decentralization of statutory authority, taxes and certain other powers of the Government to local government. Although based on local government law is prohibited from stipulating local regulations that are against the law at a higher level, the application of autonomy it creates uncertainty. Uncertainty These include the lack of implementing regulations on regional autonomy and personnel shortages government with experience in the sector relevant at several levels of local government. Moreover, there are limited precedents or other available guidance on interpretation and implementation of laws and regulations regional autonomy.

In addition, based on Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times and the last time it was amended by the Job Creation Law and Constitutional Court Decision No. 46/PUUXII/2014, local governments are given the authority to adopt their own rules and with pretext of regional autonomy, some local governments certain restrictions have been set, taxes and levies that may differ from restrictions, taxes and levies imposed by other local governments

pembatasan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perusahaan terletak di seluruh Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

and/or is in addition to restrictions, taxes and levies that determined by the central government. Business activities and The Company's operations are located throughout Indonesia and may experience adverse effects arising from additional regulations, taxes and levies or contradict each other, which may be imposed by applicable local authority.

Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik

Apabila Perusahaan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan standar teknologi secara tepat waktu, daya saing Perusahaan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perusahaan akan kehilangan pelanggan. Keberhasilan Perusahaan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perusahaan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perusahaan untuk mengganti dan/atau memperbarui infrastruktur jaringan Perusahaan, dan sebagai akibatnya Perusahaan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru. Tidak ada jaminan bahwa akan tersedia sumber daya keuangan yang memadai untuk mendanai pembaharuan teknologi tersebut, dan Perusahaan mungkin tidak mampu memulihkan biaya investasi yang dikeluarkan untuk menerapkan teknologi Perusahaan pada saat ini atau di masa depan. Kegagalan Perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perusahaan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perubahan teknologi dapat, antara lain, mengurangi hambatan masuk yang dihadapi para pesaing Perusahaan yang menyediakan layanan lokal di wilayah layanan Perusahaan. Laju perubahan teknologi dan kemampuan Perusahaan untuk menerapkan teknologi baru mungkin terhambat oleh keterbatasan modal dan/atau kebutuhan untuk menghasilkan kas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga atas utang Perusahaan.

Perkembangan teknologi mungkin menghasilkan produk dan layanan baru, dan kegagalan Perusahaan untuk mengimbangi perkembangan tersebut dapat mengurangi daya tarik layanan Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru juga dapat menyebabkan Perusahaan terpapar risiko tambahan. Sebagai contoh, pengembangan produk dan baru dapat menjadi suatu proses yang kompleks, dan

Risk of Changes in Fiber Optic Cable Technology

If the Company does not adapt to progress rapid technology and changing technology standards in a timely manner, the Company's competitiveness can be hampered, and as a result, the Company will lose customer. The Company's success depends on the ability to adapt and finance technological change rapidly in the Company's industry, including changes in fiber optic cable technology. This change is possible require the Company to replace and/or updating the Company's network infrastructure, and As a result, the Company must issue additional capital expenditure (which amount may be significant) to maintain technology standards up-to-date and still able to compete with other products and services new service. There is no guarantee that it will be available adequate financial resources to fund technological updates, and the Company may not be able to recover the investment costs incurred issued to apply the Company's technology to currently or in the future. Company failure in adopting new technology or Company decisions to choose one technology over technology others may have a detrimental effect on the Company's ability to compete or meet customer request. Technological changes can, between others, reducing the barriers to entry faced by competitors Companies that provide local services in Company service area. Technological change rate and the Company's ability to apply technology may be hampered by limited capital and/or the need to generate sufficient cash to make interest payments on the Company's debt.

Technological developments may produce products and new services, and the Company's failure to keep pace with these developments can reduce attractiveness of the Company's services. Product development and new services can also expose the Company additional risk. For example, product development and new can be a complex process, and Companies may not be able to implement

Perusahaan mungkin tidak mampu menerapkan produk dan layanan baru tersebut secara efektif, tepat waktu, atau secara ekonomis untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam mengembangkan layanan baru, Perusahaan juga perlu menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan Perusahaan guna mendukung layanan tersebut. Produk dan layanan baru yang dikembangkan Perusahaan mungkin tidak mencapai keberhasilan secara komersial, dan kegagalan produk dan layanan Perusahaan dalam mencapai penerimaan secara komersial dapat memicu belanja modal tambahan. Sebagian pesaing Perusahaan mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merespons perubahan teknologi dibandingkan Perusahaan. Kegagalan Perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sebagaimana mestinya atau kegagalan memperoleh akses terhadap teknologi baru dapat menyebabkan Perusahaan kehilangan pelanggan dan tidak mampu menarik pelanggan baru dan/atau menjual layanan baru kepada pelanggan Perusahaan yang ada. Perusahaan mungkin tidak mampu menghadirkan produk dan layanan baru dan Perusahaan mungkin tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana diperkirakan sebelumnya dari produk atau layanan tersebut.

Agar tetap bersaing, Perusahaan perlu melaksanakan program investasi yang berjalan untuk senantiasa memperbarui jaringan akses Perusahaan. Perusahaan mendefinisikan jaringan akses sebagai koneksi dari lokasi pengguna akhir - baik rumah maupun kantor - ke titik agregasi pertama dalam jaringan. Koneksi tersebut berupa serat optik dan titik agregasi pada umumnya merupakan kantor pusat atau simpul layanan jarak jauh. Jaringan akses menentukan kecepatan yang dapat ditawarkan Perusahaan kepada pelanggan akhir. Perusahaan mungkin tidak mampu mempertahankan tingkat investasi yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing jangka panjang dalam penawaran kecepatan pita lebar ke seluruh segmen dalam pasar Perusahaan.

Tren teknologi dan perkembangan dalam layanan TI dan awan dapat menjadi jauh lebih disruptif dan cenderung berubah dalam siklus yang lebih singkat dibandingkan teknologi telekomunikasi. Kemampuan Perusahaan untuk menanamkan investasi dalam pelatihan, sertifikasi, dan keahlian yang diperlukan akan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan Perusahaan. Apabila Perusahaan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam standar yang berlaku, daya saing Perusahaan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perusahaan akan kehilangan pelanggan, dan pada gilirannya hal ini akan memengaruhi kegiatan usaha dan kinerja operasi Perusahaan.

products and the new service effectively, in a timely manner, or economical to meet customer demand. In develop new services, companies also need to make significant investments in infrastructure the Company's network to support these services. New products and services developed by the Company may not achieve commercial success, and failure of the Company's products and services to achieve commercial acceptance can trigger spending additional capital. Some of the Company's competitors may be have greater resources to respond technological change compared to the Company. Failure Companies to adapt to technological changes properly or failure to gain access to new technologies may cause the Company lost customers and unable to attract customers new and/or selling new services to customers Existing company. The company may not be able presenting new products and services and the Company may not generate as much income as previously estimated from the product or service.

In order to remain competitive, companies need to carry out investment program that runs for ever updating the Company's access network. Company defines an access network as a connection from a location end users - both home and office - to the point the first aggregation in the network. The connection is Optical fiber and aggregation points are generally the central office or remote service node. Access network determine the speed that the Company can offer to the final customer. The company may not be able maintain the level of investment required to maintain long-term competitiveness in offering broadband speed to all segments in corporate market.

Technological trends and developments in IT services and cloud can be much more disruptive and prone change in shorter cycles than telecommunications technology. Company's ability to invest in training, certification, and the required expertise will be an important factor which determines the success of the Company. If The Company does not adapt to rapid technological advances and changes in applicable standards, Company's competitiveness can be hampered, and as a as a result, the Company will lose customers, and in turn this will affect business activities and the Company's operating performance.

Pesaing Perusahaan mungkin mampu mengembangkan atau memasarkan teknologi, produk, dan layanan secara lebih efektif, dan pesaing baru mungkin timbul akibat teknologi baru. Perusahaan tidak dapat meramalkan secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan memengaruhi operasi Perusahaan atau daya saing produk dan layanan Perusahaan, dan tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan mampu bersaing dengan pesaing Perusahaan yang ada saat ini maupun di masa depan. Kegagalan untuk mengantisipasi atau beradaptasi terhadap teknologi dan perubahan secara efektif sebagai respons terhadap produk dan layanan yang ditawarkan para pesaing Perusahaan dan sehubungan dengan ekspektasi dan perilaku pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi persaingan Perusahaan, dan pada gilirannya, pada kegiatan usaha dan kinerja operasi Perusahaan.

Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi

Perusahaan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi saluran dan tiang (*duct & pole*) Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar.

Kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan basis pelanggan dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar Perusahaan tergantung pada kemampuan Perusahaan untuk menggelar jaringan ke lokasi baru atau mengembangkan jaringan serat optik Perusahaan yang ada. Salah satu aspek kunci dalam strategi ekspansi Perusahaan melibatkan peningkatan ducting dan tiang telekomunikasi terpasang. Terdapat risiko dan ketidakpastian yang mungkin menimbulkan penundaan dalam menerapkan strategi tersebut, gangguan pada layanan yang ada, dan meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jaringan. Ketidakpastian tersebut meliputi bencana alam, sabotase, dan pencurian. Perusahaan mungkin wajib memperoleh izin daerah dan nasional untuk meningkatkan jaringan Perusahaan. Perizinan tersebut meliputi perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Provinsi, Kantor Kota, dan Kantor Kabupaten (dan izin lainnya dari otoritas pemerintah daerah maupun pusat sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dan nasional), tergantung wilayah tempat jaringan diluncurkan.

Terdapat risiko bahwa di masa depan, Perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh perizinan yang diperlukan dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial atau sama sekali. Kegagalan atau penundaan dalam

The Company competitors may be able to develop or market technology, products and services more effective, and new competitors may arise as a result new technology. Companies cannot predict accurately how technology changes in the future will affect the Company's operations or competitiveness Company products and services, and there are no guarantees that the Company will be able to compete with competitors Companies that exist today and in the future. Failure to anticipate or adapt to technology and change effectively in response to the products and services offered by the Company's competitors and in relation to expectations and customer behavior can have an impact significant detriment to competitive position Company, and in turn, on business activities and the Company's operating performance.

Telecommunication Infrastructure Investment Risk

The Company may not be successful in implementing the strategy duct and pole (*duct & pole*) Company for increase market share.

The Company's ability to improve or maintain customer base and retain or develop the Company's market share depending on the Company's ability to deploy netting to a new location or developing a fiber network existing Company optics. One of the key aspects in The Company's expansion strategy involves increasing ducting and telecommunications poles installed. There is a risk and uncertainties that may lead to delays in implementing the strategy, disruption of existing services, and increase construction costs and network maintenance. These uncertainties include: natural disasters, sabotage, and theft. Company may be required to obtain regional and national permits for improve the Company's network. The permission including permits from the Ministry of Public Works, Ministry of Transportation, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Provincial Office, City Office, and District Office (and other permits from local or central government authorities as required from time to time pursuant to regional and national laws and regulations), depending on the region where the network is launched.

There is a risk that in the future, the Company may unable to obtain the necessary permits on commercially acceptable terms or at all. Failure or delay in obtain the extension of these permits by acceptable conditions can also give

memperoleh perpanjangan izin-izin tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perusahaan. Apabila Perusahaan gagal mempertahankan dan mengembangkan jaringan Perusahaan secara tepat waktu, Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengembangkan basis pelanggan Perusahaan.

Risiko Persaingan Usaha

- A. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan usaha yang kompetitif, yang memengaruhi kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan keuangan Perusahaan.

Perusahaan beroperasi dalam industri jasa telekomunikasi, yang sangat kompetitif dan kian kompetitif dalam tahun-tahun belakangan. Sifat dan tingkat persaingan yang dihadapi Perusahaan bervariasi untuk masing-masing layanan yang ditawarkan Perusahaan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, Perusahaan bersaing atas dasar nilai (harga relatif terhadap produk dan layanan yang ditawarkan), pemasaran, kualitas jaringan, spesifikasi portofolio produk dan layanan, serta layanan pelanggan. Dalam beberapa kejadian, Perusahaan bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih besar, sumber daya pemasaran yang lebih besar, dan pengenalan merek yang lebih unggul, serta hubungan jangka panjang dengan otoritas berwenang dan pelanggan.

Secara khusus, Telkom, yang merupakan penyedia layanan jaringan tetap utama di Indonesia, merupakan pesaing utama berbasis fasilitas untuk layanan jaringan tetap pita lebar (fixed broadband). Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki TELKOM, juga merupakan operator telepon seluler terkemuka di Indonesia. TELKOM juga menyediakan berbagai jasa telekomunikasi, termasuk interkoneksi, jaringan, layanan data dan internet, serta layanan telekomunikasi lainnya. Dalam usaha dan pasar wholesale, TELKOM merupakan peserta aktif dan menempati posisi yang kuat dengan jaringan tengah berbasis serat optik, gelombang mikro, dan satelit yang ekstensif serta jaringan kabel serat optik bawah laut. Menurut Analisis Mason, TELKOM memimpin jauh dari segi cakupan dan kualitas jaringan di luar Jawa dibandingkan operator lainnya. Terlebih lagi, TELKOM

rise to adverse impact on business activities, conditions financial, and operating performance of the Company. If The company failed to maintain and develop Company network in a timely manner, Company may have difficulty maintaining or develop the Company's customer base.

Business Competition Risk

- A. The Company operates in a business environment that is competitive, which affects the Company's ability to attract and retain customers and can have a detrimental effect on business activities, operating and financial performance of the Company.

The Company operates in the telecommunication service industry, which is highly competitive and increasingly competitive in recent years. The nature and level of competition faced by the Company varies for each service offered Company. However, in each case, the Company compete on the basis of value (price relative to product and services offered), marketing, quality network, product and service portfolio specifications, as well as customer service. In some cases, Companies compete with companies that have access to better financing, sources greater human resources, marketing resources bigger, and more brand recognition excellence, as well as long-term relationships with authorities authorities and customers.

In particular, Telkom, which is a provider of the main fixed network service in Indonesia, is a major facility-based competitor for services fixed broadband network. Telkomsel, which is the majority subsidiary owned by TELKOM, is also an operator leading cellular phone in Indonesia. TELKOM too provides a variety of telecommunications services, including interconnection, network, data and internet services, as well as other telecommunications services. In business and wholesale market, TELKOM is an active participant and occupy a strong position with the middle network Extensive fiber optic, microwave and satellite based and undersea fiber optic cable networks sea. According to Analysis Mason, TELKOM leads far in terms of network coverage and quality outside Java compared to other operators. What's more, TELKOM dominate a substantial share of the consumer market and combine cable video services

menguasai pangsa pasar konsumen yang substansial dan menggabungkan layanan video kabel dengan suara, layanan pita lebar dan seluler, sehingga TELKOM mampu bersaing secara efektif dengan Perusahaan.

Rencana penggelaran serat optik yang diumumkan oleh beberapa pesaing Perusahaan dapat meningkatkan persaingan bisnis telekomunikasi Indonesia di masa depan. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan mungkin harus menawarkan nilai yang lebih baik melalui harga produk dan jasa yang lebih menarik dan Perusahaan mungkin kehilangan pelanggan potensial maupun pelanggan yang ada. Pada gilirannya, kondisi ini akan menyebabkan penurunan pendapatan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perusahaan.

Layanan data dan internet Perusahaan mengalami persaingan yang lebih ketat dari operator data dan internet lainnya, termasuk operator seluler. Terlebih lagi, dengan peningkatan popularitas ponsel pintar di Indonesia, layanan data dan internet menjadi ajang kompetisi yang ketat dalam industri Perusahaan. Persaingan dapat menjadi semakin tajam di masa depan sehingga memengaruhi kinerja keuangan layanan data dan internet Perusahaan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perusahaan secara keseluruhan.

Di samping itu, dalam hal para pesaing Perusahaan memperoleh alokasi spektrum yang lebih besar dibandingkan Perusahaan di masa depan (sebagai contoh, untuk tujuan meningkatkan dan memperluas 4G/Evolusi Jangka Panjang (Long Term Evolution) dan potensi peluncuran layanan 5G), para pesaing tersebut mungkin berhasil meningkatkan kecepatan unduh dan ketersediaan layanan seluler serta mampu bersaing secara lebih efektif dengan Perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perusahaan.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perusahaan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perusahaan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perusahaan. Kemampuan Perusahaan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan

with voice, broadband and cellular services, so that TELKOM able to compete effectively with the Company.

Fiber optic deployment plan announced by some of the Company's competitors can improve Indonesia's telecommunications business competition in the future front. Under these conditions, the Company may should offer better value through price more attractive products and services and the Company may lose potential customers as well as existing customers. In turn, this condition will lead to a decrease in income and cause a material adverse impact to business activities, financial condition, performance operations, and prospects of the Company.

The Company's data and internet services are experiencing tougher competition from data operators and other internet, including mobile operators. more again, with the increasing popularity of smartphones In Indonesia, data and internet services have become an arena for intense competition in the Company's industry. Competition can become more intense in the future future, thus affecting financial performance Company data and internet services, and with thereby causing detrimental effects material impact on operating performance, financial condition, and the Company's overall prospects.

In addition, in the case of the Company's competitors get a bigger spectrum allocation compared to the Company in the future (as example, for the purpose of improving and expanding 4G/Long Term Evolution and potential launch of 5G services), these competitors may succeed in increasing download speed and availability of cellular services and being able to compete more effectively with the Company. This condition can have a material adverse effect to operating performance, financial condition, and Company prospects.

Impact of competition on business activities The company involves high uncertainty and will depend on a number of factors, including economic conditions, developments in laws and regulations, behavior of customers and competitors, as well as the effectiveness of the measures taken by the Company in response to the competition faced Company. Company's ability to win the competition depends on the service customers, marketing strategy, and capabilities Companies to

pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perusahaan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perusahaan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi potongan harga yang dilakukan para pesaing. Apabila Perusahaan tidak berhasil merespons persaingan dan mengimbangi penurunan harga dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan penggunaan, dan menawarkan layanan baru, maka pendapatan dan profitabilitas Perusahaan akan mengalami penurunan.

B. Merger atau konsolidasi di antara pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perusahaan.

Konsolidasi yang signifikan di antara pelanggan Perusahaan, seperti merger Indosat-Hutchison 3, dapat menimbulkan penurunan permintaan dari perusahaan yang terkonsolidasi. Konsolidasi selama ini telah terjadi dan diperkirakan akan tetap terjadi dalam industri Perusahaan di masa depan. Konsolidasi lebih lanjut di antara penyedia layanan selular dapat terjadi, yang mungkin didorong oleh faktor-faktor persaingan serta upaya untuk mengurangi biaya operasi dan memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga mendorong terjadinya konsolidasi, termasuk melalui diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur gugus telekomunikasi dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara pemain industri yang lebih sedikit dengan profil efisiensi biaya yang lebih baik dan alokasi spektrum yang lebih luas. Konsolidasi dapat menyebabkan penurunan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi tersebut memiliki rencana ekspansi yang serupa. Pelanggan Perusahaan mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui perjanjian dengan Perusahaan karena konsolidasi tersebut. Pengakhiran perjanjian akibat konsolidasi industri dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perusahaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perusahaan.

anticipate and respond various competitive factors that influence Enterprise industry, including service launch and new technologies, changing consumer preferences, demographic trends, economic conditions, and strategies price discounts offered by competitors. If The company failed to respond to competition and offset the decline in prices by increasing number of subscribers, increase usage, and offer a new service, then revenue and the Company's profitability will decrease.

B. Mergers or consolidations among customers can be cause a material adverse impact to the Company's revenues and cash flows.

Significant consolidation among customers Companies, such as the Indosat-Hutchison 3 merger, can lead to a decrease in demand from the company consolidated. Consolidation so far has taken place and is expected to continue to occur in the industry company of the future. Further consolidation between cellular service providers may occur, which may be driven by competitive factors as well as efforts to reduce operating costs and obtain wider spectrum allocation. In addition, the Government also encourage consolidation, including through the enactment of the Job Creation Act, which, among other things, regulates telecommunications clusters in efforts to encourage healthier competition in between fewer industry players with profiles better cost efficiency and better spectrum allocation wider. Consolidation can lead to a decline overall future capital expenditures, when the consolidated companies have similar expansion plans. Enterprise customers may decide to did not renew the agreement with the Company because of the consolidation. Termination of agreement as a result of industrial consolidation can have an impact material loss to revenue and the Company's cash flows, which in turn can cause a material adverse impact to business activities, financial condition, performance operations, and liquidity of the Company.

- C. Sebagian besar pendapatan Perusahaan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, dan pengakhiran, tidak dilakukannya perpanjangan, atau perubahan yang material atas perjanjian dengan para pelanggan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perusahaan.

Sebagian besar pendapatan Perusahaan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, terutama dari Bakti. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 34,8% dari pendapatan Perusahaan berasal dari Bakti, sementara pelanggan terbesar Perusahaan lainnya (Smartfren/Smarttel, Hutchinson 3 Indonesia, dan XL Axiata), 12,7% pendapatan Perseroan berasal dari (Smartfren/Smarttel), 2,6% berasal dari (Hutchinson 3 Indonesia) dan 2,2% berasal (XL Axiata). Apabila salah satu pelanggan tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perusahaan dengan para pelanggan tersebut, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perusahaan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Terdapat kemungkinan bahwa perselisihan dengan pelanggan Perusahaan dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian antara Perusahaan dengan pelanggan yang bersangkutan atau perubahan yang material terhadap ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Salah satu dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perusahaan. Apabila Perusahaan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui tuntutan hukum, hubungan Perusahaan dengan pelanggan yang bersangkutan mungkin berakhir atau terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau kenaikan biaya, yang menghasilkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perusahaan.

Di samping itu, Perusahaan mengandalkan, dan bagian signifikan dari pendapatan Perusahaan berasal dari proyek-proyek yang berdiri sendiri seperti Proyek Palapa Ring, yang menyumbangkan 34,8% terhadap pendapatan Perusahaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kegagalan Perusahaan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berdiri sendiri sebagaimana mestinya, memenuhi kewajiban Perusahaan yang berlaku atas proyek-proyek tersebut atau keengganan atau ketidakmampuan mitra Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perusahaan dengan para mitra tersebut, dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perusahaan.

- C. Most of the Company's revenue is earned from a small number of customers, and termination, non-renewal, or change material based on agreements with customers This can have a detrimental effect on material to the Company.

Most of the Company's revenue is earned from a small number of customers, mainly from Bakti. For the year ended December 31, 2021, 34.8% of the Company's revenue comes from Bakti, while the other Company's biggest customers (Smartfren/Smarttel, Hutchinson 3 Indonesia, and XL Axiata), 12.7% of the Company's revenue comes from (Smartfren/Smarttel), 2.6% came from (Hutchinson 3 Indonesia) and 2.2% came from (XL Axiata). when wrong one customer is not willing or not able to carry out its obligations under the Company's agreements with these customers, then revenue, operating performance, financial condition, and liquidity of the Company may be impacted material harm. There is a possibility that disputes with customers of the Company may result in the termination of the agreement between Companies with relevant customers or material changes to the terms these agreements. One of the things it can have a detrimental effect material to business activities, operating performance, financial condition, and liquidity of the Company. If Companies are forced to settle disputes through lawsuits, Company relations with the customer concerned maybe terminated or interrupted. This can cause decrease in revenue or increase in costs, which produce an adverse impact on activities business, financial condition, operating performance, and Company's liquidity.

In addition, the Company relies on, and part significant portion of the Company's revenue comes from stand-alone projects such as Project Palapa Ring, which contributed 34.8% to Company's revenue for the year ended December 31, 2021. Company Failure in completing standing projects themselves as they should, fulfill their obligations Companies that apply to projects or reluctance or inability Company partners to carry out their obligations based on the Company's agreement with partners these, can have a material impact that adversely affect revenues, operating performance, financial condition, and liquidity of the Company.

D. Tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perusahaan

Tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perusahaan mencapai 0,3% per 31 Desember 2021 untuk total pelanggan di Segmen Wholesale, sementara tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perusahaan secara berturut-turut mencapai 0,5% dan 0,04% di Segmen Retail dan Segmen Enterprise per 31 Desember 2021. Tingkat perpindahan pelanggan Perusahaan dihitung per bulan dengan memperhitungkan jumlah pengakhiran oleh pelanggan dibandingkan total jumlah pelanggan keseluruhan. Kami meyakini bahwa tingkat perpindahan pelanggan terutama disebabkan oleh persaingan pasar yang semakin ketat. Tingkat perpindahan pelanggan yang tinggi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pada saat pelanggan beralih ke operator lain atau mengakhiri program berlangganan dengan Perusahaan atau meningkatkan biaya akuisisi pelanggan Perusahaan. Kenaikan dalam tingkat perpindahan Perseroan dapat menyebabkan fluktuasi arus kas dari kegiatan operasi Perusahaan. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghambat kemampuan Perusahaan untuk merencanakan dan menjalankan strategi, memantau dan memelihara sistem penagihan dan pengendalian kredit, memperkirakan pendapatan dan beban keuangan di masa depan atau untuk menghimpun modal baru dengan ketentuan yang menguntungkan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perusahaan.

D. The churn rate can cause a material adverse impact to the Company's business activities and operating performance

Average customer turnover rate per month of the Company reached 0.3% as of December 31, 2021 for total customers in the Wholesale Segment, while average customer turnover rate per month The company successively reached 0.5% and 0.04% in the Retail Segment and Enterprise Segment as of 31 December 2021. Transfer rate Company customers are calculated per month by take into account the number of terminations by customers compared to the total number of customers as a whole. We believe that the customer turnover rate mainly due to market competition which getting tighter. High customer turnover rate can lead to loss of income in when the customer switches to another operator or terminates subscription program with the Company or increase the Company's customer acquisition costs. An increase in the Company's turnover rate can cause cash flow fluctuations from operating activities Company. This, in turn, can hinder the Company's ability to plan and executing strategy, monitoring and maintaining the system collection and credit control, estimating future financial income and expenses or to raise new capital with the following provisions: profitable. One of those events in above can have a detrimental impact on material to business activities, financial condition, the Company's operating performance and prospects.

Risiko Umum GENERAL RISK

Risiko Makro Ekonomi

- A. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perusahaan.

Perekonomian Indonesia menderita dampak serius dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga menderita dampak serius dari krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi memiliki karakteristik, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kebangkrutan lembaga keuangan global, jatuhnya pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan jatuhnya permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah berkembang dalam tahun-tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang luar biasa negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap ekonomi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia, menderita dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara-negara maju. Di samping itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keyakinan publik akan perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek lainnya dalam perekonomian Indonesia. Apabila perekonomian Indonesia tetap bergejolak atau menurun, pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek perekonomian Indonesia lainnya mungkin mengalami dampak negatif.

Macroeconomic Risk

- A. Changes in the domestic, regional, or global economy can have a material adverse effect to the Indonesian economy and the Company's business activities.

The Indonesian economy is suffering serious impacts from Asian financial crisis in 1997. In Indonesia, the crisis was characterized by, among other things, depreciation of the eye money, a significant decline in real GDP, interest rates high interest, social unrest, and development great politics. Indonesian economy too suffer the serious impact of the global financial crisis which started at the end of 2008. Progress financial loss that occurs has the characteristics, among others, the scarcity of credit availability, a decrease in foreign direct investment, bankruptcy global financial institutions, stock market crash global, slowing global economic growth and falling demand for certain commodities. Furthermore, although the global economy has growing in recent years, decreasing China's economy and falling commodity prices global economy has created more economic uncertainty further around the world. The economic development. The extraordinary negative has had an impact detrimental to the economies of developed and emerging markets, including Indonesia and other ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) countries.

Indonesia and other ASEAN countries, as well as developed economies around the world world, suffering from the negative impact of economic conditions and unprecedented finance in developed countries. In addition, the Government Indonesia still has a high fiscal deficit and high levels of national debt, reserves Foreign currency Government low, Rupiah fixed volatile with low liquidity, and sectors banks suffer from bad credit levels tall one. Even though the Government has taken various measures to maintain stability economy and public confidence in the economy Indonesia, the continuation of unprecedented conditions happened before this can have an impact negative on economic growth, fiscal position Government, Rupiah exchange rate and various aspects others in the Indonesian economy. If Indonesia's economy remains volatile or in decline, economic growth, fiscal position, exchange rate Rupiah and various aspects of the Indonesian economy others may experience a negative impact.

Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkini dalam kondisi perekonomian Indonesia akan tetap berlangsung. Secara khusus, perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang menyebabkan hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, atau menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan atau resesi di Indonesia. Peningkatan volatilitas, perlambatan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dalam perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perusahaan. Secara khusus, ekonomi Indonesia masih terganggu oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap perekonomian Indonesia.

- B. Pasar berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pasar yang lebih maju, dan apabila risiko-risiko tersebut terjadi, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan dan Anda dapat menderita kerugian yang signifikan atas investasi Anda.

Secara historis, seluruh pendapatan Perusahaan diperoleh dari operasi Perusahaan di Indonesia, dan Perusahaan memperkirakan bahwa Perusahaan akan tetap memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Indonesia. Dalam hal Perusahaan memperluas pendapatan di luar Indonesia, Perusahaan memperkirakan pendapatan tersebut akan tetap diperoleh dari pasar berkembang di Asia Tenggara. Secara historis, karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia dicirikan oleh volatilitas signifikan dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mungkin memiliki perbedaan signifikan dibandingkan ekonomi yang lebih maju. Risiko-risiko spesifik yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perusahaan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- Gejolak nilai tukar;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- peristiwa bencana, penyebaran penyakit menular, bencana alam, dan *acts of God* yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung);
- keamanan data dan serangan siber;

The company cannot guarantee that latest developments in economic conditions Indonesia will continue. In particular, changes in the regional economic environment or global market leading to a loss of investor confidence in emerging market and market financial systems other factors, or other factors, can cause increased volatility in Indonesian financial markets, inhibit or reverse growth the Indonesian economy, or cause a crisis prolonged economic recession or recession in Indonesia. Increased volatility, slowing growth or negative growth in the global economy, including the Indonesian economy, can cause material adverse impact on activities the Company's business, financial condition, and operating performance. In particular, the Indonesian economy is still disrupted by the ongoing COVID-19 pandemic. Given the implications of the continued spread of COVID-19 change rapidly, it is difficult to judge the nature and the full extent of the impact of this epidemic on Indonesian economy.

- B. Emerging markets such as Indonesia are facing greater risk than the more advanced market and when those risks occur, the consequences can disrupt business activities. The company and you may suffer significant losses significant for your investment.

Historically, the Company's entire revenue is obtained from the Company's operations in Indonesia and the Company estimates that the Company will still earn most of the income from Indonesia. In the event that the Company expands income from outside Indonesia, Company expects the income to be constantly obtained from emerging markets in Southeast Asia. Historically, emerging market such as Indonesia is characterized by significant volatility and political, social, and economic conditions may have differences significantly compared to more developed economies. Specific risks that can have a material impact to business activities, operating performance, the Company's cash flows and financial condition include:

- political, social and economic instability;
- Exchange rate volatility;
- war, terrorism and civil conflict;
- catastrophic events, spread of infectious diseases, natural disasters, and acts of God that affect the Company's business activities (including uncertainty arising from the ongoing COVID-19 pandemic);
- data security and cyberattacks;

- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan perundang-undangan, pajak dan hukum;
- Liabilitas untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan pertanggungan asuransi yang memadai;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin, surat izin, dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- transportasi, energi, dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- penyitaan aset.

Secara umum, investasi di pasar berkembang hanya cocok untuk investor yang cakap dan berpengalaman, yang sepenuhnya memahami pentingnya risiko-risiko yang terlibat dalam menanamkan investasi di pasar berkembang. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat, dan oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam memorandum penawaran ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Apabila salah satu risiko-risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, terutama di Indonesia, menjadi nyata, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perusahaan dapat mengalami dampak merugikan yang material, dan nilai investasi Anda dapat mengalami penurunan signifikan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Utang Perusahaan dengan suku bunga mengambang menyebabkan Perusahaan tunduk pada fluktuasi tingkat suku bunga, yang dapat memengaruhi biaya pinjaman dan kinerja operasi Perusahaan.

Per 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp7.896,2 miliar (US\$553,4 juta). Sebagian kewajiban utang Perusahaan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perusahaan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Beban bunga bagi Perusahaan atas utang dengan suku bunga mengambang tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga dasar. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan arus kas operasi Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki perjanjian lindung nilai tingkat suku bunga untuk utang Perusahaan dengan suku bunga mengambang; hal ini mungkin ternyata tidak menguntungkan atau dapat menciptakan risiko tambahan.

- state intervention, including tariffs, protection, and subsidy;
- changes in the structure of laws and regulations, tax, and law;
- Liability for corrective action based on environmental, health and safety regulations
- cost and availability of insurance coverage adequate;
- difficulties and delays in obtaining or extending permits, permits, and authorizations;
- government actions and implementation of regulations that are arbitrary or inconsistent;
- exchange rate fluctuations;
- transportation, energy, and other infrastructure that are inadequate; and
- confiscation of assets.

In general, investments in emerging markets are only suitable for capable and experienced investors, who fully understand the importance of the risks involved in investing in emerging markets. It is important to note that political developments and Social media in Indonesia has so far been unpredictable, it can be changing rapidly, and therefore, information presented in this offer memorandum may become irrelevant in a relatively short time. If any of the risks associated with investing in emerging markets, especially in Indonesia, are becoming real, then business activities, operating performance, and financial condition Companies can experience adverse impacts that material, and the value of your investment can experience significant decrease.

Interest Rate Risk

Corporate debt with floating interest rate causes the Company to be subject to fluctuations in the level of interest rates, which can affect borrowing costs and the Company's operating performance.

As of December 31, 2021, the Company has obligations interest-bearing Rp7,896.2 billion (US\$553.4 million). Some of the Company's debt obligations have an interest rate of floating interest and causing the Company exposed to the risk of fluctuations in interest rates. Burden interest for the Company on debt at an interest rate The floating rate may fluctuate according to the base interest rate. Increase in interest rates may have a negative impact on performance operations and operating cash flows of the Company. Company does not have an interest rate hedging agreement for the Company's debt with a floating interest rate; this may turn out to be unprofitable or it can create additional risk.

Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perusahaan

- A. Penerapan peraturan benturan kepentingan OJK dapat menyebabkan Perusahaan melewatkan transaksi yang menguntungkan bagi Perusahaan.

Guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020") memberikan hak suara kepada pemegang saham independen perusahaan publik di Indonesia untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung "benturan kepentingan" berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Transaksi antara Perusahaan dan entitas lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perusahaan mungkin merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan pemegang mayoritas saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi ("pemegang saham tidak memihak") harus diperoleh apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perusahaan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Ketentuan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham tidak memihak dapat membebani Perusahaan dari segi waktu dan biaya, dan dapat menyebabkan Perusahaan melepaskan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang menguntungkan Perusahaan. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pemegang saham tidak memihak akan diperoleh apabila diminta.

Risks on Government Policies or Regulations Related to the Company's Business Field

- A. The application of the OJK conflict of interest regulations may cause the Company to miss transactions that are profitable for the Company.

In order to protect the rights of minority shareholders, OJK regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions ("Regulations OJK No. 42/2020") grants voting rights to independent shareholders of public companies in Indonesia to approve or disapprove of each transactions, whether material or not, that contain "conflict of interest" based on OJK Regulation No. 42/2020, unless the transaction is included in certain exceptions provided for in the OJK Regulation No. 42/2020. Transactions between the Company and other entities owned or controlled by the Company's Controlling Shareholders may be a transaction that contains a conflict interests based on OJK Regulation No. 42/2020. As a result, the approval of the majority shareholder who do not have a conflict of interest and are not affiliated ("impartial shareholders") must obtained in the event of a conflict of interest. OJK has the power to enforce regulations this and the Company's shareholders may also has the right to request enforcement or implement enforcement action based on OJK Regulation No. 42/2020. Conditions for obtaining approval impartial shareholders can burden Companies in terms of time and cost, and can cause the Company to release transactions of certain things that are otherwise viewed to benefit the Company. What's more, nothing guarantees that shareholders' approval is not impartial will be obtained when requested.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perusahaan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan perkara hukum.

Perusahaan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan perkara hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HaKI, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus yang terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan perkembangan usaha Perusahaan, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perusahaan telah mengalami, dan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Sebagai contoh, Perusahaan sedang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan salah satu pelanggan Perusahaan (BAKTI), yang timbul dari perselisihan mengenai interpretasi kontraktual sehubungan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut interpretasi Perusahaan atas peraturan pajak Indonesia, nilai komersial kontrak yang terkait seharusnya tidak termasuk jumlah yang terutang terkait PPN. Seluruh pembayaran PPN yang wajib dilakukan terkait dengan kontrak yang terkait telah dikenakan dan dibayarkan [oleh Perusahaan] sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Tuntutan, gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum dapat merusak reputasi Perusahaan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dalam bidang-bidang yang terpengaruh, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perusahaan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perusahaan lainnya secara signifikan. Ketetapan yang merugikan dalam tuntutan, penyelidikan, atau perkara hukum dapat menyebabkan Perusahaan harus membayar ganti rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya, membatasi kemampuan Perusahaan untuk menjalankan usaha atau mengharuskan Perusahaan untuk mengubah cara Perusahaan beroperasi.

Risk of Lawsuit or Lawsuit

The Company may face lawsuits and legal cases.

The Company may be involved in lawsuits and legal cases in Indonesia in relation to third party and IPR infringement claims, claims related to data protection and privacy, cases related to manpower, and other matters in daily business activities. Along with the Company's business development, both geographically throughout Indonesia and through the addition of new business activities, the Company has experienced, and may experience lawsuits as mentioned above in a larger amount and type. For example, the Company is in a litigation before the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with one of the Company's customers (BAKTI), which was arising from a dispute regarding the contractual interpretation in connection with the payment of Value Added Tax (PPN). According to the Company's interpretation of Indonesia tax regulations, the commercial value of the related contract should not include the amount owed in relation to VAT. The entire mandatory VAT payments related to the relevant contract have been imposed and paid [by the Company] in accordance with the applicable tax laws in Indonesia. Claims, lawsuits, investigations, and legal cases can damage the reputation of the Company, limiting the Company's ability to carry out its business in the areas affected, and have a detrimental impact on business activities, financial condition, operating performance, and Company prospects. Results of lawsuits, investigations, and legal cases are inherently uncertain, and in any circumstances, the defense of the lawsuit can be costly and time consuming and can divert management efforts and resources and other Company's personnel significantly. Detrimental stipulation in a lawsuit, investigation, or legal cases may cause the Company to pay compensation, incurring legal and other costs, limiting the Company's ability to carry out business or requiring the Company to change the way it operates.

Perkara Hukum LEGAL CASES

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perkara atau gugatan, baik perdata maupun pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dihadapi dan diterima Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi, serta Entitas Anak, yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan.

Throughout 2021, the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors did not involve in any civil, criminal, and/or dispute cases at the judiciary and/or in refereeing institutions in Indonesia or overseas or administrative disputes with competent government agencies, including disputes in respect of taxation or labor disputes relating to labor/industrial relations matters or never declared to be bankrupt, which may materially affect the business activities and/or continuity of the Company's business activities.

Sanksi Administratif ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak mendapatkan sanksi administratif dari regulator atau Lembaga yang berwenang yang dikenakan kepada Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi, serta Entitas Anak.

Throughout 2021, the Company did not receive any administrative sanction from regulators or authorized institutions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, and Subsidiaries.

Kode Etik Perusahaan COMPANY'S CODE OF CONDUCT

Perusahaan telah menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh karyawan Perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Tingkah Laku PT Mora Telematika Indonesia ("Pedoman Tingkah Laku").

Pedoman Tingkah Laku merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk senantiasa mengedepankan etika usaha dan etika perilaku dalam menjalankan usaha dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melembagakan nilai-nilai Perusahaan dengan mengacu pada standar internasional;
2. Senantiasa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; dan
3. Senantiasa patuh terhadap segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

The Company has compiled and established guidelines ethics for all employees of the Company as outlined in the PT Mora Telematika Indonesia Guidelines of Conduct.

The Code of Conduct is a form of Company's commitment to always prioritize business ethics and ethical behavior in running a business with the following purposes:

1. Institutionalize the values of the Company with reference to international standards;
2. Constantly improve accountability and transparency; and
3. Always comply with all applicable regulations and law.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok isi Pedoman Tingkah Laku Perusahaan sebagai berikut:

1. Integritas

Setiap karyawan harus memberikan jasa profesional dengan penuh integritas dan kejujuran yang tidak dapat ditempatkan di bawah keuntungan dan/atau kenikmatan pribadi.

2. Hadiah dan Pemberian Lainnya

Setiap karyawan, karena jabatan dan pekerjaannya, tidak diperkenankan meminta maupun menerima hadiah dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, jasa kepentingan pribadi lainnya, baik yang diberikan secara langsung dari pembeli, pemasok, operator, vendor, dealer, broker atau pihak-pihak lain manapun yang mempunyai usaha dengan Perusahaan. Dalam hal ini, hadiah dan pemberian lainnya juga termasuk janji memberikan atau menerima hadiah dan pemberian lainnya di kemudian hari. Demikian pula, termasuk hadiah dan pemberian lainnya yang diberikan secara tidak langsung kepada seorang karyawan melalui keluarga dan sanak saudara/ atau pihak ketiga.

Setiap hadiah dan pemberian lainnya dalam bentuk apapun yang diterima setiap karyawan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib diserahkan/dilaporkan kepada departemen *Human Capital* untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan seluruh karyawan. *Human Resources and General Affair* ("HRGA") bersama-sama dengan *Board of Management* menentukan penggunaan hadiah tersebut.

Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah untuk hal-hal berikut:

- Hadiah berupa kalender, agenda, dan jamuan makan yang berhubungan dengan pekerjaan yang nilainya tidak material (dibawah Rp250.000).
- Barang contoh yang diberikan kepada Perusahaan atau karyawan yang nilainya bila dijual tidak memiliki nilai jual atau nilai tidak material (dibawah Rp250.000).

Pada setiap kejadian, karyawan wajib pada waktunya untuk membuat laporan tertulis kepada Direksi dalam rangka keterbukaan informasi atas pemberian ataupun tawaran hadiah, termasuk yang dikecualikan. Pengecualian terhadap peraturan ini akan dipertimbangkan dan disetujui oleh Direksi.

Code of Conduct

The main contents of the Company's Code of Conduct are as follows:

1. Integrity

Every employee must provide professional services with integrity and honesty that cannot be placed under profit and/or enjoyment personal.

2. Gifts and Other Prizes

Every employee, because of his position and work, is not allowed to ask for or accept gifts and other prizes for personal good in cash or non-cash, other personal interest services, whether given directly from buyers, suppliers, operators, vendors, dealers, broker, or any other parties who have business with the Company. In this case, gifts and other prizes also include promises to give or receive gifts and other prizes in later days. Likewise, including gifts and others that are given indirectly to an employee through family and relatives/ or third parties.

Any gifts or prize in whatever forms of each employee of the Company receives either directly or indirectly must be submitted/reported to the Human Capital department to then be used for the benefit of all employees. Human Resources and General Affairs ("HRGA") together with the Board of Management determine the use of the prize.

Exceptions to this provision include the following:

- Prizes in the form of calendars, agendas, and work-related meals whose value is immaterial (under Rp250,000).
- Sample goods given to the Company or employees whose value when sold has no selling value or immaterial value (below Rp250,000).

In any event, employees are required to make a written report in timely manner to the Board of Directors in the context of disclosure of information on gifts or offers of gifts, including the ones being excluded. Exceptions to this rule will be considered and approved by the Board of Directors.

3. Benturan Kepentingan

Setiap karyawan Perusahaan wajib menghindari situasi dimana kepentingan pribadinya mempunyai kemungkinan benturan kepentingan dengan jabatan dan pekerjaannya pada Perusahaan. Situasi tersebut dapat meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- i. Karyawan memberikan kontrak atau pekerjaan kepada perusahaan yang dimilikinya dan/atau mengandung benturan kepentingan dari pribadi dan/atau keluarga;
- ii. Karyawan memiliki kepentingan keuangan (selain pada perusahaan publik) terhadap pembeli, pemasok, operator, dealer, broker, vendor, atau pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan;
- iii. Karyawan mengoperasikan, mengendalikan dan/atau memiliki usaha lain;
- iv. Penggunaan aset Perusahaan (di luar tunjangan dan sarana resmi karyawan yang bersangkutan) untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun teman;
- v. Karyawan yang melakukan usaha tertentu untuk kepentingan pribadinya dari pada melakukan hal yang sama untuk kepentingan Perusahaan.

Bila karyawan terlibat pada situasi di atas, karyawan tersebut wajib untuk melaporkan setiap kejadian kepada HRGA *Department*, untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.

4. Sumber Daya Manusia

- i. Kebijakan Perusahaan adalah untuk selalu memperlakukan seluruh karyawan secara adil, tanpa memihak dan menjunjung tinggi harkat dan hak karyawan tanpa membedakan latar belakang karyawan;
- ii. Menciptakan suasana kerja yang positif dan berusaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh komentar-komentar yang bersifat destruktif dan pesimistis;
- iii. Perusahaan tidak menganjurkan untuk mempekerjakan karyawan yang mempunyai hubungan keluarga langsung (pasangan, anak sah, orang tua atau saudara sekandung atau tidak langsung, mertua dan ipar) dari karyawan yang sudah ada.

5. Kerahasiaan Informasi

Karyawan dilarang untuk memberitahukan, membocorkan atau membuka informasi rahasia Perusahaan.

3. Conflict of Interest

Every employee of the Company must avoid situations where his personal interests have a possible conflict of interest with his position and work with that of the Company. Such situations may include but are not limited to the following:

- i. Employees give contracts or jobs to companies that they own and/or contain conflict of interest from individuals and/or families;
- ii. Employees have a financial interest (other than a public company) towards buyers, suppliers, operators, dealers, brokers, vendors, or any other parties that have business relationships with the Company;
- iii. Employees operate, control and/or have other businesses;
- iv. Use of Company assets (outside of the employee's official allowances and facilities) for personal, family or friend's interests;
- v. Employees who conduct certain businesses for their personal interests rather than do the same for the benefit of the Company.

If employees are involved in the situation above, the employee is obliged to report every incident to the HRGA Department, to obtain approval from the Board of Directors.

4. Human Resources

- i. Company policy is to always treat all employees fairly, impartially, and uphold the dignity and employee rights regardless of the background the employees;
- ii. Creating a positive work atmosphere and trying to reduce the negative impact caused by destructive and pessimistic comments ;
- iii. The company does not recommend hire employees who have direct family relationship (spouse, legal children, parents, or direct siblings or not, and in-laws) of existing employees.

5. Confidentiality of Information

Employees are prohibited from notifying, leaking, or revealing Company's confidential information.

Sosialisasi, Penyebarluasan, dan Penegakan Kode Etik

Perusahaan melakukan sosialisasi, internalisasi, dan pemantauan atas Pedoman Tingkah Laku Perusahaan kepada seluruh karyawan dan pejabat dengan tujuan agar setiap individu memahami, mengerti, dan mengimplementasikan Pedoman tersebut. Sosialisasi dan Internalisasi Pedoman Tingkah Laku akan dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh setelah ditetapkan dan dilakukan secara berkala di tahun-tahun mendatang.

Pelanggaran atas hal-hal yang diatur dalam Pedoman Tingkah Laku bisa dikenakan sanksi berupa surat peringatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Tim Internal Audit juga secara berkala akan memeriksa atau memonitor kewajaran transaksi-transaksi yang dilakukan.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan, oleh karena itu setiap komponen wajib mematuhi kode etik untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dapat tercipta diantara seluruh pemangku kepentingan meliputi karyawan, pelanggan, mitra kerja, kreditur, pemerintah dan komunitas tempat dimana Perusahaan beroperasi. Pada saat pelaporan laporan tahunan ini, seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan telah menandatangani komitmen penerapan Pedoman Tingkah Laku.

Socialization, Dissemination, and Enforcement of the Code of Ethics

The Company performs dissemination, internalization, and monitoring of the Company's Code of Conduct to all employees and officers with the objectives to ensure that each individual comprehends, understands and implements the Guidelines. The Dissemination and Internalization of the Behavior Guidelines will be implemented in an effective and comprehensive manner after being established and conducted periodically in the coming years.

Violations against subjects regulated in the Code of Conduct may result in the granting of sanctions in the form of warning letters or termination. Internal Audit team also periodically investigates or monitors the fairness level of conducted transactions.

Enforcement of the Code of Ethics

The code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees, therefore each component must comply with the code of ethics to ensure fairness and balance can be created among all stakeholders including employees, customers, business partners, creditors, governments, and communities where the Company operates. At the time of this year's reporting, the entire Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees have signed the commitment to the implementation of the Code of Conduct.

Informasi tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen

INFORMATION ON EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak mengadakan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Until December 31, 2021, the Company did not have employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP).

Informasi tentang Kepemilikan dan Transaksi Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

INFORMATION ON OWNERSHIP AND TRANSACTIONS OF COMPANY'S STOCK BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Perusahaan tidak menerbitkan saham yang dimiliki oleh pribadi/perorangan. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki dan melakukan transaksi perdagangan saham Perusahaan.

The Company does not issue privately/individually owned stock. Therefore, there are no members Board of Commissioners and Board of Directors who own and conduct Corporate stock trading transactions.

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan berkomitmen untuk terus membangun pelaksanaan usaha yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari budaya keseluruhan. Untuk memastikan peran serta seluruh jajaran Perusahaan dalam mengupayakan pelaksanaan usaha tanpa kecurangan dan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran atas Kode etik, Perusahaan telah mengembangkan sistem pelaporan (*whistleblowing system*) yang didasari prinsip transparansi dan keterbukaan.

Keberadaan dan Tujuan *Whistleblowing System*

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan, Perusahaan senantiasa mendorong setiap karyawan untuk berperilaku secara adil dan terbuka dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, integritas, dan etika yang tinggi. Pada lingkup lingkungan Perusahaan, upaya ini mendapatkan penekanan melalui serangkaian kebijakan terkait prinsip-prinsip dan standar tingkah laku yang ditetapkan bagi seluruh karyawan dalam Kode etik Perusahaan.

Pada 16 Juli 2017, Perusahaan membentuk *Whistleblower Policy* seiring dengan penegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Perusahaan. Kebijakan *Whistleblower* ini terus berfungsi sebagai panduan kebijakan dan mekanisme bagi seluruh karyawan dalam melaporkan setiap perilaku tidak etis, baik telah terjadi maupun masih berupa kecurigaan, kecurangan, atau pelanggaran atas Kode Etik Perusahaan.

The Company is committed to continuing to build healthy and sustainable business implementation as an integral part of the overall culture. To ensure the participation of all levels of the Company in strive to conduct business without fraud and corrupt practices, collusion, nepotism, and violations on the Code of ethics, the Company has developed a whistleblowing system based on the principles of transparency and openness.

The Existence and Purpose of a Whistleblowing System

In carrying out all activities, the Company always encourages every employee to behave fairly and openly by prioritizing values professionalism, honesty, integrity, and ethics. Within the scope of the Company's environment, this effort gains emphasis through a series of policies related to the principles and standards of behavior that established for all employees in the Company's Code of ethics.

On July 16, 2017, the Company established a Whistleblower Policy along with enforcing the values that are contained in the Company's Code of Ethics. This whistleblower policy continues to serve as guide policies and mechanisms for all employees in reporting any unethical behavior, whether it has occurred or still in the form of suspicion, fraud, or violation of the Company's Code of Ethics.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Jenis laporan yang dapat ditindaklanjuti disebut dengan "Pengungkapan yang dilindungi". Pengaduan ini terutama berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Perusahaan dan pelanggaran lainnya seperti:

1. Penyalahgunaan fasilitas;
2. Pengancaman;
3. Dugaan penyelewengan uang Perusahaan;
4. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
5. Penggelapan aset Perusahaan;
6. Penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
7. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
8. Pembocoran rahasia Perusahaan;
9. Pemerasan;
10. Pencurian;
11. Penipuan;
12. Kecurangan;
13. Pelanggaran disiplin;
14. Benturan kepentingan;
15. Korupsi;
16. Kolusi; dan
17. Nepotisme.

Pengelola Laporan Pengaduan

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi dengan setiap karyawan. Untuk itu, Perseroan mengembangkan beberapa sarana salah satunya adalah melalui Surel/Email : whistleblower@moratelindo.co.id untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan atau hubungan industrial. Perseroan menjamin kerahasiaan data dan informasi karyawan. Pihak internal dan pihak eksternal Perseroan dapat melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal Perseroan melalui Surel/Email yang tertera diatas. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Hasil investigasi laporan tindakan fraud menjadi dasar bagi pejabat pemutus dalam memberikan sanksi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor harus memberikan informasi, bukti atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, bukan merupakan hal-hal spekulatif, dan berisi informasi spesifik yang memenuhi unsur-unsur 4W 1H, yaitu sebagai berikut:

Types of Violations that can be Reported

This type of actionable report is called "Protected disclosure". This complaint is mainly related to violations of the Company's Code of Ethics and other violations such as:

1. Misuse of facilities;
2. Threats;
3. Allegations of misappropriation of the Company's money;
4. Misuse of office for personal gain or other groups or interests outside the Company;
5. Embezzlement of Company assets;
6. Acceptance, giving and requesting gratuities;
7. Violation of ethics and immoral acts;
8. Disclosure of Company secrets;
9. Blackmail;
10. Theft;
11. Fraud;
12. Cheating;
13. Discipline violations;
14. Conflict of interest;
15. Corruption;
16. Collusion; and
17. Nepotism.

Complaint Report Manager

The Company is committed to always maintaining communication with every employee. To that end, the Company has developed several means, one of which is through E-mail/Email: whistleblower@moratelindo.co.id to obtain information on employment or industrial relations. The Company guarantees the confidentiality of employee data and information. Internal parties and external parties of the Company can report acts of fraud or violations committed by perpetrators within the Company's internal environment via the Email/Email listed above. The Company guarantees the confidentiality of the identity of the reporter and the contents of the report. The results of investigations into reports of fraudulent acts become the basis for decision-making officials in imposing sanctions.

Submission of Violation Reports

Submission of reports of alleged violations committed by the Whistleblower must provide information, evidence, or a clear suspicion of a violation that is reported, is not speculative, and contains specific information that meets the elements of 4W 1H, namely:

1. *What*: apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?
2. *Where*: dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi dilakukan?
3. *When*: kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. *Who*: siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. *How*: bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Pelaksanaan *whistleblower* untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Audit. Kinerja penerapan *whistleblower* dilaporkan oleh Unit Audit Internal setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh stakeholders Perseroan dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan (*Sustainability Report*). Perseroan dapat meminta pihak independen eksternal untuk melakukan penilaian terhadap kinerja *whistleblower* secara obyektif sesuai dengan standar tertentu. *Whistleblower* ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek dan konteks bisnis Perseroan.

Dalam menyampaikan laporannya, Pelapor harus menyertakan identitas secara jelas. Pengelola Laporan akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, dan apabila laporan diteruskan ke pihak lain, maka identitas Pelapor tidak akan disebutkan.

Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan melalui:

1. Semua laporan terkait keuangan/akunting ditujukan kepada Ketua Komite Audit untuk diselidiki lebih lanjut;
2. Semua laporan terkait Direktur atau level di atas Direksi disampaikan kepada Ketua Komite Audit;
3. Laporan selain poin (1) dan (2) dapat ditujukan kepada Direktur/*General Manager Human Resources*;
4. Apabila laporan ternyata diterima oleh pihak eksekutif Perusahaan selain Ketua Komite Audit atau Direktur/*General Manager Human Resources*, maka laporan harus disampaikan kepada Ketua Komite Audit dan/atau Direktur/*General Manager Human Resources* untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.

Perlindungan bagi 'Whistleblower'

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor meliputi jaminan terhadap kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan sesuai dengan undang-undang, serta jaminan keamanan bagi Pelapor dari Perusahaan terhadap perlakuan

1. *What*: what are the alleged violations known to the Whistleblower?
2. *Where*: where does the violation take place?
3. *When*: when does the violation occur?
4. *Who*: who is involved in the violation?
5. *How*: how is the violation occur?

The implementation of the whistleblower for each scope is coordinated, monitored and evaluated by the Audit Committee. The performance of the whistleblower implementation is reported annually by the Internal Audit Unit to the Board of Directors, Board of Commissioners and all stakeholders of the Company in the Company's Sustainability Report. The Company may ask external independent parties to evaluate the whistleblower performance objectively in accordance with certain standards. This whistleblower is evaluated and if necessary it can be revised according to the development of the Company's business aspects and context.

In submitting the report, the Whistleblower must include a clear identity. Report Manager will maintain the confidentiality of the identity of the Whistleblower and if the report is forwarded to another party, the identity of the Reporting Party will not be mentioned.

Submission of violation reports can be done through:

1. All reports related to finance/accounting are addressed to the Chairman of the Audit Committee for further investigation;
2. All reports related to the Director or level above the Board of Directors submitted to the Chairman of the Audit Committee;
3. Reports other than points (1) and (2) can be addressed to Director/*General Manager of Human Resources*;
4. If the report turns out to be accepted by the Company's executive parties other than the Chairman of the Audit Committee or the Director/*General Manager of Human Resources*, the report must be submitted to the Chairman of the Audit Committee and/or Director/*General Manager of Human Resources* for further follow-up.

Protection for Whistleblower

The Company provides protection to the Complainant covering the confidentiality of the identity of the Complainant and the contents of the report in accordance with the Law, as well as the security guarantee of the Complainant against

yang merugikan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak adil, pemindahan tugas, demosi, penolakan promosi, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, ancaman, pelecehan atau diskriminasi dan praktik ketidakadilan di tempat kerja dalam segala bentuk lainnya.

Sosialisasi 'Whistleblowing System'

Perusahaan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* lainnya.

Penanganan Pengaduan

Proses pengelolaan laporan adalah sebagai berikut:

1. Setiap laporan "Pengungkapan yang dilindungi" akan dilakukan penyelidikan secara seksama oleh Ketua Komite Audit Perusahaan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah;
2. Ketua Komite Audit sesuai dengan pertimbangannya, dapat melibatkan penyelidik lain dalam melakukan penyelidikan;
3. Keputusan untuk melakukan penyelidikan oleh Ketua Komite Audit Perusahaan tidak berarti bahwa tuduhan telah diputuskan, melainkan hanya bagian dari proses pencarian fakta;
4. Subjek Terlapor dapat diinformasikan mengenai tuduhan yang ditujukan kepadanya dan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi selama proses penyelidikan;
5. Subjek Terlapor wajib bekerja sama dengan Pengelola Laporan selama proses penyelidikan berlangsung;
6. Subjek Terlapor memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak lain sesuai dengan pilihannya, di luar Penyelidik dan/atau anggota Komite Audit dan/atau Pelapor. Subjek Terlapor diperbolehkan untuk mendapat pendampingan dari penasihat hukum dengan biaya sendiri selama proses penyelidikan berlangsung;
7. Apabila tuduhan terhadap Subjek Terlapor tidak terbukti, maka Perusahaan akan mengganti biaya penasihat hukum tersebut;
8. Subjek Terlapor tidak diperbolehkan mengganggu proses penyelidikan, memusnahkan, menyembunyikan, atau merubah bukti-bukti laporan, dan mempengaruhi, mengancam, atau mengintimidasi saksi;

harmful treatments, such as unfair termination, assignment transfer, demotion, rejection of promotion, or downgrade of position or ranks, intimidation, threats, harassment or discrimination, and practices of workplace injustice in all other forms.

Socialization of 'Whistleblowing System'

The company socializes the Whistleblowing System to all Company employees to provide understanding on policies and mechanisms for reporting violations. The company also conducts socialization to other stakeholders.

The Handling of Complaints

The report management process is as follows:

1. Each "Protected Disclosure" report will be carried out a thorough investigation by the Chairman of the Company's Audit Committee by prioritizing the principles of presumption of innocence;
2. Chairman of the Audit Committee in accordance with his considerations, may involve other investigators in conducting investigation;
3. The decision to conduct an investigation by the Chairman of the Company's Audit Committee does not mean that allegations are decided, but only part of the process of fact finding;
4. Reported Subjects can be informed about accusations leveled against him and given opportunity to provide clarification during the investigation process;
5. Reported Subjects are required to cooperate with the Management Reports during the investigation process;
6. The Subject of the Reported Party has the right to consult with other parties according to their choice, outside the Investigator and/or members of the Audit Committee and/or Whistleblower. Reported Subjects are allowed to get assistance from legal counsel at their own expense during the investigation process ongoing;
7. If the accusation against the Reported Subject is not proven, the Company will reimburse the costs of the legal advisor;
8. The Subject of the Reported Party is not allowed to interfere with the investigation process, destroy, hide, or alter the evidence in the report, and affect, threaten, or intimidate witnesses;

9. Kecuali terdapat alasan yang memaksa untuk tidak melakukannya, Subjek Terlapor akan diberikan kesempatan untuk merespon hasil temuan yang tercantum dalam laporan penyelidikan. Tidak ada tuduhan yang dapat ditujukan kepada Subjek Terlapor kecuali terdapat bukti-bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut;
10. Subjek Terlapor memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai hasil penyelidikan. Jika tuduhan tidak dilanjutkan, maka Subjek Terlapor berhak untuk menolak atau menerima apakah hasil penyelidikan dapat dipublikasikan demi kepentingan Subjek Terlapor dan Perusahaan;
11. Penyelidikan harus diselesaikan dalam jangka waktu 45 hari sejak diterimanya laporan "Pengungkapan yang dilindungi".

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengelola laporan dapat melibatkan penyidik dari pihak lain apabila diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyidik disyaratkan untuk melakukan proses pencarian fakta dan menganalisisnya. Penyidik mendapatkan otoritas dan hak akses dari Komite Audit saat melaksanakan tugasnya dalam proses penyelidikan.
2. Hal-hal teknis dan sumber-sumber lainnya akan diberikan apabila diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan. Penyidik harus memposisikan tidak memihak dan tidak bias dalam menyampaikan fakta dan kesimpulan. Penyidik wajib untuk berlaku adil, objektif, seksama, berlaku etis, dan melaksanakan standar legal profesional.
3. Proses penyelidikan akan dilakukan setelah adanya peninjauan pendahuluan oleh Ketua Komite Audit dalam hal:
 - a. Tuduhan menunjukkan adanya aktivitas yang tidak sesuai atau tidak etis; dan
 - b. Tuduhan yang didukung dengan informasi yang cukup spesifik untuk dilakukan penyelidikan atau dalam kasus di mana tuduhan tidak didukung oleh informasi spesifik, namun dirasa cukup pantas untuk ditinjau oleh manajemen.

Pengaduan pada Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan pelanggaran melalui mekanisme Perusahaan "Pengungkapan yang dilindungi".

9. Unless there is a compelling reason not to do so, the Reported Subject will be given opportunity to respond to the findings included in the investigation report. There is not any accusations that can be directed against the Reported Subject unless there is strong evidence to support the allegation;
10. The Subject of the Reported Party has the right to obtain information about the results of the investigation. If the accusation is not continued, the Reported Subject has the right to reject or accept whether the results of the investigation can be published for the benefit of the Reported Subject and Company;
11. The investigation must be completed within 45 days from receipt of the "Protected disclosure" report.

As previously mentioned, complaint manager can involve external investigator if needed, with the following provisions:

1. The investigator must conduct fact-finding process and analyze the facts. The investigator is given authority and access rights from the Audit Committee upon carrying out their tasks in the investigation process.
2. Technical matters and other resources will be granted if needed to support the investigation process. The investigator must be in a neutral and unbiased position in conveying facts and conclusions. The investigator must be fair, objective, precise, ethical, and conduct their job based on professional legal standards.
3. The investigation process will be conducted after initial review by the Audit Committee on:
 - a. Allegation showing activities that are inappropriate and unethical; and
 - b. Allegation being supported by information specific enough to investigate upon or in cases where allegation is not supported by specific information yet deemed quite proper for the management to investigate upon.

Complaints in 2021

Throughout 2021, there were no reports on violation through the Company's "Protected disclosure" mechanism.

Kebijakan Anti Korupsi ANTICORRUPTION POLICIES

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Kebijakan dan prosedur terkait anti-korupsi di lingkup Perusahaan saat ini tertuang di dalam Kode Etik. Di dalamnya dijelaskan larangan untuk meminta atau menerima pemberian dari pihak berkepentingan seperti *customer*, vendor pekerjaan jasa, vendor pengadaan barang, dan pihak lain baik dalam bentuk tunai atau pun lainnya untuk keuntungan pribadi. Kode Etik Perusahaan ditandatangani oleh setiap karyawan tanpa terkecuali di setiap awal periode tahun. Departemen *Human Resources* bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris memastikan kebijakan tersebut berlaku dan dijalankan dengan baik.

Selain itu, Perusahaan memastikan dan mengupayakan peran serta seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan usaha bersih tanpa ada kecurangan dan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran atas kode etik dengan mengembangkan sistem pelaporan (*Whistleblowing System*) yang didasari prinsip transparansi. Perusahaan juga membentuk *Whistleblower Policy* yang berfungsi sebagai panduan kebijakan dan mekanisme bagi seluruh karyawan dalam melaporkan setiap perilaku tidak etis, baik yang telah terjadi maupun masih berupa kecurigaan, kecurangan, atau pelanggaran Kode Etik Perusahaan.

Dalam implementasi *Whistleblower Policy*, Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*) meliputi jaminan terhadap kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan sesuai dengan undang-undang, serta jaminan keamanan bagi Pelapor dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak adil, pemindahan tugas, demosi, penolakan promosi, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, ancaman, pelecehan atau diskriminasi dan praktik ketidakadilan di tempat kerja dalam segala bentuk lainnya.

Sosialisasi Anti Korupsi

Di tahun 2021, Perusahaan belum melakukan sosialisasi/kampanye/pelatihan anti korupsi kepada karyawan.

Programs and Procedures Implemented to Overcome Practices of Corruption, Kickbacks, Fraud, Bribery, and/or Gratification

Policies and procedures related to anti-corruption within the Company is currently contained in the Code of Ethics. It explains the prohibition to ask for or receive gifts from any parties such as customers, service work vendors, goods procurement vendors, and other parties either in cash or in other kinds for personal gain. Company's Code of Conduct is signed by every employee without exception at the beginning of each period of the year. Human Resources Department and the Board of Directors and the Board of Commissioners ensure the policy is valid and implemented properly.

In addition, the Company ensures and strives for the participation of all personnel of the company in carrying out clean business without any fraud and corrupt practices, collusion, nepotism, and violations of the code of ethics by developing a reporting system (*Whistleblowing System*), which is based on the principle of transparency. The Company also establishes a *Whistleblower Policy* that functions as policy guidelines and mechanisms for all employees in reporting any unethical behavior, whether already occurred or is still in the form of suspicion, fraud, or violation of the Company's Code of Ethics.

In implementing the *Whistleblower Policy*, the Company provides protection to the whistleblower, which includes guarantee on the confidentiality of the identity of the Complainant and the contents of the report in accordance with the Law, as well as the security guarantee of the Complainant against harmful treatments, such as unfair termination, assignment transfer, demotion, rejection of promotion, or downgrade of position or ranks, intimidation, threats, harassment or discrimination, and practices of workplace injustice in all other forms.

Dissemination of Anti-Corruption

In 2021, the Company had not conducted socialization/campaign/trainings on anti-corruption to all employees.

Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Sebagai Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum Obligasi dan Sukuk di pasar modal, Perusahaan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini juga membuat Perusahaan secara bertahap dan konsisten melakukan penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa rekomendasi penerapan pedoman tata kelola perusahaan yang baik telah diimplementasikan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Obligasi dan Sukuk Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Efek:
 - Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Fungsi dan Peran Direksi:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan:
 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
5. Keterbukaan Informasi:
 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

As a Company that has conducted Bond and Sukuk public offerings on the capital market, the Company complies with and is subject to applicable laws and regulations. This compliance also makes the Company gradually and consistently implement the corporate governance guidelines issued by the Financial Services Authority.

Several recommendations for the implementation of good corporate governance guidelines have been adopted by the Company, namely:

1. Company Relations with Bond and Sukuk Securities Holders in Guaranteeing the Rights of Securities Holders:
 - Increase the Value of the General Meeting of Bondholders and Sukuk Ijarah Holders.
 - Improve the Quality of the Company's Communication with Bond and Sukuk Ijarah Holders.
2. Functions and Roles of the Board of Commissioners:
 - Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.
 - Improve the Quality of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Functions and Roles of Board of Directors:
 - Strengthen the Membership and Composition of Board of Directors.
 - Improve the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors.
4. Stakeholder Participation:
 - Improve Corporate Governance Aspects through Stakeholder Engagement.
5. Information Disclosure:
 - Improve the Implementation of Information Disclosure.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



► Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



06

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Tahun 2021 menjadi terobosan bagi Perusahaan dengan menerbitkan perdana Laporan Keberlanjutan melalui buku terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan tersebut disusun dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Meskipun menjadi buku terpisah, Laporan Keberlanjutan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran OJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini dibuktikan dengan dirilisnya Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan Laporan Tahunan, yaitu 12 April 2022.

The year 2021 will be a breakthrough for the Company by publishing a Sustainability Report separately from the Annual Report for the first time. Sustainability Report is prepared with reference to the Regulation of OJK No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Company. Despite being a separate book, Sustainability Report is an inseparable document of this Annual Report, as required in OJK Circular Letter No. 16 /SEOJK.04/2021 concerning Forms and Contents of the Annual Report of the Issuer or Public Company. This is evidenced by the release of the Sustainability Report together with the Annual Report, on April 12, 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Laporan Keuangan **FINANCIAL STATEMENTS**



07

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak/*and Its Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 /
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page
Laporan Auditor Independen/Independent Auditor's Report	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019/ <i>The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia and Its Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019</i>	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6
Lampiran/Attachments	
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Financial Position</i> <i>Parent Entity</i>	i.1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/ <i>Parent Entity</i> <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	i.3
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Changes in Equity</i>	i.4
Laporan Arus Kas Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Cash Flows</i>	i.5

Laporan Auditor Independen**No. 00013/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2022****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Mora Telematika Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report**No. 00013/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2022****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Mora Telematika Indonesia**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Mora Telematika Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan entitas induk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk, laporan perubahan ekuitas entitas induk, dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

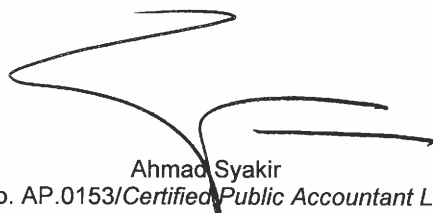
Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mora Telematika Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Mora Telematika Indonesia (parent entity), which comprise the parent entity statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the parent entity statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir

Izin Akuntan Publik No. AP.0153/Certified Public Accountant License No. AP.0153

23 Februari 2022/February 23, 2022

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019**

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu
Identitas lain/Residential Address
/in accordance with Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

- : Ir. Galumbang Menak
: Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
: Jl. Denpasar Barat Blok C-6/18,
Jakarta Selatan
: 021-31998600
: Direktur Utama / President Director

2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu
Identitas lain/Residential Address
/in accordance with Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

- : Jimmy Kadir
: Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,
Jakarta Pusat 10320
: Jl. Gading Elok Timur V
RT 011 RW 009, Kelapa Gading Timur,
Jakarta Utara
: 021-31998600
: Wakil Direktur Utama / Vice President Director

menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company consolidated financial statements As of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019.
2. The Company consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and
b. The Company consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

23 Februari 2022/February 23, 2022



Ir. Galumbang Menak
Direktur Utama/President Director

Jimmy Kadir
Wakil Direktur Utama / Vice President Director

PT. Mora Telematika Indonesia

Grha 9 6th floor, Jl. Panataran No. 9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia
Tel : +62-21-31998600 Fax : +62-21-314 2882 <http://www.moratelindo.co.id>

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha	6				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	41	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 37.583.659.725, Rp 19.431.188.627 dan Rp 12.139.756.573 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019		343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 37,583,659,725, Rp 19,431,188,627 and Rp 12,139,756,573 as of December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively
Piutang lain-lain		18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	7	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	Current portion of service concessions receivable
Uang muka	8	72.089.158.670	12.018.186.704	33.367.942.282	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	100.285.225.550	102.262.438.098	76.569.478.392	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	10	134.368.931.143	218.807.271.471	276.773.611.239	Prepaid taxes
Aset yang dibatasi penggunaannya	11	32.148.574.941	-	-	Restricted assets
Aset lancar lain-lain	16	97.583.587.825	40.019.849.662	24.678.441.461	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		3.442.650.087.617	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Aset yang dibatasi penggunaannya	11	3.644.167.725	5.203.306.285	5.904.094.734	Restricted assets
Investasi	12	-	-	-	Investments
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	7	4.541.712.843.560	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185	Service concession receivable - net of current portion:
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 721.269.881.783, Rp 156.430.889.561 dan Rp 763.833.897.971 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	13	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 721,269,881,783, Rp 156,430,889,561 and Rp 763,833,897,971 as of December 31, 2021, 2020, and 2019 respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 668.221.526, Rp 536.768.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	4	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty assets - net of accumulated depreciation of Rp 668,221,526, Rp 536,768,111 and Rp 405,314,696 as of December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 9.636.889.245, Rp 6.348.559.546 dan Rp 5.352.578.476 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	15	7.364.203.492	734.940.030	190.784.834	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 9,636,889,245, Rp 6,348,559,546 and Rp 5,352,578,476 as of December 31, 2021, 2020, and 2019 respectively
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 102.684.604.048 dan Rp 58.666.842.937 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	14	144.173.481.642	163.479.750.575	-	Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp 102,684,604,048 and Rp 58,666,842,937 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Aset pajak tangguhan	37	9.284.043.097	4.044.727.261	7.250.865.308	Deferred tax assets
Aset lain-lain	16	132.524.635.159	73.669.039.539	28.265.065.487	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		11.122.751.010.461	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	17				Trade accounts payable
Pihak berelasi	41	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Related parties
Pihak ketiga		1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Third parties
Utang lain-lain	18				Other accounts payable
Pihak berelasi	41	6.900.000	3.774.000	34.907.117	Related parties
Pihak ketiga		89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870	Third parties
Utang pajak	19	27.883.905.643	16.693.831.960	29.549.539.781	Taxes payable
Beban akrual		99.990.940.519	70.345.694.169	38.169.028.516	Accrued expenses
Uang muka penjualan	20	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961	Advances from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	23	1.164.750.861.401	954.401.804.443	1.760.476.321.040	Bank loans
Utang obligasi	25	458.861.999.070	-	537.996.897.073	Bonds payable
Sukuk ijarah	26	346.332.585.924	-	-	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	24	49.054.755.294	48.421.582.510	19.266.814.917	Lease liabilities
Utang non-bank	22	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	21	28.935.826.669	23.204.325.364	24.868.597.797	Deferred income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3.434.466.972.634	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	17	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Trade account payable - third parties
Liabilitas pajak tangguhan	37	26.754.761.296	40.842.406.696	2.090.170.498	Deferred tax liabilities
Uang muka penjualan	20	222.925.986.194	405.507.785.560	135.809.178.725	Advances from customers
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	23	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918	Bank loans
Utang obligasi	25	-	457.840.131.932	456.931.511.211	Bonds payable
Sukuk ijarah	26	1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	24	66.780.826.096	107.227.136.019	69.829.464.033	Lease liabilities
Utang non-bank	22	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	21	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761	Deferred income
Utang kepada pemegang saham	27	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	38	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.663	Long-term employee benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6.572.556.418.461	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10.007.023.391.095	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740	TOTAL LIABILITIES
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Modal Saham					Capital Stock
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021					Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,285 series B shares and 764,490 series C shares as of December 31, 2021
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	29	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015	Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares and 338,285 series B shares as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	30	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset		345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232	Revaluation surplus of property and equipment
Cadangan umum	39	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000	General reserve
Saldo laba		1.646.354.820.803	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298	Retained earnings
Komponen ekuitas lainnya		25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.979.351	Others equity component
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		4.185.852.377.281	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984	Total Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Kepentingan Nonpengendali	31	372.525.329.702	269.702.999.993	168.130.348.157	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		14.565.401.098.078	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
PENDAPATAN	32	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	33	(1.642.782.786.475)	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR		2.537.290.279.680	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	34	(993.298.500.196)	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		1.543.991.779.484	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan bunga		14.960.608.236	8.044.748.541	27.305.806.455	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - bersih		4.383.672.982	(6.463.527.389)	1.753.620.682	Gain (loss) on foreign exchange - net
Rugi pelepasan aset tetap	13	(249.118.437)	(26.775.755)	(73.715.924)	Loss on disposal of property and equipment
Beban bunga dan keuangan	35	(774.095.787.685)	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)	Interest expense and financial charges
Lain-lain - bersih	36	12.585.947.803	32.986.071.772	191.789.866.531	Others - net
Beban Lain-Lain - Bersih		(742.414.677.101)	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final		12.803.021.495	8.428.716.103	11.873.736.387	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		788.774.080.888	780.574.561.087	848.019.744.007	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK	37				TAX EXPENSE
Pajak kini		125.037.144.219	95.168.745.184	81.428.362.483	Current tax
Pajak tangguhan		(7.641.666.526)	5.728.240.463	90.541.288.125	Deferred tax
Beban Pajak - Bersih		117.395.477.693	100.896.985.647	171.969.650.608	Tax Expense - Net
LABA TAHUN BERJALAN		671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	13	-	377.262.681.230	-	Gain on revaluation of property and equipment
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	37	7.781.051.155	(37.726.268.123)	-	Deferred tax of revaluation assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	38	3.047.243.628	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	37	(788.971.406)	1.496.134.341	2.999.939.100	Tax relating to remeasurement of defined benefit liabilities
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will be reclassified subsequently to profit and loss -
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri		1.344.292.759	940.440.721	(3.446.655.747)	Exchange difference on translation of foreign operation
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		11.383.616.136	335.041.034.907	(13.206.477.635)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		578.928.827.717	578.003.431.371	591.495.494.441	Owners of the Parent Company
Kepentingan non-pengendali	31	92.449.775.478	101.674.144.069	84.554.598.958	Non-controlling interests
		671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO:
diatribusikan kepada:					attributable to:
Pemilik entitas induk		590.018.588.786	913.116.358.511	578.843.815.708	Owners of the Parent Company
Kepentingan non-pengendali	31	92.743.630.545	101.602.251.836	83.999.800.056	Non-controlling interests
		682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764	
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM					EARNING PER SHARE FROM PROFIT FOR THE YEAR
Dasar	40	842.436	982.606	1.005.543	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owners of the Parent Company									
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal disetor/ Additional Paid In Capital	Surplus		Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo Laba/ Retained Earnings	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
			Tambahan Modal disetor/ Additional Paid In Capital	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Property and Equipment					
	208.750.159.015	(2.530.088.912)		127.652.880.987	-	995.629.268.108	1.445.796.874.276	84.203.224.706	1.530.000.098.982
Saldo Pada tanggal 1 Januari 2019									
Penghasilan komprehensif Labat tahun berjalan	-	-	-	-	-	591.495.494.441	591.495.494.441	84.554.598.958	676.050.093.399
Rugi komprehensif lain Selain kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri Pajak penghasilan imbalan kerja jangka panjang-berakhir	-	-	-	-	-	-	(3.446.655.747)	-	(3.446.655.747)
38	-	-	-	-	-	(9.205.022.598)	(9.205.022.598)	-554.798.902	(9.759.821.888)
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	-	1.577.919.759.593	2.024.840.689.984	168.203.024.762	2.192.843.714.746
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	(23.328.689.735)	-	23.328.689.735	-	-	-
Transaksi dengan pemilik Dividen dari entitas anak non pengendali Penentuan cadangan umum	-	-	-	-	-	-250.000.000.000	-	(72.676.605)	(72.676.605)
39	-	-	-	-	-	-25.000.000.000	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	104.324.191.232	104.324.191.232	25.000.000.000	1.576.248.449.298	2.024.840.689.984	168.130.348.157	2.192.771.038.141
Penghasilan komprehensif Labat tahun berjalan	-	-	-	-	-	578.003.431.371	578.003.431.371	101.674.144.069	679.677.575.440
Penghasilan (rugi) komprehensif lain Keuntungan revaluasi aset tetap setelah dampak pajak Selain kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri Pajak penghasilan imbalan kerja jangka panjang-berakhir	-	-	-	339.536.413.107	-	-	339.536.413.107	-	339.536.413.107
38	-	-	-	-	-	-	940.440.721	-	940.440.721
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	-	(5.363.926.688)	(5.363.926.688)	-71.892.233	(5.435.818.921)
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	339.536.413.107	-	339.536.413.107	-	-	-
Transaksi dengan pemilik Dividen dari entitas anak non pengendali Penentuan cadangan umum	-	-	-	(12.048.093.988)	-	12.048.093.988	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-34.750.031.803	-	(29.600.000)	(29.600.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.812.510.351	431.812.510.351	59.750.031.803	2.126.186.016.166	2.937.757.048.495	269.702.999.993	3.207.460.048.488
Penghasilan komprehensif Labat tahun berjalan	-	-	-	-	-	578.928.827.717	578.928.827.717	92.449.775.478	671.378.603.195
Penghasilan komprehensif lain Dampak pajak atas revaluasi aset tetap Selain kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri Pajak penghasilan imbalan kerja jangka panjang-berakhir	-	-	-	7.781.051.155	-	-	7.781.051.155	-	7.781.051.155
13	-	-	-	-	-	-	1.344.292.759	-	1.344.292.759
38	-	-	-	-	-	1.964.417.155	1.964.417.155	293.855.067	2.258.272.222
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	-	580.893.244.872	580.893.244.872	92.743.630.545	682.762.219.331
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	-	-	94.569.099.765	-	-	-
Transaksi dengan pemilik Pembelian saham Dividen dari entitas anak non pengendali	-	-	-	(94.569.099.765)	-	-	-	-	-
33	1.813.370.280.000	-	-	-	-	(1.155.293.540.000)	1.813.370.280.000	-	1.813.370.280.000
Dividen dari entitas anak non pengendali	-	-	-	-	-	-	(1.155.293.540.000)	(46.000.000)	(1.155.293.540.000)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.112.120.439.015	(2.530.088.912)	345.024.451.741	345.024.451.741	59.750.031.803	1.646.354.820.803	4.185.852.377.581	372.525.329.702	4.558.377.706.983

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Note	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		4.547.281.071.132	4.283.756.296.516	2.370.410.365.766	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(2.246.778.778.396)	(1.742.766.189.349)	(883.565.699.082)	Cash paid to suppliers and employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih		2.300.502.292.736	2.540.990.107.167	1.486.844.666.684	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak		141.563.957.502	157.384.852.974	57.271.918.246	Cash receipt from tax refund
Penerimaan bunga		15.203.804.882	8.044.887.544	27.280.117.346	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan		(118.777.535.917)	(92.833.898.681)	(62.352.817.518)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(726.876.317.038)	(750.950.274.483)	(615.821.966.219)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>1.611.616.202.165</u>	<u>1.862.635.674.521</u>	<u>893.221.918.539</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak		2.243.001.233	-	-	Net cash in flow at acquisition date - net off cash balance of acquired subsidiary
Pencairan deposito		4.166.575.631	-	-	Withdrawal of restricted deposits
Pembayaran uang muka		-	(58.994.341.496)	(959.532.265.884)	Advance payment
Penempatan deposito		(33.004.042.765)	-	-	Placement of deposits
Pembayaran bunga dan biaya - biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap		(42.925.277.176)	(27.196.275.579)	(19.754.874.340)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Perolehan aset tetap dan aset lain-lain		<u>(1.357.080.764.889)</u>	<u>(1.278.314.588.090)</u>	<u>(1.864.342.424.568)</u>	Acquisitions of property and equipment and other assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(1.426.600.507.966)</u>	<u>(1.364.505.205.165)</u>	<u>(2.843.629.564.792)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari:					Proceeds from:
Setoran modal	29	1.813.370.280.000	-	-	Paid in capital
Utang bank		1.093.446.423.074	240.000.000.000	2.107.881.073.175	Bank loans
Penerbitan sukuk	26	500.000.000.000	666.515.000.000	1.000.000.000.000	Issuance of sukuk ijarah
Utang non-bank		53.715.626.646	-	-	Non-bank loans
Pembayaran:					Payment of:
Utang non-bank		(19.639.949.088)	(14.091.003.490)	(67.247.824.396)	Non-bank loans
Liabilitas sewa		(29.675.052.297)	(19.903.983.838)	(17.201.666.860)	Lease liabilities
Utang pemegang saham	27	(844.408.372.000)	-	-	Shareholder loan
Utang bank		(1.032.960.077.254)	(1.767.216.363.954)	(386.127.660.382)	Bank loans
Dividen		(1.155.332.640.000)	-	-	Dividends
Utang obligasi	25	-	(540.000.000.000)	-	Bonds
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>378.516.239.081</u>	<u>(1.434.696.351.282)</u>	<u>2.637.303.921.537</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS					NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		563.531.933.280	(936.565.881.926)	686.896.275.284	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN					CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
		494.777.973.772	1.432.164.203.492	746.439.069.086	
Selisih transaksi dalam mata uang asing		<u>886.027.967</u>	<u>(820.347.794)</u>	<u>(1.171.140.878)</u>	Effect of changes in foreign exchange rates
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN					CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
		<u>1.059.195.935.019</u>	<u>494.777.973.772</u>	<u>1.432.164.203.492</u>	

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mora Telematika Indonesia (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 20 Juli 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0074543.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang jasa teknologi dan telekomunikasi, pengembang, perdagangan, industri komputer, pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang usaha internet, sewa jaringan interkoneksi, domestik maupun internasional. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Lantai 1, 2, dan 6, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

PT Candrakarya Multikreasi merupakan entitas induk Perusahaan. Pemegang saham akhir Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) adalah Ir. Galumbang Menak dan Farida Bau. Grup didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan Singapura.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Mora Telematika Indonesia (the Company) was established based on the Notarial Deed No. 30 dated August 8, 2000 of Daniel Parganda Marpaung, S.H., a public notary in Jakarta. The deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 dated December 21, 2000 and published in the State Gazette No. 58 dated July 20, 2007. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 39 dated December 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, concerning additional of the authorized, issued and paid-up shares. These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0074543.AH.01.02. Tahun 2021 dated December 22, 2021.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in the business of technology and telecommunication services, developer, trading, computer industry, mining, transportation, agricultural, printing and maintenance. The Company is currently engaged in the internet, rental link of interconnection, domestic and international. The Company sells its products in domestic and foreign markets.

The Company started its commercial operations in 2001. The Company is domiciled in Jakarta and its office is located at Graha 9 Building 1st, 2nd, and 6th floor, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

PT Candrakarya Multikreasi is the parent company. Ir. Galumbang Menak and Farida Bau are the ultimate shareholders of the Company and its subsidiaries (herein after referred to as the Group). The Group is incorporated in Indonesia and conduct its operations in Indonesia and Singapore.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun awal Operasi/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019
Entitas anak langsung/ Directly subsidiaries									
Moratel International Pte, Ltd. (MIPL)	Singapura/ Singapore	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2008	100%	100%	100%	279.293.488.542	154.978.439.040	118.102.234.453
PT Palapa Ring Barat (PRB)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	98,9%	98,9%	98,9%	1.156.832.709.443	1.219.849.608.473	1.276.996.351.179
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	70%	70%	70%	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305
PT Oxygen Multimedia Indonesia (OMI)	Indonesia/ Indonesia	Televisi kabel/ Cable television	2015	99,96%	99,96%	99,96%	242.507.722.192	511.727.430.880	269.382.530.768
PT Indo Pratama Teleglobal (IPT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2021	65%	-	-	491.068.052.211	-	-
Entitas anak tidak langsung melalui OMI/Indirectly subsidiary through OMI									
PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (OII)	Indonesia/ Indonesia	Pembangunan sarana dan prasaranan jaringan telekomunikasi/ Construction of facilities and infrastructure of communication networks	2016	0,04%	0,04%	0,04%	170.663.375.455	461.143.123.675	229.102.967.199

Informasi keuangan entitas anak yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam jumlah material pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

Financial information of a subsidiary that has material non-controlling interest as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021			
Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan		
	Kepemilikan/ Equity Interest Held %	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	266.026.452.667	86.487.199.141
31 Desember 2020/December 31, 2020			
Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan		
	Kepemilikan/ Equity Interest Held %	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	165.357.280.986	100.669.171.681

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2019/December 31, 2019			
Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ Equity Interest Held %	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	82.229.454.571	83.127.826.415

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan dari PTT. Jumlah-jumlah tersebut sebelum dieliminasi dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

The summarized financial information of PTT is provided below. This information is based on amounts before inter-company eliminations.

Ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Summarized statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

	2021	2020	2019	
Jumlah aset	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305	Total assets
Jumlah liabilitas	4.154.953.433.442	4.637.587.002.787	5.192.478.934.811	Total liabilities
Jumlah ekuitas	1.175.045.506.032	886.683.013.094	551.119.107.494	Total equity
Teratribusikan pada:				Attributable to:
Pemilik entitas induk	822.531.854.224	620.656.560.427	385.761.826.507	Owners of parent company
Kepentingan nonpengendali	352.513.651.808	266.026.452.667	165.357.280.987	Non-controlling interest

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Summarized statement of profit or loss and other comprehensive income for 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Pendapatan	1.002.620.161.212	1.080.126.447.535	1.962.176.222.054	Revenues
Laba sebelum pajak	332.666.437.611	363.916.809.933	389.657.052.559	Profit before tax
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	881.425.984	(229.883.649)	(1.831.085.924)	Other comprehensive gain (loss)
Jumlah penghasilan komprehensif	288.362.492.938	335.563.905.603	277.092.754.721	Total comprehensive income
Teratribusikan pada kepentingan non pengendali	86.487.199.141	100.669.171.681	83.127.826.415	Attributable to non-controlling interests

Ringkasan informasi arus kas pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Summarized cash flow information for 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Operasi	564.191.001.455	144.506.140.915	113.036.676.195	Operating
Investasi	(2.848.915.896)	(21.010.090.400)	(959.058.764.819)	Investing
Pendanaan	(534.976.000.000)	(272.988.000.000)	1.101.896.749.099	Financing
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	26.366.085.559	(149.491.949.485)	255.874.660.475	Net increase (decrease) cash on hand and in banks

Akuisisi Entitas Anak

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 72 tanggal 24 September 2021, dari Aulia Taufani S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan mengakuisisi 65% saham PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) dengan imbalan atas pembelian sebesar Rp 18.216.250.000.

Setelah akuisisi tersebut, Grup berharap untuk dapat meningkatkan eksistensi pasar, serta menurunkan biaya dengan skala ekonomis.

Tabel berikut adalah rekonsiliasi imbalan kas yang dialihkan dan arus kas dari penggabungan usaha:

	24 September 2021/ <u>September 24, 2021</u>
Imbalan kas yang dialihkan	18.216.250.000
Dikurangi saldo kas entitas anak yang diakuisisi	<u>20.459.251.233</u>
Arus kas masuk - bersih	<u>(2.243.001.233)</u>

Rincian aset yang diakuisisi serta liabilitas yang dialihkan adalah sebagai berikut:

	24 September 2021/ <u>September 24, 2021</u> Nilai Wajar/ <u>Fair Value</u>
Kas dan setara kas	20.459.251.233
Aset tetap	201.727.166.051
Aset tidak berwujud	5.671.663.214
Uang muka	41.118.062.862
Piutang usaha	119.922.849.442
Aset lain-lain	30.915.282.650
Utang usaha	(183.523.201.893)
Utang lain-lain	(1.215.368.677)
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(2.172.979.463)
Utang bank jangka panjang	(120.641.471.561)
Liabilitas lain-lain	<u>(83.053.811.899)</u>
Aset bersih teridentifikasi	<u>29.207.441.959</u>
Kepentingan nonpengendali	<u>10.222.604.686</u>
Kepentingan pengendali	<u>18.984.837.274</u>
Imbalan atas pembelian	<u>(18.216.250.000)</u>
Keuntungan dari akuisisi saham	<u>768.587.274</u>

Acquisitions of New Subsidiary

Based on Notarial Deed No.72 of Aulia Taufani, S.H. dated September 24, 2021, notary in Jakarta, the Company acquired 65% of the share capital of PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) for purchase consideration amounting to Rp 18,216,250,000.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase its presence in this market. It also expects to reduce costs through economies of scale.

The following table is the reconciliation of cash consideration and cash flows from business combinations:

Cash consideration
Less cash balance of acquired subsidiary
Cash inflows – net

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed are as follows:

Cash and cash equivalents
Property and equipment
Intangible assets
Advances
Trade accounts receivable
Other assets
Trade accounts payable
Other accounts payable
Long-term employee benefits liability
Long-term bank loans
Other liabilities
Net identifiable assets
Non-controlling interests
Controlling interest
Purchase consideration
Gain on bargain purchase of subsidiary

Keuntungan yang timbul dari akuisisi IPT tersebut telah diakui pada laba rugi tahun 2021.

Gain on bargain purchase of IPT has been recognized in profit and loss in 2021.

Biaya-biaya terkait akuisisi sebesar Rp 290.000.000 dibukukan pada akun beban administrasi dalam laba rugi tahun 2021.

Acquisition related costs of Rp 290,000,000 have been charged to administrative expenses in the profit or loss in 2021.

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

c. Board of Commissioners, Directors, and Employees

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 29 Agustus 2018, yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 215 dari Ryan Chandra, S.H.,Mkn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors based on a resolution during the Extraordinary Stockholders Meeting held on August 29, 2018, as documented in Notarial Deed No. 215, of Ryan Chandra, S.H.,Mkn., a public notary in Jakarta, consists of the following:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Nathan Kusnadi
Komisaris	:	Doktorandus Karim Panjaitan
Komisaris Independen	:	Kanaka Puradiredja

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Commissioner
:	Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Kadir

Board of Directors

:	President Director
:	Vice President Director

Jumlah karyawan Grup adalah 1.570, 1.420 dan 1.359 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Number of employees of the Group are 1,570, 1,420 and 1,359 employees (unaudited), respectively, as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 23 Februari 2022 oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia and its subsidiaries for the years ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on February 23, 2022 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020 (Catatan 50).

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), Board of Sharia Accountants of IAI, and OJK Regulation No. VIII.G.7. Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019, including the impact of statements of Financial Accounting Standards (SAK) No. 71, 72 and 73 which had been adopted effective January 1, 2020 (Note 50).

The currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Company.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Efektif 1 Januari 2021, saat penerapan amandemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis", Grup dapat memilih untuk menerapkan 'pengujian konsentrasi nilai wajar' yang mengijinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis. Pengujian konsentrasi dapat diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi. Pengujian konsentrasi opsional terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika pengujian terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan. Jika pengujian tidak terpenuhi atau jika Grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, penilaian yang detail harus dilakukan sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK No. 22.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Accounting for Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are changed to profit or loss.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date. Effective January 1, 2021, upon adoption of the Amendment to PSAK No. 22 "Business Combination", the Group has an option to apply a 'fair value concentration test' that permits a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. The concentration test can be applied on a transaction-by-transaction basis. The optional concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. If the test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed. If the test is not met, or if the Group elects not to apply the test, a detailed assessment must be performed applying the normal requirements in PSAK No. 22.

Pada tanggal akuisisi, jika nilai agregat dari imbalan yang dialihkan lebih kecil dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

At acquisition date, if the aggregate of the consideration transferred is lower than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

d. Foreign Currency Translation

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Functional and Reporting Currencies

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transaksi dan Saldo

Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

	2021	2020	2019	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	13.901	1 United States Dollar (U.S)
1 Dolar Singapura (SGD)	10.534	10.644	10.321	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Euro (EUR)	16.127	17.330	15.589	1 Euro (EUR)

Kelompok Usaha Grup

Group's Companies

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- a. aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;

- a. assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of the statement of financial position;

- b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan comprehensive lain dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. seluruh selisih kurs yang timbul diakui sebagai komponen ekuitas yang terpisah.

Mata uang fungsional dari Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) adalah Dolar Amerika Serikat. Laporan keuangan MIPL telah dijabarkan kedalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs berikut ini:

	2021	2020	2019	
Akun-akun laporan posisi keuangan				Statement of financial position accounts
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	13.901	13.901	United States Dollar (USD)
Akun-akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income accounts
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.187	14.003	14.191	United States Dollar (USD)

Selisih kurs yang timbul dari penjabaran investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri disajikan dalam ekuitas. Jika kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepaskan, maka selisih kurs yang berasal dari penjabaran investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang sebelumnya disajikan dalam ekuitas, diakui dalam laba rugi, sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian penjualan.

e. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;

- b. income and expenses for each statement of profit or loss and other comprehensive income are translated at average exchange rates; and
- c. all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

The functional currency of Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) is U.S. Dollar. The financial statements of MIPL were translated into reporting currency using the following exchange rates:

The translation of the net investment in foreign entity is taken to equity. When a foreign operation is sold, exchange differences arising from the translation of the net investment in such foreign operation taken to equity are recognized in profit or loss, as part of the gain or loss on sale.

e. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;

ii. untuk diperdagangkan; atau

iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii. untuk diperdagangkan,

iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

h. Aset yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sejak tanggal penempatan yang digunakan Grup sebagai dana jaminan dicatat sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

i. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

ii. held primarily for the purpose of trading; or

iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i. expected to be settled in the normal operating cycle,

ii. held primarily to the purpose of trading,

iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or

iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

h. Restricted Assets

Time deposits with restricted usage from the date of placement, are used by the Group as collateral fund and recorded as Restricted Assets.

i. Financial Instruments

From January 1, 2020, The Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki instrumen keuangan pada kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

As December 31, 2021 and 2020, the Group has financial instruments classified as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets and liabilities at amortized cost. Thus, accounting policies related to financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial liabilities at fair value through profit or loss were not disclosed.

Financial Assets

From January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets

Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang jasa konsesi, piutang lain-lain, aset yang dibatasi penggunaannya dan setoran jaminan dalam akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi investasi Grup dalam obligasi wajib konversi.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, service concession receivable, other accounts receivable, restricted assets and security deposit included in other assets account are included in this category.

Financial assets at fair value through profit or loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's mandatory convertible bond are included in this category.

Prior to January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial assets are classified into financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity, and available for sale. Classifications of financial assets are determined at initial recognition based on the management's intention to hold the financial assets.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurang cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset pengampunan pajak-kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang konsesi jasa, aset yang dibatasi penggunaannya dan setoran jaminan dalam akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi investasi Grup dalam obligasi wajib konversi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

As of December 31, 2019, the Group's cash and cash equivalents, tax amnesty assets-cash, trade accounts receivable, other accounts receivable, service concession receivable, restricted assets and security deposit included in other assets account are included in this category.

Financial assets at fair value through profit or loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss.

As of December 31, 2019, the Group's mandatory convertible bond are included in this category.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

From January 1, 2020, Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan lain-lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kategori ini meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang non-bank, utang obligasi, dan utang kepada pemegang saham yang dimiliki oleh Grup.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Prior to January 1, 2020, the Group classifies its financial liabilities in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial liabilities are classified as other liabilities are measured at amortized cost.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group's bank loans, trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses, non-bank loans, bonds payable, and shareholder loan are included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassification of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan nilai aset keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif atau individual untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Impairment of financial assets

From January 1, 2020

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Prior to January 1, 2020

The Group applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments, as follows:

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

j. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

j. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

k. Perjanjian Konsesi Jasa

PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-entitas anak, mengadopsi ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa", dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan". Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan sektor publik lainnya (Grantor) mengkontrak perusahaan swasta (Operator) untuk membangun (atau meningkatkan), mengoperasikan dan memelihara infrastruktur publik.

Grantor mengendalikan atau mengatur jasa apa yang harus disediakan Operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya, dan juga mengendalikan atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

k. Service Concession Arrangements

PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement", and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangements: Disclosures". Service concession arrangement is an arrangement whereby a government or other public sector body (the "Grantor") contracts with a private entity (the "Operator") to develop (or upgrade), operate and maintain public infrastructure.

The Grantor controls or regulates what services the Operator must provide using the assets, to whom, and at what price, and also controls any significant residual interest in the assets at the end of the term of the arrangement.

Sifat dari aset Operator bergantung pada siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset keuangan ketika Grantor memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset takberwujud dalam hal lainnya.

Model Aset Keuangan

Operator mengakui aset keuangan sejauh memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari atau atas arahan Grantor atas jasa konstruksi. Operator memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas jika Grantor menjamin untuk membayar jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima dari pengguna jasa publik dan jumlah tertentu atau dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran bergantung pada apakah operator telah memastikan infrastruktur memenuhi persyaratan kualitas atau efisiensi tertentu.

Operator mengukur aset keuangan pada nilai wajar.

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi.

PRB dan PTT berkeyakinan bahwa perjanjian konsesi jasa sehubungan dengan pembangunan jaringan fiber optik dimana jasa tersebut dimaksudkan untuk penggunaan publik memenuhi kualifikasi sebagai model aset keuangan berdasarkan ISAK No. 16.

I. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat atau periode kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

The nature of the Operator's asset depends on who has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes a financial asset when the Grantor has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes an intangible asset in all other cases.

Financial Asset Model

The Operator recognizes a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the direction of the Grantor for the construction services. The Operator has an unconditional right to receive cash if the Grantor contractually guarantees to pay the Operator specified or determinable amounts or the shortfall, if any, between amounts received from users of the public service and specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the Operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.

The Operator measures the financial asset at fair value.

At the end of service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognized.

Gain or loss resulting from derecognition or disposal of concession asset is recognized in profit or loss.

PRB and PTT believes that the service concession arrangement in relation to installation of fiber optic network, which services are intended for public use qualifies under ISAK No. 16 using the financial asset model.

I. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

m. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah dan aset tetap dalam pembangunan, dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, jika ada. Kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun "Selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi. Pada setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset tetap yang dibebankan ke laba rugi dan penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dialihkan dari "Selisih penilaian kembali aset tetap" ke "Saldo laba".

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa periode ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

m. Property and Equipment

Direct Acquisition

Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Property and equipment, except land, and construction in progress, are stated at appraised values less subsequent depreciation and any impairment in value. The net appraisal increment resulting from the revaluation was recognized as "Revaluation surplus of property and equipment" shown under equity section in the consolidated statement of financial position and consolidated statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are recorded as part of other comprehensive income and all other decreases are charged to profit or loss. Each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "Revaluation surplus of property and equipment" to "Retained earnings".

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment's useful lives as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan/ <i>Buildings</i>	20
Perangkat dan perabot kantor/ <i>Office furniture and fixtures</i>	4
Peralatan telekomunikasi/ <i>Telecommunication facilities</i>	4 - 25
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	4 - 5
Aset sewaan - peralatan/ <i>Leased equipment</i>	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection performed, its cost recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection costs are capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of property and equipment derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Aset Tetap Dalam Pembangunan

Contruction In Progress

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost, and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

n. Transaksi Sewa

Sejak 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

n. Lease Transactions

From January 1, 2020

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

As lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. The Group has the right to operate the asset;
2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variable yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

The Group recognizes right-of-use assets and lease liabilities at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi manfaat 8-20 tahun. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

o. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over their useful lives of 8-20 years. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount.

p. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dan disajikan sebagai liabilitas. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Imbalan hasil sukuk ijarah kepada pemegang sukuk diakui sebagai beban ijarah pada saat terutang.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode-periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode-periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode-periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah is recognized initially at nominal amount, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred and presented as liability. Any differences between the carrying amount and nominal value is recognized in the consolidated statements of profit or loss as sukuk ijarah issuance costs using the straight line method over the period of sukuk ijarah.

Profit sharing of sukuk ijarah paid to holder is recognized as cost of ijarah when it is due.

q. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

r. Revenue and Expense Recognition

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. here these are not directly observable, the relative stand- alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan ditangguhkan".

Kewajiban Grup terhadap kontrak dengan pelanggan sehubungan dengan pendapatan dibawah ini ditentukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal:

- Pendapatan atas jasa pemasangan baru diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan.
- Pendapatan dari internet, penyediaan jaringan telekomunikasi (domestik dan internasional) dan jasa telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

Sewa diterima dimuka sehubungan dengan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus sepanjang masa sewa.

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred revenue".

The obligation of the Group from the contracts with customers relating to below revenues are determined to be a single performance obligation:

- Revenue from new installations is recognized when the terminal is completed and ready for use by the customer.
- Revenues from internet, telecommunication network (domestic and international) and other telecommunication services are recognized when the services are rendered.

Rental fees received in advance in relation to the Indefeasible Rights of Use (IRU) arrangements are deferred and recognized as deferred income. Rental income is recognized on straight-line basis over the lease term.

Interest income and interest expense are recognized in profit or loss as it accrues using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

Pendapatan dan Beban Konstruksi

Pada entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, pengakuan pendapatan dan beban kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban pada saat penyerahan barang yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani kedua belah pihak.

s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

t. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Construction Revenues and Expenses

In a subsidiary, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, contract revenues and costs recognition associated with the construction contract are recognized as revenues and expenses respectively at the time of delivery of the goods as declared in the form of minutes of hand over signed by both parties.

s. Borrowing Costs

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity determines the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

t. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

u. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

u. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

v. Aset Pengampunan Pajak

Pada saat pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset pengampunan pajak dikreditkan pada akun tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diakui dalam laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset pengampunan pajak mengacu pada masing-masing kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan Grup untuk aset serupa.

w. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

v. Tax Amnesty Assets

At initial recognition, tax amnesty assets are measured at cost, based on Letter of Tax Amnesty Annotation issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Tax amnesty assets are recognized with corresponding credit to additional paid-in capital. Fees paid for obtaining tax amnesty is recognized in profit or loss.

Subsequent measurement of tax amnesty assets is in accordance with subsequent measurement provision of each relevant accounting policies applied by the Group for similar assets.

w. Earnings Per Share

Earnings per share are computed by dividing profit attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

x. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

y. Provisi

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

z. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

x. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

y. Provisions

Provisions are recognized when Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

z. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional entitas anak luar negeri.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign subsidiary.

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying values of the Group's financial assets at amortized cost as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi (2019: Pinjaman yang Diberikan dan Piutang)				Financial assets at amortized cost (2019: Loans and Receivables)
Kas dan setara kas	1.043.159.953.514	485.960.996.991	1.414.112.274.883	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty asset - cash
Piutang usaha - bersih	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Aset yang dibatasi penggunaannya	35.792.742.666	5.203.306.285	5.904.094.734	Restricted assets
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Setoran jaminan dalam akun "Aset tidak lancar lain-lain"	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits under "Other assets"
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				Financial assets at fair value through profit or loss
Investasi	-	-	-	Investments
Jumlah	7.571.679.475.468	7.212.651.554.112	8.293.946.780.655	Total

d. Transaksi Sewa

Grup sebagai Lessee

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa (2019: PSAK No. 73, Sewa).

Grup sebagai Lessor

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

f. Perjanjian Konsesi Jasa

Dalam menerapkan ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-anak, telah membuat pertimbangan bahwa jaringan fiber optiknya termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 terutama karena Grantor (Kementerian Komunikasi dan Informatika), badan sektor publik, mengatur atau mengendalikan jasa apa yang harus diberikan oleh PRB dan PTT dengan infrastruktur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dimana jasa ditujukan untuk penggunaan publik.

d. Lease Transactions

Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-of-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases (2019: PSAK No. 30, Leases).

Group as Lessor

The Group has entered into various commercial lease agreements. The Group has determined that those are operating leases since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of this matter is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Service Concession Arrangement

In applying ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), have made a judgment that its fiber optic network is within the scope of ISAK No. 16 primarily because the Grantor (Ministry of Communication and Information Technology), a public sector entity, regulates or controls what services should be provided by PRB and PTT with the infrastructure pursuant to the Cooperation Agreement, which services are intended for public use.

PRB dan PTT juga berkeyakinan bahwa jaringan fiber optik tersebut memenuhi kualifikasi sebagai aset keuangan dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dalam model aset keuangan, PRB dan PTT mengakui imbalan yang diterima atau ditagihkan sebagai ganti jasa konstruksi infrastruktur atau akuisisi infrastruktur yang digunakan dalam perjanjian sebagai aset keuangan sejauh PRB dan PTT memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya atas jasa konstruksinya dari atau atas arahan Grantor.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 28.

PRB and PTT also believe that the fiber optic network qualifies under the financial asset model wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Under the financial asset model, PRB and PTT had recognized the consideration received or receivable in exchange for its infrastructure construction services or its acquisition of infrastructure to be used in the arrangements as a financial asset to the extent that PRB and PTT has an unconditional contractual right to receive cash or other financial asset for its construction services from or at the direction of the Grantor.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Asset and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial asset and liabilities are set out in Note 28.

b. Revaluasi Aset Tetap

Grup mengukur bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi pada nilai revaluasian, dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai revaluasian aset tersebut pada 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan laporan penilai independen dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan tanggal 30 Desember 2020 dan nilai revaluasian pada 31 Desember 2019 berdasarkan KJPP Herly, Ariawan dan Rekan tanggal 23 Desember 2015. Berdasarkan penilaian manajemen tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai aset dari laporan valuasi terakhir. Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi diungkapkan dalam Catatan 13.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

b. Revaluation of Property and Equipment

The Group measures buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. The revaluated amount of these assets as of December 31, 2021 and 2020 were based on independent appraisal reports of KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dated December 30, 2020 and the revaluated amount as of December 31, 2019 was based on KJPP Herly, Ariawan dan Rekan dated December 23, 2015. Based on assessment from management that property and equipment recorded as of December 31, 2021 and 2019 there are no significant changes in revaluated amount of the assets from the last valuation reports. The key assumptions used to determine the fair value of buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities, are further explained in Note 13.

c. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Group's property and equipment estimated based on the period over which the asset expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The carrying values of these assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty - property and equipment
Aset tetap	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044	Property and equipment
Jumlah	6.284.047.635.786	5.562.857.031.891	4.039.062.243.348	Total

d. Penurunan Nilai Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain goodwill, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset tak berwujud, disajikan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

d. Impairment of Other Intangible Assets

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

The carrying values of intangible assets, are described in Note 15 to the consolidated financial statements.

e. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty - property and equipment
Aset tetap	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044	Property and equipment
Jumlah	6.284.047.635.786	5.562.857.031.891	4.039.062.243.348	Total

The carrying values of non-financial assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

f. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 38 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 110.321.710.204, Rp 90.526.628.604 dan Rp 66.028.777.663 (Catatan 38).

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Long-term Employee Benefits Liability

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 38 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, long-term employee benefits liability amounted to Rp 110,321,710,204, Rp 90,526,628,604 and Rp 66,028,777,663, respectively (Note 38).

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 9.284.043.097, Rp 4.044.727.261 dan Rp 7.250.865.308 (Catatan 37).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, deferred tax assets amounted to Rp 9,284,043,097, Rp 4,044,727,261 and Rp 7,250,865,308 (Note 37).

4. Aset Pengampunan Pajak

Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak ke kantor pajak sehubungan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan dengan No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

Rincian aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

4. Tax Amnesty Assets

On December 13, 2016, the Company submitted Letter of Assets Declaration for tax amnesty to tax office in relation to the Company's participation in tax amnesty program of the Government of Indonesia. On December 16, 2016, the Company received Letter of Tax Amnesty Annotation from the Minister of Finance No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 as proof that tax amnesty has been granted to.

The details of tax amnesty assets are as follows:

	2021	2020	2019	
Aset lancar				Current assets
Kas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Cash
Aset tidak lancar				Noncurrent assets
Peralatan telekomunikasi	2.921.187.000	2.921.187.000	2.921.187.000	Telecommunication facilities
Akumulasi penyusutan	(668.221.526)	(536.768.111)	(405.314.696)	Accumulated depreciation
Subjumlah	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Subtotal
Jumlah	2.352.965.474	2.484.418.889	2.615.872.304	Total

Beban penyusutan aset pengampunan pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 131.453.415 yang dicatat pada akun lain-lain sebagai "Beban Usaha – Lain-lain" dalam laba rugi (Catatan 34).

Kas dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Peralatan telekomunikasi dikategorikan sebagai aset tetap dan disusutkan dengan metode seperti dijelaskan pada Catatan 2.

Depreciation expense of tax amnesty assets for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 131,453,415, is recorded in as part of "Operating Expense - others" in profit or loss (Note 34).

Cash is categorized as financial asset at amortized cost. Telecommunication facilities are measured as property and equipment and measured on a basis as stated in Note 2.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2021	2020	2019	
Kas	632.716.401	473.053.500	430.750.818	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga				Cash in banks - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	406.971.255.274	274.048.699.112	327.239.430.445	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	243.456.779.004	34.942.667	14.339.430.741	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	135.416.746.699	122.643.120.416	933.688.030.809	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	5.758.516.289	270.804.482	116.242.929	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	5.506.494.573	859.317.934	597.915.286	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3.395.633.130	3.343.044.422	2.592.119.699	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1.486.950.620	2.381.746.884	45.277.893	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	547.191.169	443.178.135	139.502.059	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)	385.945.505	612.395.753	422.462.368	PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	374.502.764	219.461.047	177.356.784	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Syariah KB Bukopin	347.016.543	3.960.838	4.028.289	PT Bank Syariah KB Bukopin
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	195.538.345	8.102.873.576	82.432.581	PT Bank Sinarmas - Sharia unit
PT Bank CIMB Niaga Tbk	158.767.891	108.184.864	64.256.555	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank NTT	146.781.612	-	-	PT Bank NTT
PT Bank Permata Tbk	125.503.523	6.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	108.203.406	88.323.456	71.256.022	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	107.481.112	97.746.614	843.005.371	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank MNC Internasional	5.080.931	22.622.958	55.684.801	PT Bank MNC Internasional
PT POS Indonesia	1.000.000	-	-	PT POS Indonesia
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)				U.S. Dollar (Note 42)
United Overseas Bank Ltd	92.874.026.544	-	-	United Overseas Bank Ltd
PT Bank KB Bukopin Tbk	63.620.533.532	43.734.120	282.311.756	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.762.527.540	14.050.457.561	4.214.490.155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	15.340.037	16.016.092	16.687.044	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	11.402.505	12.893.526	14.375.168	PT Bank Sinarmas Tbk
Citibank Singapore Ltd.	-	38.061.861.048	27.092.406.217	Citibank Singapore Ltd.
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
United Overseas Bank Ltd	6.202.920.258	-	-	United Overseas Bank Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.791.073.776	2.879.911.536	93.903.872	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank Singapore Ltd.	2.613.753.529	2.887.304.115	1.565.163.495	Citibank Singapore Ltd.
PT Bank DBS Indonesia	879.431.169	350.056.463	197.685.148	PT Bank DBS Indonesia
Euro (Catatan 42)				Euro (Note 42)
PT Bank KB Bukopin Tbk	14.462.711	16.568.986	14.891.629	PT Bank KB Bukopin Tbk
Jumlah kas di bank	976.280.859.991	471.605.226.605	1.313.970.347.116	Total cash in banks
Deposito berjangka - Pihak ketiga				Time deposits - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.208.558.627	19.233.875.627	44.693.457.559	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah KB Bukopin	10.000.000.000	-	5.000.000.000	PT Bank Syariah KB Bukopin
PT Bank Sinarmas Tbk	8.000.000.000	-	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	5.000.000.000	-	-	PT Bank Sinarmas - unit Syariah
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	73.800.000	201.800.000	201.800.000	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	366.834.780	30.366.834.780	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	-	-	10.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	-	-	3.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	-	1.700.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	-	5.000.000.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)				U.S. Dollar (Note 42)
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	-	12.510.904.500	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	2.435.129.402	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
Citibank Singapore Ltd.	-	2.897.183.260	2.854.979.317	Citibank Singapore Ltd.
Jumlah deposito berjangka	82.282.358.627	22.699.693.667	117.763.105.558	Total time deposits
Jumlah	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492	Total
Suku bunga deposito berjangka per tahun				Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	0,50% - 6,00%	1,80% - 6,00%	4,00% - 7,00%	Rupiah
Dolar Singapura	-	0,10%	0,10%	Singapore Dollar
Nisbah deposito Syariah per tahun				Nisbah per annum on Sharia time deposits
Rupiah	3,50% - 5,13%	2,75% - 7,75%	2,12% - 5,13%	Rupiah

*) Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

*) On February 1, 2021, PT Bank Mandiri Syariah and PT Bank BNI Syariah have been merged with PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas dan setara kas atas bank dan unit bisnis syariah masing-masing sebesar Rp 16.035.981.505, Rp 8.816.976.781 dan Rp 18.051.928.609.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, cash and cash equivalents in banks and sharia business unit amounted to Rp 16,035,981,505, Rp 8,816,976,781 and Rp 18,051,928,609, respectively.

6. Piutang Usaha

a. Berdasarkan Pelanggan

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Telco	78.965.783.476	3.972.073.619	1.575.254.657	Telco
Wholesale	173.219.200	2.000.156.117	1.086.830.690	Wholesale
Sub jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Telco	144.890.089.809	285.004.173.888	264.807.889.567	Telco
Wholesale	158.110.250.526	68.543.307.494	71.387.414.168	Wholesale
Retail	71.943.730.867	55.321.817.208	41.433.941.221	Retail
Lain-lain	5.726.261.775	617.016.348	-	Others
Subjumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.583.659.725)	(19.431.188.627)	(12.139.756.573)	Allowance for impairment
Bersih	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Net
Jumlah	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Total

b. Berdasarkan Umur

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Belum jatuh tempo	54.181.611.095	580.032.438	739.346.172	Not past due
Jatuh tempo				Past due
31 - 60 hari	16.484.878.719	893.009.144	930.976.225	31 - 60 days
61 - 90 hari	8.339.030.163	4.008.125.280	127.930.455	61 - 90 days
91 - 120 hari	133.482.699	491.062.874	863.832.495	91 - 120 days
Sub jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Belum jatuh tempo	144.169.002.410	194.815.386.615	152.251.738.701	Not past due
Jatuh tempo				Past due
31 - 60 hari	101.228.713.857	109.098.109.981	93.333.019.631	31 - 60 days
61 - 90 hari	47.204.771.103	60.419.603.106	56.666.782.634	61 - 90 days
91 - 120 hari	78.576.542.747	33.077.267.592	47.805.369.596	91 - 120 days
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	9.491.302.860	12.075.947.644	27.572.334.394	Past due and impaired
Sub jumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.583.659.725)	(19.431.188.627)	(12.139.756.573)	Allowance for impairment
Bersih	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Net
Jumlah	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Total

6. Trade Accounts Receivable

a. By Debtor

b. By Age

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Berdasarkan Mata Uang

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	79.132.581.624	5.936.458.866	2.622.868.402	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 42)	6.421.052	35.770.870	39.216.945	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	266.369.538.364	385.001.096.398	359.994.176.490	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 42)	114.213.877.399	24.485.218.540	17.628.359.985	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapura (Catatan 42)	86.917.214	-	6.708.481	Singapore Dollar (Note 42)
Subjumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.583.659.725)	(19.431.188.627)	(12.139.756.573)	Allowance for impairment
Subjumlah	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Subtotal
Jumlah Bersih	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Total Net

Perubahan dalam kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	19.431.188.627	12.139.756.573	7.600.134.998	Beginning balance
Cadangan penurunan nilai dari akuisisi entitas anak	18.152.471.098	-	-	Allowance from acquired subsidiary
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	-	7.291.432.054	4.539.621.575	Provision for impairment (Note 34)
Saldo akhir	37.583.659.725	19.431.188.627	12.139.756.573	Ending balance

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian pada yang disyaratkan oleh PSAK No. 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 effective January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Untuk periode pelaporan sebelum 1 Januari 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut berdasarkan penelaahan piutang usaha secara individual dan kolektif pada akhir tahun.

For reporting period prior to January 1, 2020, the Group management believes that the provision for receivables impairment is adequate to cover losses from uncollectible accounts based on the review of the status of the individual and collective accounts receivable at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

Piutang usaha kepada pelanggan tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Certain trade accounts receivable from third parties are used as collaterals for bank loans.

7. Piutang Konsesi Jasa

Fitur utama perjanjian konsesi PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas anak, adalah sebagai berikut (Catatan 2):

7. Service Concession Receivable

The main features of the concession arrangement from PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), subsidiaries, are summarized as follows (Note 2):

Nama Konsesi/ Name of Concession	Deskripsi Perjanjian/ Description of Arrangement	Persyaratan Signifikan Perjanjian/Significant Terms of Arrangement	Piutang Konsesi/ Concession Receivable
Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur/ <i>Cooperation Agreement on the Construction and Management of Fiber Optic Backbone Network of Palapa Ring Western Package and Eastern Package</i>	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian, uji coba sistem, kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan fasilitas jaringan tulang punggung telekomunikasi/ <i>Development, financing, design, engineering, procurement, construction, installation, testing, system testing, ownership, operation, management, maintenance and transfer of the telecommunication backbone network facilities</i>	Periode konsesi 15 tahun sejak operasi komersial/ <i>Period of concession 15 years since commercial operation</i> Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PRB: - Rp 25.347.084.543/ bulan (Tahun 1-5), - Rp 19.010.333.583/ bulan (Tahun 6-10) dan - Rp 13.748.967.167/ bulan (Tahun 11-15)/ <i>Availability payment by Grantor to PRB :</i> - Rp 25,347,084,543/ month (Year 1-5), - Rp 19,010,333,583/ month (Year 6-10) and - Rp 13,748,967,167/ month (Year 11-15) - Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PTT: - Rp 112.718.018.318/ bulan (Tahun 1-5), - Rp 85.414.656.877/ bulan (Tahun 6-10) dan - Rp 35.053.187.771/ bulan (Tahun 11-15)/ <i>Availability payment by Grantor to PTT:</i> - Rp 112,718,018,318/ month (Year 1-5), - Rp 85,414,656,877/ month (Year 6-10) and - Rp 35,053,187,771/ month (Year 11-15)	Rp 6.047.877.602.480 pada tanggal 31 Desember 2021/ Rp 6,047,877,602,480 as of December 31, 2021 Rp 6.312.094.769.633 pada tanggal 31 Desember 2020/ Rp 6,312,094,769,633 as of December 31, 2020 Rp 6.491.363.042.105 pada tanggal 31 Desember 2019/ Rp 6,491,363,042,105 as of December 31, 2019

Nama Konsesi/ <i>Name of Concession</i>	Deskripsi Perjanjian/ <i>Description of Arrangement</i>	Persyaratan Signifikan Perjanjian/ <i>Significant Terms of Arrangement</i>	Piutang Konsesi/ <i>Concession Receivable</i>
		Pengalihan jaringan serat optik kepada <i>Grantor</i> pada akhir perjanjian dengan pembayaran sebesar Rp 1.000/ <i>Transfer of fiber optic network to Grantor at the end of agreement with payment of Rp 1,000</i>	

PRB dan PTT mengalihkan pekerjaan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik kepada pihak ketiga dan tidak memperoleh keuntungan (*margin*) atas proses pembangunan.

PRB and PTT subcontracted the construction of the fiber optic backbone network to third parties and do not have margin from the construction process.

Penambahan piutang konsesi jasa pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.325.636.611.500, Rp 1.307.875.348.515 dan Rp 2.213.707.748.127.

Additions in service concession receivable in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 1,325,636,611,500, Rp 1,307,875,348,515 and Rp 2,213,707,748,127, respectively.

PRB telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada *grantor* pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 303.980.467.016, Rp 304.165.014.991 dan Rp 304.165.014.991.

PRB already sent the invoices for the services to the grantor in 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 303,980,467,016, Rp 304,165,014,991 and Rp 304,165,014,991, respectively.

PTT telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada *grantor* pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.205.124.192.273, Rp 1.331.692.968.108 dan Rp 337.956.860.115.

PTT already sent the invoices for the services to the grantor in 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 1,205,124,192,273, Rp 1,331,692,968,108 and Rp 337,956,860,115, respectively.

	2021	2020	2019	
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam setahun:	<u>1.506.164.758.920</u>	<u>1.506.164.758.920</u>	<u>1.506.164.758.920</u>	Less current portion
Bagian jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>4.541.712.843.560</u>	<u>4.805.930.010.713</u>	<u>4.985.198.283.185</u>	Long-term portion

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang konsesi dapat tertagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

Management believes that service concession receivables are fully collectible, thus no allowance for impairment was provided.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

8. Uang Muka

	2021	2020	2019	
Pemasok	60.208.544.698	4.456.310.723	20.175.865.956	Suppliers
Karyawan	10.372.383.598	6.434.503.914	10.042.943.803	Err Article 28A - the Company (Note 37)
Perjalanan dinas	1.508.230.374	1.127.372.067	3.143.205.959	Travel
Lain-lain	-	-	5.926.564	Others
Jumlah	72.089.158.670	12.018.186.704	33.367.942.282	Total

8. Advances

9. Biaya Dibayar Dimuka

	2021	2020	2019	
Asuransi	45.410.730.521	41.932.041.105	37.694.938.982	Insurance
Sewa	35.082.593.326	32.806.810.863	28.387.932.596	Rent
Jasa	14.594.864.296	5.240.010.010	6.710.040.689	Services
Jaringan	3.326.355.924	10.794.328.843	88.775.385	Link
Infrastruktur	1.870.681.483	11.489.247.277	3.687.790.740	Infrastructure
Jumlah	100.285.225.550	102.262.438.098	76.569.478.392	Total

9. Prepaid Expenses

10. Pajak Dibayar Dimuka

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 28A - Perusahaan (Catatan 37)				Article 28A - the Company (Note 37)
- Tahun 2019	-	12.358.764.080	14.910.812.409	- Year 2019
- Tahun 2018	-	-	18.727.084.797	- Year 2018
Pasal 28A - Entitas Anak				Article 28A - Subsidiaries
- Tahun 2019	-	6.144.670.181	-	- Year 2019
Pajak final dibayar dimuka	863.272.975	10.073.107.424	4.941.581.486	Prepaid final tax
Pajak pertambahan nilai - bersih	133.505.658.168	190.230.729.786	238.194.132.547	Value added tax - net
Jumlah	134.368.931.143	218.807.271.471	276.773.611.239	Total

10. Prepaid Taxes

Perusahaan

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan bersih Perusahaan sebesar Rp 12.358.764.080 dan sisanya sebesar Rp 2.552.048.329 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Pengembalian dana diterima tanggal 19 Januari 2021.

Company

In 2021, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) for the Company's Corporate Income Tax in 2019. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's net income tax overpayment amounting to Rp 12,358,764,080 and the difference amounting to Rp 2,552,048,329 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement for the year ended December 31, 2020. The refund received on January 19, 2021.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak pertambahan nilai Perusahaan sebesar Rp 94.505.333.424 dan sisanya sebesar Rp 2.550.007 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 94.505.333.424 tanggal 19 Januari 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan Januari 2019 hingga Desember 2019.

Pada tanggal 18 Februari 2020, kantor pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No.00010/406/18/073/20 untuk pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2018. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan Perusahaan sebesar Rp 18.845.780.420 dan mencatat Rp 50.776.750 sebagai "Beban Lain-lain" dalam laba rugi.

Pada tanggal yang sama Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.00004/201/18/073/20 atas pajak penghasilan pasal 21 dan No.00009/203/18/073/20 atas pajak penghasilan pasal 23 dengan nilai masing-masing Rp 80.036.277 dan Rp 38.659.346.

Penyelesaian atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut atas pajak penghasilan 21 dan 23 dikompensasikan dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas penghasilan Badan tahun 2018.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 47.142.638.798 tanggal 24 Februari 2020 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan April 2018 hingga November 2018.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Pada tahun 2021, PRB, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 3.375.474.671 dan sisanya sebesar Rp 10.710.000 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi. Entitas anak juga telah menerima pengembalian pajak tersebut tanggal 12 Agustus 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan Januari 2020 hingga Juni 2020.

In 2020, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's value added tax overpayment amounted to Rp 94,505,333,424 and the difference amounting to Rp 2,550,007 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. The Company received tax refund amounting to Rp 94,505,333,424 on January 19, 2021 deducted from several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period Januari 2019 until December 2019.

On February 18, 2020, the tax office has issued the Overpayment Tax Assessment Letter No.00010/406/18/073/20 for the Company's Corporate Income Tax in 2018. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's income tax overpayment amounting to Rp 18,845,780,420 and reported the difference amounting to Rp 50,776,750 as part of "Other Expenses" in profit or loss.

On the same date, the Company also received the Underpayment Tax Assessment Letter No.00004 / 201/18/073/20 for income tax article 21 and No.00009 / 203/18/073/20 for income tax article 23 amounting to Rp 80,036,277 and Rp 38,659,346, respectively.

The settlement of the underpayment Tax Assessment Letter on income tax 21 and 23 compensated with the Overpayment Tax Assessment Letter on Company's income tax overpayment in 2018.

In 2020, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. The Company received tax refund amounted to Rp 47,142,638,798 on February 24, 2020 deducted from several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period the April 2018 until November 2018.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary

In 2021, PRB, a subsidiary, received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2020 of value added tax. The tax office has agreed to pay the restitution of value added tax of amounted to Rp 3,375,474,671 and the difference amounting to Rp 10,710,000 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. A subsidiary received tax refund on August 12, 2021 which has deducted from Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for the period January 2020 until June 2020.

Pada tahun 2020, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019. PRB telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 3.241.531.117 tanggal 26 Agustus 2020 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019.

In 2020, PRB, a subsidiary, received several Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2019 value added tax. The Company received tax refund amounting to to Rp 3,241,531,117 on August 26, 2020 after deducting from 2019 several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Value added tax year 2019.

Pada tahun 2019, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. PRB telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 19.115.571.156 tanggal 28 Mei 2019.

In 2019, PRB, a subsidiary, received several Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. The Company received tax refund amounting to Rp 19,115,571,156 on May 28, 2019

Pada tahun 2018, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2017 dan 2016. PRB telah menerima pengembalian pajak Rp 96.793.022.732 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2016 beserta sanksi administrasi masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018 dan 4 Mei 2018.

In 2018, PRB, a subsidiary, received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2017 and 2016 value added tax. PRB received tax refund amounting to Rp 96,793,022,732 deducted from 2016 several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) including tax penalty on February 2, 2018 and May 4, 2018, respectively.

**PT Palapa Timur Telematika (PTT) -
Entitas Anak**

**PT Palapa Timur Telematika (PTT) -
a Subsidiary**

Pada tahun 2021, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan entitas anak tahun 2019 dan pajak pertambahan nilai bulan Januari 2020 hingga September 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan entitas anak sebesar Rp 25.242.450.053 dan sisanya sebesar Rp 12.139.949.257 dicatat Perusahaan pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi atas pemeriksaan pajak tahun 2019. Entitas anak telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 9.999.522.739 tanggal 02 Agustus 2021 dan Rp 4.308.561.954 tanggal 23 September 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas sanksi pajak masa Januari 2019 hingga Desember 2019.

In 2021, a subsidiary, receive Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax 2019 and Value Added Tax for period January 2020 until September 2020. The tax office has agreed to pay restitution of Corporate Income Tax amounted to Rp 25,242,450,053 and the difference amounting to Rp 12,139,949,257 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. A subsidiary received tax refund amounted to Rp 9,999,522,739 on August 02, 2021 and Rp 4,308,561,954 on September 23, 2021 which has deducted from Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period January 2019 until December 2019.

Pada tahun 2020, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk masa Maret, Juni, September, Desember Tahun 2019 dan masa Maret Tahun 2020. PTT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 88.273.598.162 atas surat ketetapan tersebut masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020, 9 April 2020, 24 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020.

In 2020, PTT, a subsidiary, receive several Tax Assessments for Overpayment (SKPLB) value added tax for period March, June, September, December 2019 and March 2020. PTT received tax refund amounted to Rp 88,273,598,162 based on those tax assessments on February 11, 2020, April 9, 2020, August 24, 2020 and August 28, 2020, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2019, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. PTT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 38.156.347.090 atas surat ketetapan tersebut masing-masing pada tanggal 9 April 2019 dan 4 Juli 2019.

In 2019, PTT, a subsidiary, receive several Tax Assessments for Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. PTT received tax refund amounted to Rp 38,156,347,090 based on those tax assessments on April 9, 2019 and July 4, 2019, respectively.

Pada tahun 2018, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp 306.713.911.214 setelah dikurangi Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2017 beserta sanksi administrasi.

In 2018, PTT, a subsidiary, receive Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 and 2017 value added tax amounting to Rp 306,713,911,214 after deducting the Tax Collection Letter (STP) for 2017 value added tax including tax penalty.

11. Aset yang Dibatasi Penggunaannya

11. Restricted Assets

	2021	2020	2019	
Aset Lancar				Current Assets
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32.148.574.941	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	32.148.574.941	-	-	Total
Aset Tidak Lancar				Non current Assets
Rupiah				Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	852.720.000	1.965.714.960		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	416.908.800	416.908.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.791.447.725	2.820.682.525	5.487.185.934	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	3.644.167.725	5.203.306.285	5.904.094.734	Total

Aset dibatasi penggunaannya merupakan jaminan berupa deposito terkait proyek yang dikerjakan oleh Grup.

Restricted assets are guarantee deposits related to projects undertaken by the Group.

12. Investasi

12. Investments

	2021	2020	2019	
Obligasi wajib konversi				Mandatory convertible bond
PT Bakrie Telecom Tbk	5.207.098.114	5.207.098.114	5.207.098.114	PT Bakrie Telecom Tbk
Penurunan nilai	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)	Write-down in value
Jumlah	-	-	-	Total

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebagai pelunasan piutangnya dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL) (Catatan 45), sesuai dengan surat putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT. PST tanggal 9 Desember 2014.

In 2016, the Company obtained Mandatory Convertible Bond as payment of its receivable from PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL) (Note 45), as stated in verdict letter No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT. PST dated December 9, 2014.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan penelaahan manajemen, nilai investasi pada obligasi wajib konversi adalah nihil, dan cadangan atas penurunan nilai sebesar Rp 5.207.098.114 telah diakui pada tahun 2017.

Further in 2017, based on management's assessment, the value of these investments in mandatory convertible bonds is already nil, thus, provision write-down in value amounting to Rp 5,207,098,114 has been recognized in 2017.

13. Aset Tetap

13. Property and Equipment

Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021							
1 Januari/ January 1, 2021	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2021	
Pemilikan langsung:							Direct acquisitions:
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	259.641.935.311	-	12.149.659.365	-	27.635.275.797	299.426.870.473	Land
Nilai revaluasi:							At revalued amount:
Bangunan	96.362.602.280	-	6.386.856.482	-	13.239.003.939	115.988.462.701	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	54.865.995.434	29.024.464	8.445.915.250	13.120.874.705	(226.856.140)	76.234.953.713	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	4.994.730.528.859	1.975.692.987	283.829.795.068	188.082.740.905	609.717.869.459	6.078.239.883.236	Telecommunication facilities
Kendaraan	14.496.471.023	-	4.955.396.268	(412.741.988)	-	19.039.125.303	Vehicles
Pekerjaan dalam pelaksanaan	296.805.969.656	-	698.852.652.242	-	(650.365.293.055)	414.135.256.669	Construction in progress
Jumlah	5.716.903.502.563	2.004.717.451	1.014.620.274.675	270.045.543.436	(509.486.030)	7.003.064.552.095	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Nilai revaluasi:							At revalued amount:
Bangunan	2.251.894.805	-	4.162.407.470	-	5.547.263	6.419.849.538	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	4.267.281.706	11.988.373	22.201.921.501	12.470.199.348	(33.248.427)	38.145.263.757	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	148.827.271.176	1.355.713.222	465.097.156.010	55.848.178.037	(170.028.647)	671.650.178.298	Telecommunication facilities
Kendaraan	1.084.441.874	-	3.894.705.335	-	75.442.981	5.054.590.190	Vehicles
Jumlah	156.430.889.561	1.367.701.595	495.356.190.316	68.318.377.385	(203.277.074)	721.269.881.783	Total
Nilai Tercatat	5.560.472.613.002					6.281.794.670.312	Net Book Value

*) merupakan nilai tercatat aset tetap entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)
represent net carrying value of property and equipment of acquired company on acquisition date (Note 1C)

Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020							
1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Gain on Revaluation	31 Desember/ December 31, 2020
Pemilikan langsung:							Direct acquisitions:
Biaya perolehan:							At cost:
Tanah	247.176.206.219	-	11.720.729.092	-	745.000.000	-	259.641.935.311
Nilai revaluasi:							At revalued amount:
Bangunan	104.344.788.029	-	16.774.568.194	2.862.076.218	(10.998.571.172)	(16.620.258.989)	96.362.602.280
Perangkat dan perabot kantor	48.835.512.763	308.606.850	11.532.383.237	(44.657.888)	15.736.597.902	(44.026.549.333)	54.865.995.434
Peralatan telekomunikasi	3.700.765.173.469	2.020.575.038	804.657.087.987	(70.520.000)	974.887.551.750	37.178.154.070	4.994.730.528.859
Kendaraan	9.293.148.688	-	483.503.837	-	10.055.209.582	(4.912.688.930)	14.496.471.023
Pekerjaan dalam pelaksanaan	581.966.271.015	-	789.126.111.031	-	(1.054.286.412.380)	-	296.805.969.656
Jumlah	4.692.381.100.180	2.329.181.888	1.614.294.393.378	(115.177.888)	(49.999.976.938)	(919.248.699.287)	5.716.903.502.563
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Nilai revaluasi:							At revalued amount:
Bangunan	9.007.723.947	-	6.231.791.513	-	(1.989.049.483)	(10.998.571.172)	2.251.894.805
Perangkat dan perabot kantor	28.479.199.131	303.943.339	8.333.115.209	(18.398.916)	11.195.972.276	(44.026.549.333)	4.267.281.706
Peralatan telekomunikasi	706.801.890.569	1.240.628.532	312.011.615.967	(49.564.269)	(11.866.699.791)	(859.310.889.852)	148.827.271.176
Kendaraan	3.575.603.271	-	2.425.742.534	-	(4.215.001)	(4.912.688.930)	1.084.441.874
Jumlah	747.864.416.918	1.544.771.871	329.002.265.243	(67.963.185)	(2.663.901.999)	(919.248.699.287)	156.430.889.561
Nilai Tercatat	3.944.516.683.262						5.560.472.613.002

Perubahan selama tahun 2019/ Changes during 2019						
1 Januari/ January 1, 2019	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Pemilikan langsung:						Direct acquisitions:
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	38.910.724.565	-	208.265.481.654	-	247.176.206.219	Land
Nilai revaluasi:						At revalued amount:
Bangunan	69.202.079.331	-	19.603.670.217	-	15.539.038.481	104.344.788.029
Perangkat dan perabot kantor	30.571.732.672	(11.840.024)	14.673.548.627	(264.420.257)	3.866.491.745	48.835.512.763
Peralatan telekomunikasi	1.718.004.728.724	(6.602.447.207)	546.715.067.150	(498.908.570)	1.443.146.733.369	3.700.765.173.466
Kendaraan	5.263.016.799	-	1.881.670.835	-	2.148.461.054	9.293.148.688
Pekerjaan dalam pelaksanaan	973.585.232.270	-	1.073.202.986.085	(121.222.691)	(1.464.700.724.649)	581.966.271.015
Aset sewaan - peralatan	107.999.168.835	-	-	-	-	107.999.168.835
Jumlah	2.943.536.683.196	(6.614.287.231)	1.864.342.424.568	(884.551.518)	4.800.380.269.015	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari/ January 1, 2019	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Perubahan selama tahun 2019/ Changes during 2019			31 Desember/ December 31, 2019	
			Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Akumulasi penyusutan:</u>							<u>Accumulated depreciation:</u>
Nilai revaluasian							At revalued amount:
Bangunan	6.230.977.359	-	2.776.746.588	-	-	9.007.723.947	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	22.903.912.916	(11.560.442)	5.850.419.164	(263.572.507)	-	28.479.199.131	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	540.205.532.646	(3.952.138.644)	171.036.931.185	(488.434.618)	-	706.801.890.569	Telecommunication facilities
Kendaraan	3.095.667.922	-	479.935.349	-	-	3.575.603.271	Vehicles
Aset sewaan - peralatan	4.733.097.113	-	11.236.383.940	-	-	15.969.481.053	Leased equipment
Jumlah	577.169.187.956	(3.963.699.086)	191.380.416.226	(752.007.125)	-	763.833.897.971	Total
Nilai Tercatat	2.366.367.495.240					4.036.546.371.044	Net Book Value

Dampak dari penerapan awal PSAK No. 73 terhadap rincian kelas aset adalah sebagai berikut :

The impact of initial application PSAK No. 73 to the details of asset class are as follows:

Biaya perolehan/Cost				
		Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment	Saldo awal yang d disesuaikan/ Adjusted beginning balance	
1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset sewa pembiayaan:				Finance lease asset:
Peralatan	107.999.168.835	- (107.999.168.835)	-	Lease equipment
Aset hak guna:				Right-of-use assets:
Peralatan telekomunikasi	-	- 107.999.168.835	107.999.168.835	Telecommunication facilities

Akumulasi Penyusutan /Accumulated Depreciation				
				Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted beginning balance
		Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment		
1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset sewa pembiayaan:				Finance lease asset:
Peralatan	15.969.481.053	-	(15.969.481.053)	- Lease equipment
Aset hak guna:				Right-of-use assets:
Peralatan telekomunikasi	-	-	15.969.481.053	15.969.481.053 Telecommunication facilities

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2021	2020	2019	
Beban langsung (Catatan 33)	453.437.321.676	304.393.477.419	167.023.778.838	Direct cost (Note 33)
Beban usaha (Catatan 34)	41.918.868.640	24.608.787.824	24.356.637.388	Operating expense (Note 34)
Jumlah	495.356.190.316	329.002.265.243	191.380.416.226	Subtotal

Pengurangan selama tahun 2021, 2020 dan 2019 merupakan pelepasan aset tetap.

Deductions in 2021, 2020 and 2019 pertain to the disposal of certain property and equipment.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap, kecuali tanah, yang dilakukan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya tertanggal 30 Desember 2020. Penentuan nilai wajar dilakukan dengan metode pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Perusahaan membukukan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp 377.262.681.230.

Revaluasi aset tetap, kecuali tanah, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 191/ PMK.010/2015, tanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.03/2015, tanggal 21 Desember 2015).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo surplus revaluasi aset tetap setelah dikurangi selisih penyusutan aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dan harga perolehan masing-masing adalah sebesar Rp 345.024.461.741, Rp 431.812.510.351 dan Rp 104.324.191.232.

Biaya pinjaman dan biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi yang siap digunakan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 42.925.277.176, Rp 35.708.806.880 dan Rp 38.654.670.262.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic*.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic* dengan persentase penyelesaian masing-masing berkisar antara 15% - 89%, 20% - 85% dan 33% - 90% pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 sampai dengan 2039. Manajemen berpendapat tidak terdapat permasalahan dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

In 2020, the Company revalued its property and equipment except land which was performed by KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, independent valuers, in its report, dated December 30, 2020. Market data and cost approach methods were used in determining of fair value. The Company recognized net gain on revaluation amounting to Rp 377,262,681,230.

Revaluation of property and equipment except land is in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK No. 191/PMK.010/2015, dated October 15, 2015, as amended by PMK No. 233/PMK.03/2015, dated December 21, 2015).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, gain on asset revaluation after deducting the difference between depreciation based on the revalued carrying amount and depreciation based on original cost amounted of Rp 345,024,461,741, Rp 431,812,510,351 and Rp 104,324,191,232, respectively.

Borrowing costs and other expenses that are necessary to bring an asset to its working condition capitalized to construction in progress for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 42,925,277,176, Rp 35,708,806,880 and Rp 38,654,670,262, respectively.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of Fiber Optic.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of Fiber Optic has completion percentage of 15% - 89%, 20% - 85% and 33% - 90%, respectively, as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

The Group owns several parcels of land located in Jakarta with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for 30 years until 2035 to 2039. Management believes there will be no difficulty in the extension of the landrights since all of the parcels of land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tanah, bangunan, dan fasilitas telekomunikasi dijadikan jaminan untuk utang bank (Catatan 23).

Land, buildings, and telecommunication facilities are used as collaterals for bank loans (Note 23).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mengasuransikan peralatan telekomunikasi kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Wahana Tata, pihak ketiga, terhadap gempa bumi dan *property all risk* dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 13.031.063.603.110, Rp 12.024.888.989.457 dan Rp 6.972.115.019.383.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group insured its telecommunication facilities with various insurance companies, including PT KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, and PT Asuransi Wahana Tata, third parties, against earthquake and property all risk for Rp 13,031,063,603,110, Rp 12,024,888,989,457 and Rp 6,972,115,019,383, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat penurunan nilai tercatat aset tetap.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019 based on the Group's management assessment, there is no impairment in values of the aforementioned property and equipment.

14. Aset Hak Guna

14. Right-of-use Assets

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021						31 Desember/ December 31, 2021	
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisi penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Aset Hak Guna</u>								<u>Right of use assets</u>
Jaringan	37.319.391.668	145.473.220	499.620.078	-	-	-	37.964.484.966	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	26.828.056.071	39.572.541	19.674.655.204	2.239.671.135	(1.198.440.000)	3.310.940.000	50.894.454.951	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	157.999.145.773	-	-	-	-	-	157.999.145.773	Telecommunication facilities
Jumlah	222.146.593.512	185.045.761	20.174.275.282	2.239.671.135	(1.198.440.000)	3.310.940.000	246.858.085.690	Total
<u>Akumulasi pemusutan</u>								<u>Accumulated depreciation</u>
Jaringan	15.820.772.117	71.473.800	12.262.954.326	-	-	-	28.155.200.243	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	12.440.522.229	44.085.952	14.181.614.208	1.899.945.483	(1.186.920.000)	1.356.855.000	28.736.102.872	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	30.405.548.591	-	15.387.752.342	-	-	-	45.793.300.933	Telecommunication facilities
Jumlah	58.666.842.937	115.559.752	41.832.320.876	1.899.945.483	(1.186.920.000)	1.356.855.000	102.684.604.048	Total
Nilai Tercatat	163.479.750.575						144.173.481.642	Net Book Value

*) merupakan nilai tercatat aset tetap entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)
represent net carrying value of property and equipment of acquired company on acquisition date (Note 1C)

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020				
	1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020	
Aset hak guna:				Right-of-use assets:	
Jaringan	39.207.492.721	(1.956.080.812)	67.979.759	37.319.391.668	Link
Ruangan peralatan	14.685.794.269	25.100.388	12.117.161.414	26.828.056.071	Equipment space
Peralatan telekomunikasi	107.999.168.835	-	49.999.976.938	157.999.145.773	Telecommunication facilities
Jumlah	161.892.455.825	(1.930.980.424)	62.185.118.111	222.146.593.512	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020			
	1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Akumulasi penyusutan:</u>				<u>Accumulated depreciation:</u>
Jaringan	7.080.874.489	(2.302.024.660)	11.041.922.288	15.820.772.117
Ruangan peralatan	4.270.881.443	32.911.610	8.136.729.176	12.440.522.229
Peralatan telekomunikasi	15.969.481.053	-	14.436.067.538	30.405.548.591
Jumlah	27.321.236.985	(2.269.113.050)	33.614.719.002	58.666.842.937
Nilai Tercatat	134.571.218.840			163.479.750.575
				Net Book Value

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa peralatan telekomunikasi. Periode sewa tiga (3) tahun dan sebagian besar perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

The Group entered into various lease agreements for use of telecommunication. The lease terms are three (3) years and the majority of the lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to leases:

	2021	2020	
Penyusutan aset hak-guna:			Depreciation of right-of-use assets:
Jaringan	12.262.954.326	11.041.922.288	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	14.181.614.208	8.136.729.176	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	15.387.752.342	14.436.067.538	Telecommunication facilities
Subjumlah	41.832.320.876	33.614.719.002	Subtotal
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 35)	2.976.018.724	5.374.911.785	Interest expense on lease liabilities (Note 35)
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (Catatan 33 dan 34)	42.233.460.876	30.950.817.003	Expenses relating to short-term leases (Note 33 and 34)
	87.041.800.476	69.940.447.790	

*termasuk dampak penerapan PSAK 73/Include the impact of PSAK 73 application.

15. Aset Takberwujud

15. Intangible Assets

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021			
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	31 Desember 2021/ December 31, 2021
<u>Biaya perolehan:</u>				<u>At cost:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	3.168.980.346	9.899.593.161	18.000.000	13.086.573.507
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	726.981.020
Jumlah	7.083.499.576	9.899.593.161	18.000.000	17.001.092.737
				Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021			
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Amortisasi:				Amortization:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210
PKS dan lisensi	2.467.145.756	3.261.496.895	5.500.000	5.734.142.651
Lisensi clarent	693.875.580	21.332.804	-	715.208.384
Jumlah	6.348.559.546	3.282.829.699	5.500.000	9.636.889.245
Nilai Tercatat	734.940.030			7.364.203.492
				Net Carrying Value

*) merupakan nilai tercatat aset tak berwujud entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)/
represent net carrying value of intangible assets of acquired company on acquisition date (Note 1C)

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020			
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya perolehan:				At cost:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.628.844.080	1.540.136.266	3.168.980.346	PKS and license
Lisensi clarent	726.981.020	-	726.981.020	Clarent license
Jumlah	5.543.363.310	1.540.136.266	7.083.499.576	Total
Amortisasi:				Amortization:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.511.897.231	955.248.525	2.467.145.756	PKS and license
Lisensi clarent	653.143.035	40.732.545	693.875.580	Clarent license
Jumlah	5.352.578.476	995.981.070	6.348.559.546	Total
Nilai Tercatat	190.784.834		734.940.030	Net Carrying Value

	Perubahan selama tahun 2019/ Changes during 2019			
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya perolehan:				At cost:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.628.844.080	-	1.628.844.080	PKS and license
Lisensi clarent	726.981.020	-	726.981.020	Clarent license
Jumlah	5.543.363.310	-	5.543.363.310	Total
Amortisasi:				Amortization:
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.470.840.982	41.056.249	1.511.897.231	PKS and license
Lisensi clarent	563.021.596	90.121.439	653.143.035	Clarent license
Jumlah	5.221.400.788	131.177.688	5.352.578.476	Total
Nilai Tercatat	321.962.522		190.784.834	Net Carrying Value

Beban amortisasi aset tidak berwujud yang dicatat sebagai beban usaha masing-masing sebesar Rp 3.282.829.699, Rp 995.981.070 dan Rp 131.177.688 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan dicatat sebagai "Beban Usaha" dalam laba rugi (Catatan 34).

Amortization of intangible assets amounted to Rp 3,282,829,699, Rp 995,981,070 and Rp 131,177,688 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively and is recorded as part of "Operating Expenses" in profit or loss (Note 34).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned intangible assets.

16. Aset lain-lain

16. Other Assets

	2021	2020	2019	
Aset lancar				Current assets
Persediaan perlengkapan				Supplies inventories
Peralatan dan perlengkapan	17.466.622.049	15.389.685.961	14.214.375.583	Equipment and supplies
Perangkat	59.462.576.339	14.708.330.193	2.992.187.090	Device
Suku cadang	11.642.098.126	8.457.967.478	7.471.878.788	Spare parts
Biaya proyek ditangguhkan	1.463.866.030	1.463.866.030	-	Deferred charges of project
Uang jaminan (Catatan 42)	7.548.425.281	-	-	Security deposits (Note 42)
Jumlah	97.583.587.825	40.019.849.662	24.678.441.461	Total
Aset tidak lancar				Non current assets
Proyek dalam proses konstruksi				Project in progress
Saldo awal	50.311.580.266	26.045.820.753	51.591.101.388	Beginning balance
Penambahan	325.384.837.453	159.783.178.717	115.894.999.064	Additions
Pengurangan	(265.300.381.020)	(135.517.419.204)	(141.440.279.699)	Deduction
Saldo akhir	110.396.036.699	50.311.580.266	26.045.820.753	Ending balance
Biaya proyek ditangguhkan	18.093.337.201	19.518.213.733	-	Deferred charges of project
Uang jaminan (Catatan 42)	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits (Note 42)
Jumlah	132.524.635.159	73.669.039.539	28.265.065.487	Total

Proyek dalam proses konstruksi merupakan aset lain-lain yang dikerjakan oleh PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, entitas anak.

Project in progress represent other assets from PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, a subsidiary.

17. Utang Usaha

17. Trade Accounts Payable

a. Berdasarkan Pemasok

a. By Creditor

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Pengadaan aset tetap	13.872.719.930	14.260.920.100	-	Fixed assets acquisition
Jasa telekomunikasi	-	-	6.005.330.539	Telecommunications service
Sub jumlah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Jangka pendek				Short - term
Pengadaan aset tetap	973.698.954.288	517.168.270.129	478.418.808.674	Fixed assets acquisition
Jasa telekomunikasi	159.249.461.800	161.804.749.212	127.275.942.618	Telecommunications service
Sub jumlah	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Pengadaan aset tetap	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Fixed assets acquisition
Jumlah	1.337.356.327.542	1.268.988.762.019	674.330.866.515	Total

b. Berdasarkan Umur

b. By Age

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Belum jatuh tempo	2.012.798.039	4.025.635.050	5.034.630.200	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
1 s/d 30 hari	6.968.375.000	316.974.350	33.220.000	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	-	64.295.000	178.420.000	31 to 60 days
> 60 hari	4.891.546.891	9.854.015.700	759.060.339	> 60 days
Sub jumlah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Jangka pendek				Short-term
Belum jatuh tempo	902.803.240.117	514.379.732.031	516.723.840.109	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
1 s/d 30 hari	152.705.648.712	45.143.992.625	50.174.903.865	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	5.185.037.452	34.430.486.455	17.932.617.257	31 to 60 days
> 60 hari	72.254.489.807	85.018.808.230	20.863.390.061	> 60 days
Sub jumlah	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Belum jatuh tempo	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Not yet due
Sub jumlah	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Subtotal
Jumlah	1.337.356.327.542	1.268.988.762.019	674.330.866.515	Total

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currency

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
Jangka pendek				Short-term
Rupiah	996.014.155.215	671.797.009.052	600.016.240.709	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	128.276.012.852	2.111.887.953	5.614.136.515	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapura (Catatan 42)	8.658.248.021	5.064.122.336	64.374.068	Singapore Dollar (Note 42)
Sub jumlah	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Jangka panjang				Long-term
Rupiah	159.797.186.333	575.754.822.578	62.630.784.684	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	30.738.005.191	-	-	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Subtotal
Jumlah	1.337.356.327.542	1.268.988.762.019	674.330.866.515	Total

Utang usaha jangka panjang merupakan utang atas pengadaan barang dan jasa OLT dan ONT kepada PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia untuk pembangunan jaringan network Perusahaan yang pembayarannya ditangguhkan tidak dikenakan bunga. Perusahaan mengeluarkan surat janji bayar dengan jatuh tempo dalam 18 bulan dan 24 bulan sejak diterbitkan.

Trade accounts payable represent payables for procurement of OLT's and ONT's materials and services of MTI, the Company, to PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia, for network construction with deferred payment arrangement with no interest. The Company issues Promisory Notes with maturity period of 18 months and 24 months since issuance.

18. Utang Lain-lain

a. Berdasarkan Pemasok:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Beban operasi	6.900.000	3.774.000	34.907.117	Operational expenses
Pihak ketiga				Third parties
Beban operasi	63.481.829.190	86.155.977.534	99.300.885.870	Operational expenses
Lain-lain	25.852.345.834	26.517.200.000	17.153.000.000	Others
Sub jumlah	89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870	Subtotal
Jumlah	89.341.075.024	112.676.951.534	116.488.792.987	Total

b. Berdasarkan Mata Uang

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	6.900.000	3.774.000	30.887.919	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	-	-	4.019.198	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	6.900.000	3.774.000	34.907.117	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	88.354.986.530	111.987.392.191	112.284.149.880	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	979.188.494	685.785.343	4.126.956.522	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapore (Catatan 42)	-	-	42.779.468	Singapore Dollar (Note 42)
Sub jumlah	89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870	Subtotal
Jumlah	89.341.075.024	112.676.951.534	116.488.792.987	Total

18. Other Accounts Payable

a. By Creditor:

b. By Currency

19. Utang Pajak

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan badan (Catatan 37)				Corporate income tax (Note 37)
Pasal 29 - Perusahaan				Article 29 - Company
- Tahun 2021	1.989.209.886	-	-	- Year 2021
- Tahun 2020	-	1.043.406.631	-	- Year 2020
Pasal 29 - Entitas anak				Article 29 - Subsidiaries
- Tahun 2021	19.329.947.734	-	-	- Year 2021
- Tahun 2020	-	8.426.494.068	-	- Year 2020
- Tahun 2019	-	-	22.059.842.121	- Year 2019
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4 (2)	779.441.370	1.468.812.196	2.500.076.186	Article 4 (2)
Pasal 15	-	31.537.979	-	Article 15
Pasal 21	1.618.413.150	2.083.948.292	1.296.188.401	Article 21
Pasal 23	333.050.123	2.522.642.458	346.219.258	Article 23
Pasal 25	615.919.030	914.524.387	3.309.988.833	Article 25
Pasal 26	7.226.770	50.528.736	37.224.982	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	3.210.697.580	151.937.213	-	Value Added Tax - Subsidiary
Jumlah	27.883.905.643	16.693.831.960	29.549.539.781	Total

19. Taxes Payable

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

The filed tax returns are based on the Group's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

20. Uang Muka Penjualan

20. Advances from Customers

	2021	2020	2019	
SKY Perfect JSAT	64.210.545.000	-	-	SKY Perfect JSAT
PT Huawei Tech Investment	28.775.765.818	208.997.759.562	77.238.357.255	PT Huawei Tech Investment
PT ZTE Indonesia	-	126.772.488.076	58.571.361.473	PT ZTE Indonesia
Ditlantas Polda Metro Jaya	-	-	16.092.365.066	Ditlantas Polda Metro Jaya
PT Batutua Tembaga Raya	-	-	5.507.871.920	PT Batutua Tembaga Raya
PT Smart Telecom	-	-	1.617.111.876	PT Smart Telecom
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	132.338.871.675	72.277.896.831	3.133.498.096	Others (each below Rp 1,000,000,000)
Jumlah	225.325.182.493	408.048.144.469	162.160.565.686	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961	Less Current portion
Bagian jangka panjang	222.925.986.194	405.507.785.560	135.809.718.725	Long portion

Uang muka penjualan terkait perjanjian kerjasama sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur serat optik dan jasa penyediaan *gateway service* VSAT.

Advance from customers related to agreement of construction of fiber optic infrastruktur and gateway service VSAT.

21. Pendapatan Ditangguhkan

21. Deferred Income

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

This account represents advance rental fees received from several telecommunication operators for the rental of capacity of optical fiber core based on Indefeasible Right of Use (IRU) for a term of fifteen (15) years.

Mutasi selama tahun-tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements for the years ended are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	130.124.408.243	136.740.849.558	95.277.307.356	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	416.349.694.150	154.123.329.014	246.885.748.615	Additions during the year
Selisih kurs penjabaran	394.527.806	477.976.508	(1.114.399.377)	Translation adjustment
Amortisasi	(353.059.770.956)	(161.217.746.837)	(204.307.807.036)	Amortization
Saldo akhir	193.808.859.243	130.124.408.243	136.740.849.558	Ending balance
Dikurangi bagian jangka pendek	28.935.826.669	23.204.325.364	24.868.597.797	Less current portion
Bagian jangka panjang	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761	Noncurrent portion

22. Utang Non-Bank

	2021	2020	2019	
Cisco System Capital Asia, Ltd.	56.630.969.306	21.990.464.042	35.154.808.142	Cisco System Capital Asia, Ltd.
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669	Noncurrent portion

Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.

Pada 16 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi backbone sebesar USD 4.629.869. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 3% per tahun. Pada 13 Januari 2021, perjanjian tersebut mengalami perubahan pada nilai pembiayaan menjadi USD 3.775.080.

Pada 1 Maret 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 2.023.541. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama 5 tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Pada 5 Oktober 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.276.508. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Pada 13 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 923.194. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 5% pertahun.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada 30 Maret 2015, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.100.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 3,5% per tahun.

22. Non-Bank Loans

Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.

On September 16, 2020, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. to finance backbone investment amounting to US\$ 4,629,869. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 3% per year. On January 13, 2021, this agreement has been amended changing the facility to US\$ 3,775,080.

On March 1, 2018, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 2,023,541. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

On October 5, 2017, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 1,276,508. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

On October 13, 2016, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 923,194. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 5% per year.

In 2021, the Company had fully paid this loan facilities.

On March 30, 2015, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. to finance Information Technology solution amounting to US\$ 1,100,000. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 3.5% per year.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki utang masing-masing sebesar USD 3.968.810 (setara dengan Rp 56.630.969.306), USD 1.559.054 (setara dengan Rp 21.990.464.042) dan USD 2.528.941 (setara dengan Rp 35.154.808.142).

Bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar Rp 2.326.534.221, Rp 1.819.622.248 dan Rp 1.813.065.043 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

In 2019, the Company had fully paid this loan facilities.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's outstanding loans amounted to 3,968,810 (equivalent to Rp 56,630,969,306), USD 1,559,054 (equivalent to Rp 21,990,464,042) and USD 2,528,941 (equivalent Rp 35,154,808,142), respectively.

Interest expense paid on these loans amounted to Rp 2,326,534,221, Rp 1,819,622,248 and Rp 1,813,065,043, in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

23. Utang Bank

23. Bank Loans

	2021	2020	2019	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.738.887.536.358	3.960.967.378.470	4.630.999.601.536	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.399.297.758.968	983.786.621.213	1.812.783.448.394	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	18.000.000.000	30.000.000.000	42.000.000.000	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	-	16.187.313.707	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Jumlah	5.156.185.295.326	4.974.753.999.683	6.501.970.363.637	Total
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.164.750.861.401)	(954.401.804.443)	(1.760.476.321.040)	Less: current portion
	3.991.434.433.925	4.020.352.195.240	4.741.494.042.597	
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(46.598.039.512)	(60.056.781.356)	(79.634.214.679)	Unamortized provision fee and transaction costs
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918	Noncurrent portion

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Perusahaan

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

- Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

The Company

On October 14, 2011, the Company obtained loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The current facilities as follows:

- The working capital credit facility obtained from Bank Mandiri amounting to Rp 20,000,000,000 has a term of one (1) year. On October 18, 2015, the Company obtained additional working capital credit facility from Bank Mandiri amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

This facility has been renewed every year with latest renewal made on July 10, 2021 for twelve (12) months.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 25.000.000.000.

- b) Perusahaan memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) yang memiliki *limit* sebesar Rp 5.000.000.000 dan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini di perpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perusahaan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

The outstanding balance of bank loan from these facilities as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 25,000,000,000.

- b) The Company obtained Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Guarantee (BG) with a maximum credit amounting to Rp 5,000,000,000 and a term of 180 days. This facility will be used to purchase fiber optic lease network, network material and imported and local equipment in order to support the Company's operating activity.

On May 21, 2012, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 15,000,000,000, bringing the total facility to Rp 20,000,000,000.

On October 16, 2013, this facility was extended and combined with the facilities of Bank Guarantee facility amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

On October 13, 2015, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 35,000,000,000 bringing the total facility to Rp 60,000,000,000.

On October 12, 2016, this facility was extended. The Company reduced its facility amounting to Rp 35,000,000,000, reducing the total facility to Rp 25,000,000,000.

On October 18, 2017, this facility was extended for 9 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

On July 9, 2018, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 2 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 963.697.332, Rp 2.130.760.623 dan Rp 7.667.399.646.

- c) Fasilitas *treasury line* sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah *hedging* transaksi usaha impor dan ekspor.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan fiber optic di Sumatra, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.

On July 10, 2019, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

On July 9, 2020, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

On July 10, 2021, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 963,697,332, Rp 2,130,760,623 and Rp 7,667,399,646, respectively.

- c) A line treasury facility amounting to US\$ 1,000,000 for a period of 12 months, the purpose of this facility is to support the import and export hedging transactions.

This facility has been renewed on July 10, 2021 for twelve (12) months.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not utilized these credit facilities.

On October 31, 2014, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 72,700,000,000 which will be used to finance fiber optic development project in Sumatra, Jambi - Batam and DWDM equipment on Jambi - Bumi Serpong Damai fiber optic lane.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 13.328.333.333.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan *BTS Backhaul* di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan *limit* fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 733.333.333 dan Rp 1.533.333.333.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 104.391.594.313, Rp 143.628.218.718 dan Rp 174.945.696.991.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

As of December 31, 2019, the outstanding balance of bank loan from these facilities amounted to Rp 13,328,333,333.

On 2020, the Company fully paid this facility.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 157,000,000,000 which will be used to finance BTS Backhaul development project in Indonesia. On October 18, 2015, the credit investments facility limit was changed to Rp 4,000,000,000.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 733,333,333 and Rp 1,533,333,333, respectively.

On 2020, the Company fully paid this facility.

The collaterals for these credit facilities are the project itself and all of the working capital collaterals.

On June 20, 2017, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 240,000,000,000 which will be used to finance XL tower fiberization project.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 104,391,594,313, Rp 143,628,218,718 and Rp 174,945,696,991, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 22.000.000.000. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 5.036.698.603, Rp 6.122.592.338 dan Rp 6.931.236.609.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa *BTS backhaul* untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 17.967.205.610, Rp 23.794.425.471 dan Rp 29.621.609.249.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 856.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 50,000,000,000 which will be used to refinance existing assets fiber optic Batam - Singapore.

This credit facility has a term of forty-eight (48) months from the 2-month withdrawal period.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 10,000,000,000 and Rp 22,000,000,000, respectively. In 2021, the Company had fully paid this loan facility.

On June 21, 2018, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to finance tower fiberization project for PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia and PT XL Axiata Tbk.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 5,036,698,603, Rp 6,122,592,338 and Rp 6,931,236,609, respectively.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 70,000,000,000 which will be used to construction project of telecommunication infrastructure of *BTS backhaul* for PT Smartfren Telecom Tbk and/or PT Smart Telecom

This credit facility has a term of sixtysix (66) months from the 9-month withdrawal period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 17,967,205,610, Rp 23,794,425,471 and Rp 29,621,609,249, respectively.

As of December 31, 2019, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 856,000,000,000 for General Corporate Purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 856.000.000.000 dan Perusahaan telah melunasi pinjaman ini pada tahun 2020.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 240.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 500.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 687.366.666.667 dan Rp 234.084.848.485.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Perusahaan diisyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/SKBDN/BG) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).

As of December 31, 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 856,000,000,000 and the Company has fully paid in 2020.

On October 22, 2020, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 240,000,000,000 for *General Corporate Purposes*.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the 3-month withdrawal period.

On May 28, 2021, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 500,000,000,000 for *General Corporate Purposes*.

As of December 31, 2021, the Company fully drawdown of this facility.

As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 687,366,666,667 and Rp 234,084,848,485, respectively.

The covenant of the Company's credit facility from Mandiri is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.

The Company is required to fulfill certain general covenant and financial ratio. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company complied with the required general covenant and financial ratio.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary

Based on Investment Credit (KI) and Non Cash Loan Facility (LC/SKBDN/BG) Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dated July 25, 2016, the PRB obtained the following credit facilities:

- a. Investment Credit Facility ("KI") amounted to Rp 875,785,000,000 used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package. The period of credit facilities is 8 years from the signing of the Credit Agreement (include grace period and availability period within 2 years, which is dated from July 25, 2016 until July 24, 2024).

- b. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 500.000.000.000 yang merupakan sub limit dari KI dan digunakan untuk pembiayaan penerbitan LC Impor/SKBDN/BG untuk pengadaan material dan dan peralatan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas ini adalah 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan fasilitas ini sudah berakhir pada tahun 2018.
- c. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Standby Letter of Credit)* (SBLC)) sebesar Rp 57.000.000.000 untuk jaminan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2018.
- d. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 26.000.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2017.

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 391.423.220.879, Rp 540.423.220.879 dan Rp 683.423.220.881.

- b. Non Cash Loan Credit Facility (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Guarantee (BG)) amounted to Rp 500,000,000,000 which is sub limit of KI to finance the issuance of LC Import/SKBDN/BG for purchasing the material and equipment construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package project. Time period of this facility is 2 years from the signing of the Credit Agreement and this facility has ended on 2018.
- c. Non Cash Loan Credit Facility (Standby Letter of Credit (SBLC)) amounted to Rp 57,000,000,000 to guarantee the execution of construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package project addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia and this facility expired in July 2018.
- d. Non Cash Loan Credit Facility (Bank Guarantee (BG)) amounted to Rp 26,000,000,000 to guarantee the availability of services addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia and this facility has expired in July 2017.

PRB entered into a new agreement on December 18, 2018 for Non Cash Loan Credit Facility (Bank Guarantee (BG)) amounted to Rp 25,500,000,000 to guarantee the availability of services addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia with time period of this facility is 2 months from the signing of the Credit Agreement.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 391,423,220,879, Rp 540,423,220,879 and Rp 683,423,220,881, respectively.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* dan *deficit cashflow* dari PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham Perusahaan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Fasilitas ini mengharuskan Perusahaan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perusahaan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan *submarine cable*/serat optik milik Perusahaan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik perusahaan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung.

These facilities are secured by the construction of national fiber optic backbone network western package including fiber optic network and land, trade receivables to Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI), claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), corporate guarantee and deficit cashflow from PT Mora Telematika Indonesia, pledges of shares of the Company on behalf PT Ketrosden Triasmitra and PT Mora Telematika Indonesia, pledges of shares PT Inovasi Mas Mobilitas on behalf Farida Bau and Personal Guarantee of Galumbang Menak, a related party.

The facilities agreement required the Company to comply with several requirements, such as requirements which are compulsive and matters which are not to be done without approval and other additional requirements, one of them is that when the construction of national fiber optic backbone network western package are completed then the Company must provide a minimum restricted funds amounting to Rp 7,000,000,000 to cover the risk of uninsured of submarine cable/fiber optic owned by the Company when construction of backbone network of National Optical Fiber West Package project had finished.

The PRB's Covenant for credit facility with Mandiri is that PRB is not allowed to be debt guarantor/pledge assets to other parties and obtain new credit/loan facilities from other parties.

PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - a Subsidiary

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 dated December 22, 2020, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 1, amounting to Rp 90,000,000,000 which is used to finance the Company's existing assets in the form of 47 towers, 510 VSAT and Communication Centers (HUB) for the provision of capacity for telecommunications satellites and supporting facilities.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 69.070.000.000.

- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 59.945.885.466.

- c. Penawaran fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 2021 fasilitas ini di perpanjang untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya.

The credit facility has a term of forty three (43) months from the 3-months grace period and bears interest of 10.5% per annum.

As of December 31, 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 69,070,000,000.

- b. Investment Credit Facility 2, amounting to Rp 60,000,000,000 which is used for financing procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bowheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bowheer companies.

The credit facility has a term of thirty four (34) months from the 12-months grace period and bears annual interest at 10.5%.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 59,945,885,466.

- c. Offering of Treasury Line facility of USD 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the company's operational activities. The term of this facility is 12 months.

On December 8th, 2021 the facility is extended for 12 months.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not utilized these credit facilities.

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 3, amounting to Rp 70,000,000,000 which is used to finance procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bowheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bowheer companies.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fasilitas kredit ini memiliki periode Pelunasan 60 bulan Sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 39.096.487.430.

- b. Selain fasilitas kredit investasi, Perusahaan juga memperoleh fasilitas Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (Payment Bond) pembayaran akhir tahun ke BAKTI.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan sudah menggunakan fasilitas kredit ini sebesar Rp 29.185.661.366.

- c. Perpanjangan fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha kepada Bowheer, gadai saham yang dimiliki oleh PT Mora Telematika Indonesia dan PT Telematika Cahaya Global pada IPT, entitas anak, Corporate Guarantee dan Deficit Cash Flow Guarantee dari PT Gema Lintas Buana dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup pada Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 168.112.372.896, Rp 983.786.621.213 dan Rp 1.812.783.448.394.

Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 258.880.235.142, Rp 1.068.996.827.181 dan Rp 209.985.119.899.

The credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-months grace period and this facility bears interest of 9.5% per annum.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 39,096,487,430.

- b. Beside the investment facility, the Company also obtain Non-cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Revolving Line Guarantee Bank Facility Rp 40,000,000,000 used to guarantee (Payment Bonds) year end payment to BAKTI.

The term of this facility is 1 year and renew yearly.

As of December 31, 2021 the Company has utilized this facility amounting to Rp 29,185,661,366.

- c. Renewal of Treasury Line facility of USD 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the company's operational activities.

The term of this facility is 12 months.

These facilities are secured by the assets financed by the credit facility, trade receivables to customers, pledges of shares owned by PT Mora Telematika Indonesia and PT Telematika Cahaya Global to IPT, a subsidiary, corporate guarantee and deficit cash flow guarantee from PT Gema Lintas Buana and Personal Guarantee of Galumbang Menak.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the total outstanding balances of bank loan of the Group from these facilities in Bank Mandiri amounted to Rp 168,112,372,896, Rp 983,786,621,213 and Rp 1,812,783,448,394, respectively.

Total payments made by the Group for the principal loan balance of Bank Mandiri amounted to Rp 258,880,235,142, Rp 1,068,996,827,181 and Rp 209,985,119,899 in 2021, 2020 and 2019, respectively.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan masing-masing berkisar antara 8,5% dan 10,5% per tahun, 9% dan 10,25% per tahun dan antara 10% dan 11,5% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 94.561.809.987, Rp 103.354.449.035 dan Rp 109.893.840.955 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35 dan 13).

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (Bank Jtrust)

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek FTTX. Pada tahun 2016, Perusahaan telah mencairkan fasilitas ini seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi FTTX dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya, dan Bali (Catatan 13).

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *Non Revolving* sebesar Rp 100.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek *Ultimate Java Backbone*, Ring 1, 2 dan 3. Pada tahun 2018, fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit.

In 2021, 2020 and 2019, the interest rate is between 8,5% and 10,25% per annum, between 9% and 10,25% per annum and 10% and 11.5% per annum, respectively.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 94,561,809,987, Rp 103,354,449,035 and Rp 109,893,840,955 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Notes 35 and 13).

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (Bank Jtrust)

The Company obtained several loan facilities from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk as follows:

- a. On December 23, 2015, the Company obtained credit investment facility amounting to Rp 55,000,000,000 which were used to finance FTTX project. In 2016, the Company has made full drawdown of the facility.

The credit facility has a term of sixty (60) months from the approval of credit agreement.

This loan is secured by telecommunication facilities of FTTX and land and building and machine and equipment of data center in Medan, Palembang, Surabaya, and Bali (Note 13).

This loan has been fully paid on May 19, 2019, based on letter of payment with No. 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

- b. On May 18, 2016, the Company obtained Non Revolving investment loan facility amounting to Rp 100,000,000,000 which were used to finance Ultimate Java Backbone Ring 1, 2 and 3 project. In 2018, the facility has been fully availed.

The credit facility has a term of seventy eight (78) months from the approval of credit agreement.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* beserta pra sarana pendukungnya dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya dan Bali, dan tanah dan bangunan di Jakarta serta piutang perusahaan dan peralatan telekomunikasi NIX 1, FTTX dan *Ultimate Java Backbone Ring 1, 2, 3* (Catatan 13).

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan J-trust meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari bank lain.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp 113.395.631.564.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 5.832.664.830 pada tahun 2019 (Catatan 35).

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank Panin Syariah)

Pada tanggal 18 April 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas wa'ad musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2014.

Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pengambil alihan (*take over*) dan investasi.

Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan shelter, perangkat BTS dan perangkat Serat Optik di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Catatan 13), deposito senilai Rp 1.700.000.000 (Catatan 5) serta tagihan piutang efektif kepada PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Telekomunikasi Selular (Catatan 6) serta jaminan perusahaan atas nama PT Gema Lintas Benua, pihak berelasi.

This loan is secured by telecommunication facilities *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* with its supporting facilities and land and building and machine and equipment of data center in Medan, Palembang, Surabaya and Bali, and land and building in Jakarta and also receivables of the Company and telecommunication facilities of Nix 1, FTTX and *Ultimate Java Backbone project Ring 1, 2, 3* (Note 13).

This loan has been fully paid on May 13, 2019, based on letter of payment with Number 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

The covenant of the Company's credit facility from J-trust is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other bank.

In 2019, the Company had fully paid principal of this loan amounted to Rp 113,395,631,564.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 5,832,664,830 in 2019 (Note 35).

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank Panin Syariah)

On April 18, 2013, the Company obtained "wa'ad musyarakah" facility, a financing facility granted by Bank Panin Syariah to the Company amounting to Rp 90,000,000,000. This facility has been fully withdrawn in 2014.

The facility bears a floating profit sharing rate and has a term of sixty (60) months from the each of withdrawal date.

The proceeds was used to finance the existing credit investment facilities.

The above loans are secured by telecommunication facilities BTS and Fiber Optic in West Java and Central Java (Note 13), time deposit amounting to Rp 1,700,000,000 (Note 5), trade accounts receivable from PT Smartfren Telecom Tbk and PT Telekomunikasi Selular (Note 6) and corporate guarantee of PT Gema Lintas Benua, a related party.

Pada tanggal 18 November 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk investasi upgrade *Java Ring Backbone* yang terdiri atas proyek *Metro WDM Inner* Jakarta dan Surabaya, *upgrade Java Network* dan *Protection*, *Java Access* dan Surabaya - Malang *Backbone*. Perusahaan telah mencairkan keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang diberikan tersebut.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Bank Panin Syariah meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit sebesar Rp 16.187.313.707. Pada tahun 2020, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.187.313.707 dan Rp 23.244.510.469.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tingkat bagi hasil yang diharapkan mengambang dikenakan 11% - 14,25% per tahun.

Bagi hasil yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.078.857.096 dan Rp 2.778.545.550 pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 35).

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan).

On November 18, 2014, the Company obtained musyarakah facility, from Bank Panin Syariah amounting to Rp 70,000,000,000 which were used to upgrade investment in Java Ring Backbone consists of Inner Metro WDM project in Jakarta and Surabaya, upgrade Java Network and Protection, Java Acces and Surabaya - Malang backbone. These facilities were fully availed by the Company.

The credit facility has a term of sixty (60) months from each of withdrawal date.

The Covenant of the Company's credit facility from Bank Panin Sharia is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties.

As of December 31, 2019, the outstanding loan balances from this credit facility amounted to Rp 16,187,313,707. In 2020, the Company had fully paid this loan facility.

Payment of loan principal in 2020 and 2019 amounted to nil, Rp 16,187,313,707 and Rp 23,244,510,469.

As of December 31, 2020 and 2019, the floating profit sharing rate is 11% - 14.25% per annum.

Total payment of the profit sharing on these loan facilities amounted to Rp 1,078,857,096 and Rp 2,778,545,550 in 2020 and 2019, respectively (Note 35).

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

On November 29, 2016, the Company obtained credit investments facility amounting to Rp 50,000,000,000 and Rp 10,000,000,000 (*uncommitted loan*) which were used to finance the network construction of ultimate java backbone ring 4 and 5, respectively. The Company has fully availed these facilities in 2018.

The credit facility has a term seventy eight (78) months from the approval of credit agreement (including 18 months grace period and availability period).

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone ring 4* dan 5 (Catatan 13).

This loan is secured by fiber optic network of *ultimate java backbone ring 4* and 5 (Note 13).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 18.000.000.000, Rp 30.000.000.000 dan Rp 42.000.000.000.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding loan balances from this credit facility amounted to Rp 18,000,000,000, Rp 30,000,000,000 and Rp 42,000,000,000, respectively.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000, Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Payment of loan principal in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 12,000,000,000, Rp 12,000,000,000 and Rp 12,000,000,000, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan masing-masing adalah 9,5%, 11% dan 11,5% per tahun.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9.5%, 11% and 11.5% per annum.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 2.654.250.008, Rp 4.117.958.341 dan Rp 5.654.166.669 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 2,654,250,008, Rp 4,117,958,341 and Rp 5,654,166,669, for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Perusahaan

The Company

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

The Company obtained loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* dan jaringan FTTB.

- a. On April 30, 2019, the Company obtained the Investment refinancing credit facility amounting to Rp 400,000,000,000 which will be used to refinancing Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 project and FTTB network.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the approval credit agreement.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu.

On December 19, 2019, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to construction fiber optic Denpasar-Waingapu.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 405.337.536.358, Rp 548.441.378.470 dan Rp 672.497.601.535.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 143.103.842.113, Rp 124.056.223.066 dan Rp 27.502.398.458.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 166.666.666.667.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 sebesar Rp 33.333.333.333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

This credit facility has a term of seventy two (72) months from the approval credit agreement.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 405,337,536,358, Rp 548,441,378,470 and Rp 672,497,601,535, respectively.

Payment of loan principal in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 143,103,842,113, Rp 124,056,223,066 and Rp 27,502,398,458, respectively.

On February 8, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 200,000,000,000 which will be used to refinancing Bonds 1 Moratelindo 2017 Serie A.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the approval credit agreement.

On February 17, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 166,666,666,667.

Payment of loan principal in 2021 amounted to Rp 33,333,333,333.

On May 11, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 340,000,000,000 which will be used to financing capital expenditure and working capital for year 2021.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the approval credit agreement.

On May 31, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 300.333.333.333.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 300,333,333,333.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 39.666.666.667.

Payment of loan principal in 2021 amounted to Rp 39,666,666,667.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan sebesar 9%, 10,5% dan 10,5% per tahun.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9%, 10.5%, and 10.5% per annum.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 73.016.788.685, Rp 66.352.579.687 dan Rp 14.796.503.323 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 73,016,788,685, Rp 66,352,579,687 and Rp 14,796,503,323, in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

- b. Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Derivative Line* (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi treasury valuta asing *non today* dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

- b. Derivative line facility amounting to USD 3,000,000 or equivalent in another foreign currency for a period of 12 months since signing Derivative Line Facility Agreement (PPFDL). The purpose of this facility is to non today foreign exchange transaction and other derivative transaction also structured product for hedging.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

As of December 31, 2021, the Company has not utilized these credit facilities.

- c. Plafond fasilitas *letter of credit/ SKBDN* dengan sublimit garansi bank/ *SBL/C* sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembukaan *L/C import/ SKBDN sight* and/atau *usance/180 days after BL date* dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.

- c. Plafond letter of credit/ SKBDN with sublimit bank guarantee/ SBL/C facility amounting to Rp 30,000,000,000 for a period of 12 months since signing of Indirect Credit Facility Agreement (PPFKTL). The purpose of this facility is for opening L/C import/ SKBDN sight and/or usance/180 days after BL date in order to purchase merchandise/ raw material/ equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.750.544.079, Rp 16.081.099.555 dan Rp 9.940.830.642.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 23,750,544,079, Rp 16,081,099,555 and Rp 9,940,830,642, respectively.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp 1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (*inland*) dan 4.670 km (*submarine*). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).
- b. Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perusahaan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia, dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.866.550.000.000, Rp 3.412.526.000.000 dan Rp 3.958.502.000.000.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) - a Subsidiary

Based on Credit Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dated March 16, 2017, PTT obtained the following credit facilities:

- a. Investment Credit Facility package 1 and 2 ("KI package 1 and 2") amounted to Rp 2,075,800,000,000 and Rp 1,667,200,000,000, respectively, used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic East Package 1 which connected 35 towns/cities in East Nusa Tenggara, Maluku, Papua and West Papua with length around 2,780 km (*inland*) and 4,670 km (*submarine*). The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (include grace period and availability period within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).
- b. Investment Credit Facility – Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 261,000,000,000 used to finance the interest in obligation for interest payment during construction. The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (including grace period and availability period within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).

These facilities are secured by the equipment of fiber optic and infrastructure as stated in an agreement between Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI) and PTT, land which used as infrastructure location of fiber optic owned by PTT, receivable during rental credit period for 10 years between antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), pledges of shares of the Company on behalf PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera and PT Mora Telematika Indonesia, and *Personal Guarantee* of Galumbang Menak, a related party.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loans from these facilities from BNI amounted to Rp 2,866,550,000,000, Rp 3,412,526,000,000 and Rp 3,958,502,000,000, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan sebesar 9,75% per tahun.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9.75% per annum.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 311.764.707.958, Rp 366.780.615.500 dan Rp 348.795.160.871 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 311,764,707,958, Rp 366,780,615,500 and Rp 348,795,160,871 in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

The covenant for credit facility from BNI is that PTT not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.

Rincian biaya provisi yang belum diamortisasi untuk keseluruhan utang bank pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of unamortized provision cost for all of bank loans as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

2021					
	1 Januari/ January 1, 2021	Biaya provisi belum diamortisasi dari entitas anak baru/ Unamortized provision from newly subsidiary	Penambahan Provisi/ Additions provision	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Biaya provisi belum diamortisasi:</u>					<u>Unamortized provision costs:</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.451.273.312		2.780.076.200	(16.894.787.300)	39.336.562.212
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.529.040.887	303.478.260	2.798.669.146	(2.399.582.558)	7.231.605.735
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	76.467.157	-	-	(46.595.592)	29.871.565
Jumlah	60.056.781.356	303.478.260	5.578.745.346	(19.340.965.450)	46.598.039.512
					Total
2020					
	1 Januari/ January 1, 2020		Penambahan Provisi/ Additions provision	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2020
<u>Biaya provisi belum diamortisasi:</u>					<u>Unamortized provision costs:</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.619.678.024		-	(19.168.404.712)	53.451.273.312
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.872.136.454	1.850.000.000		(2.193.095.567)	6.529.040.887
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	142.400.201	-		(65.933.044)	76.467.157
Jumlah	79.634.214.679	1.850.000.000		(21.427.433.323)	60.056.781.356
					Total
2019					
	1 Januari/ January 1, 2019		Penambahan Provisi/ Additions provision	Amortisasi/ Amortization	31 Desember/ December 31, 2019
<u>Biaya provisi belum diamortisasi:</u>					<u>Unamortized provision costs:</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.985.647.106	20.040.852.894		(28.406.821.976)	72.619.678.024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.420.724.297	375.000.000		(1.923.587.843)	6.872.136.454
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	225.136.685	-		(82.736.484)	142.400.201
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	666.360.582	-		(666.360.582)	-
Jumlah	90.297.868.670	20.415.852.894		(31.079.506.885)	79.634.214.679
					Total

24. Liabilitas Sewa

24. Lease Liabilities

	2021	2020	2019	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance				PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Indonesia	48.249.569.474	69.829.464.032	89.096.278.950	Indonesia
PT Verena Multi Finance Tbk	41.265.650.277	49.360.808.016	-	PT Verena Multi Finance Tbk
Lain-lain	26.320.361.639	36.458.446.481	-	Others
Jumlah	<u>115.835.581.390</u>	<u>155.648.718.529</u>	<u>89.096.278.950</u>	Total

Pada tahun 2019, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK No. 30. Sedangkan mulai tahun 2021 dan 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

In 2019, transactions that met finance lease criteria under PSAK No. 30 were recorded as lease liabilities. While in 2021 and 2020, transactions were recorded as lease liabilities if it met lease criteria in accordance with PSAK 73.

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement:

	2021	2020	2019	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payments due in:
2020	-	-	28.701.626.883	2020
2021	1.975.806.468	59.976.716.363	28.701.626.883	2021
2022	56.712.306.475	54.571.428.103	28.701.626.883	2022
2023	42.284.925.024	40.442.773.901	25.708.041.227	2023
2024	15.496.033.280	14.156.526.491	-	2024
2025	14.769.602.500	13.826.764.616	-	2025
Jumlah pembayaran sewa minimum	<u>131.238.673.747</u>	<u>182.974.209.474</u>	<u>111.812.921.876</u>	Total minimum lease liabilities
Bunga	<u>(15.403.092.357)</u>	<u>(27.325.490.945)</u>	<u>(22.716.642.926)</u>	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	<u>115.835.581.390</u>	<u>155.648.718.529</u>	<u>89.096.278.950</u>	Present value of minimum lease liabilities
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(49.054.755.294)</u>	<u>(48.421.582.510)</u>	<u>(19.266.814.917)</u>	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>66.780.826.096</u>	<u>107.227.136.019</u>	<u>69.829.464.033</u>	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

Pada tanggal 19 September 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun, dengan suku bunga efektif 11,5% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 13).

On September 19, 2018, the Company entered into lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has terms of five (5) years with effective interest rates at 11.5% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 13).

Pada tanggal 20 November 2020, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Verena Multi Finance Tbk atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun, dengan suku bunga efektif 10,5% per tahun (Catatan 13).

On November 20, 2020, the Company entered into lease agreement with PT Verena Multi Finance Tbk for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has terms of five (5) years with effective interest rates at 10.5% per annum (Note 13).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban bunga sewa adalah masing-masing sebesar Rp 11.565.102.773, Rp 9.588.912.182 dan Rp 13.024.681.241 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

The lease interest expense amounted to Rp 11,565,102,773, Rp 9,588,912,182 and Rp 13,024,681,241 in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (future minimum lease payment) berdasarkan perjanjian sewa antara Grup dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) dan PT Verena Multi Finance Tbk:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement between the Group and PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) and PT Verena Multi Finance Tbk:

	2021	2020	2019	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payments due in:
2020	-	-	28.701.626.883	2020
2021	-	40.522.798.883	28.701.626.883	2021
2022	40.522.798.883	41.597.450.883	28.701.626.883	2022
2023	38.603.865.225	38.603.865.227	25.708.041.227	2023
2024	12.895.824.000	12.895.824.000	-	2024
2025	12.895.824.000	12.895.824.000	-	2025
Jumlah pembayaran sewa minimum	104.918.312.108	146.515.762.993	111.812.921.876	Total minimum lease liabilities
Bunga	(15.403.092.357)	(27.325.490.945)	(22.716.642.926)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	89.515.219.751	119.190.272.048	89.096.278.950	Present value of minimum lease
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(32.372.601.029)	(28.967.665.030)	(19.266.814.917)	liabilities
				Less: current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	57.142.618.722	90.222.607.018	69.829.464.033	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

25. Utang Obligasi

25. Bonds Payable

Perincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The following are the details of bonds payable:

Seri/ Series	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo (Tahun)/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2021	2020	2019
Seri A/Series A	9,90%	3	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Seri B/Series B	10,50%	5	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000
Jumlah utang obligasi/Total outstanding bonds				460.000.000.000	460.000.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi/ Unamortized provision fee and transaction costs				(1.138.000.930)	(2.159.868.068)	(5.071.591.716)
Jumlah - bersih/net				458.861.999.070	457.840.131.932	994.928.408.284

Pada bulan Desember 2017, Grup menerbitkan obligasi dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan suku bunga tetap, bunga dibayar setiap triwulanan, dan tanpa jaminan atas obligasi ini. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan suku bunga tetap 9,9%. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

In December 2017, the Group issued denominated bonds in Rupiah amounting to Rp 1,000,000,000,000 with fixed interest rate payable quarterly, and without collateral. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2020. Interest rate is fixed at 9.9% per annum. The Series B bonds have a term of five (5) years until 2022. Interest rate is fixed at 10.5% per annum. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as trustee.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Amortisasi biaya provisi dan biaya transaksi adalah masing-masing sebesar Rp 1.021.867.137, Rp 2.920.540.316 dan Rp 2.622.649.881 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana obligasi adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan proyek FTTX (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat obligasi yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A.

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo utang obligasi adalah sebagai berikut:

	2020	2021	2022	Jumlah/Total
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri A	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri B	-	-	460.000.000.000	460.000.000.000
	540.000.000.000	-	460.000.000.000	1.000.000.000.000

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sebesar Rp 540.000.000.000 pada bulan Desember 2020.

Amortization of provision fee and transactions costs amounted to Rp 1,021,867,137, Rp 2,920,540,316 and Rp 2,622,649,881 in 2021, 2020 and 2019, respectively, were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and Project FTTX (ii) 10% for working capital of the Company.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the bonds are rated is A.

The future scheduled principal payments of the bond outstanding are as follows:

The Company has paid Obligation Series A amounting Rp 540,000,000,000, in December 2020.

26. Sukuk Ijarah

Perincian sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

Seri/ Series	Imbalan hasil sukuk ijarah/Profit sharing of sukuk ijarah	Jatuh Tempo (Tahun)/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2021	2020	2019
Seri A Tahap I/Series A Phase I	103.059.000.000	3	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000
Seri B Tahap I/Series B Phase I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II/Series A Phase II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000	191.000.000.000	-
Seri B Tahap II/Series B Phase II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	-
Seri A Tahap III/Series A Phase III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000	333.365.000.000	-
Seri B Tahap III/Series B Phase III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000	56.150.000.000	-
Seri A Tahap IV/Series A Phase IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000	-	-
Seri B Tahap IV/Series B Phase IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000	-	-
Jumlah sukuk ijarah/Total outstanding sukuk ijarah				2.166.515.000.000	1.666.515.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap I/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase I				(4.022.910.307)	(6.197.867.119)	(8.315.748.798)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap II/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase II				(1.448.513.447)	(1.918.898.083)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap III/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase III				(2.272.424.348)	(3.167.495.226)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap IV/ Unamortized provision fee and transaction costs Phase IV				(3.446.328.347)	-	-
Jumlah - bersih/net				2.155.324.823.551	1.655.230.739.572	991.684.251.202

26. Sukuk Ijarah

The following are the details of sukuk ijarah:

Pada bulan Juli 2019, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 2.539.956.811, Rp 2.292.881.679 dan Rp 1.103.440.130 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur (ii) 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dalam Rupiah sebesar Rp 277.000.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 668.014.636 dan Rp 258.100.842 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

In July 2019, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 1.000.000.000.000, with fixed ijarah installments payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2022 and the Series B bonds have a term of five (5) years until 2024. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 2,539,956,811, Rp 2,292,881,679 and Rp 1,103,440,130 in 2021, 2020 and 2019, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 85% for investment of backbone network construction including passive and active devices and infrastructure. The proceeds are also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting devices for active and passive infrastructure (ii) 15% for working capital of the Company.

In August 2020, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 277,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase II, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 668,014,636, and Rp 258,100,842 in 2021 and 2020, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of *Inland Cable*, *Ducting*, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity (ii) 10% for working capital of the Company.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III dalam Rupiah sebesar Rp 389.515.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 1.109.078.728 dan Rp 207.726.467 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 75% akan digunakan untuk *refinancing* Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A (ii) 25% untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru.

Pada bulan Mei 2021, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV dalam Rupiah sebesar Rp 500.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2026. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah sebesar Rp 813.787.036 pada tahun 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

In October 2020, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 389,515,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase III, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 1,109,078,728 and Rp 207,726,467 in 2021 and 2020, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 75% for refinancing Obligation Moratelindo 2017 Series A (ii) 25% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of Inland Cable, Ducting, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity.

In May 2021, the Company issued Rupiah amounting to Rp 500,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I fase IV, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2024 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2026. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 813,787,036 in 2021 and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 80% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru 20% untuk untuk modal kerja.

Usage plan of obligation fund is used for (i) 80% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of Inland Cable, Ducting, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity and 20% for capital expenditure.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat sukuk ijarah Perusahaan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A (sy).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the sukuk ijarah are rated is A (sy).

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

The future scheduled principal payments of the sukuk ijarah outstanding are as follows:

	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah/Total
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	347.000.000.000	-	-	-	-	347.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	-	-	653.000.000.000	-	-	653.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	-	191.000.000.000	-	-	-	191.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	-	-	-	86.000.000.000	-	86.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	-	333.365.000.000	-	-	-	333.365.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.150.000.000	-	56.150.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri A	-	-	469.100.000.000	-	-	469.100.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri B	-	-	-	-	30.900.000.000	30.900.000.000
	347.000.000.000	524.365.000.000	1.122.100.000.000	142.150.000.000	30.900.000.000	2.166.515.000.000

27. Utang Kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham merupakan uang muka setoran modal dari PT Candrakarya Multikreasi berdasarkan perjanjian mengenai uang muka setoran modal Perusahaan No. 012/PKS/MTI-CKM-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah diamandemen pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perjanjian No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Utang kepada pemegang saham ini akan dikonversi seluruhnya menjadi modal saham Perusahaan dan tidak ada pengenaan bunga dan pengembalian atas uang muka ini.

Pada tahun 2021 Perusahaan telah melunasi utang pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang kepada pemegang saham sebesar Rp 844.408.372.000.

27. Shareholder Loan

Shareholder loan represents deposit for future stock subscription of PT Candrakarya Multikreasi based on an agreement regarding providing deposit for future stock subscription of the Company with No. 012/PKS/MTI-CKMI/2017 dated January 18, 2017 which was amended on December 20, 2018 with agreement No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Shareholder loan will be converted into the Company's share capital and is non-interest bearing and no repayment of these deposits.

In 2021, Company has fully paid the shareholder loan.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of shareholder loan amounted to Rp 844,408,372,000.

28. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:

28. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

31 Desember/ December 31, 2021									
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)					
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset tetap dengan model revaluasi					Revalued property and equipment				
Bangunan	109.568.613.163	-	109.568.613.163	-	Bangunan				
Perangkat dan perabot kantor	38.089.689.956	-	38.089.689.956	-	Perangkat dan perabot kantor				
Peralatan telekomunikasi	5.406.589.704.938	-	5.406.589.704.938	-	Peralatan telekomunikasi				
Kendaraan	13.984.535.113	-	13.984.535.113	-	Kendaraan				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings:				
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	5.109.587.255.814	-	5.109.587.255.814	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)				
Liabilitas sewa (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	89.515.219.751	-	89.515.219.751	-	Lease liabilities (including current and noncurrent portion)				
Utang obligasi (bagian jangka pendek)	458.861.999.070	-	458.861.999.070	-	Bonds payable (including current portion)				
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	56.630.969.306	-	56.630.969.306	-	Loan payable (including current and noncurrent portion)				
31 Desember 2020/December 31, 2020									
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)					
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset tetap dengan model revaluasi					Revalued property and equipment				
Bangunan	94.110.707.475	-	94.110.707.475	-	Bangunan				
Perangkat dan perabot kantor	50.598.713.728	-	50.598.713.728	-	Perangkat dan perabot kantor				
Peralatan telekomunikasi	4.845.903.257.683	-	4.845.903.257.683	-	Peralatan telekomunikasi				
Kendaraan	13.412.029.149	-	13.412.029.149	-	Kendaraan				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings:				
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	4.914.697.218.327	-	4.914.697.218.327	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)				
Utang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	457.840.131.932	-	457.840.131.932	-	Bonds payable (including current and noncurrent portion)				
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	21.990.464.042	-	21.990.464.042	-	Loan payable (including current and noncurrent portion)				

31 Desember 2019/December 31, 2019				
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:				
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
Aset yang diukur pada nilai wajar:				
Aset tetap dengan model revaluasi				
Bangunan	95.337.064.082	-	95.337.064.082	-
Perangkat dan perabot kantor	20.356.313.627	-	20.356.313.627	-
Peralatan telekomunikasi	2.993.963.282.897	-	2.993.963.282.897	-
Kendaraan	5.717.545.414	-	5.717.545.414	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan				
Pinjaman dan utang dengan bunga				
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	6.406.148.835.252	-	6.406.148.835.252	-
Utang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	994.928.408.284	-	994.928.408.284	-
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	35.154.808.142	-	35.154.808.142	-
Assets measured at fair value:				
Revalued property and equipment				
Buildings				
Office furniture and fixtures				
Telecommunication facilities				
Vehicles				
Liabilities for which fair values are disclosed:				
Interest-bearing loans and borrowings:				
Bank loans (including current and noncurrent portion)				
Bonds payable (including current and noncurrent portion)				
Loan payable (including current and noncurrent portion)				

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki level 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan seperti analisa arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Pengukuran nilai wajar berulang aset non keuangan termasuk dalam Level 2 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.

Informasi tentang pengukuran nilai wajar yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 2) adalah pendekatan harga pasar pembandingan untuk bangunan, perangkat dan perabot kantor, peralatan telekomunikasi dan kendaraan.

Seluruh aset dimanfaatkan pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Fair Value Hierarchy

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value of the financial instruments.

The fair value measurement for recurring non-financial assets falls within level 2 of the fair value hierarchy outlined in Note 2.

The information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 2) is market comparable approach for building, office furniture and fixtures, telecommunication facilities and vehicles.

All assets are based on their highest and best use.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Aset-aset tertentu telah dinilai oleh penilai independen sebagaimana diungkapkan pada Catatan 13.

These assets have been valued by independent valuers as mentioned in Note 13.

29. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

29. Capital Stock

The composition of the Company's stockholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

		31 Desember 2021/ December 31, 2021				
Pemegang Saham	Jenis Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock	Name of Stockholder	Series shares
			%	Rp		
PT Gema Lintas Benua	Seri A	250.000	33,78	25.000.000.000	PT Gema Lintas Benua	Series A shares
	Seri C	206.998		490.999.256.000		Series C shares
PT Candrakarya Multikreasi	Seri B	338.235	45,71	273.750.159.015	PT Candrakarya Multikreasi	Series B shares
	Seri C	280.056		664.292.832.000		Series C shares
PT Smart Telecom	Seri C	277.436	20,51	658.078.192.000	PT Smart Telecom	Series C shares
Jumlah		1.352.725	100,00	2.112.120.439.015	Total	

		31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019/ December 31, 2020 and December 31, 2019				
Pemegang Saham		Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock	Name of Stockholder	
			%	Rp		
Saham seri A					Series A shares	
PT Gema Lintas Benua		250.000	42,50	25.000.000.000	PT Gema Lintas Benua	
Saham seri B					Series B shares	
PT Candrakarya Multikreasi		338.235	57,50	273.750.159.015	PT Candrakarya Multikreasi	
Jumlah		588.235	100,00	298.750.159.015	Total	

Berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 21 Juni 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 658.750.971.015 dengan menerbitkan saham Seri C sebesar 151.771 lembar saham yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 2.372.000 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 360.000.812.000. Seluruh saham Seri C ini diambil dan disetor penuh oleh PT Smart Telecom.

Based on Notarial Deed No.49 dated June 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the Company increased the authorized, issued and paid-up capital to Rp 658,750,971,015 by issuing of 151.771 Series C shares with par value of Rp 2,372,000 per share or a total of Rp 360,000,812.000. All of these Series C shares were taken and fully paid up by PT Smart Telecom.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor menjadi Rp 2.112.120.439.015 dengan menerbitkan saham Seri C. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 tanggal 22 Desember 2021.

Based on Notarial Deed No. 39 dated December 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, the Company increased capital authorized, issued and paid-up to Rp 2,112,120,439,015 by issuing Series C shares. These amendment have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 dated December 22, 2021.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Capital Management

The primary objective of Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa rasio utang terhadap modal, yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using debt to equity ratio, by dividing net debt with the total equity.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

	2021	2020	2019	
Jumlah pinjaman	7.896.240.629.131	7.205.407.272.402	8.533.199.895.535	Total borrowings
Dikurangi: kas dan setara kas	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492	Less: cash and cash equivalents
Utang bersih	6.837.044.694.112	6.710.629.298.630	7.101.035.692.043	Net debt
Jumlah ekuitas	4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	149,99%	209,22%	323,84%	Net debt to equity

30. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan tambahan modal disetor sehubungan dengan:

30. Additional Paid-in Capital

This account represents additional paid-in capital in connection with the following:

	2021	2020	2019	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	(5.551.275.912)	(5.551.275.912)	(5.551.275.912)	Difference in value of restructuring transactions among entities under common control
Penambahan dari program pengampunan pajak	3.021.187.000	3.021.187.000	3.021.187.000	Additional from tax amnesty program
Saldo akhir	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	Ending balance

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tambahan modal disetor sebesar Rp 5.551.275.912 merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat investasi di PT Indo Pratama Teleglobal, yang diakuisisi untuk entitas sepengendali.

Additional paid in capital amounting to Rp 5,551,275,912 represents the difference between the consideration transferred and the carrying amount of investment in PT Indo Pratama Teleglobal, an associate acquired from an entity under common control.

31. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

31. Non-controlling Interest

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets of the subsidiaries, with details as follows:

31 Desember/ December 31, 2021							
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	2.529.267.322	-	901.158.476	7.284.502	-	4.537.710.300
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	46.280.004	-	48.982.679	(209.480)	(46.000.000)	50.053.203
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	262.726.452.667	-	86.244.320.086	242.879.055	-	352.513.651.808
PT Indo Pratama Teleglobal *)	3.923.500.000	-	6.201.199.164	5.255.314.237	43.900.990	-	15.423.914.391
Jumlah/Total	8.324.500.000	265.301.999.993	6.201.199.164	92.449.775.478	293.855.067	(46.000.000)	372.525.329.702

*) Diakuisisi di tahun 2021/ Acquired in 2021

31 Desember/December 31, 2020						
			Laba periode berjalan/ <i>Profit for the year</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive Income</i>	<i>Dividen/ Dividends</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>				
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	1.641.234.511	890.838.987	(2.806.176)	-	3.629.267.322
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	30.832.660	45.168.306	(120.962)	(29.600.000)	47.280.004
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	162.057.280.986	100.738.136.776	(68.965.095)	-	266.026.452.667
Jumlah/Total	4.401.000.000	163.729.348.157	101.674.144.069	(71.892.233)	(29.600.000)	269.702.999.993

31 Desember/December 31, 2019						
			Laba periode berjalan/ <i>Profit for the year</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive Income</i>	<i>Dividen/ Dividends</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>				
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	857.640.996	788.690.003	(5.096.488)	-	2.741.234.511
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	15.129.139	88.756.762	(376.636)	(72.676.605)	31.832.660
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	78.929.454.571	83.677.152.193	(549.325.778)	-	165.357.280.986
Jumlah/Total	4.401.000.000	79.802.224.706	84.554.598.958	(554.798.902)	(72.676.605)	168.130.348.157

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

32. Pendapatan

32. Revenues

	2021	2020	2019	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan				Revenue from contracts with customers
Penyelenggaraan telekomunikasi				Telecommunication operations
Jaringan domestik	1.124.618.347.830	1.107.461.784.585	656.836.496.844	Domestic link
Internet	811.755.666.704	620.655.372.188	544.501.706.145	Internet
Jaringan internasional	325.288.088.540	297.871.817.108	201.851.318.185	International link
VSAT	106.023.020.087	-	-	VSAT
Sub Jumlah	2.367.685.123.161	2.025.988.973.881	1.403.189.521.174	Subtotal
Non- penyelenggaraan telekomunikasi				Non-telecommunication operations
Pendapatan dari proyek konsesi	1.217.252.904.368	1.307.875.348.640	946.907.962.899	Revenue from concession project
Pusat data	37.606.592.683	26.472.355.803	23.909.148.323	Data Center
Pendapatan konstruksi dari konsesi jasa	-	-	1.266.799.785.223	Construction revenue from concession project
Lain-lain	541.190.473.252	392.052.833.872	415.684.441.800	Others
Sub Jumlah	1.796.049.970.303	1.726.400.538.315	2.653.301.338.245	Subtotal
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	4.163.735.093.464	3.752.389.512.196	4.056.490.859.419	Total revenue from contracts with customers
Indefeasible Right of Use (IRU) (Catatan 21)	16.337.972.691	13.298.622.598	5.890.692.332	Indefeasible Rights of Use (IRU) (Note 21)
Jumlah pendapatan	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751	Total revenue

Pendapatan non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan pendapatan dari proyek pembangunan fiberisasi.

Revenues from non-telecommunication operations - others represents revenues derived from fiberization project.

33. Beban Langsung

33. Direct Costs

Rincian dari beban langsung adalah sebagai berikut:

The details of direct costs are as follows:

	2021	2020	2019	
Penyelenggaraan telekomunikasi				Telecommunication operations
Jaringan domestik	531.617.921.944	588.722.724.034	428.075.756.653	Domestic link
Internet	69.587.483.782	53.136.010.425	40.541.915.211	Internet
VSAT	64.749.833.566	-	-	VSAT
Jaringan internasional	30.329.380.188	31.030.326.517	36.151.640.610	International link
Sub jumlah	696.284.619.480	672.889.060.976	504.769.312.474	Subtotal
Non - penyelenggaraan telekomunikasi				Non - telecommunication operations
Penyusutan (Catatan 13)	453.437.321.676	304.393.477.419	167.023.778.838	Depreciation (Note 13)
BHP - USO	64.964.735.200	60.010.448.387	33.531.929.736	BHP - USO
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	27.650.706.669	22.814.087.827	-	Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Biaya persediaan	24.449.601.472	21.450.967.315	7.419.890.396	Inventory cost
Beban konstruksi dari konsesi jasa	-	-	1.266.799.785.223	Construction cost of concession project
Lain-lain	375.995.801.978	206.962.739.666	151.671.698.174	Others
Sub jumlah	946.498.166.995	615.631.720.614	1.626.447.082.367	Subtotal
Jumlah	1.642.782.786.475	1.288.520.781.590	2.131.216.394.841	Total

Beban langsung non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan beban dari proyek pembangunan fiberisasi.

Direct cost from non-telecommunication operations - others represents cost derived from fiberization project.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

34. Beban Usaha

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	247.433.566.077	222.258.001.979	179.624.419.267
Perbaikan dan pemeliharaan	244.281.121.481	285.109.762.631	94.261.617.299
Karyawan alih daya	105.691.301.866	78.822.127.235	65.265.283.745
Asuransi	82.750.937.427	77.212.914.607	54.565.930.017
Pemasaran	48.721.933.656	39.199.408.386	29.282.044.247
Sewa	45.367.125.131	33.411.976.781	24.724.114.182
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	41.918.868.640	24.608.787.824	24.356.637.388
Komunikasi dan utilitas	33.050.330.044	29.096.715.175	22.534.668.696
Perjalanan dinas	25.015.574.804	21.843.997.214	28.895.839.325
Imbalan kerja jangka panjang karyawan (Catatan 38)	21.101.290.795	19.519.398.700	13.588.567.399
Pajak	21.066.671.753	7.790.019.587	2.712.781.111
Jasa profesional	19.346.886.913	12.625.556.215	16.219.843.989
Beban kantor	17.212.401.064	9.774.629.579	6.148.829.610
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	14.582.754.207	8.136.729.176	-
Jamuan dan representasi	11.015.472.030	9.026.151.888	16.501.942.000
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 6)	-	7.404.534.305	4.539.621.575
Izin legal	6.678.416.422	6.071.300.311	4.292.985.460
Amortisasi aset tak berwujud	3.282.829.699	995.981.070	131.177.688
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta)	4.781.018.187	12.842.675.253	8.293.392.580
Jumlah	993.298.500.196	905.750.667.916	595.939.695.578

34. Operating Expenses

The details of operating expenses are as follows

	2021	2020	2019
Salaries and allowances	247.433.566.077	222.258.001.979	179.624.419.267
Repairs and maintenance	244.281.121.481	285.109.762.631	94.261.617.299
Outsourcing employee	105.691.301.866	78.822.127.235	65.265.283.745
Insurance	82.750.937.427	77.212.914.607	54.565.930.017
Marketing	48.721.933.656	39.199.408.386	29.282.044.247
Rental	45.367.125.131	33.411.976.781	24.724.114.182
Depreciation of property and equipment (Note 13)	41.918.868.640	24.608.787.824	24.356.637.388
Communication and utilities	33.050.330.044	29.096.715.175	22.534.668.696
Business travel expenses	25.015.574.804	21.843.997.214	28.895.839.325
Long-term employee benefits (Note 38)	21.101.290.795	19.519.398.700	13.588.567.399
Tax	21.066.671.753	7.790.019.587	2.712.781.111
Professional fees	19.346.886.913	12.625.556.215	16.219.843.989
Office expenses	17.212.401.064	9.774.629.579	6.148.829.610
Depreciation right of use assets (Note 14)	14.582.754.207	8.136.729.176	-
Entertainment and representation	11.015.472.030	9.026.151.888	16.501.942.000
Provision for impairment (Note 6)	-	7.404.534.305	4.539.621.575
Legal license	6.678.416.422	6.071.300.311	4.292.985.460
Amortization of intangible asset	3.282.829.699	995.981.070	131.177.688
Others (each below Rp 200 million)	4.781.018.187	12.842.675.253	8.293.392.580
Total	993.298.500.196	905.750.667.916	595.939.695.578

35. Beban Bunga dan Keuangan

	2021	2020	2019
Bunga atas:			
Utang bank (Catatan 23)	481.944.022.317	541.684.459.659	480.301.448.295
Sukuk ijarah	179.697.429.640	101.627.293.261	42.882.500.000
Utang obligasi	48.300.000.000	101.760.000.000	101.760.000.000
Liabilitas sewa (Catatan 24)	11.565.102.773	9.588.912.182	13.024.681.241
Aset hak-guna	2.976.018.724	5.374.911.785	-
Utang non-bank (Catatan 22)	2.349.378.073	1.819.622.248	8.023.109.359
Amortisasi utang bank	19.340.965.450	21.427.433.323	18.348.653.976
Amortisasi biaya sukuk ijarah (Catatan 26)	5.130.837.211	2.758.708.988	1.103.440.130
Amortisasi biaya obligasi (Catatan 25)	1.021.867.138	2.920.540.316	2.622.649.881
Provisi	21.770.166.359	27.992.043.505	28.041.075.800
Jumlah	774.095.787.685	816.953.925.267	696.107.558.682

35. Interest Expense and Financial Charges

	2021	2020	2019
Interest on:			
Bank loans (Note 23)	481.944.022.317	541.684.459.659	480.301.448.295
Sukuk ijarah	179.697.429.640	101.627.293.261	42.882.500.000
Bond payable	48.300.000.000	101.760.000.000	101.760.000.000
Lease liabilities (Note 24)	11.565.102.773	9.588.912.182	13.024.681.241
Right-of-use Assets	2.976.018.724	5.374.911.785	-
Non-bank loans (Note 22)	2.349.378.073	1.819.622.248	8.023.109.359
Amortization bank loans	19.340.965.450	21.427.433.323	18.348.653.976
Amortization cost of sukuk ijarah (Note 26)	5.130.837.211	2.758.708.988	1.103.440.130
Amortization cost of bonds (Note 25)	1.021.867.138	2.920.540.316	2.622.649.881
Provision	21.770.166.359	27.992.043.505	28.041.075.800
Total	774.095.787.685	816.953.925.267	696.107.558.682

36. Lain-lain Bersih

	2021	2020	2019
Penghasilan Lain-lain			
Sewa ruangan	343.174.997	323.562.758	641.192.846
Pendapatan pinalti	-	-	215.977.886.597
Pendapatan lain-lain	20.107.385.237	39.237.886.880	3.974.450.000
Subjumlah	20.450.560.234	39.561.449.638	220.593.529.443
Beban Lain-lain			
Beban pinalti	-	-	(21.932.295.000)
Administrasi bank	(1.221.069.003)	(997.550.195)	(660.294.376)
Beban lain-lain	(6.643.543.428)	(5.577.827.671)	(6.211.073.536)
Subjumlah	(7.864.612.431)	(6.575.377.866)	(28.803.662.912)
Jumlah- net	12.585.947.803	32.986.071.772	191.789.866.531

36. Others – net

	2021	2020	2019
Other Income			
Space rent	343.174.997	323.562.758	641.192.846
Penalty income	-	-	215.977.886.597
Other income	20.107.385.237	39.237.886.880	3.974.450.000
Subtotal	20.450.560.234	39.561.449.638	220.593.529.443
Other Expense			
Penalty expense	-	-	(21.932.295.000)
Bank administration	(1.221.069.003)	(997.550.195)	(660.294.376)
Other expense	(6.643.543.428)	(5.577.827.671)	(6.211.073.536)
Subtotal	(7.864.612.431)	(6.575.377.866)	(28.803.662.912)
Total - net	12.585.947.803	32.986.071.772	191.789.866.531

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selama tahun 2019, PTT, entitas anak, menerima pendapatan penalti sebagai kompensasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 215.977.886.597 sebagai bagian dari pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi.

In 2019, PTT, a subsidiary, received penalty fees from vendor as compensation for the delay in the finalization of the project amounted to Rp 215,977,886,597 recorded as part of other income-others in the statements of profit or loss.

37. Pajak Penghasilan

37. Income Tax

Beban pajak Grup terdiri dari:

Tax expense of Group consists of the following:

	2021	2020	2019	
Pajak kini				Current tax
Perusahaan	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	The Company
Entitas anak	72.628.154.839	44.724.082.124	40.413.595.983	Subsidiaries
Pajak tangguhan	(7.641.666.526)	5.728.240.463	90.541.288.125	Deferred tax
Jumlah	117.395.477.693	100.896.985.647	171.969.650.608	Total

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(612.742.108.065)	(583.184.293.091)	(693.636.517.958)	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	188.834.994.318	205.818.984.099	166.256.962.436	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	15.217.126.724	14.031.724.073	10.196.272.563	Provision for long-term employee
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	22.749.633.917	(26.925.811.609)	(13.335.083.076)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Liabilitas sewa	(9.635.566.031)	(5.709.632.736)	4.539.621.574	Leased liabilities
Pembayaran Pesangon	(554.326.751)	(1.953.501.020)	(1.946.516.288)	Payment of benefit
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	7.291.432.054	(5.728.758.367)	Allowance for impairment
Bersih	27.776.867.859	(13.265.789.238)	(6.274.463.594)	Net
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:				Permanent differences:
Beban jamuan dan representasi	32.970.743.560	26.060.105.036	26.004.634.286	Entertainment and representation
Beban pajak	2.260.921.488	3.678.389.906	798.886.759	Tax expenses
Beban perayaan dan ucapan	450.442.210	1.666.257.671	3.335.930.751	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	11.941.684	13.129.087	10.793.014	Mobile phone expenses
Laba yang telah dikenakan pajak final	(14.498.505.677)	(6.797.274.911)	(25.945.238.403)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	415.274.188	12.120.121.796	(128.438.476)	Others
Bersih	21.610.817.453	36.740.728.585	4.076.567.931	Net
Laba kena pajak	238.222.679.630	229.293.923.446	164.059.066.773	Taxable income

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perhitungan beban pajak dan utang pajak kini
adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are
computed as follows:

	2021	2020	2019	
Beban pajak kini				Current tax expense
Perusahaan	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	The Company
Entitas anak	72.628.154.839	44.724.082.124	40.413.595.983	Subsidiaries
Subjumlah	125.037.144.219	95.168.745.184	81.428.362.483	Subtotal
Dikurangi pembayaran dimuka				Less prepaid taxes
pajak penghasilan				
Perusahaan	50.419.779.494	49.401.256.429	55.925.578.909	The Company
Entitas anak	53.298.207.105	36.297.588.056	18.353.753.862	Subsidiaries
Subjumlah	103.717.986.599	85.698.844.485	74.279.332.771	Subtotal
Kurang bayar pajak kini	21.319.157.620	9.469.900.699	7.149.029.712	Current tax under payment
Rincian kurang (lebih) bayar pajak				Details of under (over) tax payment
Perusahaan (Catatan 10 dan 19)	1.989.209.886	1.043.406.631	(14.910.812.409)	The Company (Note 10 and 19)
Entitas anak (Catatan 19)	19.329.947.734	8.426.494.068	22.059.842.121	Subsidiaries (Note 19)
Jumlah	21.319.157.620	9.469.900.699	7.149.029.712	Total

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU No. 2 year 2020 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 have been calculated at the tax rates that are expected to apply when realized.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) follows:

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a subsidiary	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
<u>Aset pajak tangguhan</u>						<u>Deferred tax asset</u>
Perusahaan						The Company
Imbalan kerja jangka panjang	15.608.369.458	-	3.225.815.994	(300.691.615)	18.533.493.837	Long-term employee benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	-	-	-	4.274.861.499	Allowance for impairment
Sewa pembiayaan	(1.929.590.272)	-	(2.119.824.527)	-	(4.049.414.799)	Finance lease
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(18.481.045.859)	-	5.004.919.462	-	(13.476.126.397)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Surplus revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-	-	7.781.051.155	(29.945.216.968)	Revaluation surplus on property and equipment
Subjumlah	(38.253.673.297)	-	6.110.910.929	7.480.359.540	(24.662.402.828)	Subtotal
Entitas anak						Subsidiary
Rugi fiskal	637.520.204	-	(637.520.204)	-	-	Fiscal loss
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(203.959.424)	364.348.619	109.618.582	-	270.007.777	Difference between commercial and fiscal depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	698.372.122	363.049.422	-	1.061.421.544	Allowance for impairment
Sewa pembiayaan	-	-	37.525.157	-	37.525.157	Finance lease
Imbalan kerja jangka panjang	3.611.166.481	3.630.494.220	1.161.707.709	(488.279.791)	7.915.088.619	Long-term employee benefits liability
Subjumlah	4.044.727.261	4.693.214.961	1.034.380.666	(488.279.791)	9.284.043.097	Subtotal
Aset pajak tangguhan - bersih	(34.208.946.036)	4.693.214.961	7.145.291.595	6.992.079.749	(15.378.359.731)	Deferred tax asset - net
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>						<u>Deferred tax liability</u>
Entitas anak						Subsidiary
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.588.733.399)	-	496.374.931	-	(2.092.358.468)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	(36.797.679.435)	4.693.214.961	7.641.666.526	6.992.079.749	(17.470.718.199)	Deferred tax asset (liability) - net

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax asset</u>
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja jangka panjang	13.227.348.654	1.069.927.234	1.311.093.570	15.608.369.458	Long-term employee benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.034.939.144	1.239.922.355	-	4.274.861.499	Allowance for impairment
Sewa pembiayaan	(673.471.070)	(1.256.119.202)	-	(1.929.590.272)	Finance lease
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(12.557.367.305)	(5.923.678.554)	-	(18.481.045.859)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	(37.726.268.123)	(37.726.268.123)	Revaluation surplus on property and equipment
Subjumlah	3.031.449.423	(4.869.948.167)	(36.415.174.553)	(38.253.673.297)	Subtotal
Entitas anak					Subsidiary
Rugi fiskal	1.464.735.236	(827.215.032)	-	637.520.204	Fiscal loss
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(56.705.237)	(147.254.187)	-	(203.959.424)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Imbalan kerja jangka panjang	2.811.385.886	614.739.824	185.040.771	3.611.166.481	Long-term employee benefits liability
Subjumlah	4.219.415.885	(359.729.395)	185.040.771	4.044.727.261	Subtotal
Aset pajak tangguhan - bersih	7.250.865.308	(5.229.677.562)	(36.230.133.782)	(34.208.946.036)	Deferred tax asset - net
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liability</u>
Entitas anak					Subsidiary
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.090.170.498)	(498.562.901)	-	(2.588.733.399)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	5.160.694.810	(5.728.240.463)	(36.230.133.782)	(36.797.679.435)	Deferred tax asset (liability) - net

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax asset</u>
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja jangka panjang	8.990.300.368	2.062.439.069	2.174.609.217	13.227.348.654	Long-term employee benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.900.033.750	1.134.905.394	-	3.034.939.144	Allowance for impairment
Sewa pembiayaan	758.718.522	(1.432.189.592)	-	(673.471.070)	Finance lease
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(9.223.596.537)	(3.333.770.768)	-	(12.557.367.305)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Subjumlah	2.425.456.103	(1.568.615.897)	2.174.609.217	3.031.449.423	Subtotal
Entitas anak					Subsidiary
Rugi fiskal	92.483.437.619	(91.018.702.383)	-	1.464.735.236	Fiscal loss
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(84.379.811)	27.674.574	-	(56.705.237)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Sewa pembiayaan	-	-	-	-	Finance lease
Imbalan kerja jangka panjang	1.358.390.040	627.665.963	825.329.883	2.811.385.886	Long-term employee benefits liability
Subjumlah	93.757.447.848	(90.363.361.846)	825.329.883	4.219.415.885	Subtotal
Aset pajak tangguhan - bersih	96.182.903.951	(91.931.977.743)	2.999.939.100	7.250.865.308	Deferred tax asset - net
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liability</u>
Entitas anak					Subsidiary
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(3.480.860.116)	1.390.689.618	-	(2.090.170.498)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	92.702.043.835	(90.541.288.125)	2.999.939.100	5.160.694.810	Deferred tax asset (liability) - net

Rekonsiliasi antara jumlah beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(612.742.108.065)	(583.184.293.091)	(693.636.517.958)	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	188.834.994.318	205.818.984.099	166.256.962.436	Profit before tax of the Company
Beban pajak berdasarkan tarif pajak	41.543.698.750	45.280.176.502	41.564.240.609	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas beda tetap:				Tax effect of permanent difference:
Beban jamuan dan representasi	7.253.563.583	5.733.223.108	6.501.158.571	Entertainment and representation
Beban pajak	497.402.727	809.245.779	199.721.690	Tax expenses
Beban perayaan dan ucapan	99.097.286	366.576.688	833.982.688	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	2.627.170	2.888.399	2.698.254	Mobile phone expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(3.189.671.249)	(1.495.400.480)	(6.486.309.601)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	91.360.184	2.666.426.696	(32.109.816)	Others
Bersih	46.298.078.451	53.363.136.692	42.583.382.395	Net
Penyesuaian atas perubahan tarif	-	1.951.474.535	-	Adjustment for changes in tax rates
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	Adjustment of deferred tax
Beban pajak entitas anak	71.097.399.242	45.582.374.420	129.386.268.213	Subsidiaries tax expense
Beban (penghasilan) pajak - bersih	117.395.477.693	100.896.985.647	171.969.650.608	Tax expense (benefit) - net

38. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan paska kerja tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh Konsultan Arya Bagiastra, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2022.

Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 1.431, 1.233 dan 1.198 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	15.691.590.756	14.858.650.134	9.885.217.922	Current service costs
Biaya bunga	5.409.700.039	4.660.748.566	3.703.349.477	Net interest expense
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	21.101.290.795	19.519.398.700	13.588.567.399	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:				Remeasurement on the defined benefit liability:
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:				Actuarial losses (gains) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)	8.512.184.410	7.630.572.848	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)	(1.580.231.148)	5.129.188.140	Experience adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.047.243.628)	6.931.953.262	12.759.760.988	Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	18.054.047.167	26.451.351.962	26.348.328.387	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" pada laba rugi (Catatan 34).

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

38. Long-Term Employee Benefits Liability

The amount of long-term employee benefits is determined based on Law No. 11 Year 2020 and Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of benefits has been made to date. No funding of the benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from Consultant Arya Bagiastra, an independent actuary, dated January 26, 2022.

The number of employees of the Group entitled to employee benefits totaled to 1,431, 1,233 and 1,198 (unaudited) as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "Operating expenses" in profit or loss (Note 34).

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit obligation follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	90.526.628.604	66.028.777.663	41.894.962.800	Balance at the beginning of the year
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada entitas anak yang akuisisi	2.172.979.463	-	-	Balance of long-term employee benefits liability of the acquired subsidiary
Penyesuaian kerugian aktuarial atas akuisisi entitas anak	122.381.721	-	-	Adjustment of actuarial losses on acquisitions of subsidiary
Biaya jasa kini	15.691.590.756	14.858.650.134	9.885.217.922	Current service costs
Biaya bunga	5.409.700.039	4.660.748.566	3.703.349.477	Interest expense
Imbalan dibayarkan	(554.326.751)	(1.953.501.020)	(2.214.513.523)	Benefit paid
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:				Remeasurement losses (gains)
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)	8.512.184.410	7.630.572.848	Actuarial losses (gain) arising from: Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)	(1.580.231.148)	5.129.188.140	Experience adjustments
Saldo akhir tahun	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.663	Balance at the end of the year

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	6,05%-6,92% IGSYC (Durable) per tahun/annum	5,76%-6,04% IGSYC (Durable) per tahun/annum	6,94%-7,14% IGSYC (Durable) per tahun/annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7%-8% per tahun/annum	8% per tahun/annum	8% per tahun/annum	Future salary increment rate
Umur pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tabel mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 10%	10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25% for each year up to 1% 10%	10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25% for each year up to 1% at 10%	Resignation rate
Tingkat cacat	10%	10%	10%	Disability

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows

31 Desember/ December 31, 2021				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/				
Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
Perubahan asumsi/	Kenaikan asumsi/	Penurunan asumsi/		
Change in Assumptions	Increase in Assumptions	Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(10.976.593.231)	13.222.811.441	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	12.439.237.917	(10.569.775.191)	Salary growth rate

31 Desember/December 31, 2020				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(3.576.382.609)	28.260.831.416	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	27.368.418.110	(4.069.632.342)	Salary growth rate

31 Desember/December 31, 2019				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(6.685.088.622)	7.881.863.665	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.432.585.086	(6.445.489.337)	Salary growth rate

39. Dividen dan Cadangan Umum

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 53 tertanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- Membagikan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 224.474.772.872 sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menetapkan untuk tidak menempatkan cadangan karena telah mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 958.663.976.130 kepada pemegang saham Perseroan.

Pembagian dividen tersebut di atas sejumlah Rp 1.964.000 per lembar saham atau sejumlah Rp 1.155.293.540.000.

39. Dividend and General Reserve

Based on Decision Letter of Shareholders in Annual General Meeting of shareholders for 2020 dated May 20, 2021 which stated in the notarial deed No. 53 dated May 21, 2021 by Aulia Taufani, Notarial in South Jakarta, the shareholders agreed to:

- Distribute the Company profit as of December 31, 2020 amounting to Rp 224,474,772,872 as dividends to shareholders of the Company and determined not to appropriate general reserve because the Company has fulfilled the requirement of a general reserve of 20% of the total issued and paid-up capital.
- Distribute dividends from retained earning of the Company as of December 31, 2019 amounting to gRp 958,663,976,130 to shareholders.

The dividends distribution as mentioned above is for Rp 1,964,000 per share or equivalent to Rp 1,155,293,540,000.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pelaksanaan pembagian dividen yang diumumkan dan disetujui oleh Para Pemegang Saham di atas dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 tentang Pembagian Dividen Tahunan PT Mora Telematika Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari para kreditur Perseroan dan telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan dan dinyatakan diterima seluruhnya oleh pemegang saham pada bulan Desember 2021.

Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreas masing-masing sebesar Rp 491.000.000.000 dan Rp 664.293.540.000. PT Smart Telecom yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan yang belum menjadi pemegang saham pada 31 Desember 2020. Bahwa pemegang saham yang menerima dividen yaitu PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi menyetorkan kembali dividen yang telah dibagikan sebagai modal saham Perseroan sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan modal dasar dan ditempatkan atau disetor Perseroan sesuai pengungkapan pada Catatan 29 atas laporan Keuangan.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan membentuk cadangan umum berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 25.000.000.000.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah meningkatkan cadangan umum berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 59.750.031.803 berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 17 Juni 2020.

Cadangan umum tersebut dibentuk sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk cadangan umum sedikitnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut.

The distribution of dividends which was announced and approved by the Shareholders stated in the Decree of the Board of Directors No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 dated December 9, 2021 regarding the Annual Dividend Distribution of PT Mora Telematika Indonesia and has obtained approval from creditors of the Company and has been fully paid by the Company and declared fully received by the shareholders in December 2021.

The shareholders entitled to the above dividend distribution are PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi amounting to Rp 491,000,000,000 and Rp 664,293,540,000, respectively. PT Smart Telecom currently is a shareholder of the Company but was not a shareholder as of December 31, 2020. The shareholders who received the dividends, PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi, returned the dividends as the Company's share capital which resulted to to an increase in the authorized and issued or paid-up capital of the Company which stated in Note 29 to financial statements.

Based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated May 29, 2019, the Company provided general reserve based on the total issued and paid up capital amounting to Rp 25,000,000,000.

In 2020, the Company has increased general reserve based on the total issued and paid up capital to Rp 59,750,031,803 based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated June 17, 2020

This general reserve was provided in relation with the Law of Republic of Indonesia No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, which requires companies to set up general reserve equivalent to at least 20% of the total issued and paid up capital. There is no timeline over which this amount should be appropriated.

40. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian berdasarkan pada informasi berikut:

	2021	2020	2019
Jumlah laba yang digunakan dalam perhitungan laba persaham dasar:			
Jumlah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	578.928.827.717	578.003.431.371	591.495.494.441
Jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham (dalam lembar saham penuh)	687.208	588.235	588.235
Laba per saham	842.436	982.606	1.005.543

40. Earnings Per Share

The computation of basic and diluted earnings per share is based on the following data:

Profit for computation basic earnings per share:
Profit attributable to owners of the Parent Company
Weighted average number of shares outstanding (in full number of shares)
Earning per share

41. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

41. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Nature of Relationships

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dan hubungan/ <i>Nature and relationship</i>	Jenis transaksi/ <i>Transaction type</i>
PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trade accounts payable, and direct costs</i>
PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	Piutang dari pihak berelasi, utang lain-lain dan beban usaha/ <i>Due from a related party, other accounts payable and operating expenses</i>
PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	Utang lain-lain dan utang kepada pemegang saham / <i>Other accounts payable and shareholder loan</i>
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan/ <i>Trade accounts receivable, trade accounts payables and revenue</i>

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
PT Smart Telecom	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Stockholders of the Company</i>	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Smartfren Telecom Tbk	Pemegang saham PT Smart Telecom/ <i>Stockholders of PT Smart Telecom</i>	Piutang usaha dan pendapatan / <i>Trade accounts receivable and revenue</i>
PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>

Pada tahun 2021, PT Mora Advertising Contents, PT Bali Tower Indonesia Tbk, PT Sarana Global Indonesia, PT Intercontinental Network Communication sudah tidak menjadi pihak berelasi Perusahaan.

In 2021, PT Mora Advertising Contents, PT Bali Tower Indonesia Tbk, PT Sarana Global Indonesia, PT Intercontinental Network Communication are no longer related party to the Company.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

Transactions with Related Parties

- a. In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, among others, follows:

	2021	2020	2019	Persentase terhadap jumlah Aset dan terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Percentage to Total Liabilities			
				2021	2020	2019	
				%	%	%	
Aset							Assets
Piutang usaha							Trade accounts receivable
PT Smart Telecom	67.262.430.753	-	-	0,46	0,00	0,00	PT Smart Telecom
PT Smartfren Telecom Tbk	11.030.150.600	-	-	0,08	0,00	0,00	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	521.903.608	231.059.733	311.729.950	0,00	0,00	0,00	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
PT Jejaring Mitra Persada	173.219.200	-	-	0,00	0,00	0,00	PT Jejaring Mitra Persada
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	151.298.515	3.741.013.886	1.263.524.707	0,00	0,03	0,01	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
PT Mora Advertising Contents	-	-	40.294.130	0,00	0,00	0,00	PT Mora Advertising Contents
PT Pakkodian	-	-	180.000	0,00	0,00	0,00	PT Pakkodian
PT Bali Tower erindo Sentra Tbk	-	1.284.469.500	439.028.895	0,00	0,01	0,00	PT Bali Tower erindo Sentra Tbk
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	678.707.082	533.565.509	0,00	0,01	0,00	PT Graha Telekomunikasi Indonesia
PT Intercontinental Netw ork Communication	-	36.979.535	73.762.156	0,00	0,00	0,00	PT Intercontinental Netw ork Communication
Jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	0,54	0,05	0,02	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:	b. The Company provides compensation to its key management personnel. The remuneration of directors and other members of key management in 2021, 2020 and 2019 follows:
--	--

- 109 -

42. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Mata Uang Asing

Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan utang non-bank.

Selain piutang usaha, utang usaha dan utang non-bank, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2021		2020		2019		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	USD	11.162.925	159.283.830.158	3.699.748	52.184.962.347	3.349.853	46.566.304.242
	SGD	1.185.443	12.487.178.732	846.898	9.014.455.374	456.530	4.711.731.832
	EUR	897	14.462.711	956	16.568.986	955	14.891.629
Piutang usaha	USD	8.004.784	114.220.298.451	1.738.460	24.520.989.410	1.270.957	17.667.576.930
	SGD	8.251	86.917.214	-	-	650	6.708.481
Aset yang dibatasi penggunaannya	USD	-	-	-	-	531.666	5.487.185.934
	SGD	265.000	2.791.447.725	265.000	2.820.682.525	-	-
Setoran jaminan dalam akun "Aset lain-lain"	USD	98.126	1.400.160.385	4.533	63.944.608	4.600	63.944.608
Jumlah Aset			290.284.295.376		88.621.603.250		74.518.343.656
							Total Assets

42. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk and fair value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk.

Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar and Singapore Dollar. Foreign exchange risk arises from future settlement of commercial transactions and recognized assets and liabilities.

The Group's exposures to the foreign exchange risk relate primarily to trade accounts receivable, trade accounts payable and non-bank loan.

Other than trade accounts receivable, trade accounts payable and non-bank loan, the Group has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group has monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		2021		2020		2019		
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	
Liabilitas								Liabilities
Utang usaha	USD	11.144.016	159.014.018.043	149.726	2.111.887.953	403.866	5.614.136.515	Trade accounts payable
	SGD	821.952	8.658.248.021	475.769	5.064.122.336	6.237	64.374.068	
Utang lain-lain	USD	68.623	979.188.494	48.620	685.785.343	297.171	4.130.975.720	Other accounts payable
	SGD	-	-	-	-	4.145	42.779.468	
Utang non-bank	USD	3.968.810	56.630.969.306	1.559.054	21.990.464.042	2.528.941	35.154.808.142	Non-bank loans
Jumlah Liabilitas			225.282.423.864		29.852.259.674		45.007.073.913	Total Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas) - bersih			65.001.871.512		58.769.343.576		29.511.269.743	Net Assets (Liabilities)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jika mata uang melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk periode dan tahun-tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 1.462.542.109, Rp 1.323.402.396 dan Rp 664.003.569 terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) selisih kurs karena penjabaran aset dan liabilitas moneter.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, if the currencies had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been higher/lower by Rp 1,462,542,109, Rp 1,323,402,396 and Rp 664,003,569, respectively, mainly as a result of foreign exchange gains (losses) on translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 2 dalam laporan keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

Risiko Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar

Cash Flow and Fair Value Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to interest rate risk relates primarily to bank loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through variable-rate debts, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before it takes any decision to enter a new loan agreement.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial liability that are exposed to interest rate risk as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

31 Desember/ December 31, 2021							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate %	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 th Year	Jumlah/ Total
Liabilitas/Liability Bunga Mengambang/Floating Rate Utang bank/Bank loans	9,50 - 11,50	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	1.052.721.146.556	897.011.090.912	804.084.622.273	5.109.587.255.814
31 Desember/December 31, 2020							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate %	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 th Year	Jumlah/ Total
Liabilitas/Liability Bunga Mengambang/Floating Rate Utang bank/Bank loans	9,50 - 11,00	954.401.804.444	938.172.295.850	950.616.606.522	773.710.472.336	1.297.796.039.175	4.914.697.218.327
31 Desember/December 31, 2019							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate %	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 th Year	Jumlah/ Total
Liabilitas/Liability Bunga Mengambang/Floating Rate Utang bank/Bank loans	9,75 - 11,50	1.747.017.921.036	886.712.663.110	886.318.480.626	898.611.077.871	1.987.488.692.609	6.406.148.835.252

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customer, client and other parties who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for individual customers and monitors the exposure associated with these restrictions.

The Group conducts business relationships only with recognized and credible third parties. The Group has a policy to go through customer's credit verification procedures. In addition, the amount of receivables is monitored continuously to reduce the risk for impairment.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kas dan setara kas dinilai sebagai kelas tinggi karena disimpan di bank-bank terkemuka di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan yang memiliki probabilitas rendah kebangkrutan.

Cash and cash equivalents are assessed as high grade since those are deposited in reputable banks in the country as approved by the Board of Directors and which have low probability of insolvency.

Piutang dinilai sebagai berikut:

Receivables are assessed as follows:

	2021	2020	2019	
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak lawan tanpa peringkat kredit eksternal				Counterparties without external credit rating
Grup A	53.462.464.995	28.624.606.052	10.233.776.876	Group A
Grup B	359.271.908.073	355.326.802.351	330.345.462.460	Group B
Jumlah piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai	412.734.373.068	383.951.408.403	340.579.239.336	Total unimpaired trade accounts receivable
Piutang Lain-lain				Other accounts receivable
Grup B	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Group B

- Grup A - pelanggan baru/pihak berelasi (kurang dari enam (6) bulan).
- Grup B - pelanggan yang sudah ada/pihak berelasi (lebih dari enam (6) bulan) tanpa kasus gagal bayar di masa terdahulu.

- Group A - new customers/related parties (less than six (6) months).
- Group B - existing customers/related parties (more than six (6) months) with no defaults in the past.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The table below shows consolidated statements of financial position maximum exposures related to credit risk as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

	2021	2020	2019	
<i>Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (2019: Pinjaman yang diberikan dan piutang)</i>				<i>Financial assets at amortized cost (2019: Loans and receivables)</i>
Kas dan setara kas*)	1.042.527.237.113	485.487.943.491	1.413.681.524.065	Cash and cash equivalents*)
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty asset - cash
Piutang usaha - bersih	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Aset yang dibatasi penggunaannya	35.792.742.666	5.203.306.285	5.904.094.734	Restricted assets
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Setoran jaminan dalam akun "Aset tidak lancar lain-lain"	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits under "Other assets"
<i>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</i>				<i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>
Investasi	-	-	-	Investments
Jumlah	7.571.046.759.067	7.212.178.500.612	8.293.516.029.837	Total

*) Tidak termasuk kas dan unit Syariah/Not Include cash on hand and Sharia Unit.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan tidak termasuk bunga pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial liabilities based on contractual undiscounted payment excluding interest as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

31 Desember/ December 31, 2021						
<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	1.146.821.136.018	190.535.191.524	-	1.337.356.327.542	1.337.356.327.542	Trade accounts payable
Utang lain-lain	89.341.075.024	-	-	89.341.075.024	89.341.075.024	Other accounts payable
Beban akrual	99.990.940.519	-	-	99.990.940.519	99.990.940.519	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Long-term liabilities
Utang bank	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	2.753.816.859.741	5.109.587.255.814	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa	49.054.755.294	51.382.777.473	15.398.048.623	115.835.581.390	115.835.581.390	Lease liabilities
Utang non-bank	20.094.690.773	23.184.402.021	13.351.876.512	56.630.969.306	56.630.969.306	Non-bank loans
Utang obligasi	458.861.999.070	-	-	458.861.999.070	458.861.999.070	Bonds payable
Jumlah	3.028.915.458.099	1.456.121.905.690	2.782.566.784.876	7.267.604.148.665	7.267.604.148.665	Total

31 Desember 2020/December 31, 2020						
<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	693.233.939.441	575.754.822.578	-	1.268.988.762.019	1.268.988.762.019	Trade accounts payable
Utang lain-lain	112.676.951.534	-	-	112.676.951.534	112.676.951.534	Other accounts payable
Beban akrual	70.345.694.169	-	-	70.345.694.169	70.345.694.169	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Long-term liabilities
Utang bank	954.401.804.443	938.172.295.850	3.022.123.118.034	4.914.697.218.327	4.914.697.218.327	Bank loans
Liabilitas sewa	48.421.582.510	46.053.965.515	61.173.170.504	155.648.718.529	155.648.718.529	Lease liabilities
Utang non-bank	11.270.769.682	9.214.230.008	1.505.464.352	21.990.464.042	21.990.464.042	Non-bank loans
Utang obligasi	-	457.840.131.932	-	457.840.131.932	457.840.131.932	Bonds payable
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Jumlah	1.890.350.741.779	2.871.443.817.883	3.084.801.752.890	7.846.596.312.552	7.846.596.312.552	Total

31 Desember 2019/December 31, 2019						
<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	611.700.081.831	62.630.784.684	-	674.330.866.515	674.330.866.515	Trade accounts payable
Utang lain-lain	116.488.792.987	-	-	116.488.792.987	116.488.792.987	Other accounts payable
Beban akrual	38.169.028.516	-	-	38.169.028.516	38.169.028.516	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Long-term liabilities
Utang bank	1.760.476.321.040	889.441.576.812	2.506.405.467.070	6.422.336.148.958	6.422.336.148.958	Bank loans
Liabilitas sewa	19.266.814.917	45.750.565.791	24.078.898.242	89.096.278.950	89.096.278.950	Lease liabilities
Utang non-bank	13.482.391.473	11.107.761.090	10.564.655.579	35.154.808.142	35.154.808.142	Non-bank loans
Utang obligasi	537.996.897.073	456.931.511.211	-	994.928.408.284	994.928.408.284	Bonds payable
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Jumlah	3.097.580.327.837	2.310.270.571.588	2.541.049.020.891	9.214.912.704.352	9.214.912.704.352	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

43. Segment Information

The Group operates and maintains its business by grouping market segment in order to give services to the customer as follow:

- 115 -

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31, 2019					
	Telco/ Telco	Wholesale/ Wholesale	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</u>						<u>Consolidated Statement of Profit or Loss and</u>
<u>Komprehensif Lain Konsolidasian</u>						<u>Comprehensive Income</u>
Pendapatan Usaha						Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	614.159.417.085	475.031.320.374	343.798.624.369	2.629.392.189.923	4.062.381.551.751	Segment sales - external parties
Beban Segmen						Segment Expenses
Beban langsung	(385.032.787.272)	(175.176.282.398)	(142.305.407.259)	(1.428.701.917.912)	(2.131.216.394.841)	Direct cost
Laba Kotor	229.126.629.813	299.855.037.976	201.493.217.110	1.200.690.272.011	1.931.165.156.910	Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(185.866.149.565)	(185.866.149.565)	Allocated Subsidiaries' operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(410.073.546.013)	Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(475.331.980.938)	Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	-	-	-	-	859.893.480.394	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	-	-	-	-	(11.873.736.387)	Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(171.969.650.608)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	676.050.093.399	Profit for the year
<u>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</u>						<u>Consolidated Statement of Financial Position</u>
Aset Segmen						Segment Assets
Piutang usaha	261.011.174.343	68.183.758.517	38.956.640.870	-	368.151.573.730	Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	6.491.363.042.105	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated assets
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	7.250.865.308	Deferred assets
Lain-lain	-	-	-	-	5.929.172.415.738	Others
Jumlah aset	261.011.174.343	68.183.758.517	38.956.640.870	6.491.363.042.105	12.795.937.896.881	Total assets
Liabilitas Segmen						Segment Liabilities
Uang muka penjualan	-	-	-	162.160.565.686	162.160.565.686	Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	10.077.848.065	31.707.855.198	94.955.146.295	-	136.740.849.558	Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated liabilities
Utang pajak	-	-	-	-	29.549.539.781	Taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	2.090.170.498	Deferred liabilities
Lain-lain	-	-	-	-	10.272.625.733.217	Others
Jumlah liabilitas	10.077.848.065	31.707.855.198	94.955.146.295	162.160.565.686	10.603.166.858.740	Total liabilities

44. Komitmen dan Perjanjian

PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung serat optik (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati tertuang dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

44. Commitments and Agreements

PT Palapa Ring Barat

In February 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Ring Barat (PRB) to fulfil the requirement from the project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for West Package.

On February 29, 2016, PRB and Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo) signed a Cooperation Agreement for the construction and management of fiber optic backbone network of palapa ring western package. PRB is required to build a fiber optic network with a certain capacity to areas that have been agreed as stated in the agreement and operate them for a period of 15 years.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

PT Palapa Timur Telematika

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

This agreement will expire in fifteen (15) years from the date of commercial operation, which was preceded by two (2) years of project construction period. The total contract value of this agreement amounted to Rp 3,486,383,120,000 to be received by PRB in accordance with the agreed schedule. At the end of the agreement, PRB must transfer the fiber optic network to Kominfo with payment of Rp 1,000 to be made by Kominfo to PRB.

On February 29, 2016, PRB as a Business Entity Executive (BUP) performs a guarantee agreement with PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) in relation to Governments and Enterprises Partnership Projects (KPBU) Fiber Optic Backbone Network Palapa Ring Western Package (Guarantee Agreement). Under this Guarantee Agreement, PII has been mandated and trusted by the Government to conduct the infrastructure guarantee in relation to financial obligations of the Partnership Project Owner (PJPK) to BUP based on the Cooperation Agreement as mentioned above.

This agreement will expire in twelve (12) years from the date of commercial operation. In the Guarantee Agreement, PRB is obliged to pay an upfront fee to PII of Rp 4,200,000,000 and the recurring fee of Rp 600,000,000 every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this Guarantee Agreement. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, PRB has made payment to PII amounting to Rp 1,200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable.

PT Palapa Timur Telematika

In August 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Telematika Timur (PTT) to fulfil the requirement of project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perusahaan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perusahaan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On September 29, 2016, the Company as Implementing Business Entity (BUP) entered into an agreement with Communication and information Ministry of Indonesia as Responsible Project Cooperation (PJPK) in relation with Construction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package. BUP must build fiber optic backbone with a certain capacity for areas as agreed in an agreement and operate for 15 years. This agreement will expire within 15 (fifteen) years from the date of commercial operation, which was preceded by 2 (two) years of construction projects. The contract value of this agreement amounted to Rp 14,068,866,350,000 which will be received by the Company in accordance with the schedule that has been agreed. At the end of this agreement, Company as implementing business entity should handover the fiber optic network to PJPK with value of Rp 1,000.

On September 29, 2016, the Company as BUP entered into a guarantee agreement with the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero) (PII) for the Construction and management of Partnership Projects Governments and Entity (PKBU) of Backbone Network Fiber Optic Palapa Ring for East Package. In this agreement, PII has an instruction from the Government to implement the infrastructure assurance in relation with financial obligations of PJPK to BUP based on Cooperation Agreement mentioned above.

This agreement will expire within twelve (12) years from the date of commercial operation. In this Agreement, the Company is obliged to pay an upfront fee to PII amounting to Rp 4,800,000,000 and the guarantee services fee amounting to Rp 2,100,000,000 for every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this agreement. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has made payment to PII amounting to Rp 4,200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable consolidated statements of financial position.

Perusahaan

Pada tanggal 6 Desember 2019 Perusahaan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perusahaan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 25 tahun. Perusahaan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini.

Hingga penyelesaian laporan konsolidasian ini, proyek tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian.

PT Indo Pratama Teleglobal

Pada tanggal 30 Januari 2019, IPT, entitas anak, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi yang memiliki spesifikasi teknologi *High Troughput Satellite* (HTS). Proyek ini untuk mendukung program KPU untuk memenuhi kebutuhan bandwidth satelit yang belum terlayani oleh penyelenggara komunikasi terestrial, khususnya pada daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai kontrak total atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.360.746.000.000 yang akan diterima sesuai jadwal yang telah disepakati.

45. Perkara Hukum

Perusahaan sebagai salah satu kreditur atas kasus pengadilan niaga dengan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST sehubungan dengan penundaan pembayaran utang PT Bakrie Telecom Tbk.

The Company

On December 6, 2019, the Company entered into an agreement with PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) in relation with implementation of passive telecommunication in Semarang City. The Company and BPS will jointly operate and manage Semarang Passive Infrastructure Telecommunication to Construction and Management Semarang Passive Infrastructure Telecommunication for 25 years. The Company and BPS will share in gross revenue of 80% and 20%, respectively, to be generated from this project.

Until the completion date of the consolidated financial statements, the project is under construction process.

PT Indo Pratama Teleglobal

On January 30, 2019, IPT, a subsidiary, and the Telecommunications and Information Accessibility Agency (BAKTI) signed a Cooperation agreement in the framework of providing Telecommunication Satellite Capacity which has High Troughput Satellite (HTS) technology specifications. This project is to support the KPU program to meet the bandwidth needs of satellites that have not been served by terrestrial communication, especially in areas that fall into the lagging, outermost and leading category (3T).

This cooperation agreement will expire on December 31, 2024. The total contract value of this agreement is Rp 1,360,746,000,000 will be received according to the agreed schedule.

45. Legal Matters

The Company is one of the creditors in Jakarta Commercial Court with case number No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST related to suspension of Debt Payment of PT Bakrie Telecom Tbk.

Perusahaan telah mendapatkan putusan pengadilan yang dinyatakan dalam putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 9 Desember 2014 dimana PT Bakrie Telecom Tbk harus membayar piutang Perusahaan sebesar Rp 10.438.711.592 dengan kondisi sebagai berikut:

- I. Rp 3.000.000.000 pertama akan dibayarkan dalam kurun waktu 84 bulan secara bertahap sejak tanggal putusan pengadilan;
- II. 70% dari sisa nilai piutang akan dibayarkan melalui penerbitan sertifikat obligasi wajib konversi; dan
- III. Sisa nilai piutang akan dibayarkan dalam 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan.

Selama kurun waktu 84 bulan, PT Bakrie Telecom Tbk tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 sehingga berdasarkan hasil keputusan pengadilan tersebut, pembayaran tahap 1 tersebut akan dimasukkan kedalam jadwal pembayaran tahap 3 yaitu 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan menerima sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp 5.207.098.114 yang berjangka waktu 10 tahun sebagai bentuk pelunasan piutang tahap 2.

46. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Grup. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Grup.

The Company has obtained a court verdict as stated in verdict letter No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST dated December 9, 2014 where PT Bakrie Telecom Tbk, has to pay the Company's receivables amounting to Rp 10,438,711,592 with the following conditions:

- I. The first Rp 3,000,000,000 will be paid within 84 months step-up payments from the date of such verdict letter;
- II. 70% of the remaining receivables amount will be paid through issuance of Convertible Bond; and
- III. The remaining receivables amount will be paid within 66 months step-up payments from the date of such verdict letter.

Within 84 months, PT Bakrie Telecom Tbk could not pay the Rp 3,000,000,000 so based on court verdict, the step payment phase 1 will be included in step payment phase 3 for 66 months step up payments from the date of such verdict letter. On June 28, 2016, the Company obtained the Mandatory Convertible Bond amounting to Rp 5,207,098,114 with term of 10 years as realization of step payment phase 2.

46. Economic Environment Uncertainty

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchange rates, and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the Telecommunication industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Group. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Group's control.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Grup belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19). Grup telah menerapkan kebijakan *Work from Home (WFH)* bagi karyawan-karyawan Grup yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai *Physical Distancing*, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Grup dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari sisi eksternal, terdapat pembatasan jam operasional bank, sehingga transaksi dari sisi penerimaan dan pembayaran berpengaruh terhadap arus kas Grup meskipun pembatasan tersebut sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak berpengaruh secara material bagi Grup dan tidak menghambat kegiatan operasional Grup. Terdapat permintaan dari pelanggan (terutama pelanggan yang terdampak Covid-19 seperti industri perhotelan) kepada Grup untuk menurunkan biaya berlangganan disebabkan turunnya penggunaan internet, penurunan biaya berlangganan tersebut sampai dengan saat ini tidak berpengaruh secara material bagi Grup.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan kemampuan keuangan Grup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi.

Adapun kemungkinan dampak yang akan dialami oleh Grup dalam hal penyebaran Covid-19 ini berlangsung secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- I. Dari segi pengadaan dan operasional hal ini dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan operasional proyek yang diakibatkan oleh faktor adanya keterlambatan ketersediaan bahan baku atau tenaga kerja yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah tertentu karena adanya larangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- II. Dari segi keuangan, Grup mempunyai kewajiban pembayaran terhadap kreditur jika dampak Covid-19 membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* dan berlangsung secara terus menerus, maka hal tersebut dapat mempengaruhi arus kas Grup yang akan berdampak kepada kewajiban pembayaran Grup terhadap kreditur.

As of date of completion of the consolidated financial statement, the Group has not been significantly affected by the Corona virus (Covid-19). the Group has implemented Work from Home (WFH) policy for all the Group's employees, to comply with government's regulation regarding physical distancing, but this implementation is not an obstacle for the Group to operate its business activity. For the external side, there is a limitation of bank's operational hour, hence receipt and payment transaction affected the Group's cash flow, even though, until reporting release date, this limitation has not affected the Group and obstructed the Group's operational activity. There were requests from customers (especially affected by Covid-19, such as hotel industry) for downgrade of monthly payment of internet due to the decline of internet traffic. The decreasing of this monthly payment has not material impacted to the Group until now.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Group's financial capability to comply the payment obligation of principal and/or interest due to the creditor has been managed and fulfilled.

Furthermore, there are possibilities that the Group will be affected due to continuous Covid-19 spread as follows:

- I. From the procurement and operational perspective, this may have impact on delayed operational project, which is caused by delayed raw material availability or manpower who are not allowed to enter certain region due to Central Government or Regional Government's prohibition.
- II. From the financial perspective, the Group still has payment obligation to the creditor. If this Covid-19 spread will trigger implementation of lockdown policy by the Government, so it will affect the Group's cash flows, which also has impact to settlement of Group's obligation to the creditors as well.

Grup akan melakukan pemantauan secara intensif atas dampak Covid-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan Grup dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami Grup. Grup terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Grup tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

The Group will monitor intensively its operational and financial performance as the effect of Covid-19 and take action to overcome the impacts to the Group. The Group will frequently maintain the condition which safe and controllable. The Group will stay alert for any changes that will occur in the future.

47. Peristiwa setelah laporan keuangan

Perusahaan

Pada tanggal 17 Februari 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Nilai tahun 2020 dengan nilai bersih lebih bayar sebesar Rp 70.246.496.831.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - entitas anak

- a. Pada bulan 19 Januari 2022, PRB, entitas anak, telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 426.776.887 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk periode Juli hingga Desember tahun 2020.
- b. Pada tanggal 11 Februari 2022, PRB, entitas anak, yang merupakan entitas anak Perseroan mengajukan permohonan arbitrase kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) yang merupakan penanggung jawab proyek kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat selaku termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa No.45016/II/ARB-BANI/2022 tanggal 11 Februari 2022.

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh PRB (Pemohon) kepada Kemenkominfo (Termohon) sehubungan dengan perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perbedaan pengenaan PPN pada nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PRB dan Kemenkominfo.

47. Events after the Reporting Period

The Company

On February 17, 2022, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Value Added Tax year 2020 amounted to Rp 70,246,496,831.

PT Palapa Ring Barat (PRB) - a subsidiary

- a. On January 19, 2022, PRB, a subsidiary, received tax refund amounting to Rp 426,776,887 from Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of July until December 2020.
- b. On February 11, 2022, PRB, a subsidiary, of the Company submitted arbitration request to the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia (Kemenkominfo) as project owner of Development and Management of Palapa Ring Fiber Optic Backbone west package through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with registration No. 45016/II/ARB-BANI/2022 dated February 11, 2022.

The Resolution letter was submitted by PRB to Kemenkominfo related with the dispute of interpretations of the provisions in the agreement about Value Added Tax (PPN) and the difference in the imposition of VAT as a payment of service availability as stated in Attachment 11 of the Cooperation Agreement which signed by PRB and Kemenkominfo.

Adapun nilai yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp 105.831.458.839 dimana nilai tersebut kurang dari 20% dari nilai ekuitas Perseroan terkonsolidasi, sehingga berdasarkan pertimbangan batasan nilai dimaksud, manajemen Perseroan berpandangan bahwa nilai yang menjadi sengketa tidak material bagi PRB.

Nilai PPN tersebut di atas seluruhnya telah dipungut oleh Kemenkominfo, sehingga apabila sengketa dimenangkan oleh Kemenkominfo, PRB tidak memiliki kewajiban pembayaran lagi.

The value of dispute is Rp 105,831,458,839 where the value is less than 20% of the Consolidated Company's equity value, so that based on the consideration of the value limit, the Company's management opinion the value is immaterial to PRB.

The afore mentioned VAT above has been fully collected by Kemenkominfo, so if the dispute is won by the Kemenkominfo, PRB has no obligation to make anymore payment.

48. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui utang bank	-	259.858.141.117
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	310.323.665.975	-
Penambahan aset hak guna usaha melalui liabilitas sewa	62.185.118.111	-
Kenaikan utang lain-lain dari pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali	-	29.580.000

48. Supplemental Disclosures for Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the noncash investing and financing activities of the Group:

Addition to property and equipment through bank loan
Acquisition of property and equipment through trade account payable
Acquisition of property and equipment through lease liabilities
Increase in other accounts receivable arising from dividend to noncontrolling interest

49. Rekonsiliasi Kewajiban Konsolidasian yang Timbul dari Kegiatan Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

49. Reconciliation of Consolidated Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in the Group liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	31 Desember/ December 31, 2021 Perubahan Nonkas/Non-cash Changes				31 Desember/ December 31, 2021	
				Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank	4.914.697.218.327	120.641.471.563	60.486.345.820	-	-	13.762.220.104	-	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa	119.190.272.048	-	(29.675.052.297)	-	-	-	-	89.515.219.751	Lease liabilities
Utang non-bank	21.990.464.042	-	34.075.677.558	564.827.706	-	-	-	56.630.969.306	Non-bank loans
Utang obligasi	457.840.131.932	-	-	-	-	1.021.867.138	-	458.861.999.070	Bonds payable
Sukuk ijarah	1.655.230.739.572	-	500.000.000.000	-	-	5.130.837.211	(5.036.753.232)	2.155.324.823.551	Sukuk ijarah
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	7.168.948.825.921	120.641.471.563	564.886.971.081	564.827.706	-	19.914.924.453	(5.036.753.232)	7.869.920.267.492	Total liabilities from financing activities

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/ December 31, 2020							
Perubahan Nonkas/Non-cash Changes							
	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes	31 Desember/ December 31, 2020
Utang bank	6.422.336.148.958	(1.527.216.363.954)	-	-	-	19.577.433.323	4.914.697.218.327
Liabilitas sewa	89.096.278.950	29.844.003.214	-	-	-	249.989.884	119.190.272.048
Utang non-bank	35.154.808.142	(14.091.003.490)	926.659.390	-	-	-	21.990.464.042
Utang obligasi	994.928.408.284	(540.000.000.000)	-	-	2.920.540.316	(8.816.668)	457.840.131.932
Sukuk ijarah	991.684.251.202	666.515.000.000	-	-	2.758.708.988	(5.727.220.618)	1.655.230.739.572
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	8.533.199.895.536	(1.384.948.364.230)	926.659.390	-	5.679.249.304	14.091.385.921	7.168.948.825.921
							Total liabilities from financing activities

31 Desember/ December 31, 2019							
Perubahan Nonkas/Non-cash Changes							
	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes	31 Desember/ December 31, 2019
Utang bank	4.414.878.387.259	1.721.753.412.793	-	-	18.348.653.976	267.355.694.930	6.422.336.148.958
Liabilitas	106.297.945.810	(17.201.666.860)	-	-	-	-	89.096.278.950
Utang non-bank	104.250.548.544	(67.247.824.396)	(1.847.916.006)	-	-	-	35.154.808.142
Utang obligasi	992.305.758.403	-	-	-	2.622.649.881	-	994.928.408.284
Sukuk ijarah	-	1.000.000.000.000	-	-	(8.315.748.798)	-	991.684.251.202
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	5.617.732.640.016	2.637.303.921.537	(1.847.916.006)	-	12.655.555.059	267.355.694.930	8.533.199.895.536
							Total liabilities from financing activities

50. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Grup tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amendemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

50. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Consolidated Financial Statements

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2021

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2021 and relevant for the Group, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business
- Amendments to PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2

- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

Diterapkan pada tahun 2020

Penerapan PSAK No. 71, PSAK No. 72, dan PSAK No. 73

Grup menerapkan PSAK No. 71, PSAK No. 72, dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 72 tidak signifikan, sehingga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 11%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna dan liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp 161.892.455.825 yang terdiri dari reklasifikasi aset sewa pembiayaan sebesar Rp 107.999.168.835 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 53.893.286.990.

- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 73: Leases, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 73: Leases, on Covid-19-related Rent Concessions

Adopted during 2020

Application of PSAK No.71, PSAK No.72, and PSAK No. 73

The Group has applied PSAK No. 71, PSAK No. 72, and PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020.

The cumulative effect of initially applying PSAK No. 71 and No. 72 is insignificant so that those were recognized in the consolidated statement profit or loss 2020.

For application of PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020, the Group has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

PSAK No. 73: Leases

On the application of PSAK No. 73, the Group recognized right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, Leases. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of incremental borrowing rate applied was 11%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2019.

By applying this standard, as of January 1, 2020 the Group's right-to-use assets and leased liabilities increased by Rp 161,892,455,825 which comprised reclassification of finance lease amounting to Rp 107,999,168,835 and recognition of leases that were previously recognized as operating lease amounting to Rp 53,893,286,990.

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.
- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.
- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal:

1 Januari 2022

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard:

- do not perform reassessment of lease definition on contract were previously identified as containing lease.
- lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate as at January 1, 2020.
- the use of a single discount rate to a portfolio of leases in calculating lease liability.
- operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2019 are treated as short-term lease.
- the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets at the date of initial application.
- the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.
- apply the exemption on leases of low-value assets.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2022

- Amendment to PSAK No. 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks
- Amendment to PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs
- 2020 Annual Improvements - PSAK No. 71: Financial Instruments - Fees in the '10 per cent' test for derecognition of financial liabilities

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan amendemen PSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan amendemen PSAK tersebut belum dapat ditentukan.

January 1, 2023

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current

The Group is still evaluating the effects of the amendment to PSAK and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

	2021	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	558.509.195.681	150.842.378.736	1.000.801.922.405	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	116.679.679.800	8.953.472.652	2.702.335.176	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi				Third parties - net of allowance
penyisihan kerugian penurunan				for doubtful accounts of Rp 19,431,188,627,
masing-masing sebesar Rp 19.431.188.627,				Rp 19,431,188,627 and Rp 12,139,756,573
Rp 19.431.188.627 dan Rp 12.139.756.573				as of December 31, 2021, 2020
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	193.266.349.977	370.483.205.773	357.538.008.074	and 2019, respectively
Piutang lain-lain	19.606.562.255	12.725.882.999	11.990.089.397	Other accounts receivable
Uang muka	2.606.122.023	2.630.751.155	4.825.242.522	Advances
Biaya dibayar dimuka	46.992.930.023	44.791.921.866	36.083.559.884	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	71.357.977.760	177.124.314.383	172.111.842.772	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	68.603.744.269	27.082.525.302	18.570.513.650	Others Current Assets
Jumlah Aset Lancar	1.077.722.561.788	794.734.452.866	1.604.723.513.880	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.791.447.725	2.820.682.525	5.487.185.934	Restricted assets
Piutang kepada pihak berelasi	1.604.881.137.995	1.513.581.137.995	1.501.081.137.995	Due from related parties
Investasi pada entitas asosiasi	133.975.037.808	114.990.200.534	114.990.200.534	Investment in associated entity
Aset tetap - setelah dikurangi				Property and equipment - net of
akumulasi penyusutan masing-masing				accumulated depreciation of Rp 497,249,744,305,
sebesar Rp 497.249.744.305, Rp 31.798.425.263				Rp 31,798,425,263 and Rp 658,196,624,794
dan Rp 658.196.624.794 pada tanggal				as of December 31, 2021, 2020
31 Desember 2021, 2020 dan 2019	5.946.866.945.859	5.503.300.334.404	4.013.079.389.269	and 2019, respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi				Tax amnesty asset - net of
akumulasi penyusutan masing-masing				accumulated depreciation of Rp 668,221,526
sebesar Rp 668.221.526, Rp 536.768.111				, Rp 536,768,111 and Rp 405,314,696 as of
dan Rp 405.314.696 pada tanggal				December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively
31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Intangible assets - net of
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi				accumulated amortization of Rp 9,430,382,835,
akumulasi amortisasi sebesar				Rp 6,158,178,136 and Rp 5,185,624,095
Rp 9.430.382.835, Rp 6.158.178.136				December 31, 2021, 2020
dan Rp 5.185.624.095 pada tanggal				and 2019, respectively
31 Desember 2021, 2020 dan 2019	1.623.290.278	667.565.030	99.982.805	Right-of-use assets - net of
Aset hak-guna - setelah dikurangi				accumulated depreciation of
akumulasi penyusutan masing-masing				Rp 87,415,305,085 and Rp 50,811,039,386
sebesar Rp 87.415.305.085 dan				as of December 31, 2021
Rp 50.811.039.386 pada tanggal				and 2020, respectively
31 Desember 2021 dan 2020	128.546.769.487	155.420.472.453	-	Deferred tax assets
Aset pajak tangguhan	-	-	3.031.449.423	Other assets
Aset lain-lain	3.428.777.689	3.624.551.040	2.202.994.734	
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.824.366.372.315	7.296.789.362.870	5.642.488.212.998	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET	8.902.088.934.103	8.091.523.815.736	7.247.211.726.878	TOTAL ASSETS

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak berelasi	4.148.687.355	14.290.965.319	15.368.292.936	Related parties
Pihak ketiga	874.168.124.433	623.590.677.469	548.191.929.129	Third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	5.327.117	Related parties
Pihak ketiga	56.921.208.548	62.352.491.658	43.798.625.585	Third parties
Utang pajak	4.314.510.437	6.913.842.835	6.045.455.105	Taxes payable
Beban akrual	39.064.827.424	35.255.777.105	24.925.575.233	Accrued expenses
Uang muka penjualan	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961	Advances from customer
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long term-liabilities:
Utang Bank	434.588.192.470	274.792.402.450	1.089.603.834.663	Bank loans
Utang obligasi	458.861.999.070	-	537.996.897.073	Bonds payable
Sukuk ijarah	346.332.585.924	-	-	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	42.992.200.061	45.532.444.462	19.266.814.917	Lease liabilities
Utang non-bank	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	22.445.331.651	18.325.845.489	18.720.651.673	Deferred Income
Jumlah Liabilitas Lancar	2.306.331.554.445	1.094.865.575.378	2.343.756.641.865	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR				NONCURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	159.797.186.333	575.754.822.578	62.630.784.684	Trade account payable - third parties
Liabilitas pajak tangguhan	24.662.402.828	38.253.673.297	-	Deferred tax liabilities
Utang kepada pihak berelasi	-	403.015.037.559	171.750.033.562	Due to related parties
Uang muka penjualan	129.939.675.375	69.737.537.925	-	Advances from customer
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities net of current portion:
Utang bank	1.285.145.459.269	738.051.036.277	759.946.976.266	Bank loans
Utang obligasi	-	457.840.131.932	456.931.511.211	Bonds payable
Sukuk ijarah	1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	57.785.115.528	101.484.702.857	69.829.464.032	Lease liabilities
Utang non-bank	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	139.478.773.483	86.503.056.699	86.342.342.687	Deferred Income
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Liabilitas imbalan pasca kerja	84.243.153.802	70.947.133.895	52.909.394.613	Post-employment benefits reserve
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	3.726.580.282.778	5.051.945.938.951	3.518.105.546.926	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	6.032.911.837.223	6.146.811.514.329	5.861.862.188.791	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Capital Stock
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021				Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,285 series B shares and 764,490 series C shares as of December 31, 2021
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015	Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares and 338,285 series B shares as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232	Surplus asset revaluation
Komponen ekuitas lainnya	1.141.300.622	1.141.300.622	1.141.300.622	Others equity component
Cadangan umum	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000	General reserve
Saldo laba	353.670.952.611	1.155.788.388.528	958.663.976.130	Retained earnings
Jumlah Ekuitas	2.869.177.096.880	1.944.712.301.407	1.385.349.538.087	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.902.088.934.103	8.091.523.815.736	7.247.211.726.878	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

	2021	2020	2019	
PENDAPATAN	2.302.493.871.809	2.172.757.383.691	1.469.748.161.486	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	(1.214.593.356.166)	(1.153.057.118.085)	(747.992.489.180)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR	1.087.900.515.643	1.019.700.265.606	721.755.672.306	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(539.980.639.681)	(467.065.169.388)	(373.528.367.694)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	547.919.875.962	552.635.096.218	348.227.304.612	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	4.231.281.833	(6.435.766.958)	1.652.244.197	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	14.174.025.677	6.472.794.912	25.375.425.403	Interest income
Rugi pelepasan aset tetap	(29.900.224)	(9.735.380)	(73.715.924)	Loss on disposal of property and equipment
Beban bunga dan keuangan	(382.030.850.931)	(346.118.138.873)	(218.385.459.977)	Interest expense and financial charges
Lain-lain-bersih	119.574.562.001	73.245.134.180	191.080.000.022	Others-net
Beban Lain-Lain - Bersih	(244.080.881.644)	(272.845.712.119)	(351.506.279)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK	303.838.994.318	279.789.384.099	347.875.798.333	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN (MANFAAT) PAJAK				TAX (INCOME) EXPENSE
Pajak kini	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	Current tax
Pajak tangguhan	(6.110.910.929)	4.869.948.167	1.568.615.897	Deferred tax
BEBAN PAJAK - Bersih	46.298.078.451	55.314.611.227	42.583.382.397	TAX EXPENSE - Net
LABA TAHUN BERJALAN	257.540.915.867	224.474.772.872	305.292.415.936	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	377.262.681.230	-	Gain on revaluation of property and equipment
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	7.781.051.155	(37.726.268.123)	-	Deferred tax of asset revaluation
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.366.780.066	(5.959.516.229)	(8.698.436.867)	Remeasurement of defined benefit liability
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	Gain on revaluation of fixed asset
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(300.691.615)	1.311.093.570	2.174.609.217	Tax relating to remeasurement of defined benefit liabilities
Jumlah	8.847.139.606	334.887.990.448	(6.523.827.650)	Total
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	266.388.055.473	559.362.763.320	298.768.588.286	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah kecuali Dinyatakan Lain)

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Parent Entity S
Parent Entity Statements of Changes in Equity
For the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Surplus Revaluasi Aset	Tambahan Modal disetor/ Additional Paid in Capital	Surplus Revaluation Assets	Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas lainnya/ Others Equity Component	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo Pada tanggal 1 Januari 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	127.652.890.967	-	661.566.698.109	1.141.300.622	1.086.590.949.801	Balance as of January 1, 2019
Penghasilan komprehensif	-	-	-	-	305.292.415.936	-	305.292.415.936	Total comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	(6.523.827.650)	-	(6.523.827.650)	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	298.768.588.286	-	298.768.588.286	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	-	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(23.328.689.735)	-	23.328.689.735	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings
Transaksi dengan pemilik	-	-	-	25.000.000.000	(25.000.000.000)	-	-	Transactions with owners
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	25.000.000.000	958.663.976.130	1.141.300.622	1.385.348.538.087	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	104.324.191.232	25.000.000.000	958.663.976.130	1.141.300.622	1.385.348.538.087	Balance as of December 31, 2019
Penghasilan komprehensif	-	-	-	-	224.474.772.872	-	224.474.772.872	Total comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	339.536.413.107	-	-	-	339.536.413.107	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain-lain	-	-	-	-	(4.648.422.659)	-	(4.648.422.659)	Other comprehensive income
Keuntungan revaluasi aset tetap setelah dampak pajak	-	-	-	-	-	-	-	Gain of asset revaluation net of tax
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	339.536.413.107	-	219.826.350.213	-	559.362.763.320	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	-	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(12.048.093.988)	-	12.048.093.988	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings
Transaksi dengan pemilik	-	-	-	34.750.031.803	(34.750.031.803)	-	-	Transactions with owners
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	59.750.031.803	1.155.788.388.528	1.141.300.622	1.944.712.301.407	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.812.510.351	59.750.031.803	1.155.788.388.528	1.141.300.622	1.944.712.301.407	Balance as of December 31, 2020
Penghasilan komprehensif	-	-	-	-	257.540.915.867	-	257.540.915.867	Total comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	7.781.051.155	-	-	-	7.781.051.155	Profit for the year
Rugi komprehensif lain-lain	-	-	-	-	1.066.088.451	-	1.066.088.451	Other comprehensive loss
Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	-	-	-	-	258.607.004.318	-	266.388.055.473	Tax effect of revaluation property and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	-	-	-	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	7.781.051.155	-	-	-	-	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	(94.569.099.765)	-	94.569.099.765	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings
Transaksi dengan pemilik	1.813.370.280.000	-	-	-	-	-	1.813.370.280.000	Transactions with owners
Pembelian saham	-	-	-	-	(1.155.293.540.000)	-	(1.155.293.540.000)	Issuance of shares of stock
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	Dividends
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.112.120.439.015	(2.530.088.912)	345.024.461.741	59.750.031.803	353.670.952.611	1.141.300.622	2.869.177.096.880	Balance as of December 31, 2021

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.564.476.117.182	2.187.606.060.146	1.407.166.791.009	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.246.947.338.870)	(1.065.877.821.723)	(724.843.588.462)	Cash paid to suppliers and employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih	1.317.528.778.312	1.121.728.238.423	682.323.202.547	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak	106.864.097.504	65.869.723.595	-	Cash Receipt from tax refund
Penerimaan bunga	14.375.634.996	6.472.794.911	25.349.907.817	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(54.295.055.023)	(78.389.114.401)	(51.659.433.830)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(364.307.803.079)	(321.459.109.994)	(212.506.432.959)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.020.165.652.710	794.222.532.534	443.507.243.575	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan deviden	-	-	11.602.605.654	Dividends received
Pembayaran investasi ke entitas anak	(18.216.250.000)	-	-	Payment of investment in subsidiary
Pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(42.925.277.176)	(27.196.275.579)	(19.754.874.340)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Penambahan (penurunan) piutang pihak berelasi	(339.652.915.241)	292.102.781.680	(344.150.000.000)	Increase (decrease) in due from related parties
Perolehan aset tetap	(1.238.439.272.241)	(1.162.115.609.639)	(1.588.810.745.041)	Acquisitions of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.639.233.714.658)	(897.209.103.538)	(1.941.113.013.727)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari:				Proceeds from:
Setoran modal	1.813.370.280.000	-	-	Paid in capital
Utang bank	1.040.000.000.000	240.000.000.000	1.366.634.324.076	Bank loans
Penerbitan sukuk ijarah	500.000.000.000	666.515.000.000	1.000.000.000.000	Issuance of sukuk ijarah
Utang non-bank	53.715.626.646	-	-	Non-bank loans
Pembayaran:				Payment of:
Utang non-bank	(19.639.949.088)	(14.091.003.490)	(67.247.824.396)	Non-bank loans
Liabilitas sewa	(29.675.052.297)	(19.903.983.838)	(17.201.666.860)	Lease liabilities
Utang bank	(331.705.077.254)	(1.078.240.363.952)	(249.127.660.382)	Bank loans
Utang kepada pemegang saham	(844.408.372.000)	-	-	Shareholder loan
Dividen	(1.155.293.540.000)	-	-	Dividends
Utang obligasi	-	(540.000.000.000)	-	Bonds payable
Utang pihak berelasi	-	-	(98.787.146.941)	Due to related parties
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	1.026.363.916.007	(745.720.351.280)	1.934.270.025.497	Net Cash Provided (Used) by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	407.295.854.059	(848.706.922.284)	436.664.255.345	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Selisih transaksi dalam mata uang asing	370.962.886	(1.252.621.385)	(706.159.188)	Effect of changes in foreign exchange rates
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	150.842.378.736	1.000.801.922.405	564.843.826.248	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	558.509.195.681	150.842.378.736	1.000.801.922.405	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

*) Menggunakan metode biaya

*) Using cost method

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

2021 Laporan Tahunan Annual Report



PT Mora Telematika Indonesia

Grha 9, Jl. Penataran No. 9
Jl. Proklamasi RT. 10 RW. 2
Pegangsaan, Kec. Menteng
Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10320

Phone: [+62 21] 3199 8600
Fax: [+62 21] 314 2882

oxygen.id
Net For Life...

oxygen.HOME
.id



www.moratelindo.co.id